

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023



BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHANs YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah bahwa RKPD Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta arah kebijakan dan isu strategis RKPD Tahun 2023, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023;
 - b. Secara normatif menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - d. Sebagai bahan evaluasi untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB VII Penutup
- (2) Rincian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Tahun 2023, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman dalam pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2023 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada KUA dan PPAS dan Rancangan APBD dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Semesteran dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang capaian program, masukan, keluaran dan hasil kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya semester pertama yang bersangkutan.

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagian analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja PD tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD tahun 2023.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 09

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 merupakan Tahun ke dua Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja terpilih periode Tahun 2021-2026. Secara umum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tana Toraja Tahun 2023 berisi tentang Visi, Misi, tujuan, sasaran, program Kepala Daerah sehingga menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan "**Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru**".

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada DPRD Kabupaten Tana Toraja serta semua pihak yang telah bersama-sama menyusun RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati seluruh upaya yang sudah kita lakukan dan tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua.

Makale, 2022



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I - 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I - 13
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I - 14
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I - 15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II - 1
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II - 1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 21
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II - 46
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II - 92
2.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah.....	II - 100
2.6. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu.....	II - 151
2.7. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II - 159
2.8. Isu Strategis.....	II - 168
2.9. Inovasi Daerah.....	II - 175
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 24
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV - 2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	IV - 12
4.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tana Toraja	IV - 72
BAB V RENJANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V - 1
5.1. Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2023	V - 1
5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	V - 2
5.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	V - 20

BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI – 1
6.1	Indikator Kinerja Makro	VI – 1
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI – 2
6.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI – 3
6.4	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	VI – 17
6.5	Target Indikator Kinerja SDGs / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	VI – 22
BAB VII	P E N U T U P	VII – 1
7.1	Kaidah Pelaksanaan	VII – 1
7.2	Kesimpulan	VII – 4

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021.....	II – 2
Tabel 2.2	Klasifikasi Tingkat Kelerengan Wilayah Kabupaten Tana Toraja.....	II – 5
Tabel 2.3	Formasi Geologi Di Kabupaten Tana Toraja.....	II – 7
Tabel 2.4	Jumlah Curah Hujan Dirinci Per Bulan di Tana Toraja Tahun 2021 (mm).....	II – 12
Tabel 2.5	Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Tana Toraja.....	II – 12
Tabel 2.6	Jenis Tanah diperinci Perkecamatan di Wilayah Kabupaten Tana Toraja.....	II – 13
Tabel 2.7	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021.....	II – 14
Tabel 2.8	Kelompok Wilayah menurut Tingkat Kepadatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021.....	II – 15
Tabel 2.9	Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021.....	II – 16
Tabel 2.10	Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021.....	II – 18
Tabel 2.11	Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021.....	II – 43
Tabel 2.12	Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	II – 45
Tabel 2.13	Capaian Indikator PAUD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	II – 47
Tabel 2.14	Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	II – 49
Tabel 2.15	Capaian AKB, AKBA dan AKI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	II – 51
Tabel 2.16	Status gizi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja 2017-2021.....	II – 51
Tabel 2.17	Kondisi Pelayanan Kesehatan Dasar kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	II – 52
Tabel 2.18	Kondisi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	II – 53
Tabel 2.19	Kondisi Standar Pelayanan Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	II – 54
Tabel 2.20	Kondisi Kualitas Lingkungan Sehat dan Industri Rumah Tangga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	II – 55
Tabel 2.21	Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2021.....	II – 56
Tabel 2.22	Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	II – 57
Tabel 2.23	Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	II – 58

Tabel 2.24	Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021	II – 58
Tabel 2.25	Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 60
Tabel 2.26	Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tana Toraja Tahun 2017-2021	II – 61
Tabel 2.27	Kinerja Urusan Pangan Kab. Tana Toraja Tahun 2017–2021	II – 62
Tabel 2.28	Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021	II – 63
Tabel 2.29	Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017–2021	II – 64
Tabel 2.30	Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 65
Tabel 2.31	Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 66
Tabel 2.32	Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tana Toraja Tahun 2017–2021..	II – 67
Tabel 2.33	Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 68
Tabel 2.34	Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 69
Tabel 2.35	Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 71
Tabel 2.36	Capaian Pembangunan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021	II – 72
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017-2021	II – 74
Tabel 2.38	Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021	II – 75
Tabel 2.39	Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021	II – 76
Tabel 2.40	Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 77
Tabel 2.41	Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 78
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 79
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017–2021	II – 80
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017–2021	II – 82
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 83
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 84
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 85

Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017–2021	II – 86
Tabel 2.49	Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 87
Tabel 2.50	Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 88
Tabel 2.51	Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 90
Tabel 2.52	Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 91
Tabel 2.53	Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 92
Tabel 2.54	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kab. Tana Toraja 2017 – 2021	II – 93
Tabel 2.55	Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 93
Tabel 2.56	Net Ekspor Barang dan Jasa Kab. Tana Toraja Tahun 2017-2021	II – 94
Tabel 2.57	Rasio Ketergantungan Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2021..	II – 95
Tabel 2.58	Angka Kriminalitas di Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2021....	II – 96
Tabel 2.59	Jenis Izin dan Lama Proses Pengurusannya.....	II – 98
Tabel 2.60	Capaian IKU Bupati Tana Toraja Tahun 2020-2021.....	II – 101
Tabel 2.61	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD.....	II – 103
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021	II – 106
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2021.....	II - 121
Tabel 2.64	Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021.....	II – 132
Tabel 2.65	Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021	II - 143
Tabel 2.66	Capaian Target Indikator TPB/SDG's Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021	II – 147
Tabel 2.67	Kategori Pencapaian Kinerja.....	II – 152
Tabel 2.68	Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021	II – 152
Tabel 2.69	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD.....	II – 154
Tabel 2.70	Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD.....	II – 156
Tabel 2.71	Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD.....	II – 157
Tabel 2.72	Komposisi program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022.....	II – 158
Tabel 2.73	Daftar Inovasi Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2021.....	II – 175
Tabel 3.1	Capaian Tahun 2021, Asumsi Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja	III – 8

Tabel 3.2	Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021	III – 12
Tabel 3.3	Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021	III – 14
Tabel 3.4	Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021	III – 16
Tabel 3.5	PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Tana Toraja dengan Wilayah yang Setara dalam jutaan Rupiah 2017-2021	III – 16
Tabel 3.6	Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDRB Kabupaten Tana Toraja atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 – 2021	III – 16
Tabel 3.7	Distribusi PDRB menurut lapangan Usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2017 – 2021	III – 17
Tabel 3.8	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Menurut Kategori Tahun 2021	III – 18
Tabel 3.9	Perbandingan Angka IPM Kabupaten Tana Toraja dan daerah Sekitar Tahun 2018- 2021	III – 19
Tabel 3.10	IPM Kabupaten Tana Toraja menurut Komponennya Tahun 2017- 2021	III – 20
Tabel 3.11	Target Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	III – 24
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kab. Tana Toraja Tahun 2020 s/d Tahun 2024	III – 27
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2020–2024.....	III – 36
Tabel 3.14	Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2023	III – 38
Tabel 3.15	Proyeksi Pagu Belanja Daerah Tahun 2023	III – 40
Tabel 3.16	Proyeksi Alokasi Anggaran Program Pembangunan terhadap TPB/SDG's tahun 2023	III – 42
Tabel 3.17	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2020 – 2024.....	III – 49
Tabel 3.18	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2024	III – 51
Tabel 3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 – 2024	III – 52
Tabel 4.1	Penjelasan Visi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026....	IV – 3
Tabel 4.2	Perumusan Penjelasan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2021 – 2026.....	IV – 5
Tabel 4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023.....	IV – 9
Tabel 4.4	Keselarasn Target Pencapaian Target Indikator Makro Nasional, Pro. Sulsel dan Kab. Tana Toraja Tahun 2023.....	IV – 12
Tabel 4.5	Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV – 23

Tabel 4.6	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	IV – 32
Tabel 4.7	Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	IV – 36
Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang Mendukung atau terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV – 38
Tabel 4.9	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023.....	IV – 41
Tabel 4.10	Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV – 55
Tabel 4.11	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2023.....	IV – 58
Tabel 4.12	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2023..	IV – 61
Tabel 4.13	Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV – 62
Tabel 4.14	Keselarasasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV – 63
Tabel 4.15	Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023.....	IV – 65
Tabel 5.1	Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2024.....	V – 2
Tabel 5.2	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	V – 4
Tabel 5.3	Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023	V – 21
Tabel 6.1	Capaian dan Target Kinerja Indikator Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2023.....	VI – 1
Tabel 6.2	Capaian dan Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 – 2023	VI – 2
Tabel 6.3	Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2023	VI – 4
Tabel 6.4	Capaian dan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2023	VI – 18
Tabel 6.5	Capaian dan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2023.....	VI – 22

Daftar Grafik

Grafik 2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)	II – 22
Grafik 2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019 - 2021 (%)	II – 23
Grafik 2.3	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021	II – 25
Grafik 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II – 25
Grafik 2.5	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2021	II – 26
Grafik 2.6	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)	II – 27
Grafik 2.7	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019 - 2021	II – 28
Grafik 2.8	Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017–2021 (nilai)	II – 29
Grafik 2.9	Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kab./Kota Sekitar Tahun 2019 - 2021	II – 29
Grafik 2.10	PDRB per Kapita ADHB Nasional, Prov. Sulsel dan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017–2021	II – 30
Grafik 2.11	PDRB per Kapita ADHB Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Serta Kab./Kota Sekitar Tahun 2017-2021	II – 31
Grafik 2.12	Perkembangan Laju Inflasi Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional serta Zona Sekitar Tahun 2017-2021	II – 33
Grafik 2.13	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	II – 34
Grafik 2.14	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021	II – 34
Grafik 2.15	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	II – 35
Grafik 2.16	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021	II – 36
Grafik 2.17	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	II – 36
Grafik 2.18	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021	II – 37

Grafik 2.19	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	II – 38
Grafik 2.20	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021	II – 38
Grafik 2.21	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Tana Toraja tahun 2017-2021	II – 40
Grafik 2.22	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).....	II – 40
Grafik 2.23	Perkembangan IPG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	II – 41
Grafik 2.24	Perbandingan IPG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kab./Kota Sekitar Tahun 2019-2021	II – 42
Grafik 2.25	Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	II – 44
Grafik 2.26	Perbandingan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kab./Kota Sekitar Tahun 2019-2021	II – 45
Grafik 2.27	Persentase Penduduk Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021	II – 99
Grafik 2.28	Angka Ketergantungan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021	II – 100
Grafik 3.1	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021	III - 9
Grafik 3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021	III – 10
Grafik 3.3	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Tahun 2021	III – 10
Grafik 3.4	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)	II – 11
Grafik 3.5	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021 (%)	III – 12
Grafik 3.6	Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	III – 13
Grafik 3.7	Perbandingan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021	III – 14
Grafik 3.8	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	III – 15
Grafik 3.9	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021	III – 15
Grafik 3.10	Perkembangan Laju Inflasi Kab. Tana Toraja, 2017-2021	III – 21
Grafik 3.11	Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021 (%)	III – 21

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD.....	I – 3
Gambar 1.2	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.....	I – 13
Gambar 2.1	Kabupaten Tana Toraja dalam Konstelasi Provinsi Sulawesi Selatan.....	II – 1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Tana Toraja.....	II – 3
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tana Toraja	II – 6
Gambar 2.4	Peta Ketinggian Kabupaten Tana Toraja.....	II – 6
Gambar 2.5	Peta Geologi Kabupaten Tana Toraja.....	II – 9
Gambar 2.6	Peta Hidrogeologi Kabupaten Tana Toraja.....	II – 11
Gambar 2.7	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tana Toraja.....	II – 11
Gambar 2.8	Peta Jenis Tanah Kabupaten Tana Toraja.....	II – 14
Gambar 2.9	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tana Toraja.....	II – 17
Gambar 4.1	Koridor Pembangunan Wilayah Secara Spasial.....	IV – 14



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 9 dan Pasal 5 Ayat 3 serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat 1, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional diantaranya adalah RKPD yang disusun sesuai hasil Musrenbang, Forum OPD, Renja OPD dan Kebijakan Pemerintah. Sebagai suatu sistem perencanaan nasional merupakan acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Terkait dengan amanat tersebut, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS dan APBD dan atau penjabarannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berkenan menghadapi berbagai fenomena baik itu sifatnya masalah maupun isu



strategi belum mencapai hasil maksimal terutama dalam pencapaian kerja menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, peluang berusaha/bekerja, pengangguran, produktifitas dan daya saing. Fenomena tersebut telah diakumulasikan dan sekaligus menjadi langkah strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diusulkan sebagai program strategi dan prioritas Rencana Kerja (Renja) OPD dalam suatu penyusunan sistem perencanaan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tana Toraja dengan tema **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang inklusif Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing”**.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 serta pemulihan ekonomi dari dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) serta target akhir RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 akan fokus pada upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 serta pencapaian target akhir Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang Dalam RPJMD dengan fokus pada pemantapan pemulihan ekonomi, sosial, budaya yang inklusif melalui pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing sesuai dengan arah kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026. Selain itu, Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 yaitu : Pertumbuhan Ekonomi 5.19%, Tingkat Kemiskinan 10.29%), Tingkat Pengangguran Terbuka 3.10, Gini Rasio 0,378, Indeks Pembangunan Manusia 69.49 dan PDRB Perkapita (ADHB)



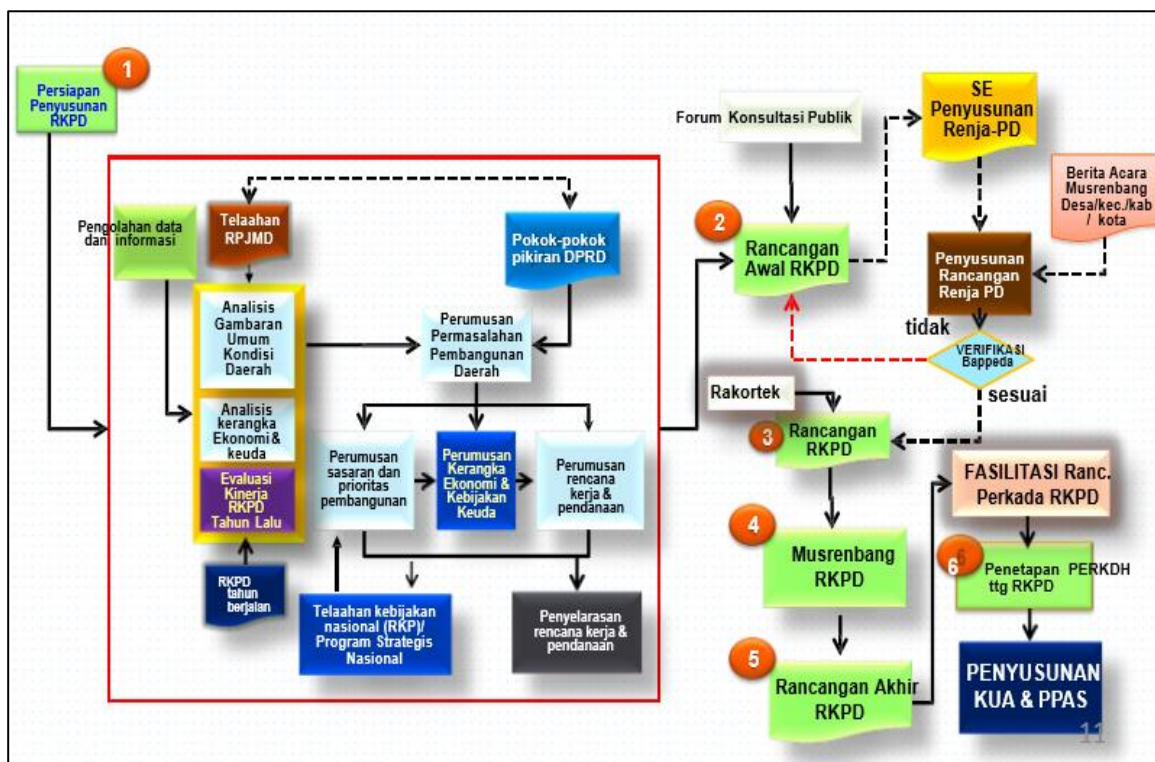
28.35 Juta Rupiah. Selain memperhatikan capaian indicator ekonomi makro, Penyusunan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional harus memuat dan bersinergi dengan kebijakan prioritas provinsi dan nasional tanpa meninggalkan kearifan lokal yang berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan : holistic-tematik, integratif dan spasial sesuai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun gambaran sebagai suatu sistem perencanaan nasional maka Tahapan dan Tata Cara Penyusunan sebagaimana gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan atau Sustainable Development Goals (SDGs); TPB/SDGs merupakan komitmen international untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi



berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

RKPD Tahun 2023 sebagai salah satu dokumen resmi daerah mempunyai kedudukan yang strategis, karena menjembatani program perencanaan pembangunan daerah, Provinsi dan Nasional sekaligus menjadi pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2023. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan. Dengan prinsip tersebut ini, diharapkan dokumen RKPD harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2026, mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020 - 2024 dan RKP Tahun 2023, hal ini sesuai petunjuk teknis Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJDP, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan RKPD merupakan satu kesatuan dan tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Pertama, Pendekatan Teknokratis, yaitu pendekatan menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua, Pendekatan Partisipatif, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga, Pendekatan Politis, yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat, yaitu pendekatan “bottom-up” dan “top-down” dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Musyawarah Nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi



pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mempengaruhi pelaksanaan perencanaan. Berdasarkan kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengarahkan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah sehingga dibutuhkan prioritas anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 sebagai landasan Operasional serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah



- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar



- Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);



43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
45. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);



51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251)
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321);
55. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010– 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 3);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021– 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 2);



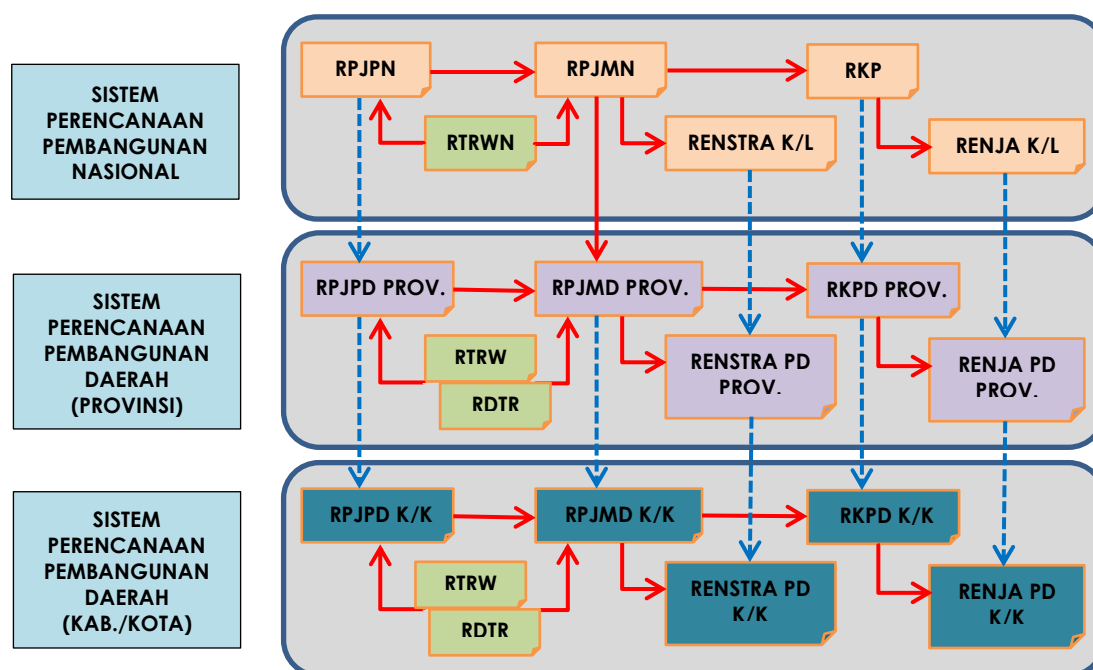
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka keberadaan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJMD dan RPJP Daerah Kabupaten Tana Toraja maupun RTRW Kabupaten Tana Toraja. Secara bersamaan, baik RPJMD maupun Renstra OPD akan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang terinci di dalam Rencana Kerja (Renja) OPD.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 17 ayat (2), maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan KUA-PPAS yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tana Toraja. Gambaran tentang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut ini :

Gambar 1.2

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah



Hubungan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2023 juga menyangkut sinergitas dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional;
2. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan sinergitas dan sinkronisasi terkait tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan, prioritas program dan kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten;
3. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dan dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan pelaksanaan Tahun Kedua RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2026.
4. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dengan demikian RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 ini merupakan bahan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2022 sebagai pengejawantahan dari terciptanya sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar bidang/fungsi dan antar wilayah dengan mengacu pada tujuan Pembangunan Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 adalah :

1. Mendukung pencapaian Tana Toraja Bangkit Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru;
2. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);



3. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
4. Pedoman Penyelarasan dan integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi dan RKP Nasional.
5. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tana Toraja.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 berdasarkan Lampiran C.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN ; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen



RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ; Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ; Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ; Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.



BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ; Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ; Bab ini Berisi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP ; Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

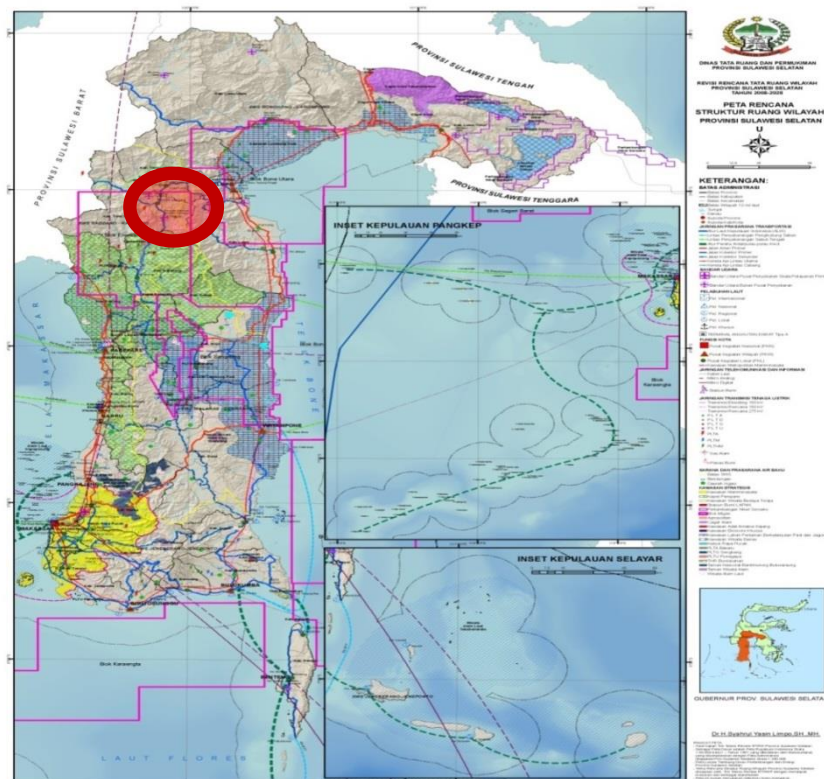
2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota adalah Makale, sebuah kota berhawa sejuk dan indah. Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan 6 Kabupaten terdiri dari 19 Kecamatan, 47 Kelurahan dan 112 Lembang/Desa.

Gambar 2.1

Kabupaten Tana Toraja dalam Konstelasi Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030

2.1.1.1 Geografi

Kabupaten Tana Toraja dengan ibukota di Makale terletak pada posisi antara 1190 - 1200 Bujur Timur dan 20 - 30 Lintang Selatan dengan elevasi ketinggian 400 - 3.075 mdpl, yang sekaligus sebagai pusat kegiatan pariwisata budaya di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pintu gerbang antara Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Secara administratif wilayah, Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 edisi I Tahun 1991 yang diterbitkan Bakosurtanal dan Peta Administrasi BPN Tana Toraja yaitu kurang lebih 213.188,69 Ha. Sedangkan menurut BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Luas Wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 2.054,30 Km² meliputi 19 Kecamatan, dimana Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan 2 (dua) kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 211,47 Ha dan 206,76 Ha. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Makale Utara dan Kecamatan Sangalla Utara dengan luas masing-masing adalah 26,08 Km² dan 27,96 Km². Jumlah dan luas masing-masing wilayah di Kabupaten Tana Toraja lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Desa/Lembang dan Kelurahan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan		Juml. Lembang	Juml. Kel.
		Luas (km ²)	%		
1	2	3	4	5	6
1	Bonggakaradeng	206,76	10,06	5	1
2	Simbuang	194,82	9,48	5	1
3	Rano	89,43	4,35	5	-
4	Mappak	166,02	8,08	5	1
5	Mengkendek	196,74	9,58	13	4
6	Gandangbatu Sillanan	108,63	5,29	9	3
7	Sanggalla	36,24	1,76	3	2
8	Sanggalla Selatan	47,80	2,33	4	1
9	Sanggalla Utara	27,96	1,36	4	2
10	Makale	39,75	1,93	1	14
11	Makale Selatan	61,70	3,00	4	4

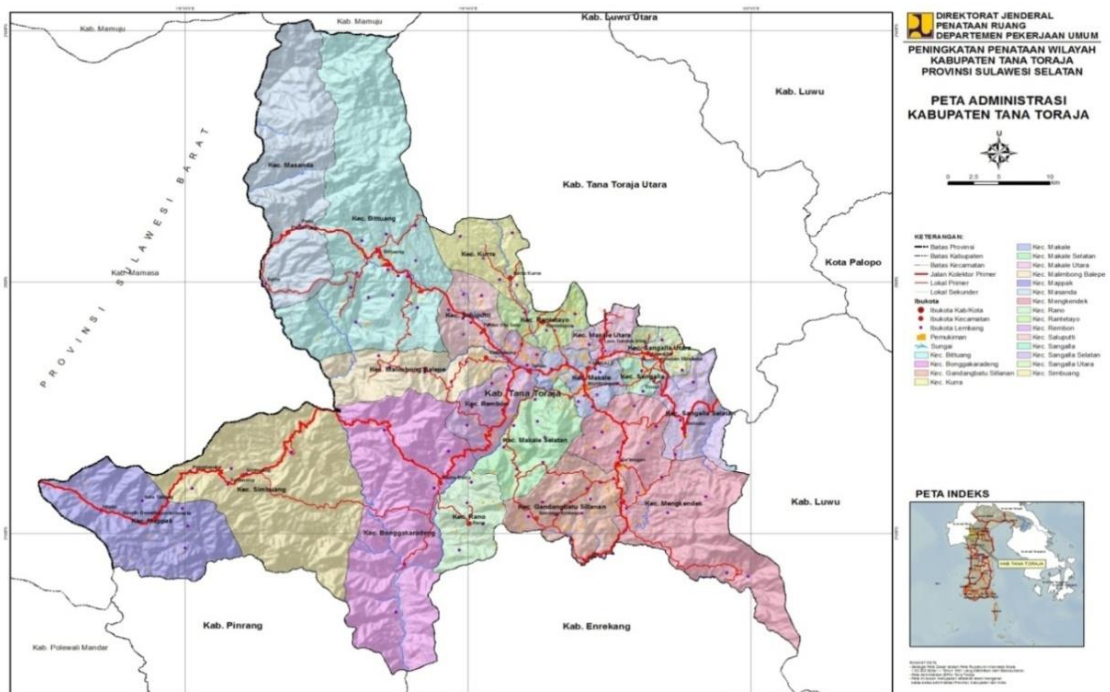


No.	Kecamatan	Luas Kecamatan		Juml. Lembang	Juml. Kel.
		Luas (km ²)	%		
1	2	3	4	5	6
12	Makale Utara	26,08	1,27	-	5
13	Saluputti	87,54	4,26	8	1
14	Bittuang	163,27	7,95	14	1
15	Rembon	134,47	6,55	11	2
16	Masanda	134,77	6,56	8	-
17	Malimbong Balepe	211,47	10,29	5	1
18	Rantetayo	60,35	2,94	3	3
19	Kurra	60,50	2,94	5	1
Jumlah		2.054,30	100.00	112	47

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja (Tana Toraja dalam Angka Tahun 2022)

Berdasarkan tabel 2.1 di atas terlihat proporsi terluas terdapat pada Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng dengan persentase luas 10,29 % dan 10,06 %. Sedangkan Kecamatan dengan luasan relatif rendah adalah Kecamatan Makale Utara dan Kecamatan Sangalla Utara dengan persentase luas berkisar 1,27 % dan 1,36 %. Sedangkan Kecamatan Makale merupakan wilayah ibukota kabupaten memiliki luas sebesar 1,93 % dari luas total wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030



2.1.1.2 Geomorfologi dan Topografi

Kondisi geomorfologi merupakan elemen penting dalam penentuan kesesuaian pemanfaatan lahan atau kemampuan daya dukung lahan. Kabupaten Tana Toraja yang berada pada daerah perbukitan yang cukup tinggi merupakan limitasi dalam pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Tana Toraja.

Kondisi geomorfologi di Kabupaten Tana Toraja dalam 5 tahun terakhir terus mengalami perubahan. Tingginya frekwensi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor telah banyak mengubah kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup di kabupaten ini. Selain oleh alam, perubahan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup juga turut dipicu oleh pemanfaatan sumber daya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi yang telah menyebabkan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Kondisi ini antara lain terlihat dari terus berkurangnya luas areal hutan dan bertambahnya luas lahan kritis. Problematika tersebut turut memicu terjadinya banjir dan longsor.

Berbagai upaya untuk menekan laju kerusakan lingkungan telah ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja, akan tetapi sejauh ini upaya-upaya ini belum cukup efektif untuk menekan laju kerusakan lingkungan dan mengurangi dampak bencana alam sehingga berbagai terobosan masih sangat diperlukan dalam pembangunan 20 tahun ke depan

Dalam pada itu, Kabupaten Tana Toraja mempunyai topografi yang relatif bergelombang dan berbukit, sedangkan topografi datar relatif sedikit. Kawasan yang mempunyai kemiringan lahan datar (0-8%) pada umumnya berada di daerah di sebelah timur dan lahan-lahan sepanjang jalan poros. Selanjutnya kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 8-15% tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja, sedangkan kemiringan lahan di atas 40% pada umumnya berada di sebelah barat Kecamatan Simbuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Masanda dan beberapa kecamatan lainnya merupakan kawasan lindung.

Adapun kondisi kemiringan lereng dan ketinggian wilayah Kabupaten Tana Toraja, diperlihatkan pada Tabel dan Gambar berikut :



Tabel 2.2
Klasifikasi Tingkat Kelerengan Wilayah Kabupaten Tana Toraja

No.	Klasifikasi Lereng	Kecamatan									
		BTG	BK	GDS	KRR	MKL	MKL-S	MKL-U	MB	MPK	MSD
1	0 – 8	2284,34	26,47	837,74	703,98	1204,59	-	1055,97	373,28	-	57,99
2	8 – 15	3533,75	609,15	3197,42	1799	1299,67	32,15	411,73	710,61	-	727,01
3	15 – 25	11034,55	2228,12	3053,65	1451,79	1414,9	1762,68	469,2	2055,61	2639,14	3758,22
4	25 – 40	12316,44	6480,88	1243,86	928,64	288,82	4041,45	140,91	5878,83	6996,48	10502,69
5	>40	2598,31	9538,24	130,66	1143,72	-	1456,76	-	1552,19	4754,02	4763,88
		31767,39	18882,86	8463,33	6027,13	4207,98	7293,04	2077,81	10570,52	14389,64	19809,79

Lanjutan

Klasifikasi Lereng	Kecamatan									
	MKK	RN	RTY	RMB	SLPT	SGL	SGL-S	SGL-U	SBG	
0 – 8	2837,88	297,83	1550,06	670,02	796,32	539,02	955,91	1175,09	-	
8 – 15	6347,8	431,56	484,59	362,8	1441,59	526,63	2332,16	295,83	149,17	
15 – 25	5215,26	1333,81	150,92	1078,95	815,45	850,91	5179,87	313,79	4457,08	
25 – 40	2951,88	1141,04	159,12	2241,28	1198,93	50,6	2736,21	186,72	11784,25	
>40	4862,05	2545,41		1315,63	1502	-	360,83		16071,76	
	22214,87	5749,65	2344,69	5668,68	5754,29	1967,16	11564,98	1971,43	32462,26	

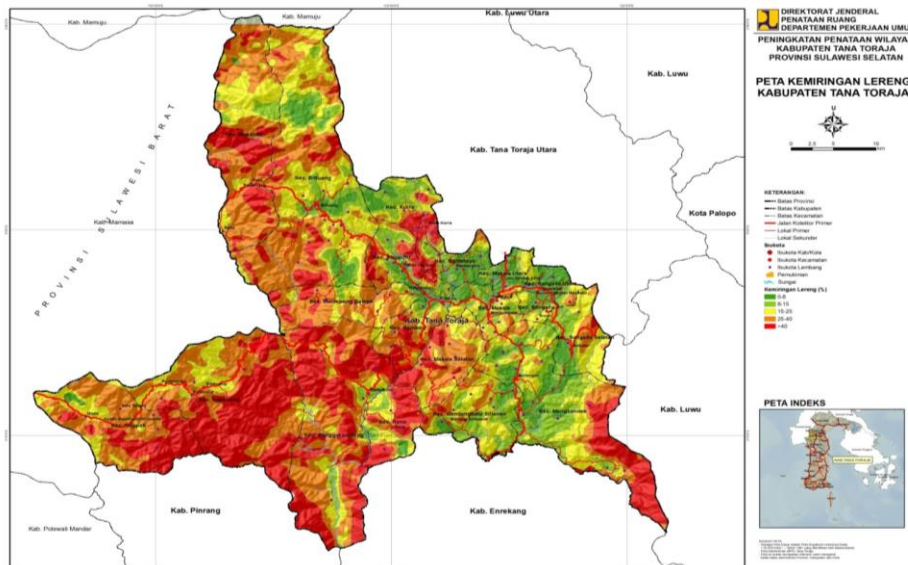
Ket : BTG=Bittuang, BK=Bonggakaradeng, GDS=Gandasil KRR=Kurra, MKL=Makale, MKL-S Makale Selatan, MKL-U Makale Utara
MB=Malimbong Balepe, MPK=Mappak, MSD=Masanda, MKK=Mengkendek, RN=Rano, RTY=Rantetayo, RMB=Rembon
SLPT=Saluputti, SGL=Sangalla, SGL-S=Sangalla Selatan, SGL-U=Sangalla Utara, SBG=Simbuang

Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030



Gambar 2.3

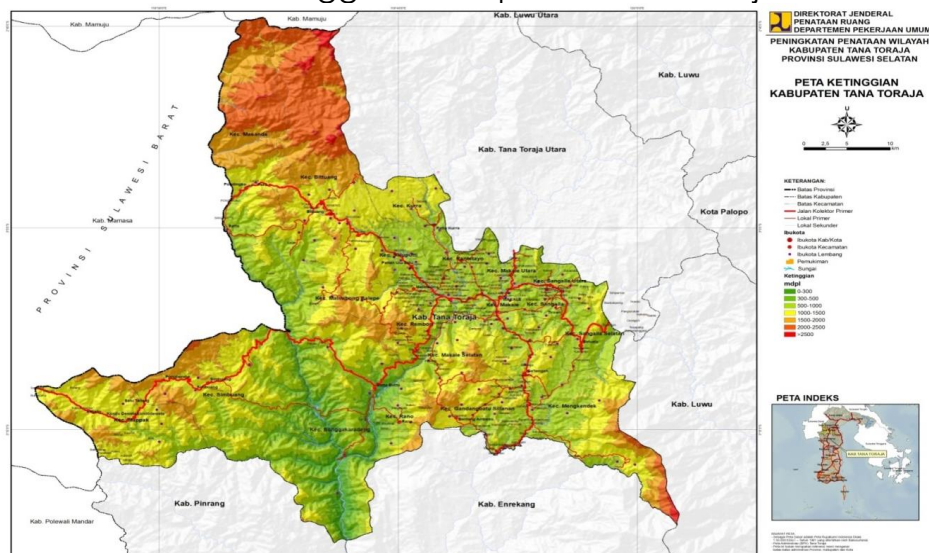
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030

Gambar 2.4

Peta Ketinggian Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030

2.1.1.3 Geologi

Struktur geologi batuan Kabupaten Tana Toraja yang memiliki karakteristik geologi yang kompleks dicirikan oleh adanya jenis satuan batuan yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Beberapa jenis batuan yang dapat ditemukan di Kabupaten Tana Toraja pada umumnya antara lain:

- batuan epiklastik gunungapi (batupasir andesitan, batulanau, konglomerat dan breksi)
- batu gamping kelabu hingga putih berupa lensa-lensa besar
- batu gamping terumbu



- batu pasir hijau, grewake, napal, batulempung dan tuf, sisipan lava bersisipan andesit-basal
- batu pasir, konglomerat, tufa, batulanau, batulempung, batu gamping, napal
- batu sabak, kuarsit, filit, batupasir kuarsa malih, batulanau malih dan pualam, setempat batulempung malih
- granit, granodiorit, riolit, diorit, dan aplit
- hasil erupsi parasit
- konglomerat, sedikit batupasir glokonit dan serpih
- lava andesit dan basal, dan latit kuarsa
- lava, breksi, tufa, konglomerat
- Napal diselingi batulanau gampingan dan batupasir gampingan
- napal, kalkarenit, batugamping koral bersisipan dengan tuf dan batupasir, setempat dengan konglomerat
- serpih coklat kemerahan, sepi napalan kelabu, batugamping, batupasir kuarsa, konglomerat, batugamping dan setempat batubara

Formasi geologi Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.3
Formasi Geologi Di Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan	Formasi	Luas (ha)
1. Bittuang	Batuan Gunung Api Lompo Batang	7.803,45
	Batuan Terobosan	3.254,12
	Formasi Loka	361,50
	Formasi Toraja	124,31
	Formasi Walanae	391,65
	Tuff Barupu	7.061,72
	Jumlah	18.996,75
2. Bonggakaradeng	Batuan Gunung Api Lompo Batang	6.152,77
	Batuan Terobosan	303,35
	Formasi Loka	5.304,69
	Formasi Walanae	7.122,34
	Jumlah	18.883,15
3. Gandang Batu Sillanan	Batuan Terobosan	1.045,49
	Formasi Date	972
	Formasi Makale	1.771,64
	Formasi Toraja	4.674,21
	Jumlah	8.463,25
4. Kurra	Formasi Sekala	117,86
	Formasi Walanae	649,57
	Tuff Barupu	5.297,15
	Jumlah	6.064,58



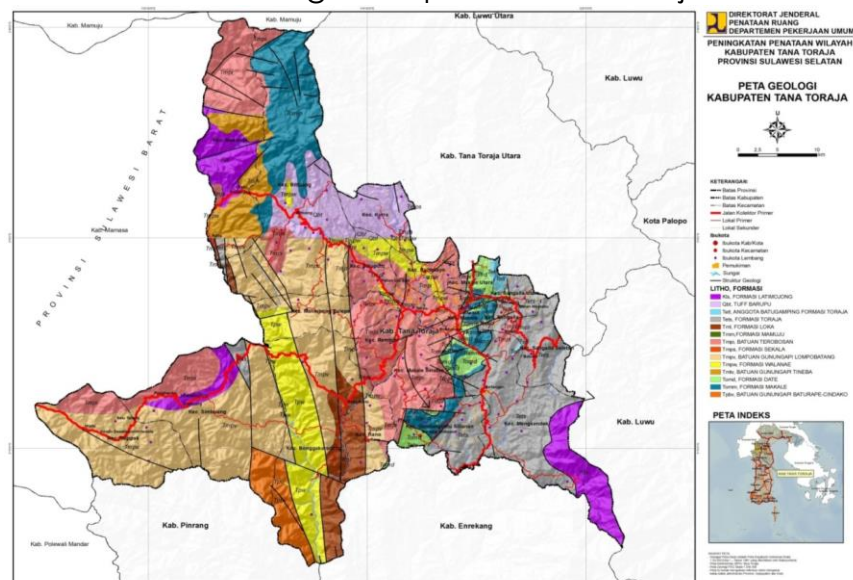
Kecamatan	Formasi	Luas (ha)
5. Makale	Batuan Terobosan	2.664
	Formasi Date	608,12
	Formasi Makale	758,03
	Formasi Toraja	3,71
	Formasi Walanae	170,44
	Mamuju	3,67
	Jumlah	4.207,97
6. Makale Selatan	Batuan Gunung Api Lompo Batang	46,77
	Batuan Terobosan	6.796,93
	Formasi Date	219,7
	Formasi Makale	229,63
	Jumlah	7.293,03
7. Makale Utara	Anggota Batugamping Formasi Toraja	157,14
	Batuan Terobosan	183,71
	Formasi Date	1.288,12
	Formasi Makale	277,08
	Mamuju	171,77
	Jumlah	2.077,82
8. Malimbong Balepe	Anggota Batu Gamping Formasi Toraja	6.324,58
	Batuan Terobosan	2.679,32
	Formasi Walanae	1.566,64
	Jumlah	10.570,54
9. Mappak	Batuan Gunung Api Lompo Batang	12.355,4
	Batuan Terobosan	2.258,01
		Jumlah
10. Masanda	Batuan Gunung Api Lompo Batang	808,29
	Batuan Gunungapi Tineba	6.723,28
	Batuan Terobosan	6.583,22
	Formasi Latimojong	5.178,12
	Formasi Loka	166,15
	Formasi Toraja	284,48
	Formasi Walanae	66,27
	Jumlah	19.810,33
11. Mengkendek	Anggota Batu Gamping Formasi Toraja	121,55
	Batuan terobosan	367,58
	Formasi date	928,72
	Formasi latimojong	6.296,99
	Formasi makale	1.064,25
	Formasi toraja	13.212,05
	Jumlah	21.991,14
12. Rano	Batuan Gunung Api Lompo Batang	2.200,38
	Batuan terobosan	945,83
	Formasi date	52,82
	Formasi loka	2.550,64
	Jumlah	5.749,47
13. Rantetayo	Batuan Terobosan	1.789,45
	formasi walanae	555,23
	Jumlah	2.344,68
14. Rembon	Batuan Gunung Api Lompo Batang	306,52
	Batuan terobosan	5.338,24



Kecamatan	Formasi	Luas (ha)
	Formasi walanae	23,94
	Jumlah	5.668,70
15. Saluputti	Batuan Gunung Api Lompo Batang	216,5
	Batuan terobosan	3.272,65
	Formasi walanae	1.926,09
	Tuff barupu	364,93
	Jumlah	5.780,98
16. Sangalla	Batuan Terobosan	303,38
	Formasi date	128,22
	Formasi makale	13.241,19
	Formasi toraja	1.066,14
	Jumlah	14.738,93
17. Sangalla Selatan	Anggota Batu Gamping Formasi Toraja	113,19
	Batuan terobosan	84,17
	Formasi latimojong	19,11
	Formasi toraja	11.348,52
	Jumlah	11.564,99
18. Sangalla Utara	Anggota Batu Gamping Formasi Toraja	293,45
	Formasi date	231,84
	Formasi makale	6,37
	Formasi toraja	1.439,78
	Jumlah	1.971,44
19. Simbuang	Batuan Gunungapi Baturape-Cindako	5114,92
	Batuan Gunungapi lompo Batang	16.009,28
	Batuan terobosan	4.183,27
	Formasi latimojong	2.639,92
	Formasi toraja	895,62
	Formasi walanae	3619,6
	Jumlah	32.462,61
	Grand Total	213.253,77

Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030



2.1.1.4 Hidrologi, Klimatologi dan Jenis Tanah

Keadaan Hidrologi di Kabupaten Tana Toraja umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Saddang, Sungai Mataallo, Sungai Noling dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Hulu Sungai Saddang merupakan sungai terpanjang di Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Mamasa merupakan urat nadi yang vital bagi pengembangan pertanian dan PLTU Bakaru di Kabupaten Pinrang. Keberadaan sungai-sungai tersebut pada umumnya digunakan untuk irigasi perdesaan. Disatu sisi, keberadaan sungai-sungai tersebut sangat potensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya arum jeram dan wisata rafting dan sumber PLTMH.

Sungai Sa'dan adalah sebuah sungai yang merupakan sungai terpanjang di Sulawesi Selatan karena sungai ini membentang sepanjang 182 Km dari dataran tinggi utara Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Gunung Latimbangan dan mengarah ke Kabupaten Pinrang, dengan lebar rata-rata sekitar 80 meter, Sungai Sa'dan memiliki arus yang cukup deras dengan banyak bebatuan besar yang tersebar di sepanjang alirannya.

Sungai Sa'dan merupakan sungai utama di Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang yang luasnya 10.230 km² merupakan wilayah sungai lintas kabupaten termasuk Kabupaten Tana Toraja. Sungai Sa'dan merupakan urat nadi yang sangat vital di Kabupaten Tana Toraja khususnya bagi pengembangan pertanian dan PLTA Malea yang ada di Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja.

Kondisi hidrologi Kabupaten Tana Toraja secara umum adalah sebagai berikut;

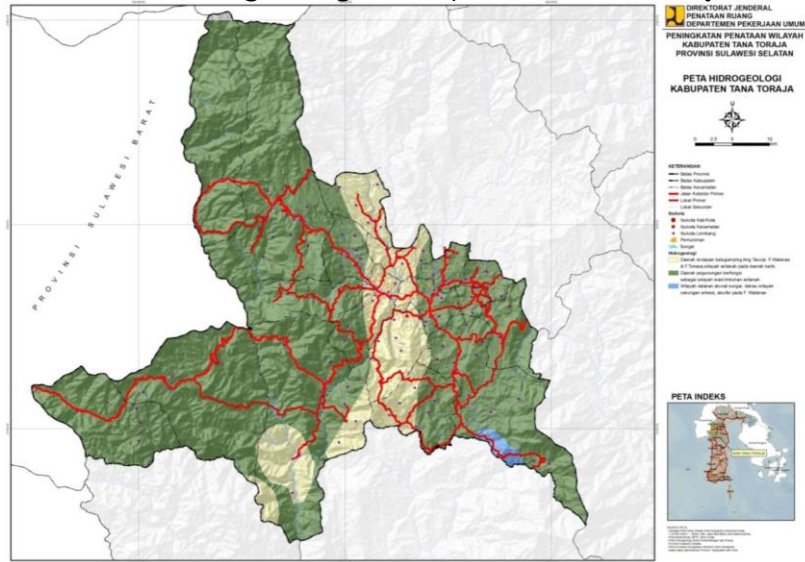
- Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.
- Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Dalam hal ini, hidrologi di Kabupaten Tana Toraja untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestarian.



Gambar 2.6

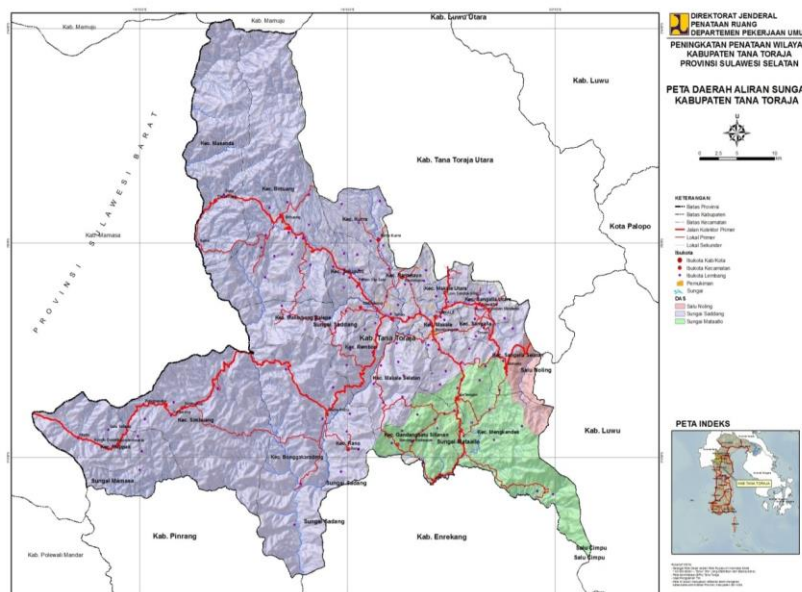
Peta Hidrogeologi Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030

Gambar 2.7

Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030

Wilayah Indonesia pada umumnya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lama dan bulan jatuhnya awal setiap musim sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. November sampai Maret angin bertiup sangat banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga pada bulan-bulan tersebut terjadi musim hujan.

Kabupaten Tana Toraja beriklim musim hujan dan kemarau. Kondisi iklim Kabupaten Tana Toraja berdasarkan pencatatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, curah hujan terbanyak pada Tahun 2020 terjadi pada bulan Pebruari dan April yaitu sekitar 482,3 mm³ dan 669,9



mm3 banyaknya hari hujan yang terjadi pada Tahun 2020 terbanyak terjadi pada bulan april dan Juli yaitu sebanyak 28 hari. Jumlah curah hujan dari tahun ke tahun memperlihatkan meningkat dan curah hujan terbesar terjadi dari bulan April yaitu 669,9 mm dan terendah terjadi pada bulan September yaitu 125,1mm untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini :

Tabel 2.4

Jumlah Curah Hujan Dirinci Per Bulan di Tana Toraja Tahun 2021 (mm)

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	404.5	26	49
Februari	235.0	20	62
Maret	502.8	27	66
April	262.1	19	65
Mei	248.0	21	54
Juni	73.5	19	61
Juli	146.3	23	40
Agustus	162.5	26	59
September	215.1	25	53
Oktober	202.5	18	71
Nopember	628.9	29	67
Desember	108.8	19	49

Sumber : BPS Kab. Tana Toraja Tahun 2022

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Toraja didominasi oleh jenis tropudults, dystropepts dan utrandepts, sedangkan yang paling kecil adalah jenis tanah rendolis. Jenis tanah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan, yang diperlihatkan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.5

Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Tana Toraja

No.	Jenis Tanah	Tekstur	Luas (ha)
1	Dystropepts	agak halus	139.986,68
		agak kasar	1.345,46
2	Utrandepts	agak halus	3.,182,05
		Halus	12.011,77
3	Eutropepts	Halus	2.1141,4
4	Paleudults	agak halus	1.201,85
5	Rendolls	agak halus	4.846,9
6	Tropudults	agak halus	29.478,33
		Grand Total	213.194,44

Sumber : RTRW Kab. Tana Toraja Tahun 2011-2030



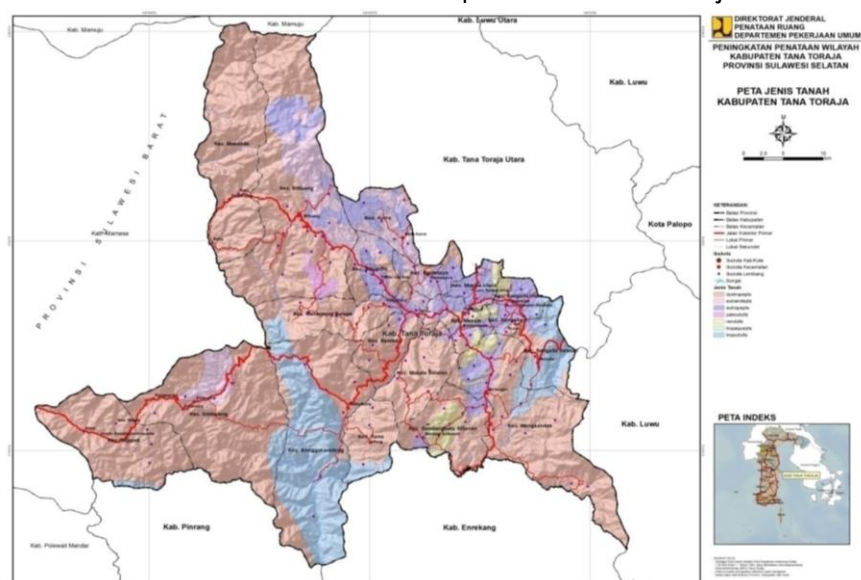
Tabel 2.6
Jenis Tanah di Perinci Perkecamatan di Wilayah
Kabupaten Tana Toraja

Tanah	Lokasi	Luas (Ha)
1. agak halus	Kec. Kurra	19,32
	Kec. Rembon	156,13
	Kec. Saluputti	1.189,33
	Jumlah	1.364,78
2. berbatu	Kec. Gandang Batu Sillanan	2.062,51
	Kec. Makale	662,72
	Kec. Makale Utara	391,36
	Kec. Mengkendek	1.022,13
	Kec. Sangalla	394,98
	Kec. Sangalla Utara	313,2
	Jumlah	1.730,31
3. halus	Kec. Bittuang	31.767,38
	Kec. Bonggakaradeng	7.192,67
	Kec. Gandang Batu Sillanan	6.401,51
	Kec. Kurra	6.007,81
	Kec. Makale	3.545,25
	Kec. Makale Selatan	7.293,04
	Kec. Makale Utara	1.686,46
	Kec. Malimbong Balepe	9.793,45
	Kec. Mappak	14.161,69
	Kec. Masanda	1.9809,8
	Kec. Mengkendek	19.706,68
	Kec. Rano	4.711,23
	Kec. Rantetayo	2344,7
	Kec. Rembon	5.512,57
	Kec. Saluputti	4.564,95
	Kec. Sangalla	1.572,72
	Kec. Sangalla Selatan	4.079,43
	Kec. Sangalla Utara	1.383,89
	Kec. Simbuang	2.5969,2
Jumlah	31.432,52	
4. sedang	Kec. Bonggakaradeng	11690,18
	Kec. Malimbong Balepe	777,09
	Kec. Mappak	451,72
	Kec. Mengkendek	1.264,15
	Kec. Rano	1.038,43
	Kec. Sangalla Selatan	7.489,35
	Kec. Sangalla Utara	274,35
	Kec. Simbuang	6.493,06
	Jumlah	14.256,76
Grand Total	213.194,4	

Sumber : RTRW Kab. Tana Toraja Tahun 2011-2030



Gambar 2.8
Peta Jenis Tanah Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kab. Tana Toraja Tahun 2011-2030

2.1.1.5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Aspek kependudukan dan sumberdaya manusia merupakan variabel utama objek dan sekaligus subyek dalam setiap kegiatan pembangunan diberbagai bidang. Pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Tana Toraja sebesar 231.519 jiwa, Tahun 2018 sebesar 232.821 jiwa kemudian terus meningkat setiap tahun dan pada tahun 2021 menjadi 285.179 jiwa. Data penduduk ini dapat dicapai dari pelaksanaan program pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui Lembang/Kelurahan. Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bonggakaradeng	7.268	6.765	7.434	8.023	8.080
Simbuang	6.427	6.028	6.487	7.959	8.107
Rano	6.298	6.301	6.359	7.649	7.766
Mappak	5.902	5.833	6.002	7.018	7.120
Mengkendek	27.963	27.930	28.073	36.390	37.092
Gandang Batu Sillanan	19.961	20.466	20.120	23.049	23.276



Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sanggalla	6.904	6.454	6.969	7.958	8.041
Sanggalla Selatan	7.659	7.317	7.725	9.557	9.727
Sanggalla Utara	7.630	7.262	7.698	9.041	9.157
Makale	35.442	40.142	35.892	38.814	39.040
Makale Selatan	13.056	12.892	13.208	16.609	16.956
Makale Utara	12.209	11.610	12.300	14.602	14.796
Saluputti	7.723	7.530	7.792	9.741	9.922
Bittuang	15.105	15.234	15.315	18.692	19.012
Rembon	18.992	18.148	19.085	24.662	25.220
Masanda	6.723	6.460	6.834	8.495	8.695
Malimbong Balepe	9.706	10.472	9.917	10.517	10.603
Rantetayo	11.201	10.635	11.308	14.614	14.957
Kurra	5.420	5.342	5.484	7.404	7.612
Jumlah	231.519	232.821	234.002	280.794	285.179

Sumber : BPS Kab. Tana Toraja Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terjadi pada wilayah Kecamatan Makale dan terkecil pada wilayah Kecamatan Mappak. Secara umum, daerah padat, menengah dan rendah di Kabupaten Tana Toraja dapat dibagi atas kelompok tingkat kepadatan penduduk. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam wilayah padat jika memiliki kepadatan >450 jiwa/Km², menengah jika memiliki kepadatan 200-450 jiwa/Km², dan rendah < 200 jiwa/Km². Adapun pembagian wilayah Kecamatan menurut tingkat kepadatannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.8
Kelompok Wilayah menurut Tingkat Kepadatan di
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

Kategori Kepadatan	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Keterangan
1. Padat	Makale	982	Kecamatan Induk
	Makale Utara	567	Hasil Pemekaran
2. Menengah	Sanggalla Utara	328	Hasil Pemekaran
	Makale Selatan	275	Hasil Pemekaran
	Rantetayo	248	Kecamatan Induk
	Sanggalla	222	Kecamatan Induk
	Gandang Batu Sillanan	214	Hasil Pemekaran
	Sanggalla Selatan	203	Hasil Pemekaran
3. Rendah	Bonggakaradeng	39	Kecamatan Induk
	Simbuang	42	Kecamatan Induk
	Rano	87	Hasil Pemekaran
	Mappak	43	Hasil Pemekaran
	Mengkendek	189	Kecamatan Induk
	Saluputti	113	Kecamatan Induk
	Bittuang	116	Kecamatan Induk
	Rembon	188	Hasil Pemekaran
	Masanda	65	Hasil Pemekaran



Kategori Kepadatan	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Keterangan
	Malimbong Balepe	50	Hasil Pemekaran
	Kurra	126	Hasil Pemekaran

Sumber : BPS Kab. Tana Toraja Tahun 2022

Kelompok wilayah padat sebanyak 2 wilayah Kecamatan, kepadatan menengah sebanyak 6 wilayah Kecamatan dan kepadatan terendah cukup banyak, sebanyak 11 Kecamatan.

2.1.1.6 Penyebaran Penduduk

Kecamatan Makale dengan jumlah penduduk 39.040 jiwa dan luas 39,75 Km², memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 982 jiwa/Km². Makale Utara adalah kecamatan dengan kepadatan tertinggi kedua yaitu sebesar 567 jiwa/Km², selanjutnya kepadatan penduduk tertinggi berikutnya adalah Sangalla Utara 328 jiwa/Km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bonggakaradeng hanya mencapai 39 jiwa/km². Penyebaran penduduk berdasarkan data tersebut di Kabupaten Toraja relatif tidak merata.

Dari tingkat kepadatan penduduk tersebut dapat dilihat arah dan kecenderungan fisik wilayah yang telah berkembang secara linier sepanjang jalan utama atau mengikuti jaringan jalan yang ada. Lebih jelasnya tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja, diperlihatkan pada Tabel berikut;

Tabel 2.9

Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

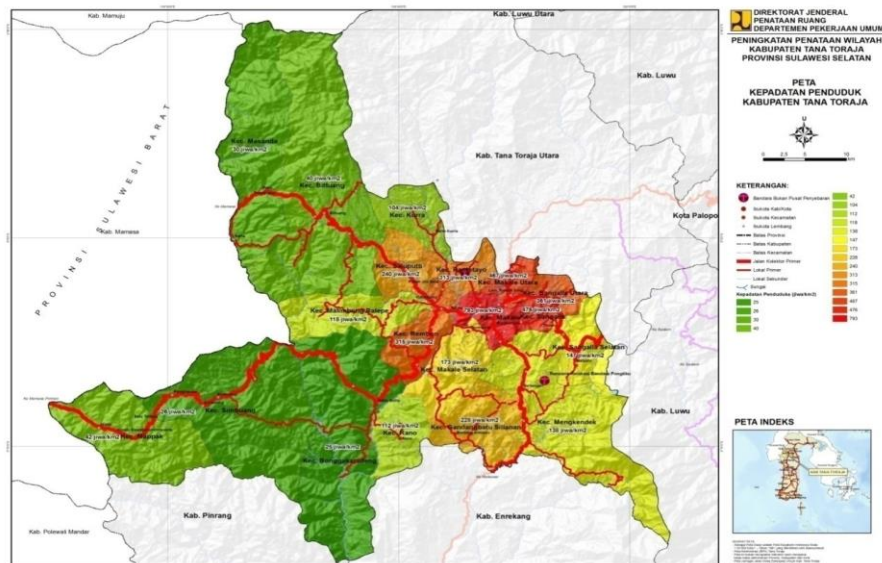
Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
BONGGAKARADENG	8.080	206,76	39
SIMBUANG	8.107	194,82	42
RANO	7.766	89,43	87
MAPPAK	7.120	166,02	43
MENGENDEK	37.092	196,74	189
GANDANG BATU SILLANAN	23.276	108,63	214
SANGALLA	8.041	36,24	222
SANGALLA SELATAN	9.272	47,80	203
SANGALLA UTARA	9.157	27,96	328
MAKALE	39.040	39,75	982
MAKALE SELATAN	16.956	61,70	275
MAKALE UTARA	14.796	26,08	567



Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
SALUPUTI	9.922	87,54	113
BITTUANG	19.012	163,27	116
REMBON	25.220	134,47	188
MASANDA	8.695	134,77	65
MALIMBONG BALEPE	10.603	211,47	50
RANTETAYO	14.957	60,35	248
KURRA	7.612	60,50	126
Jumlah	285.179	2.054,30	139

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022

Gambar 2.9
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kab. Tana Toraja Tahun 2011-2030

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun nonmateri. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030, Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Tana Toraja dibagi atas :

1. Kawasan Rawan Bencana Alam :
 - Kawasan rawan banjir dengan potensi terbesar terjadi pada wilayah Kecamatan Makale.



2. Kawasan Rawan Bencana Geologi :

- Kawasan pusat gempa dengan potensi terbesar terjadi pada wilayah Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Masanda
- Kawasan rawan gerakan tanah/longsor dengan potensi terbesar terjadi pada wilayah Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Masanda.

Tabel 2.10

Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kecamatan
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021

Kecamatan	Banjir		Gempa Bumi		Tanah Longsor	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Bonggakaradeng	-	-	-	-	2	1
Simbuang	-	-	-	-	-	1
Rano	-	-	-	-	4	4
Mappak	-	-	-	-	2	-
Mengkendek	-	-	-	2	3	2
Gandang batu sillanan	-	-	-	5	3	-
Sangalla	2	-	1	1	2	1
Sangalla selatan	1	-	-	-	1	1
Sangalla utara	-	1	-	-	2	1
Makale	2	2	-	-	3	4
Makale selatan	-	-	-	-	5	4
Makale utara	1	-	-	-	-	1
Saluputti	-	-	2	-	5	2
Bittuang	-	-	13	-	12	10
Rembon	1	-	-	-	7	4
Masanda	-	-	-	-	7	-
Malimbong balepe	-	-	-	-	1	-
Rantetayo	-	-	-	2	3	3
Kurra	-	-	-	-	3	-
Jumlah	7	3	16	10	65	39

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Tana Toraja diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Tana Toraja guna mewujudkan ruang Tana Toraja yang produktif, kompetitif dan berkelanjutan, yang diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan



perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Tana Toraja.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas : pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan; pengembangan prasarana wilayah; peningkatan fungsi kawasan lindung; peningkatan sumber daya hutan produksi; peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; pengembangan potensi pariwisata; pengembangan potensi pertambangan; pengembangan potensi industri; pengembangan potensi perdagangan; pengembangan potensi pendidikan; pengembangan potensi permukiman; peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan; peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan terdiri atas :

1. mempromosikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa kota-kota satelit penyangga ibukota Kabupaten Tana Toraja;
2. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) eksisting, (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
3. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
4. mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah rawan longsor di perbukitan dan rawan banjir di tepi sungai;
5. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
6. Meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antarkawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKL, PKLp, PPK dan PPL;



7. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah perbukitan dan bantaran sungai; dan;
8. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :

1. PKL; yaitu PKL yang telah ditentukan dalam RTRW Sulawesi Selatan adalah kawasan perkotaan Makale
2. PKLp; Kawasan Perkotaan Bittuang yang potensil dikembangkan sebagai gerbang wisata penghubung kawasan wisata Budaya di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan kawasan wisata Tana Toraja; dan kawasan perkotaan sekitar bandara baru Buntu Kuni' Kecamatan Mengkendek, yang potensil dikembangkan menjadi kota simpul transportasi udara.
3. PPK; terdiri atas ibukota-ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKL atau PKLp, yang terdiri atas PPK :
 - a. Kawasan Perkotaan Rante Kurra di Kecamatan Kurra
 - b. Kawasan Perkotaan Padang Iring di Kecamatan Rantetayo
 - c. Kawasan Perkotaan Pattan Ulu Salu di Kecamatan Saluputti
 - d. Kawasan Perkotaan Leatung di Kecamatan Sangalla' Utara
 - e. Kawasan Perkotaan Bullian Massa'bu di Kecamatan Sangalla'
 - f. Kawasan Perkotaan Malolin di Kecamatan Rano
 - g. Kawasan Perkotaan Ratte Buttu di Kecamatan Bonggakaradeng
 - h. Kawasan Perkotaan Kondo Dewata di Kecamatan Mappak
 - i. Kawasan Perkotaan Buntu Benteng Ambeso di Kecamatan Gandang Batu Sillanan
 - j. Kawasan Perkotaan Batualu di Kecamatan Sangalla' Selatan
 - k. Kawasan Perkotaan Tiromanda di Kecamatan Makale Selatan
 - l. Kawasan Perkotaan Lion Tondok Iring di Kecamatan Makale Utara
 - m. Kawasan Perkotaan Talion di Kecamatan Rembon
 - n. Kawasan Perkotaan Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe;
 - o. Kawasan Perkotaan Podingao' di Kecamatan Masanda; dan
 - p. Kawasan Perkotaan Lekke' di Kecamatan Simbuang.



2. PPL ; meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas PPL- PPL:
 - a. Bau dan Buntu Limbong di Kecamatan Bittuang;
 - b. Poton, Bau Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng;
 - c. Salubarani, Gandangbatu, Mebali, Tangatondok, Perindingan di Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
 - d. Tabang di Kecamatan Kurra;
 - e. Pantan, Kamali Pentalluan di Kecamatan Makale;
 - f. Pa'tekke, di Kecamatan Makale Selatan ;
 - g. Rantelemo dan Mandetek di Kecamatan Makale Utara;
 - h. Balepe' di Kecamatan Malimbong Balepe' ;
 - i. Tondok Banga di Kecamatan Mappak,
 - j. Sangratte dan belau di Kec. Masanda;
 - k. Uluway, Marinding, Tampo di Kecamatan Mengkendek;
 - l. Pangalloan di Kecamatan Rano
 - m. Madandan di Kecamatan Rantetayo;
 - n. Batusura', Palesan di Kecamatan Rembon;
 - o. Tolange di Kecamatan Saluputti;
 - p. Kaero di Kecamatan Sangalla' ;
 - q. Kandeapi di Kecamatan Sangalla' Selatan;
 - r. Saluallo di Kecamatan Sangalla' Utara;
 - s. Makkodo di Kecamatan Simbuang.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

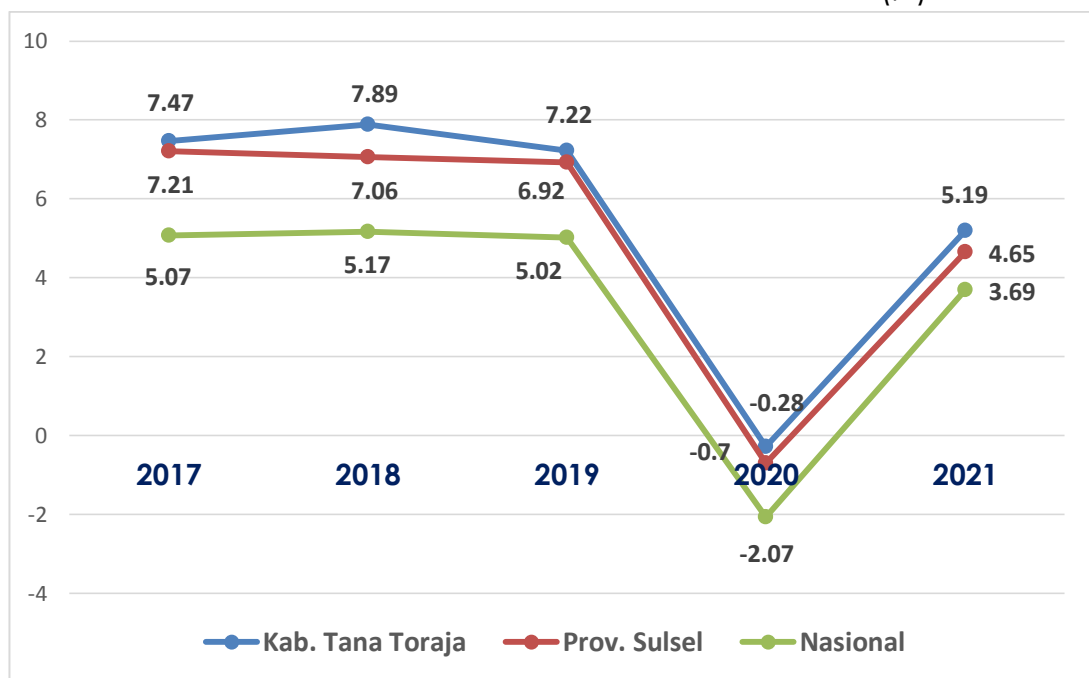
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2017 sebesar 7,47 %. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 7,89 % dan tahun 2019 turun menjadi



7,22 %. Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi -0,28 % karena pandemi Covid-19 namun meningkat menjadi 5,19 % pada tahun 2021. Demikian pula pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,65 % dan Nasional sebesar 3,69 %. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 - 2021 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

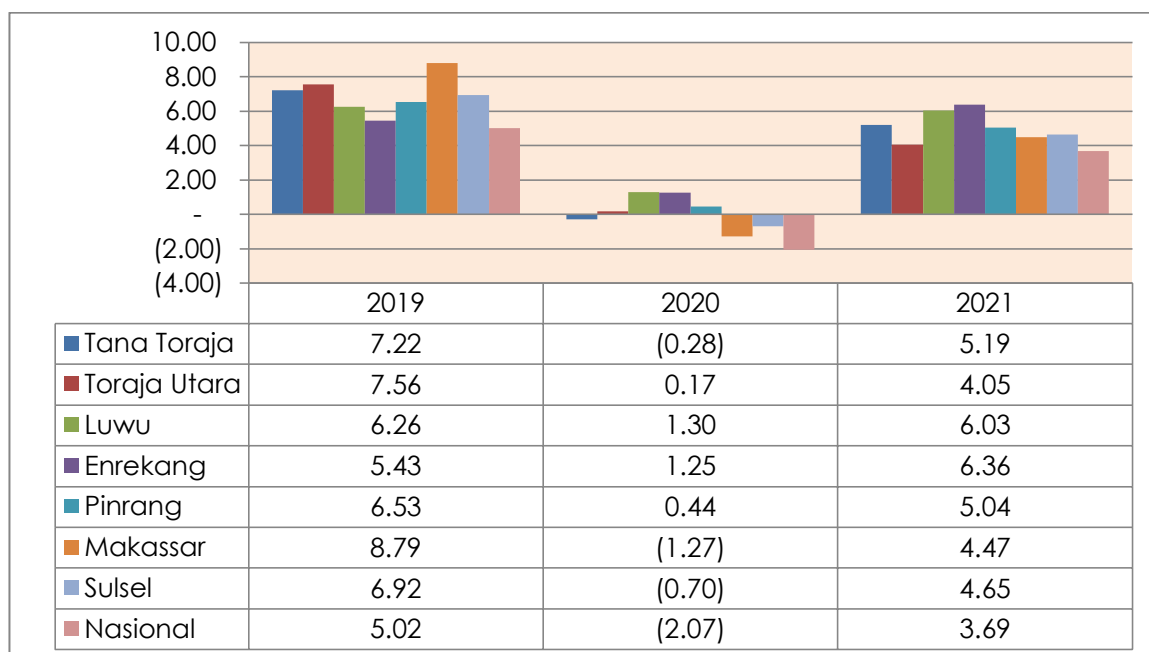
Pada Tahun 2017, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja sebesar 7,47%, berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,21% dan Nasional sebesar 5,77% serta berada di posisi ke-10 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2018 juga mengalami peningkatan pada angka 7,89% berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada angka 7,06% dan Nasional sebesar 5,17% serta berada di posisi ke-7 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Pada Tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mengalami



penurunan dibanding pada tahun sebelumnya pada angka 7,22%, namun angka ini masih berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,92% dan Nasional sebesar 5,02%, Pada Tahun 2020, Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Tana Toraja bahkan Nasional mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi minus. Namun pada Tahun 2021 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja serta kabupaten sekitar mengalami peningkatan yang sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.2

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021 (%)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja masih ditopang oleh Konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2020. Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 anjlok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bahkan bernilai minus (-0.28 %) namun nilai tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan nilai pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada Tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi Tana Toraja sudah mengalami perbaikan dan nilainya tetap di



atas nilai Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dengan nilai 5,19 %. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seri 2010 Menurut Pengeluaran. Pada Tahun 2017 sampai Tahun 2019 mengalami perkembangan dari angka Rp. 3.940,52 miliar pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp. Rp. 4.251,26 miliar pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 4.558,14 miliar. Pada Tahun 2020, turun menjadi 4.545,29 miliar. Indikasi penyebab kontraksi secara umum yakni pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan ekonomi baik masyarakat pemerintah maupun pihak swasta. Pembatasan kegiatan ekonomi terjadi baik dari sisi produksi (*supply*) dan dari sisi konsumsi/pengeluaran (*demand*). Namun pada tahun 2021, dengan berbagai kebijakan yang menstimulus pemulihan kegiatan ekonomi angka PDRB ADHK mampu bertumbuh positif sebesar 5,19 persen menjadi 4.780,98 miliar. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah yang kategori yang paling berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tana Toraja. Hal ini juga nampak pada Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 di Kabupaten Tana Toraja yang mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 1,55 % dibanding pada tahun sebelumnya yaitu 1,51 %.

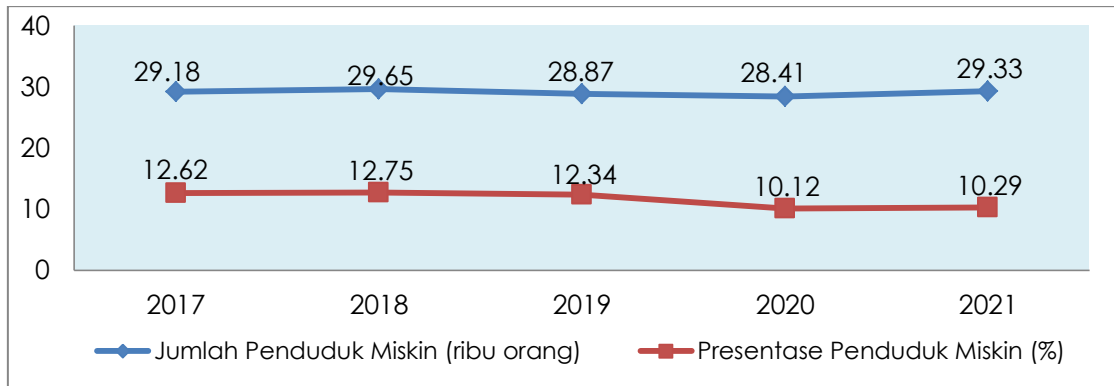
2.2.1.2 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Menurut data BPS, Pada Tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja mencapai 12,62 persen atau 29,18 ribu orang, meningkat menjadi 12,75 persen atau 29,65 ribu orang pada Tahun 2018. Tahun 2019 presentase penduduk miskin sebesar 12,34 persen atau 28,87 ribu orang, kemudian mengalami penurunan menjadi 10,12 persen atau 28,41 ribu orang pada tahun 2020 dan 10,29 persen atau 29,33 ribu orang pada Tahun 2021. Penurunan ini seiring dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 salah satunya melalui perbaikan bantuan perlindungan sosial utamanya untuk penduduk miskin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja berada pada urutan 7 (tujuh) besar diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan dengan urutan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Selayar dan Kabupaten Tana Toraja.

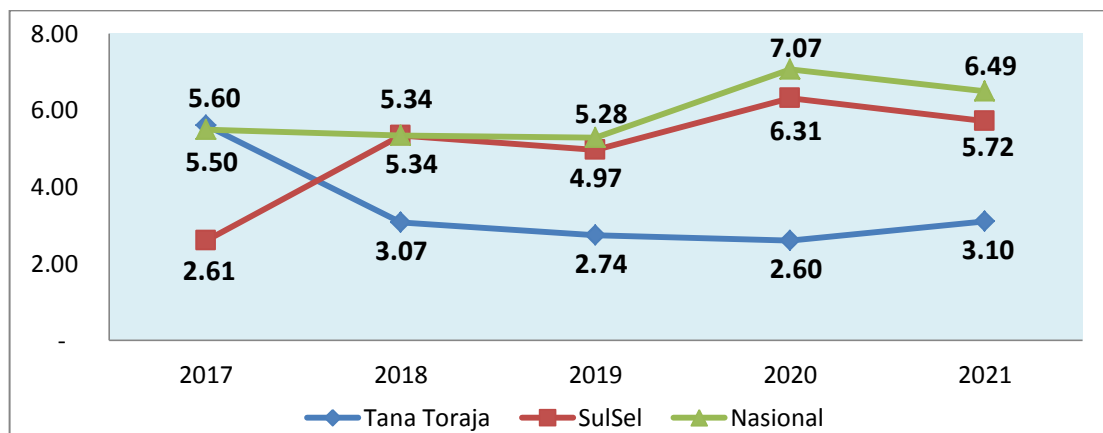
2.2.1.3 Ketenagakerjaan

A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Tana Toraja masih tergolong tinggi yaitu pada Tahun 2017 sebesar 5,60 % pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 menurun menjadi 3,07 % dan 2,74 %. Kemudian pada Tahun 2020 turun menjadi 2,60%. Pada Tahun 2021, TPT Kabupaten Tana Toraja sebesar 3,09 %, masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,72 % dan Nasional sebesar 6,49 %.

Grafik 2.4

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021



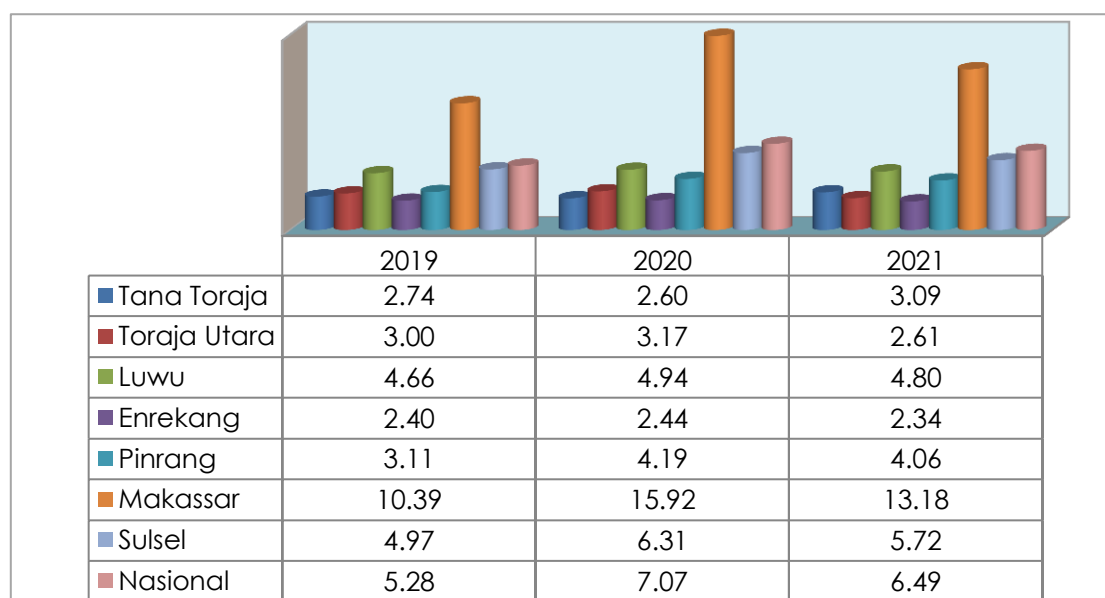
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022



Penurunan jumlah TPT di Kabupaten Tana Toraja sebagian besar dipengaruhi oleh tenaga kerja yang menggeluti lapangan pekerjaan dibidang pertanian. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang terbesar di Kabupaten Tana Toraja. Tenaga kerja di sektor ini tidak terlalu terdampak terhadap dampak pandemi Covid-19. Tenaga kerja yang terjun ke usaha bidang pertanian dapat menurunkan jumlah pengangguran terbuka. Selain itu tenaga kerja ada juga yang berkecimpung di sektor perdagangan dan industri. Penurunan TPT juga terjadi karena terserapnya tenaga kerja diberbagai sektor usaha serta pengaruh positif dari pelatihan tenaga kerja. Dengan kata lain tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tana Toraja lebih banyak yang bekerja pada sektor informal. Selengkapnya TPT dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 2.5

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kab./Kota Tahun 2019-2021



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2022

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

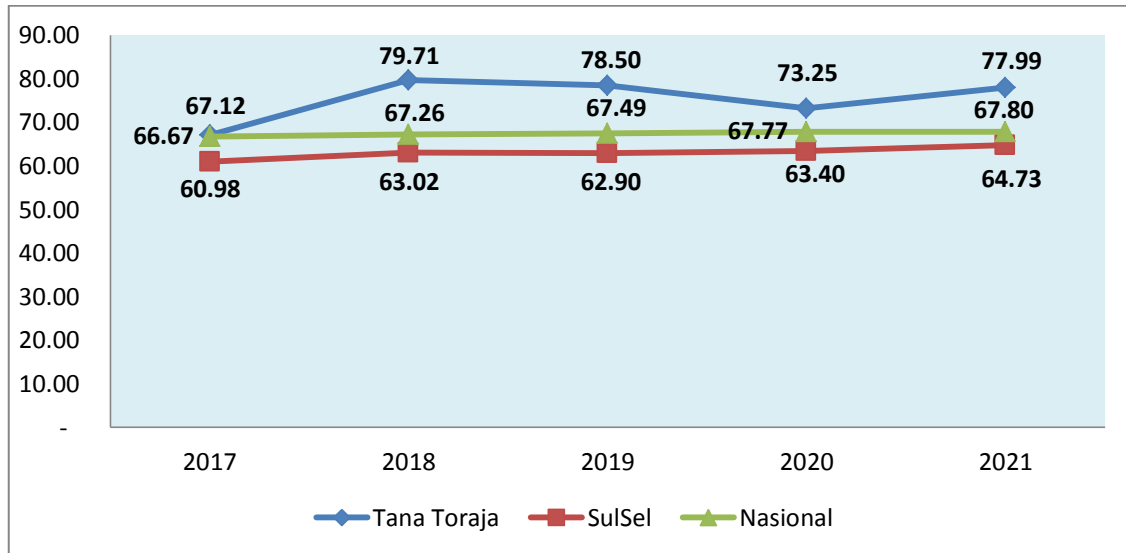
TPAK Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan tren fluktuatif. Pada Tahun 2017, TPAK Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 67,12 persen, meningkat menjadi 79,71 persen pada Tahun 2018. Peningkatan ini utamanya didorong oleh meningkatnya jumlah pencari kerja. Kemudian TPAK mengalami penurunan menjadi 73,25 persen pada Tahun 2020 yang dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang tidak



masuk angkatan kerja bertambah banyak. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 77,99 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.6

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)



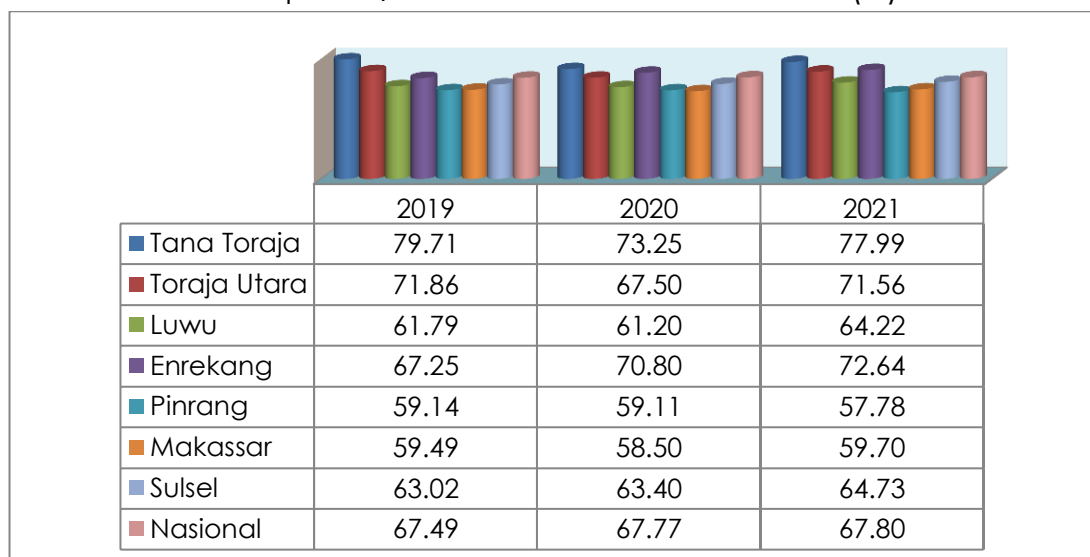
Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2022

Pada Tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 77,99 persen atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 73,25 persen seiring dengan meningkatnya jumlah TPT dari 2,60 persen pada tahun 2020 menjadi 3,10 persen pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang tidak masuk angkatan kerja bertambah banyak. Pada Tahun 2021, TPAK Kabupaten Tana Toraja sebesar 77,99 persen, berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 64,73 persen dan Nasional sebesar 67,80 persen. Perubahan TPAK di Kabupaten Tana Toraja tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain seperti Kota Makassar dan Kabupaten Luwu. TPAK di Kabupaten Tana Toraja didominasi oleh pekerja sektor informal. Dimana sektor informal tidak terlalu berimbas akibat dampak pandemi Covid-19. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha terbesar yang diisi oleh tenaga kerja di Kabupaten Tana Toraja. Sektor pertanian tetap dapat beroperasi meskipun pandemi Covid-19 berimbas terhadap berbagai sektor usaha. Selengkapnya perbandingan TPAK Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.7

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021 (%)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

2.2.1.4 Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauhmana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Indeks gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk kategori dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan kategori rendah.

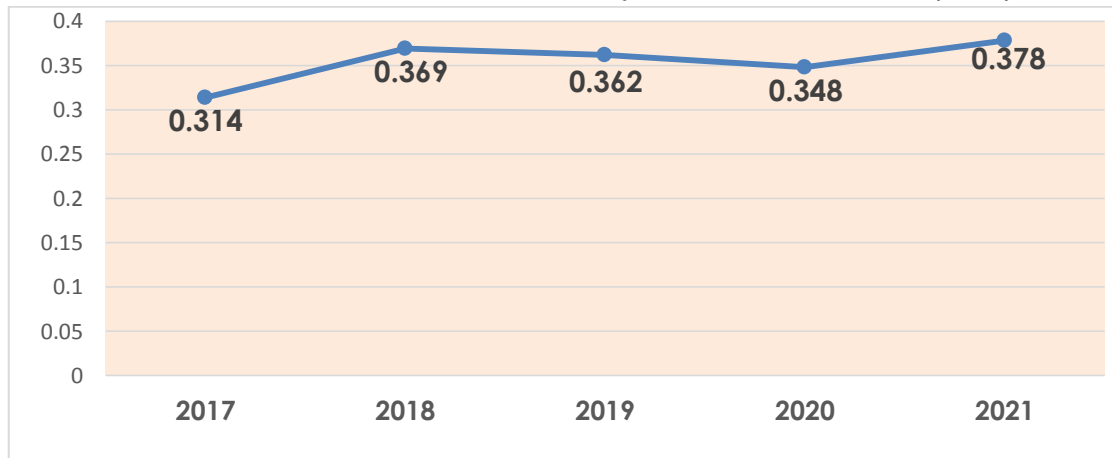
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami fluktuasi namun tetap dalam kategori ketimpangan sedang. Pada Tahun 2017 nilai Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja 0,314, menurun pada Tahun 2021 berada pada nilai 0,378. Selanjutnya perkembangan nilai Indeks Gini



Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.8

Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017–2021 (nilai)

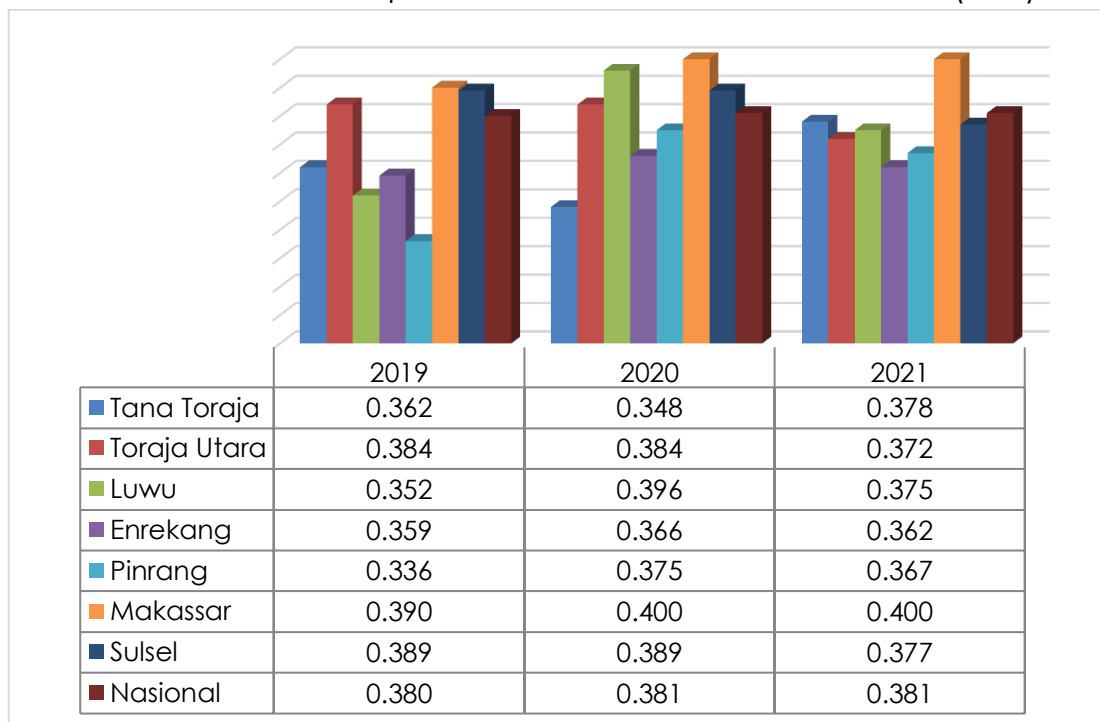


Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Pada Tahun 2021, nilai Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja 0,378 lebih tinggi dibanding dengan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada nilai 0,377 dan lebih rendah jika dibandingkan Nasional pada angka 0,381, serta berada di posisi ke delapan belas dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 2.9

Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021 (nilai)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022



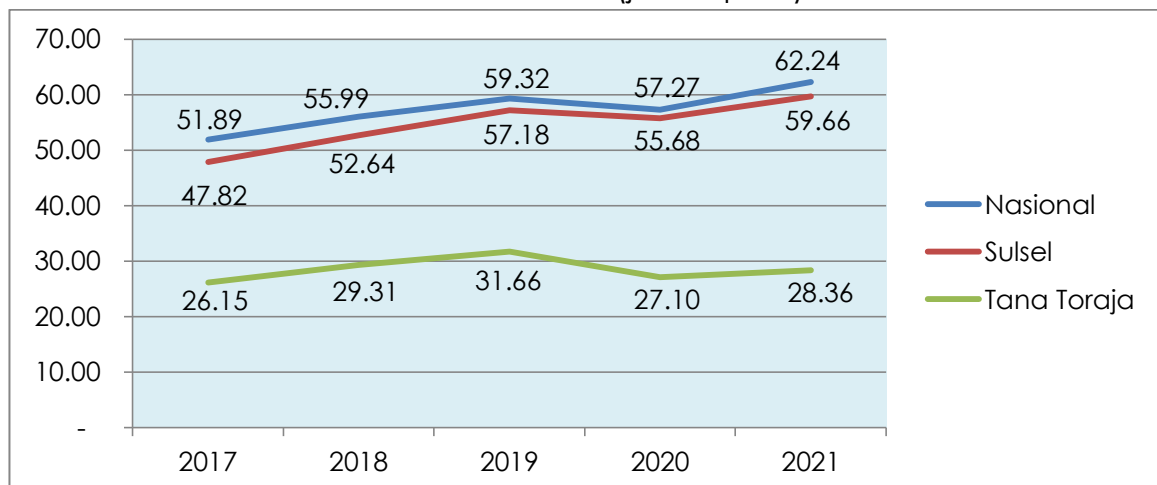
2.2.1.5 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraaannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan atas dasar harga berlaku dalam kurun Tahun 2017-2021 mengalami tren kenaikan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2017 senilai 26,15 juta rupiah dan meningkat menjadi 28,36 juta rupiah pada Tahun 2021. Penurunan pada tahun 2020 juga terjadi pada nilai PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.10

PDRB per Kapita ADHB Nasional, Prov. Sulsel dan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017–2021 (juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

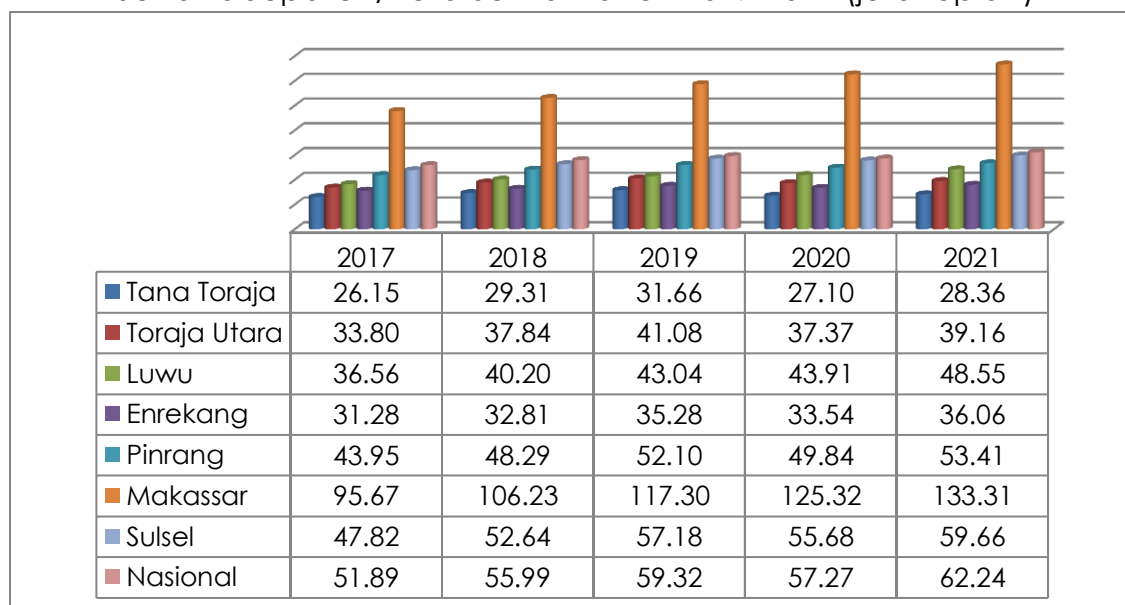


PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dipengaruhi oleh peningkatan output (produksi) atau aktifitas ekonomi dari setiap penduduk. Aktifitas ekonomi dari setiap penduduk kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya sehingga PDRB per Kapita di Kabupaten Tana Toraja dapat mengalami peningkatan. Adanya penurunan nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku yang cukup signifikan pada tahun 2020 diakibatkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian di Kabupaten Tana Toraja. Aktivitas ekonomi yang paling berkontribusi dalam peningkatan PDRB per kapita adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kategori ini merupakan lapangan usaha yang paling banyak digeluti di Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat meningkatkan PDRB per kapita. PDRB perkapita juga dipengaruhi oleh pola konsumsi. Pola konsumsi masyarakat Tana Toraja masih lebih banyak didominasi oleh pengeluaran makanan dibanding non makanan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, nilai PDRB per kapita penduduk Kabupaten Tana Toraja lebih rendah bahkan terhadap Kabupaten Toraja Utara yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Perbandingan nilai PDRB Perkapita Kabupaten Tana Toraja dengan kabupaten sekitar dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.11

PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2017-2021 (juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022



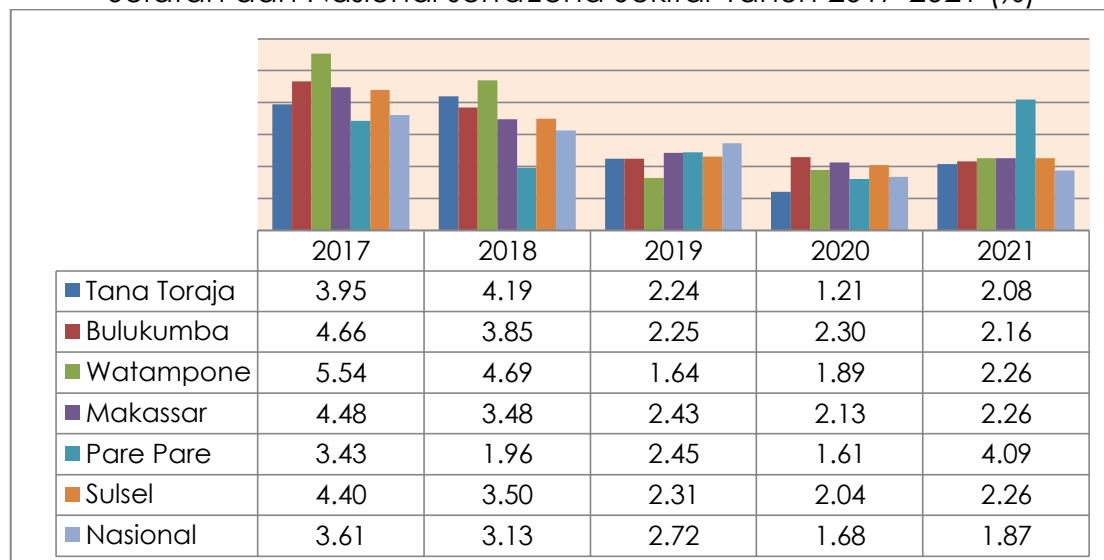
2.2.1.6 Laju Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang/jasa secara umum. Perhitungan inflasi mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. IHK memberikan informasi mengenai perkembangan naik atau turunnya harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Untuk penyusunan IHK, BPS melakukan Survei Harga Konsumen (SHK) setiap bulan dan Survei Biaya Hidup (SBH) setiap lima tahun di kabupaten/kota terpilih. Di Sulawesi Selatan, terdapat lima kabupaten/kota yang menjadi sample untuk menghitung inflasi provinsi (zona inflasi), yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Bone (Watampone), dan Bulukumba. Perhitungan angka inflasi dapat dilakukan di masing-masing kabupaten/kota atau diagregasi hingga level provinsi dan nasional. Inflasi Kabupaten Tana Toraja merujuk pada inflasi Kota Palopo. Menurut data BPS Kabupaten Tana Toraja nilai inflasi Kota palopo yang menjadi rujukan Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2017 sebesar 3,95 persen, Tahun 2018 sebesar 4,19 persen dan Tahun 2019 turun menjadi 2,24 persen. Pada Tahun 2021, tingkat inflasi mencapai 2,08 persen, lebih tinggi dibanding dengan Tahun 2020 yang berada pada angka 1,21 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga seluruh kelompok pengeluaran. Dari sebelas Kelompok Pengeluaran, lima diantaranya mengalami inflasi terbesar yaitu: Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,01 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 1,79 persen; Kelompok Makanan, minuman dan Tembakau sebesar 1,44 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,18 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya sebesar 1,15 persen. Untuk mengetahui perbandingan laju inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, nasional dan Zona sekitar dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.12

Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Zona Sekitar Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

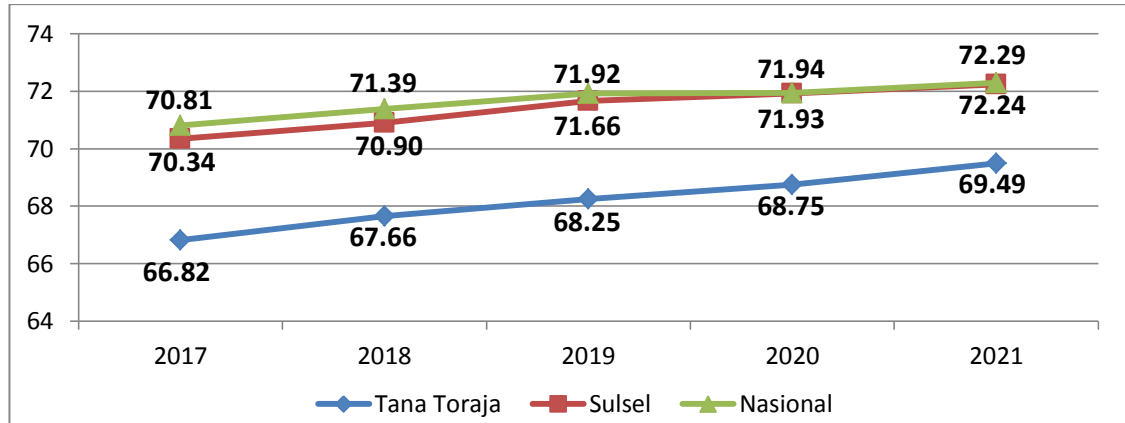
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan, pada tahun 2017 capaian IPM Kabupaten Tana Toraja sebesar 66,82 meningkat menjadi 67,66 pada Tahun 2018. Demikian pula pada Tahun 2019 capaian IPM Kabupaten Tana Toraja meningkat pada angka 68,25 kemudian pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 meningkat pada angka 68,75 dan 69,49. Angka capaian IPM Kabupaten Tana Toraja ini, masih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang juga sama sama mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti terlihat pada grafik berikut :



Grafik 2.13

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

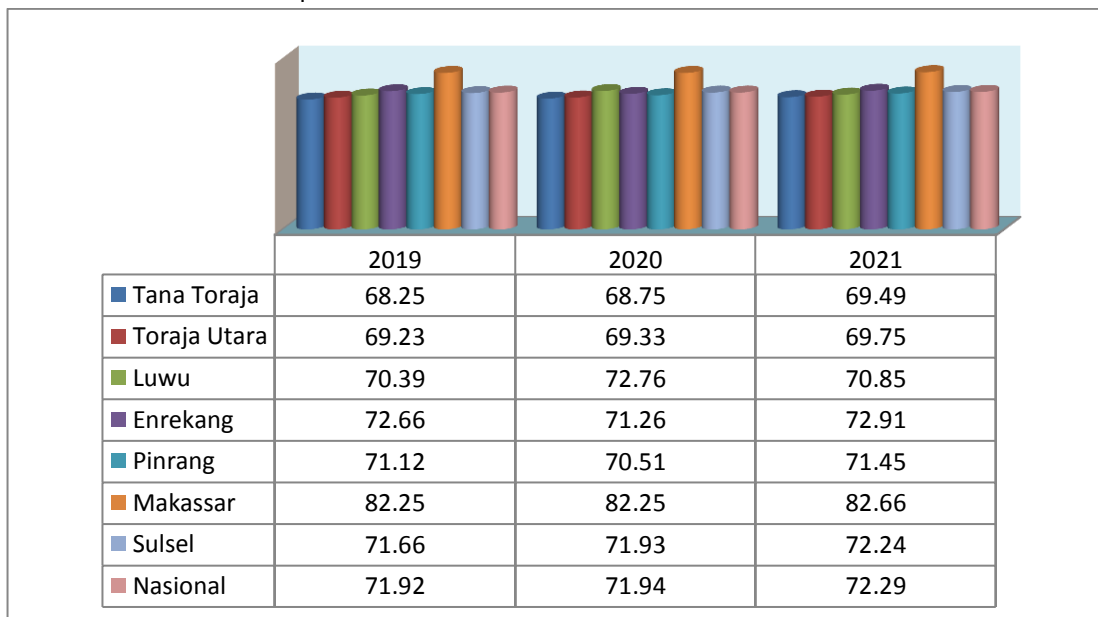


Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Pada Tahun 2021, IPM Kabupaten Tana Toraja berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 72,24 dibawah Nasional sebesar 72,29 serta berada di posisi ke-16 diantara 24 Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Grafik 2.14

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Indikator pembentuk IPM yang paling berpengaruh terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Tana Toraja adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tana Toraja adalah yang tertinggi ke-dua di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Angka Harapan Hidup



antara lain fasilitas kesehatan yang sudah semakin memadai. Selain itu semakin tingginya kesadaran wanita hamil untuk melahirkan pada fasilitas kesehatan atau tenaga medis berpengalaman.

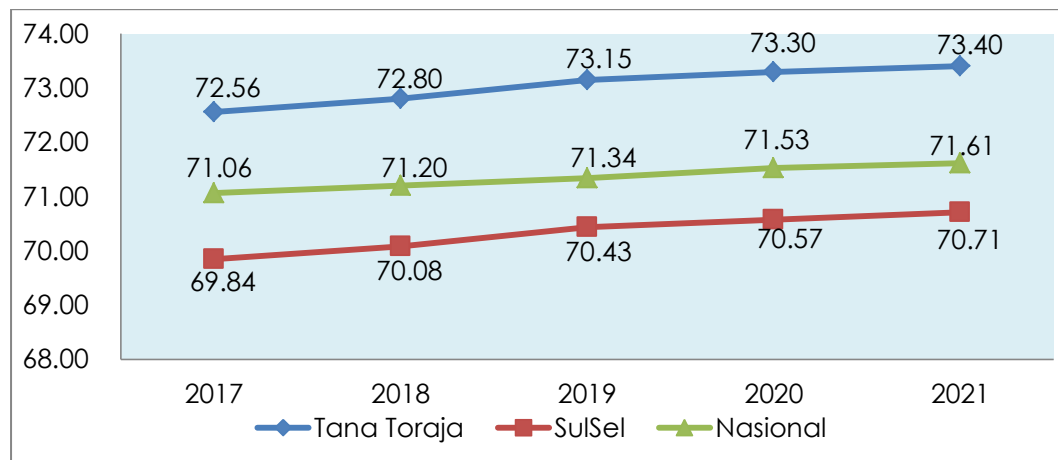
Sementara itu, perkembangan indeks pembentuk IPM Kabupaten Tana Toraja yang meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita uraiannya sebagai berikut :

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup atau disingkat UHH, merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan UHH Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 terus mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 72,56 tahun meningkat menjadi 73,40 tahun pada Tahun 2021. Perkembangan tersebut relevan dengan Sulawesi Selatan dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.15

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021.



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

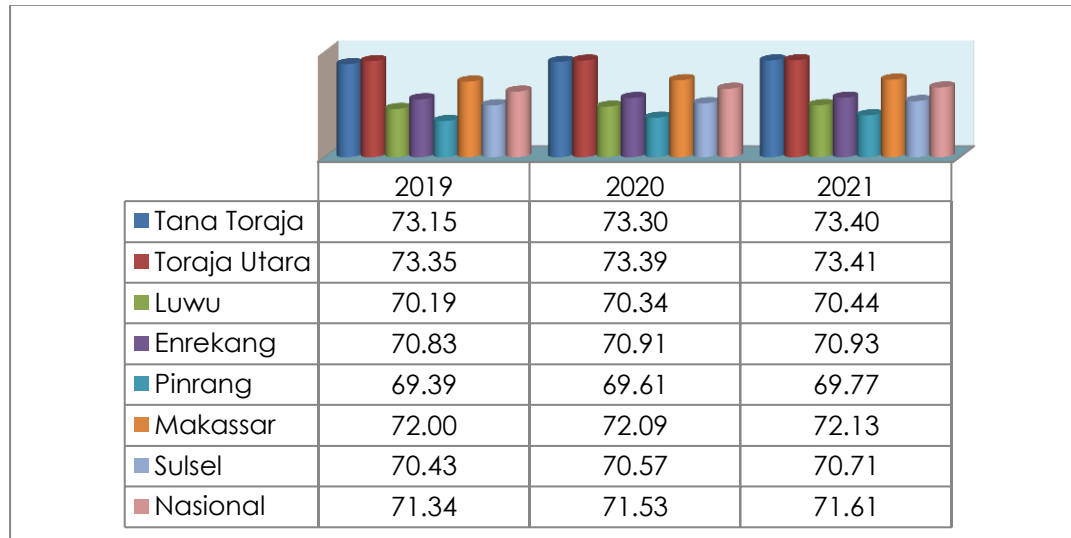
Pada Tahun 2021, AHH Kabupaten Tana Toraja sebesar 73,40 tahun, berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,71 tahun dan Nasional sebesar 71,61 tahun serta berada di posisi pertama dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Sementara Kabupaten Toraja Utara yang berada di urutan kedua teratas Angka Harapan Hidup yaitu 73,35 tahun disusul Kotamadya



Makassar sebesar 72.08 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.16

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab. Tana Toraja, Prov. Sulsel dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021 (Tahun)



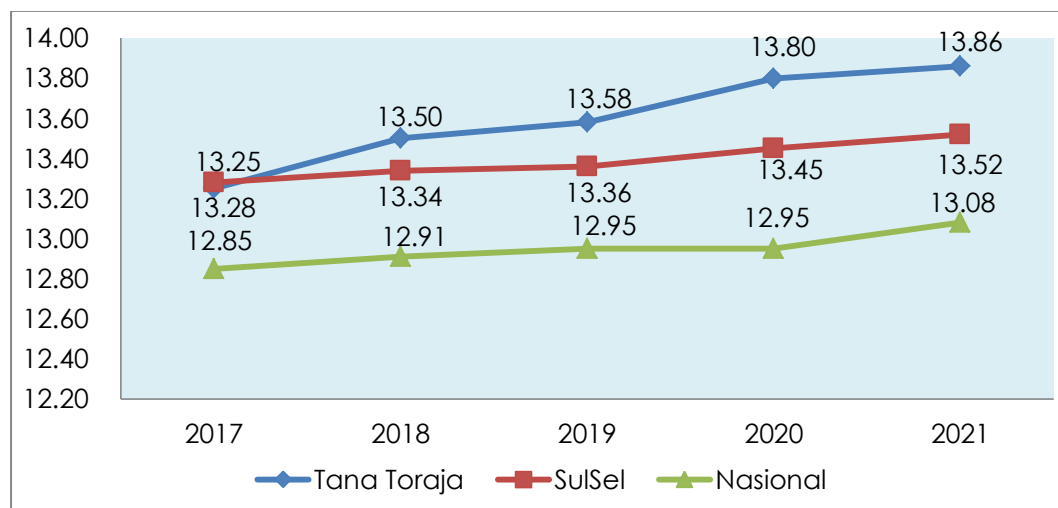
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 13,25 tahun dan pada Tahun 2021 menjadi sebesar 13,86 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.17

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



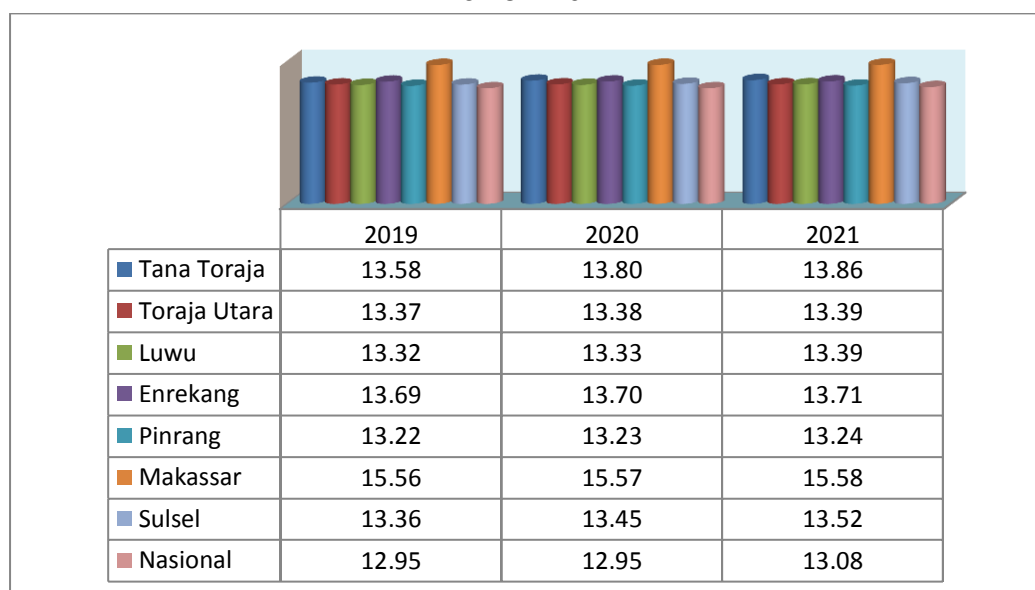
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022



Pada Tahun 2021, HLS Kabupaten Tana Toraja sebesar 13,86 tahun, berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 13,52 tahun dan Nasional sebesar 13,08 tahun menjadikan Kabupaten Tana Toraja berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.18

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

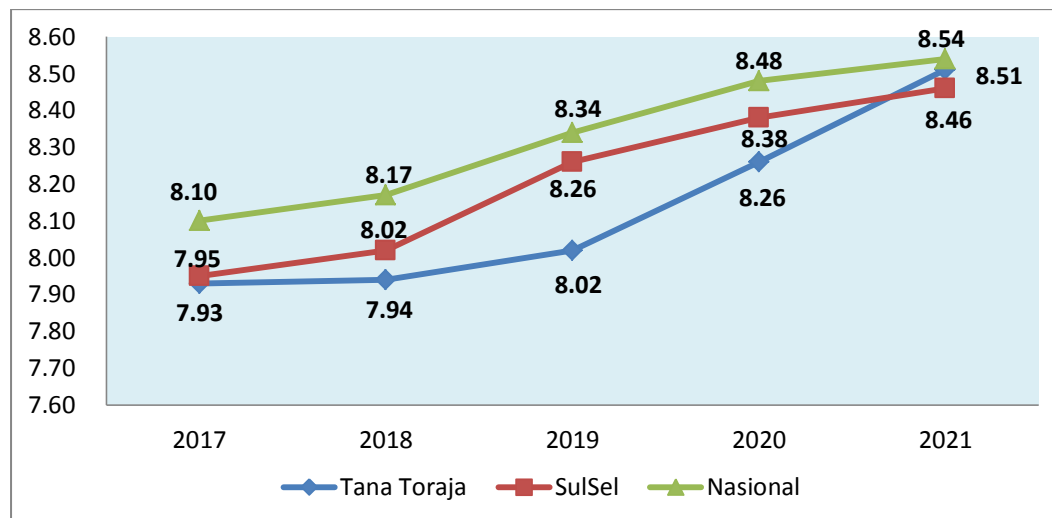
3) Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 7,94 tahun menjadi sebesar 8,51 tahun pada Tahun 2021. Kondisi tersebut relevan dengan Sulawesi Selatan dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.19

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

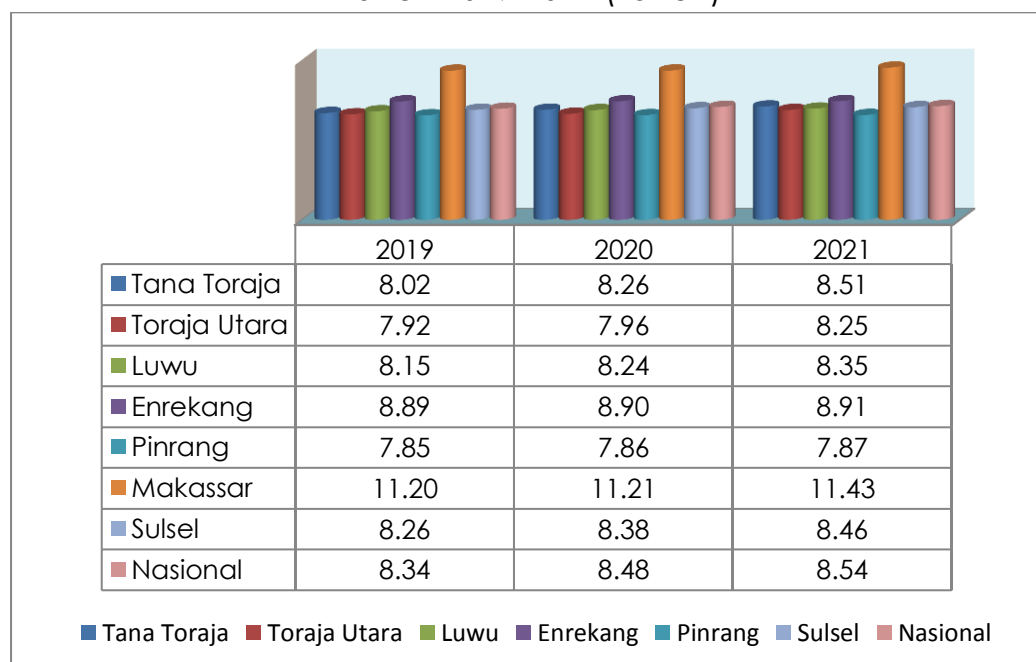


Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Pada Tahun 2021, RLS Kabupaten Tana Toraja sebesar 8,51 tahun, berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,46 tahun dan dibawah Nasional sebesar 8,54 tahun serta berada di posisi ke-6 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.20

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021 (Tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022



Perkembangan IPM Kabupaten Tana Toraja ditentukan oleh 4 dimensi (umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita). Umur harapan hidup di Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh berbagai faktor antara lain semakin memadainya fasilitas kesehatan semakin optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta meningkatnya kesadaran perempuan untuk melahirkan pada fasilitas kesehatan atau tenaga profesional kesehatan.

Selain itu perkembangan IPM juga di pengaruhi oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tana Toraja. Harapan lama sekolah di Kabupaten Tana Toraja dipengaruhi semakin baiknya fasilitas pendidikan serta semakin meningkatnya kemauan dari masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk untuk melanjutkan pendidikan. Untuk Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tana Toraja dipengaruhi oleh jarak sekolah dengan tempat tinggal, belum adanya paksaan dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan serta belum adanya tuntutan untuk pola hidup modern.

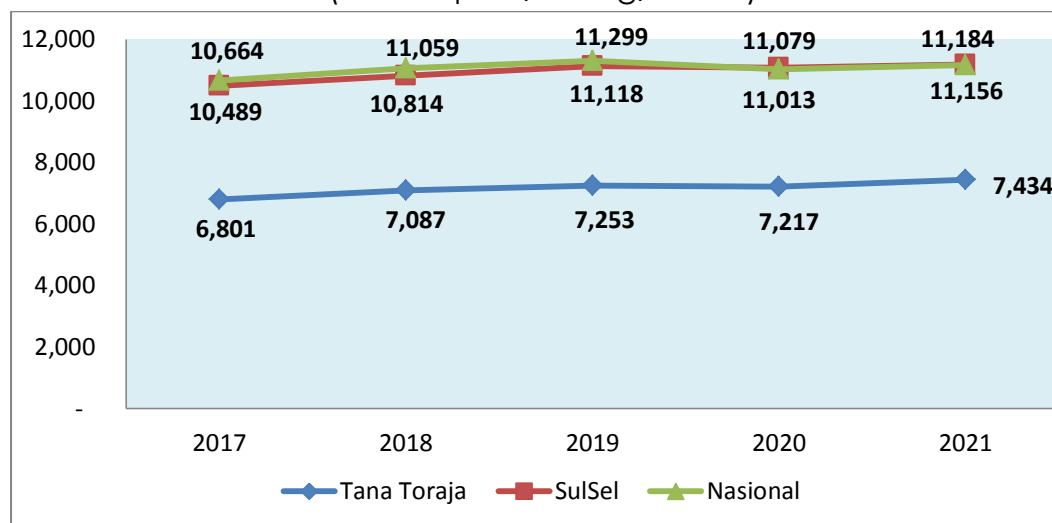
4) Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 hingga Tahun 2021 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan yang diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya jumlah pengeluaran perkapita masyarakat. Pada Tahun 2017 total pengeluaran per kapita sebesar Rp. 6.801 (ribu rupiah/orang/tahun) dan Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 7.434 (ribu rupiah/orang/tahun). Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Grafik 2.21

Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Tana Toraja tahun 2017-20201
(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

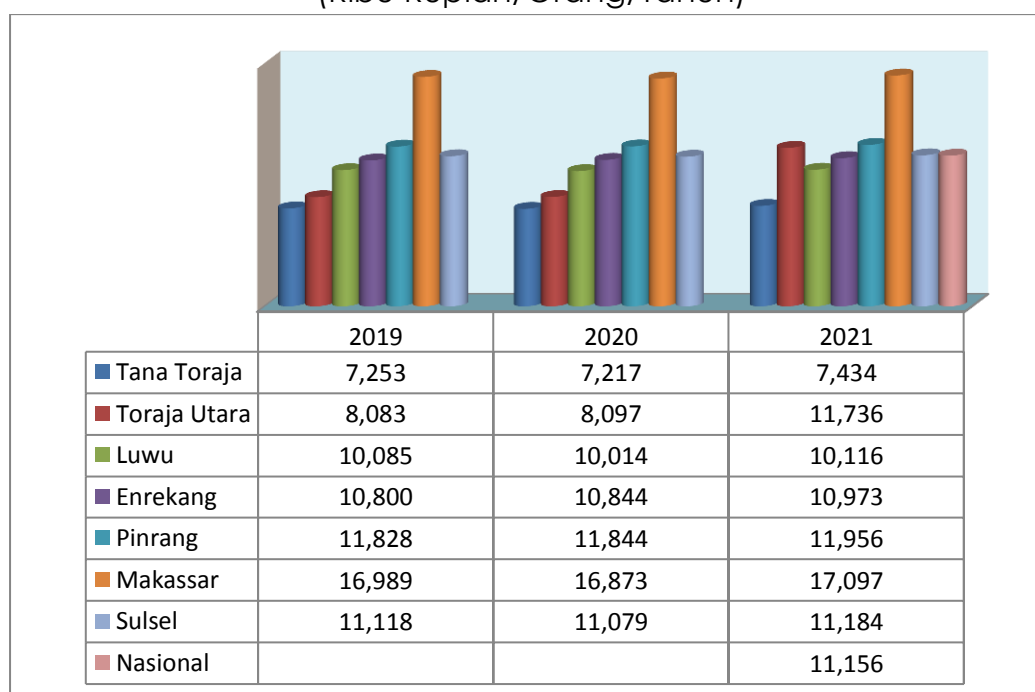


Sumber : Publikasi BPS Provinsi, 2022

Pada Tahun 2021, total Pengeluaran Per kapita Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp. 7.434 (ribu rupiah/orang/tahun), berada dibawah total Pengeluaran Per kapita Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.11.156 (ribu rupiah/orang/tahun) dan Nasional sebesar Rp. 11.184 (ribu rupiah/orang/tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.22

Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021
(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022



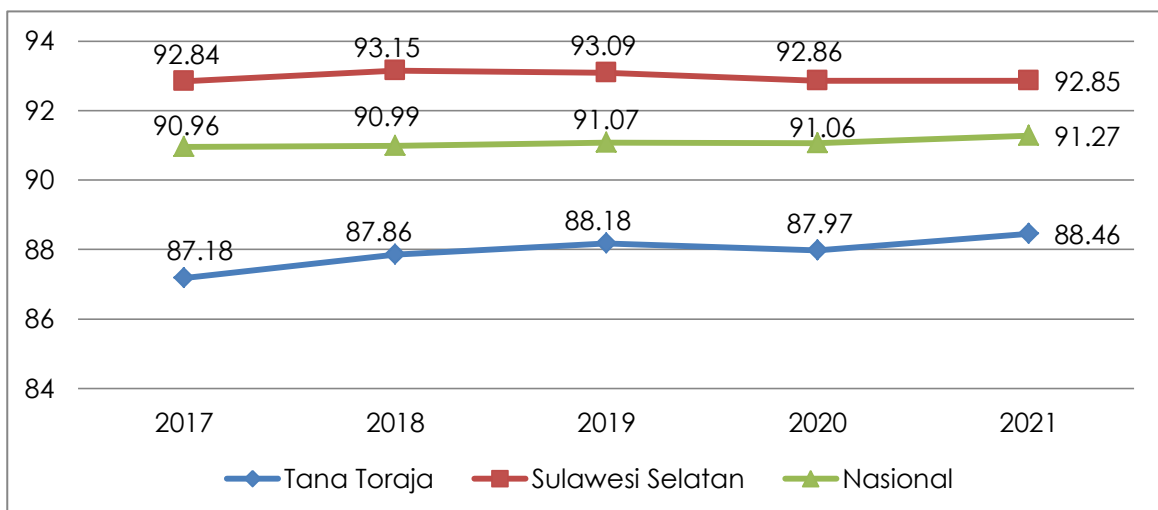
2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG. IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100.

Perkembangan IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 hingga Tahun 2021 mengalami peningkatan meskipun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020. IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 sebesar 87,18, Tahun 2018 meningkat menjadi 87,86 demikian pula pada Tahun 2019 meningkat menjadi 88,18 namun pada Tahun 2020 menurun menjadi 87,97 dan meningkat menjadi 88,46 pada Tahun 2021. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.23

Perkembangan IPG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

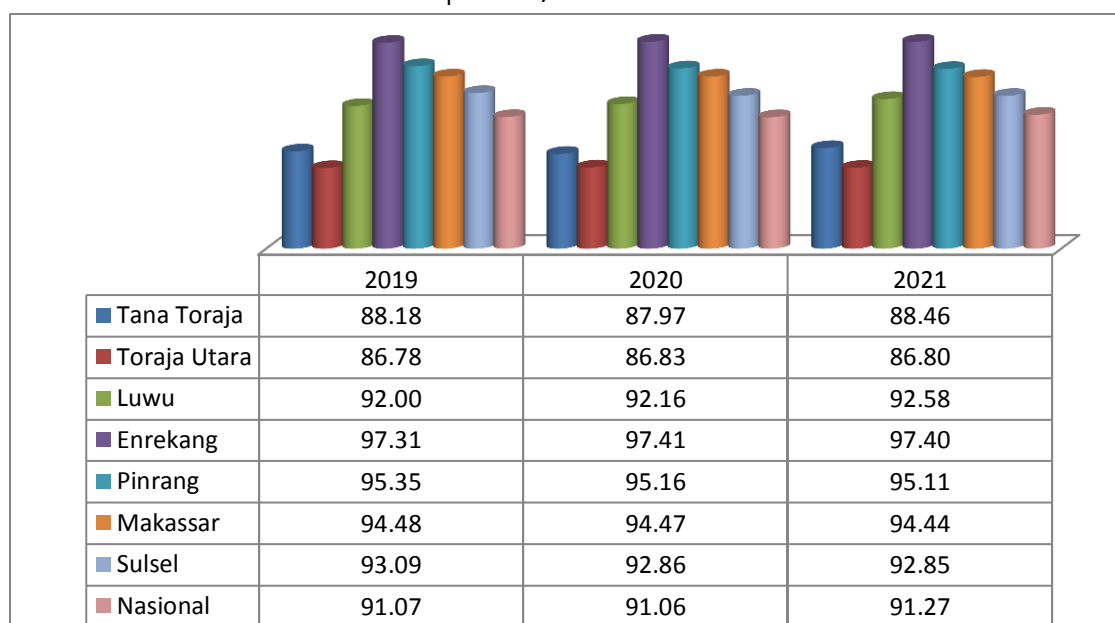
Pada Tahun 2021, IPG Kabupaten Tana Toraja sebesar 88,46 berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 92,85 dan Nasional sebesar 91,27 serta berada di posisi ke-4 terbawah



dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.24

Perbandingan IPG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Usia Harapan Hidup perempuan di Kabupaten Tana Toraja lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Usia harapan hidup perempuan Tahun 2017 sampai Tahun 2021 berturut-turut sebesar 74,42 tahun, 74,66 tahun 75,00 tahun, 75,13 tahun dan 75,22 tahun, sedangkan usia harapan hidup laki-laki Tahun 2017 sampai Tahun 2021 sebesar 70,59 tahun, 70,83 tahun, 71,20 tahun, 71,37 tahun dan 71,48 tahun.

Harapan Lama Sekolah untuk perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, dimana harapan lama sekolah perempuan Tahun 2017 sebesar 13,72 tahun meningkat menjadi 14,01 tahun pada Tahun 2018 Tahun 2019 dan Tahun 2020 berturut-turut sebesar 14,09 tahun dan 14,10 tahun kemudian meningkat menjadi 14,16 pada Tahun 2021. Sedangkan untuk laki-laki Tahun 2017 sampai tahun 2021 berturut-turut sebesar 13,22 tahun, 13,23 tahun, 13,24 tahun, 13,50 tahun dan 13,51 pada Tahun 2021.



Sementara rata-rata lama sekolah laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan. Pada Tahun 2017 rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 8,49 tahun, 8,50 tahun pada Tahun 2018 kemudian menjadi 8,51 tahun pada Tahun 2019. Tahun 2020 dan Tahun 2021 berturut-turut sebesar 8,73 tahun dan 8,74 tahun. Rata-rata lama sekolah perempuan pada Tahun 2017 yaitu 7,77 tahun meningkat menjadi sebesar 7,78 tahun pada Tahun 2018 demikian pula pada Tahun 2019 meningkat menjadi 7,94 tahun, pada Tahun 2020 sebesar 8,21 tahun dan meningkat menjadi 8,49 tahun pada Tahun 2021.

Dilihat dari segi Pengeluaran perkapita Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 hingga Tahun 2021, pengeluaran perkapita laki-laki jauh lebih baik dibandingkan dengan perempuan yaitu Tahun 2017 sebesar Rp.10.053 ribu dan Rp.4.908 ribu. Pada Tahun 2018 pengeluaran perkapita laki-laki menjadi sebesar Rp.10.461 ribu, sedangkan untuk perempuan tahun 2018 sebesar Rp.5.135 ribu dan Tahun 2019 menjadi sebesar Rp.10.714 ribu dan Rp. 5.227 ribu. Tahun 2020 pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp. 10.614 ribu dan perempuan Rp. 5.208 ribu, sedangkan tahun 2021 pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp. 10.986 ribu dan perempuan sebesar Rp. 5.336 ribu. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11

Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017-2021

NO.	TAHUN	USIA HARAPAN HIDUP		HLS		RRLS		PENGELUARAN PER KAPITA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	2017	70,59	74,42	13,22	13,72	8,49	7,77	10.053	4.908
2.	2018	70,83	74,66	13,23	14,01	8,50	7,78	10.461	5.135
3.	2019	71,20	75,00	13,24	14,09	8,51	7,94	10.714	5.227
4.	2020	71,37	75,13	13,50	14,10	8,73	8,21	10.614	5.208
5.	2021	71,48	75,22	13,51	14,16	8,74	8,49	10.986	5.336

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

2.2.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

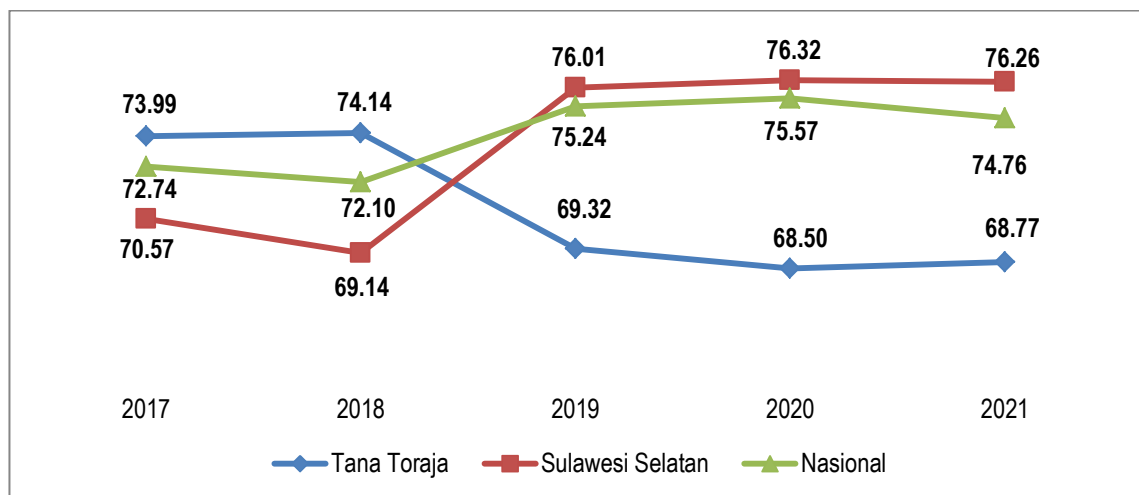
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan,



sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami fluktuasi, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 73,99 menjadi sebesar 74,14 namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 69,32 pada Tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 68,50 dan meningkat menjadi 68,77 pada tahun 2021. Kondisi tersebut sejalan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sama-sama mengalami fluktuasi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 2.25

Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



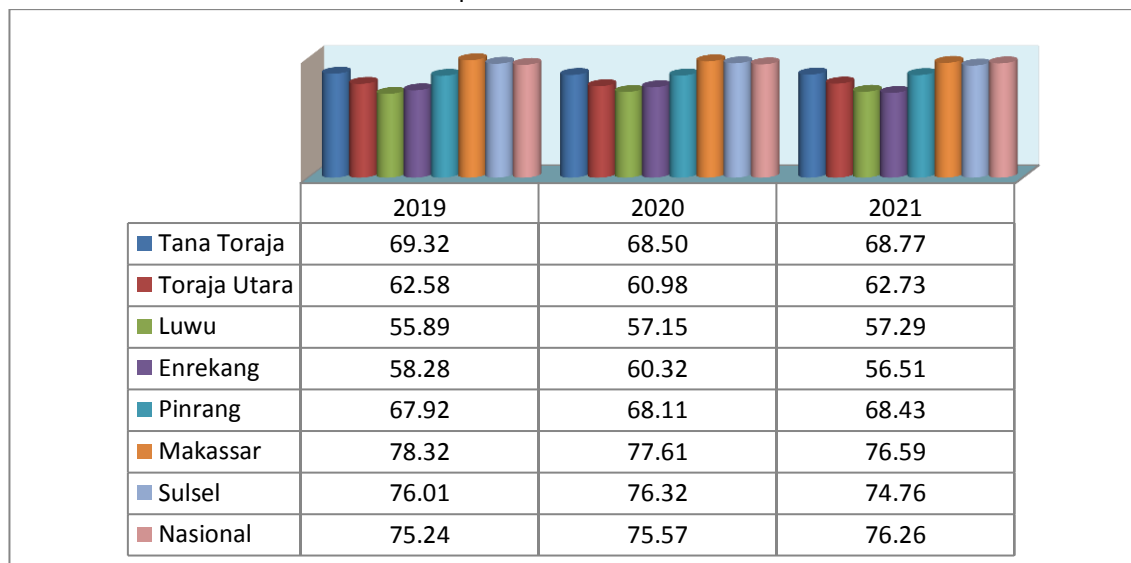
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Pada Tahun 2021, IDG Kabupaten Tana Toraja sebesar 68,77, berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 76,26 dan Nasional sebesar 74,76 serta berada di posisi ke-10 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Grafik 2.26

Perbandingan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2021



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2022

Komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021, dilihat dari perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu Tahun 2017 sebesar 20% dan Tahun 2021 turun menjadi 13,33%. Kondisi perempuan sebagai tenaga profesional mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2017 sebesar 55,58% meningkat menjadi 59,57 pada Tahun 2021 meskipun mengalami penurunan pada Tahun 2019 tetapi pada tahun-tahun setelahnya mengalami perkembangan yang positif.

Sedangkan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Tana Toraja terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu Tahun 2017 sebesar 40,55 %, Tahun 2018 sebesar 41,07 % dan Tahun 2019 sebesar 42,67 %, Tahun 2020 sebesar 43,00 % dan pada Tahun 2021 menjadi 43,48 %. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kabupaten Tana Toraja dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12

Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	20,00	20,00	22,22	13,33	13,33
2	Perempuan sebagai tenaga Profesional (%)	55,58	56,64	55,23	58,60	59,57



NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	40,55	41,07	42,67	43,00	43,48

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh pada semua jenjang pendidikan. Di dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* pendidikan mengambil peran penting dengan target Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan harus juga memperhatikan kualitas pendidik atau guru. Target SDGs lain dalam bidang pendidikan pada Tahun 2030, adalah secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas. Pencapaian tujuan tersebut bagi Kabupaten Tana Toraja harus diupayakan karena Kabupaten Tana Toraja merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan urusan pendidikan bagi kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan



lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan. Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut :

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2017 sampai Tahun 2021 cenderung meningkat. Pada Tahun 2017 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 74,28 % kemudian pada Tahun 2021 meningkat menjadi 112,00 % capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Apabila dibandingkan dengan target SDGs, maka capaian tersebut telah melampaui target SDGs 100% pada Tahun 2030.

Lembaga pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 cenderung meningkat. Pada Tahun 2017 lembaga PAUD sebanyak 196 lembaga dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 242 lembaga.

Kondisi pelayanan PAUD di Kabupaten Tana Toraja juga menunjukan peningkatan selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021. Kualitas pelayanan PAUD diukur melalui indikator Persentase PAUD terakreditasi. Pada Tahun 2017 – 2021 persentase PAUD terakreditasi menunjukkan tren positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga PAUD di Kabupaten Tana Toraja semakin baik. Capaian indikator PAUD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13

Capaian Indikator PAUD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	74,28	75,00	75,20	75,30	112,00
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga	196	196	203	217	242
3.	Prosentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	%	37,23	39	36,13	45,50	52,60

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, 2022



B. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. Perkembangan ketersediaan dapat dilihat dari indikator persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 perkembangan ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik cenderung meningkat. Pada tahun 2017 persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik sebesar 20,90 %; pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,00 %. Demikian juga persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik. Selama kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, perkembangan ruang kelas SMP dalam kondisi baik mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentase ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 22,26 % dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 83,00 %. Selain kondisi ruang kelas indikator lain dari ketersediaan adalah persentase kondisi perpustakaan dalam kondisi baik. SD dengan ruang perpustakaan dalam kondisi baik pada Tahun 2017 sebesar 14,2 % pada Tahun 2021 meningkat menjadi 55,0 %. Sedangkan untuk SMP juga mengalami peningkatan persentase ruang perpustakaan dalam kondisi baik pada Tahun 2017 sebesar 22,0 % meningkat menjadi 63,0 % pada Tahun 2021.

C. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.14
Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	74,28	75,00	75,20	75,30	112,00
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lmbg.	196	196	203	217	242
3.	Presentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	%	37,23	39	36,13	45,50	52,60
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	%	110,99	106,90	109,48	107,99	116,60
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	96,88	93,60	103,91	106,13	110,60
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SLDB/MI/Paket A	%	99,36	97,45	97,45	98,48	97,21
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	82,23	78,58	78,58	81,83	77,26
8.	Angka Putus Sekolah (APS) SD	%	0	1,83	0,50	0,30	0,38
9.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	%	0	1,27	0,20	0,10	0,11
10.	Angka Kelulusan dari SD/SLDB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	99,61	99,61	99,78	99,88	100,00
11.	Angka Kelulusan dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/MA	%	98,51	98,51	98,80	99,00	100,00
12.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SLDB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	101,3	101,3	101,4	101,4	100,0
13.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA	%	91,6	91,60	92,00	92,00	97,61
14.	Persentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	%	20,9	20,84	21,25	22,0,	73,00
15.	Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	%	22,26	25,12	40,03	41,00	83,00
16.	Persentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	14,2	18,2	40	49	55
17.	Persentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	22	23,2	47	57	63
18.	Rasio Guru/Siswa SD	Rasio	1:13	1:17	1:15	1:15	1:15
19.	Rasio Guru/Siswa SMP	Rasio	1:14	1:17	1:15	1:14	1:14
20.	Persentase Penduduk Usia > 15 Tahun Melek Huruf	%	93,70	95,80	98,80	99,00	97,89
21.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	%	95,93	95,93	97,55	97,8	97,89
22.	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	%	85,15	86,20	86,80	86,90	91,30



NO	INDIKATOR	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
23	Persentase Pendidik SD Memiliki Sertifikasi	%	50,70	51,63	52,62	52,78	29,70
24	Persentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	%	63,20	65,30	67,22	67,50	26,24

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja 2022

2.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan. UHH meningkat disebabkan oleh rendahnya angka kematian.

Urusan kesehatan memiliki sumbangan dalam meningkatnya UHH yaitu dengan menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian karena kesakitan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi. AKB Tahun 2017 sebesar 2,52 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) namun pada Tahun 2021 menjadi 0 per 1.000 KH. Angka ini dibandingkan dengan target nasional, telah melampaui target yang ditentukan yaitu 23 per 1.000 KH. Sedangkan kematian balita juga fluktuatif, dari Tahun 2017 AKBA sebesar 6,16 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami perbaikan pada Tahun 2021 menjadi 0 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu (AKI) dari Tahun 2017 – 2021 juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan. AKI Tahun 2017 sebesar 154 per 100.000 KH menurun Tahun 2021 menjadi 0 per 100.000 KH. Dibandingkan dengan target SDGs Tahun 2030 sudah melampaui target yang ditentukan yaitu 70 per 100.000 KH. Adany kasus kematian ibu disebabkan oleh kondisi dimana ibu tidak siap mengalami kelahiran yaitu mengalami 4 T (terlalu sering, terlalu banyak, terlalu muda dan terlalu tua) melahirkan. Penyebab langsung kematian ibu melahirkan seperti kasus pendarahan telah mengalami penurunan namun karena infeksi penyakit dan penyakit penyerta (jantung, hipertensi, kanker dll) mengalami peningkatan.



Tabel 2.15

Capaian AKB, AKBA dan AKI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	2,57	1,67	7,96	4,93	0
2	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	6,16	4,44	2,27	5,3	0
3	Angka Kematian Ibu	per 100000 KH	154	83	28	56	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2022

Status gizi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari kondisi gizi buruk dan balita stunting. Gizi buruk di Kabupaten Tana Toraja mengalami kenaikan dari Tahun 2017 sebesar 0,23 % menjadi 7,8 % pada Tahun 2021. Gizi buruk terjadi karena asupan makan yang tidak memenuhi kebutuhan pertumbuhan. Hal ini karena kemiskinan dan ketidakpahaman penduduk dalam menyiapkan makanan yang seimbang. Untuk balita stunting Tahun 2017 sebanyak 22,74 % menurun menjadi 21,10 % pada Tahun 2021.

Tabel 2.16

Status gizi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prevalensi balita gizi kurang	%	0,23	1,59	1,13	0,71	7,80
2	% Balita Stunting	%	22,74	22,59	36,22	7,56	21,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2022

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Tana Toraja telah tersedia di semua kecamatan. Dari sisi ketersediaan pelayanan kesehatan tidak menjadi permasalahan karena semua puskesmas telah diakreditasi yang berarti pelayanan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan standar, namun dari sisi ketersediaan tenaga medis di tiap puskesmas masih menjadi perhatian. Hal ini dapat dilihat % puskesmas yang memiliki tenaga sesuai dengan permenkes 43 Tahun 2019, pada Tahun 2021 hanya sebesar 31 % yang artinya baru 7 dari 21 puskesmas yang memiliki tenaga sesuai dengan permenkes 43 Tahun 2019.



Tabel 2.17
Kondisi Pelayanan Kesehatan Dasar kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017 - 2021

NO	INDIKATOR SESUAI KEWENANGAN	SAT.	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Puskesmas terhadap Penduduk	Rasio	1 : 11.025	1 : 11.087	1 : 11.143	1 : 11.143	1:16.253
2	Rasio jumlah tempat tidur Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio	1 : 764	1 : 659	1 : 663	1 : 663	1 : 674
3	% Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai permenkes 43 Tahun 2019	%	4,7	4,7	4,7	4,7	31,0
4	% apotek dan toko obat yang berijin	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2022

BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Diperoleh dari jumlah hari perawatan RSUD dibagi dengan hasil kali jumlah tempat tidur dan jumlah hari pada periode tahun tersebut, dikalikan 100%. Pencapaian BOR selama 5 tahun mengalami Fluktuasi dimana BOR tertinggi pada Tahun 2018 dan 2019 dan yang terendah Tahun 2021. BOR yang rendah diakibatkan karena bertambahnya Rumah Sakit di daerah Tana Toraja yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Peningkatan BOR yang melebihi dari standar nasional diakibatkan karena ketersediaan dokter ahli serta sarana dan prasarana yang memadai. BOR yang meningkat > 85% menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi, agar BOR menjadi ideal dilakukan dengan memperluas ruangan sehingga dapat menambah tempat tidur yang ada, sedangkan apabila BOR < 60% menunjukkan pemanfaatan tempat tidur yang rendah agar BOR menjadi ideal dilakukan dengan meningkatkan jenis pelayanan yang ada maupun menambah atau melakukan inovasi pelayanan agar meningkatkan jumlah kunjungan maupun pelayanan rawat inap sehingga BOR menjadi ideal.

ALOS (Average Length of Stay) yaitu rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu layanan. Batas ideal ALOS adalah 6-9 hari. Terjadinya penurunan ALOS setiap tahunnya dikarenakan banyak kasus yang ditangani rumah sakit seharusnya



dilayani fasilitas kesehatan tingkat 1 sehingga waktu rawat lebih cepat. Upaya yang dilakukan pihak manajemen agar pencapaian ALOS dalam rentang standar Kementerian Kesehatan RI dapat dilakukan dengan menambah jumlah tempat tidur, dan kesiagaan faskes tingkat 1 dalam penanganan kasus sederhana.

NDR (Net Death Rate) yaitu angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Dalam 5 Tahun ini NDR mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dan telah melebihi dari target nasional yaitu sebesar 25/1000. NDR mengalami peningkatan dikarenakan masyarakat/pasien mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan dengan kondisi kesehatan yang sudah kurang baik/berat. Dengan capaian NDR di atas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di RSUD Lakipadada perlu ditingkatkan sehingga angka kematian pasien yang dirawat di RSUD Lakipadada \geq dari 48 jam dapat diturunkan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur satu indikator melalui survey dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan pasien/masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pencapaian RSUD selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan adanya komitmen dari Pihak Manajemen RSUD Lakipadada dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan optimal sehingga mewujudkan Misi Kepala Daerah bidang kesehatan yaitu "Jangan Biarkan Rakyatku Sakit. Komitmen ini ditunjukkan dengan keberhasilan RSUD Lakipadada meraih Akreditasi dengan Lulus Tingkat Utama 4 Bintang Versi 2012 yang di keluarkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Tabel 2.18

Kondisi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SAT.	2017	2018	2019	2020	2021
1	BOR (Bed Occupancy Rate)	%	90.89	81.05	93.92	93.92	47,67
2	AVLOS (Average Length Of Stay)	Hari	4.6	4.21	4.05	4.05	4,59
3	NDR (Net Death Rate)	%	17.55	17.04	17.72	16.60	29,73
4	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	Nilai	76.33	80.5	95.5	90.0	83,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2022



Pelayanan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Tana Toraja belum sebagaimana target yang ditentukan. Berdasarkan data yang disediakan Dinas Kesehatan, hanya indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang telah mencapai 100%. Sedangkan berdasarkan penilaian indeks keluarga sehat Kabupaten Tana Toraja belum masuk kategori sehat. Pada Tahun 2021 Indeks Keluarga Sehat baru mencapai 0,516 meskipun telah meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Kategori keluarga sehat dibedakan menjadi 3 yaitu keluarga tidak sehat (0-0,5), keluarga prasehat (0,5-0,8) dan keluarga sehat (0,8-1).

Tabel 2.19

Kondisi Standar Pelayanan Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR SESUAI KEWENANGAN	SAT.	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	% Penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	%	83	89,1	100	100	100
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100	100	97
4	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	%	100	100	100	100	100
5	Pelayanan kesehatan balita;	%	100	100	100	100	80
6	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	%	100	100	100	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	%	100	100	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	%	100	100	100	100	50
9	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	%	100	100	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	%	100	100	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	%	100	100	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>).	%	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR SESUAI KEWENANGAN	SAT.	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
13	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	NA	NA	NA	0,228	0,516

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2022

Kualitas lingkungan Kabupaten Tana Toraja cukup baik, hal ini dapat dilihat dari semua kelurahan dan desa telah bebas dari buang air besar sembarangan, Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sampai dengan Tahun 2021 telah mencapai 70 %. Kelurahan/Desa ODF (*Open Defecation Free*) mencapai 23 % ditahun 2017 meningkat menjadi 100% pada Tahun 2021, Dan untuk indikator % Kelurahan/Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) telah mencapai 100% pada Tahun 2021.

Tabel 2.20

Kondisi Kualitas Lingkungan Sehat dan Industri Rumah Tangga
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR SESUAI KEWENANGAN	SAT.	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	% Kelurahan/Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	%	98	100	100	100	100
2	% Kelurahan/Desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	%	23	61	60	54	100
3	% Rumah ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	%	55,6	59,0	59,34	56,7	70

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2022

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 10 sub urusan meliputi Sumberdaya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang.

Pada sub urusan sumberdaya air menunjukkan, Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan dari 58,28 % Tahun 2017 menjadi 60,21 % Tahun 2020 kemudian Kembali mengalami penungkatan pada Tahun 2021 menjadi 77,41 %. Sementara itu Prosentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Tana Toraja mengalami perbaikan dari tahun ke



tahun dimana pada Tahun 2017 sebesar 28 % kemudian meningkat menjadi 35,20 % pada Tahun 2021. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2017 mencapai 49,85 % meningkat pada Tahun 2021 menjadi 67,72 %. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terus berupaya untuk merampungkan dokumen perencanaan di bidang infrastruktur, untuk dokumen RTRW seharusnya sudah direvisi karena ada beberapa data yang sudah tidak sesuai misalnya alih fungsi lahan, untuk dokumen RDTR belum ada, dan untuk Dokumen RTBL hanya kawasan Burake dan Pango-Pango yang mempunyai dokumen RTBL, kawasan yang lain belum ada dokumennya. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21

Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR KEWENANGAN	SAT.	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	58,28	58,95	60,10	60,21	77,41
2.	Prosentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	28	30	32	32	35,20
3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	473.540	378.470	158.950	711.150	914.840
4.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	1 : 263	1 : 228	1 : 229	1 : 230	1 : 228
5.	Panjang Jalan dilalui roda 4	Km	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
6.	Persentase kondisi mantap jalan	%	49.85	50.13	52.66	69.37	67.72
7.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	Km	473,540	378,470	158,950	711,150	914.840
8.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	37.82	30.23	12.70	56.80	73.07
9.	% Kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL	%	Belum ada data				
10.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	1.15	2.15	3.15	4.15	5.15
11.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar						

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tana Toraja 2022



2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan meliputi Perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kondisi rumah di Kabupaten Tana Toraja sudah relatif baik, pemerintah meningkatkan kualitas hunian melalui program peningkatan rumah tidak layak huni. Prosentase ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan peningkatan dari 84,98 % di Tahun 2017 menjadi 93,13 % di Tahun 2021.

Sementara itu untuk kawasan perumahan untuk kondisi kawasan kumuh menunjukkan perkembangan yang menurun, dimana persentase lingkungan permukiman kumuh Tahun 2017 sebesar 0,137 % menurun menjadi 0,101 % ditahun 2021. Sedangkan untuk rasio rumah layak huni mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar 0,170 meningkat menjadi 0,177% pada Tahun 2021. Perkembangan capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.22

Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SAT.	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,170	0,173	0,173	0,144	0,177
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	84,98	86,25	86,69	86,98	90,13
3	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0.137	0.132	0.126	0.101	0,101
4	Prosentase Rumah tinggal bersanitasi	%	88,47	93,13	98,03	90,04	90.13

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten Tana Toraja 2022

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, bencana dan kebakaran. Capaian indikator kinerja untuk masing-masing



sub urusan di Kabupaten Tana Toraja untuk ketenteraman dan perlindungan masyarakat dari 2 indikator yaitu Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan Cakupan penegakan Perda.

Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.23

Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017– 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Rasio	NA	0,43	0,43	0,43	0,43
2	Cakupan penegakan Perda	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Damkar; BPBD Kabupaten Tana Toraja 2021

2.3.1.6 Sosial

Indikator yang kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan urusan sosial adalah berjalannya penanganan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada Tahun 2017 0,084 % menjadi 34,50 % pada Tahun 2021. Sedangkan Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 100 %.

Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.24

Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	0.084	0.25	0.10	34,5	34,5
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	10.6	30.9	18.0	30.0	83.0
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Orang	56	56	56	80	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022



2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tenaga kerja juga ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen di Kabupaten Tana Toraja. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya.

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2017 sebesar 10 orang kemudian meningkat menjadi 20 orang pada Tahun 2021. Sedangkan Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 40 orang namun pada Tahun 2021 tidak ada Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan.



Tabel 2.25

Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	10	15	10	10	20
2	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan	Orang	40	40	40	40	0
3	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	20.40
4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	100	100	100	100	100
5	Prosentase penempatan transmigrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	87.50

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab Tana Toraja, 2022

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Indikator Agregat pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada pembahasan diatas terlihat bahwa IPG dan IDG Kabupaten Tana Toraja belum optimal. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan belum responsive gender. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mengawal perencanaan yang responsif gender hanya 12% yang aktif. Persentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif sebesar 20% pada Tahun 2017 turun menjadi 13,03% pada Tahun 2021.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diberikan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak-haknya. Rasio KDRT perempuan dan anak pada Tahun 2017 adalah 2 orang pada Tahun



2021 adalah 6 orang. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Puskesmas pada Tahun 2017 sebanyak 19 kasus meningkat pada Tahun 2021 sebesar 61 kasus, untuk Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Tahun 2017 sebesar 16 kasus ditingkatkan pada Tahun 2020 sebesar 19 kasus. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada Tahun 2017 sebanyak 4 kasus dan pada Tahun 2021 sebesar 7 kasus.

Tabel 2.26

Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	20.00	20.00	22.22	13,03	13,03
2	Rasio KDRT perempuan dan anak	Org	2	3	3	3	6
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Kasus	19	17	27	31	61
4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	16	17	21	19	N/A
5	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Kasus	4	15	4	23	7
6	Presentasi kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	%	12	12	12	12	12

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Tana Toraja, 2022

2.3.2.3 Pangan

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi



kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Tana Toraja untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi kebijakan pangan nasional.

Peningkatan pengembangan pangan yang perlu ditingkatkan adalah pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) bersifat fluktuatif yaitu Tahun 2017 sebesar 96,9% menurun pada Tahun 2018 sebesar 76,2% dan kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi sebesar 80,66 %. Hal ini dikarenakan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Tana Toraja masih tinggi dalam konsumsi karbohidrat terutama tingkat konsumsi beras, dan masih rendah dalam konsumsi umbi-umbian, protein hewani, sayur-sayuran serta buah-buahan.

Untuk pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pada Tahun 2017 kinerjanya sebesar 76,33 % menjadi sebesar 95,50 % pada Tahun 2021. Gambaran capaian kinerja peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan, sebagai berikut :

Tabel 2.27

Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg	113.33	95.78	64.33	56.17	89,5
2	Ketersediaan Energi	kcal/ kapita/hari (kalori)	105.49	100.42	100.07	98.79	100
3	Ketersediaan Protein	gram/ kapita/hari (Protein)	112.18	101.57	101.01	99.13	100,68
4	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	76.33	65	87.01	75.49	95,5
5	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	96.9	76.2	77.57	79.19	80,66
6	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rupiah	6.801	7.087	7.253	7.217	7.367

Sumber data : Dinas Katakanaan Pangan dan Perikanan Kab Tana Toraja, 2022

2.3.2.4 Pertanian

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi : a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten; b). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk



pembangunan oleh Pemerintah Daerah; c). penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten; d). penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; e). penerbitan izin membuka tanah dan f). perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah Negara, dan Penyelesaian izin lokasi.

Tabel 2.28

Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SAT.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	1.945.679 M2 (0.17 %)	5.296.319 M2 (0.46 %)	3.913.407 M2 (0.34 %)	3.590.159 M2 (0.31 %)	5.285.912 M2 (0.46 %)
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	1 (100%)	2 (100%)	2 (28.6%)	3 (100%)	Tidak terdapat kasus tanah Negara
3	Penyelesaian izin lokasi	%	-	2 (100%)	3 (100%)	-	Tidak terdapat penyelesaian izin lokasi

Sumber data : ATR/BPN Kab. Tana Toraja, 2022

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Kewenangan urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Hasil Pengukuran Indeks kualitas air di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 angkanya mencapai 65 dan pada Tahun 2021 turun jadi 62,73. begitupun dengan Indeks kualitas udara Tahun 2018 mencatat angka 86,38 dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 88,98.

Untuk Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti pada Tahun 2017 terdapat 6



pengaduan dan pada Tahun 2021 terdapat 9 pengaduan yang masuk Dinas Lingkungan Hidup. Untuk urusan sampah di Kabupaten Tana Toraja, persentase sampah yang tertangani pada Tahun 2017 sebesar 52,79 persen dan turun pada Tahun 2021 menjadi 18,91 persen. Dan untuk persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R pada Tahun 2017 kinerjanya sebesar 20 persen, kemudian meningkat menjadi 30 persen di Tahun 2021.

Permasalahan pokok dalam meningkatkan kinerja bidang urusan lingkungan hidup adalah belum adanya Dokumen RPPLH Kabupaten Tana Toraja di Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.29

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017–2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Terselenggaranya KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota	Ya/Tdk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
3	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	N/A	N/A	N/A	25	16.57
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas air	Indeks	N/A	65	55	55	62.73
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara;	Indeks	N/A	86.38	85.45	85.45	88.98
6	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	6	7	3	3	9
7	Cakupan Limbah B3 Fasil/Fasos/Usaha yang diawasi	%	N/A	N/A	N/A	17.86	15.00
8	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
9	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	20	25	28	28	30
10	Persentase sampah yang tertangani	%	52.79	32.57	35.08	33.33	18.91

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja, 2022



2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Capaian indikator kinerja untuk bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan untuk indikator kinerja rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada Tahun 2017 sebesar 86,4 % meningkat pada Tahun 2021 menjadi 86,6 %, Persentase bayi berakte kelahiran menunjukkan capaian 86 % pada Tahun 2017 dan meningkat menjadi 98 % pada Tahun 2021, Kabupaten Tana Toraja melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 telah menerapkan sistem KTP Nasional berbasis NIK. Sedangkan Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2017 mencapai 86,4 % meningkat pada Tahun 2021 menjadi 92.0 %. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.30

Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	persen	86,4	76,3	78,9	83,8	92
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	persen	86,4	76,3	78,9	83,8	86,6
4	Persentase bayi berakte kelahiran	persen	86	89	90	93	98
5	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	N/A	N/A	N/A	69	54
6	Persentase Anak 0-18 Tahun berakte kelahiran	%	N/A	N/A	N/A	79	81
7	Persentase pasangan berakte perkawinan	%	N/A	N/A	N/A	39	95
8	Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan	%	N/A	N/A	N/A	100	100



NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
9	Persentase lembaga yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public	%	N/A	N/A	N/A	100	100
10	Prosentase Penyajian Profil Kependudukan	%	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tana Toraja, 2022

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selama kurun waktu Tahun 2017–2021 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berswadaya mengalami peningkatan. Sejak Tahun 2017 seluruh Desa/Lembang di Kabupaten Tana Toraja telah memiliki BUMDes. Sementara itu, Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik mengalami peningkatan, pada Tahun 2017 sebanyak 70 Desa kemudian meningkat menjadi 83 Desa pada Tahun 2021. Selain itu, Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga mengalami peningkatan dari 47 % pada Tahun 2017 menjadi 52 % pada Tahun 2021.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Desa	70	83	83	83	83
2	Jumlah BUMDes yang telah terbentuk	BUMDES	112	112	112	112	112
3	Persentase Lembang yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	%	100	100	100	100	100
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	47	50	50	50	52
5	Persentase PKK aktif	%	60	65	70	75	75
6	Jumlah Posyandu aktif	Jumlah	336	336	448	448	448

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kab Tana Toraja, 2022



2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk adalah menjadi keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar. Pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran.

Pengendalian penduduk dilakukan dengan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah Peserta KB Baru pada Tahun 2017 mencapai 5.607 orang mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebanyak 4.610 orang, Jumlah Peserta KB Aktif pada Tahun 2017 adalah 24.547 orang meningkat menjadi 25.712 orang pada Tahun 2021.

Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria pada Tahun 2017 mencapai 805 orang meningkat pada Tahun 2021 sebanyak 830 orang. Jumlah Klinik KB yang ada di Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 tidak mengalami perubahan yakni sebanyak 26 unit.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2017 sebesar 68,04 % meningkat menjadi 68,44 pada Tahun 2021. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32

Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peserta KB Baru	Orang	5.607	4.375	3.307	2.706	4.610
2	Jumlah Peserta KB Aktif	Orang	24.547	25.327	25.346	26.435	25.712
3	Jumlah Kelompok Akseptor	Orang	87	87	87	87	87
4	Jumlah Klinik KB	Unit	26	26	26	26	26
5	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	Orang	805	828	782	750	830
6	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	68.04	N/A	68.14	65.92	68.44
7	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
8	Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitas pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab Tana Toraja, 2022

2.3.2.9 Perhubungan

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan, namun sub urusan yang ditangani hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkan penurunan dari 3.870.150 orang tahun 2017 menjadi 1.950.000 orang Tahun 2021. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum menurun dari 2,240 unit di tahun 2017 menjadi 1,191 unit di Tahun 2020, Tahun 2021 tidak dilaksanakan pengujian KIR akibat kerusakan alat pengujian. Untuk Jumlah Orang Melalui Terminal Pertahun menunjukkan peningkatan dari 2.465.210 orang pada Tahun 2017 menjadi 2.

540.000 orang di Tahun 2021. Dan untuk Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan dari 60% Tahun 2017 meningkat menjadi 72% Tahun 2021. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.33

Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	3,870,150	4,848,022	4,807,187	1,780,480	1.950.000
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Unit	2,240	2,091	1,955	1,191	-
4	Jumlah Orang Melalui Terminal Pertahun	Orang	2,465,210	2,628,622	2,480,450	1,560,320	2.540.000
5	Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	60	60	65	70	72

Sumber data : Dinas Perhubungan Kab Tana Toraja, 2022



2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika. Adapun capaian indikator kinerja untuk bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 - 2021 menunjukkan untuk Cakupan Layanan Telekomunikasi di Tahun 2021 mencapai 71,67 %, Proporsi rumah tangga dengan akses internet sebesar 6,37 %, Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika sebesar 63%. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen data, Buku "Kabupaten Dalam Angka" dan Buku "PDRB" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja dapat diakses di Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk menampilkan informasi mengenai potensi daerah, sosialisasi kebijakan/program yang diambil Pemerintah Daerah, forum interaktif antara pemerintah dan masyarakat, hal tersebut dapat diakses melalui website pemda Kabupaten Tana Toraja. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34

Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Keberadaan Website Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Unit	1	1	1	1	1
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	60.00	60.00	65.00	68.26	71.67
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	N/A	N/A	3.58	4.98	6.37
4	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	%	N/A	N/A	30.0	30.0	63.0
5	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah	%	N/A	N/A	13.0	13.0	29.0
6	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO	INDIKATOR	SAT.	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
8	Buku "PDRB"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	19	19	19	19	19
10	Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)	Skor	10	10	10	10	10

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Tana Toraja, 2022

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam. Lingkup kewenangan pada perijinan meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi: 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu



pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Tana Toraja sampai pada Tahun 2021 mencapai 52,00 %. Jika dilihat capaiannya menunjukkan peningkatan mencapai sebesar 0,85 % dibandingkan dengan Tahun 2020, namun jika dibandingkan dengan tahun 2017, mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana pada Tahun 2017 nilainya sebesar 95,93 %. Sementara itu Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada Tahun 2017 sebesar 15,73 % mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sebesar 52,00 %. Untuk Persentase koperasi yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen, ditahun 2017 sebesar 12,20 %, namun pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 8,22 %. Sementara untuk Untuk Persentase Tingkat Pertumbuhan UKM, ditahun 2017 mencapai 12,05 % kemudian pada Tahun 2021 turun menjadi 11,17 %. Kinerja urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Tana Toraja selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35

Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	%	95,93	93,64	89,53	51,15	52,00
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	15,73	9,81	7,32	3,18	52,00
3	Persentase koperasi yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen	%	12,2	8,1	10,4	10,3	8,22
4	Persentase tingkat pertumbuhan UKM	%	12,05	52,11	62,81	121,29	11,17
5	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi Izin usaha	%	N/A	N/A	N/A	0.6	0.9
6	Persentase Koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan	%	N/A	N/A	N/A	13.79	12.06
7	Prosentase koperasi yang memiliki kategori SEHAT	%	N/A	N/A	N/A	10.34	10.92
8	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi	%	N/A	N/A	N/A	8.62	7.47
9	Persentase Koperasi yang terfasilitasi untuk diberdayakan	%	N/A	N/A	N/A	10.34	10.91
10	Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan	%	N/A	N/A	N/A	0.97	1.16



NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
11	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	%	N/A	N/A	N/A	0.95	1.21

Sumber data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Tana Toraja, 2022

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan pemuda dan olah raga dapat dilihat dari Persentase organisasi pemuda yang aktif dimana capaiannya pada Tahun 2021 sebesar 19 %, Persentase wirausaha muda capaiannya pada Tahun 2021 sebesar 5 %, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi sebesar 30 % pada Tahun 2021, Cakupan pembinaan atlet muda capaiannya sebesar 107 % pada Tahun 2021 atau sudah melampaui target, kemudian Jumlah atlet berprestasi dan Jumlah prestasi olahraga pada Tahun 2021 tidak ada perubahan dibandingkan Tahun sebelumnya. Adapun capai untuk indikator tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.36

Capaian Pembangunan Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SAT.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	N/A	35	35	35	19



NO	INDIKATOR	SAT.	2017	2018	2019	2020	2021
2	Persentase wirausaha muda	%	N/A	20	25	25	5
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	N/A	45	45	45	30
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	N/A	76	78	78	107
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	N/A	88	88	88	88
7	Jumlah prestasi olahraga	Kali	N/A	2	3	3	3
8	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	%	N/A	76	78	40	10
9	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	N/A	N/A	N/A	0	0
10	Presentase Peningkatan SDM Kepramukaan	%	N/A	N/A	N/A	0	25

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3.2.13 Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha.

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistik khusus.

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun



masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan Indeks Harga Konsumen serta Inflasi dan Penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang memiliki tugas pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Untuk kebutuhan perencanaan Bappeda memiliki data profil pembangunan Kabupaten. Adapun capai untuk indikator tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017-2021

NO	INDIKTOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku Tana Toraja Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3.2.14 Persandian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan



Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi.

Saat ini Kabupaten Tana Toraja memiliki 1 (satu) orang personil yang kompeten dalam bidang persandian. Idealnya pada setiap PD mempunyai 1 (satu) orang yang kompeten dalam persandian, sehingga pengelolaan persandian di Kabupaten Tana Toraja bisa tertangani secara optimal.

Untuk Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi) pada Tahun 2016 sampai Tahun 2021 dinilai dengan cara mengisi format instrumen dari Badan Siber dan Sandi Negara, dari pengisian tersebut didapatkan nilai 10 (sepuluh) dimana nilai tersebut masih rendah.

Di Kabupaten Tana Toraja saat ini untuk Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah dilaksanakan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja. Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38

Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SAT.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)	skor	10	10	10	10	10
2	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3.2.15 Kebudayaan

Cagar budaya merupakan warisan budaya suatu bangsa, dengan menjaga dan melestarikannya kita bisa menjaga sejarah bangsa. Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut.

Kesenian dan kebudayaan dalam masyarakat juga harus kita jaga dan lestarikan. Seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa,



selain menjaga dan melestarikan kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan indikator Persentase budaya lokal yang dilestarikan, Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Cakupan cagar budaya yang dilestarikan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan 1 kali setiap tahun kecuali pada tahun 2020 tidak ada pelaksanaan Festival Seni dan Budaya diakibatkan adanya Pandemi Covid-19, Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi pada Tahun 2017 sebanyak 30 karya budaya Tahun 2018 sebanyak 40 karya budaya dan pada Tahun 2021 sebanyak 2 karya budaya. Untuk Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu sebanyak 15 Cagar Budaya pada Tahun 2021 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39

Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SAT.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg.	1	1	1	0	1
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	karya budaya	30	40	1	0	2
4	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	11	11	11	11	15
5	Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	N/A	N/A	N/A	0	11
6	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	N/A	N/A	N/A	26.16	30.84
7	Presentase sejarah lokal yang disusun/dibukukan	%	N/A	N/A	N/A	0	13.33
8	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	N/A	N/A	N/A	11.57	13.22
9	Prosentase pengelolaan museum	%	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2022



2.3.2.16 Perpustakaan

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 menunjukkan untuk indikator Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun pada Tahun 2017 sebanyak 2.082 orang meningkat pesat pada Tahun 2021 sebanyak 9.085 orang, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada Tahun 2017 sebanyak 12.311 exemplar meningkat pada Tahun 2021 sebanyak 12.930 exemplar. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan pada Tahun 2017 sebanyak 2.406 judul dan pada Tahun 2021 terjadi penambahan koleksi judul buku menjadi 2.649 judul. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.40

Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp	12.311	12.349	12.624	12.630	12.930
2	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	82	84	85	24	27
3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	2.028	2.082	2.096	732	9.085
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	2.406	2.444	2.493	2.499	2.649

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3.2.17 Kearsipan

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan. Capaian kinerja perpustakaan untuk indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada Tahun 2017 sebesar 77 % meningkat menjadi 90 % pada Tahun 2021. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini;



Tabel 2.41

Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	77	85	89	89	90

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup :

- sub urusan perikanan tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- sub urusan perikanan budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi perikanan darat seluas 3.675 Ha) dan potensi perikanan tangkap pada aliran sungai seluas 40 Ha. Kinerja produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan dari sebesar 420,0 ton pada Tahun 2017 menjadi 712,55 ton pada Tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem budidaya, pemerintah Kabupaten Tana Toraja melaksanakan pembinaan terhadap pembudidaya ikan dengan cakupan pada Tahun 2021 sebanyak 524 orang. Demikian pula dengan jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR) yang mengalami peningkatan dari Tahun 2017 hanya 20 unit menjadi 30 unit pada Tahun 2021. Produksi benih ikan juga mengalami peningkatan selama lima tahun. Pada Tahun 2017 produksi benih ikan hanya 810.000 ekor mengalami peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 850.000 ekor dan pada Tahun 2021 sebanyak 1.200.000 ekor benih. Dengan adanya peningkatan produksi benih ikan maupun ikan konsumsi berpengaruh positif terhadap konsumsi ikan yang selama lima tahun mengalami peningkatan dari 13,50 kg/kapita/tahun pada Tahun 2017 menjadi 15,40 kg/kapita/tahun pada Tahun 2021. Dengan meningkatnya jumlah produksi perikanan juga berpengaruh terhadap produksi produk hasil olahan perikanan, dimana pada Tahun 2017 hanya dapat



menghasilkan 2.950 kg menjadi 4.280 kg pada Tahun 2021. Secara rinci kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021 tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi perikanan	Ton	420	489,94	571,3	689,21	712,55
2	Konsumsi ikan	Kg /Kapita/ tahun	13,5	14,59	14,94	15	15,4
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Orang	515	517	517	519	524
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	14	20,17	17,16	18,9	20,60
6	Jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR)	Unit	20	25	30	30	30
7	Produksi Benih	Ekor	810.000	850.000	960.000	1.100.000	1.200.000
8	Produksi produk hasil olahan perikanan	Kg	2.950	3.520	3.800	4.030	4.280

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3.3.2 Pariwisata

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja, tak lepas dari meningkatnya jumlah obyek wisata unggulan dan jumlah objek wisata yang dibangun/dikembangkan. Jumlah objek wisata yang dibangun/dikembangkan dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 hanya ada 7 objek wisata namun pada Tahun 2020 objek wisata yang dibangun/dikembangkan meningkat menjadi 11 objek wisata, meskipun pada Tahun 2021 hanya ada 3 objek wisata yang dibangun/dikembangkan. Hal ini berpengaruh kepada lama kunjungan wisata yang semula hanya 2 hari pada Tahun 2017, meningkat menjadi 3 hari pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Jumlah objek wisata yang dibangun/dikembangkan juga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata pada Tahun 2017 sebanyak 1.199.102



orang meningkat pada Tahun 2018 menjadi 1.375.701. Namun sejak tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga Tahun 2021 dimana Tahun 2021 jumlah kunjungan wisata hanya 78.239 orang.

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja juga dipengaruhi oleh SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar. Dengan meningkatnya SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar, yang semula pada Tahun 2017 hanya 50 % meningkat menjadi 67 % pada Tahun 2021 juga berpengaruh terhadap peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Secara rinci kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021 tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kunjungan wisata	orang	1.199.102	1.375.701	1.041.347	94.577	78.293
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	2	2	2	3	3
3	Jumlah Obyek wisata unggulan	OW	15	15	15	15	12
4	Jumlah Obyek destinasi yang ibangun/ dikembangkan	OW	7	8	9	11	3
5	Persentase SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/ memenuhi standar kompetensi	%	50	50	63	63	67
6	Prosentase obyek wisata yang dipromosikan	%	64	66	66	66	80
7	PAD sektor pariwisata	Rp.	1.485.719.001	3.682.998.600	5.324.310.000	959.391.500	702.504.500

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3.3.3 Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan



Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Persentase lahan sawah untuk pertanian di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan angka peningkatan angka 5 % pada Tahun 2017 sampai Tahun 2021 meningkat menjadi 6 % pada Tahun 2021. Produksi tanaman pangan terlihat dari produksi padi, yang mengalami penurunan dari sebesar 203.642 ton pada Tahun 2017 menjadi 174.740 ton pada Tahun 2021, meskipun produktifitas padi meningkat dari 6,48 ton/ha pada Tahun 2017 menjadi 6,70 ton/ha pada Tahun 2021. Produksi Jagung fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 4.457,52 ton pada Tahun 2017 menjadi 620 ton pada Tahun 2021.

Produksi tanaman hortikultura terlihat dari Produksi Bawang merah, selama kurun waktu Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 sebanyak 7,2 ton meningkat menjadi 39,75 ton pada Tahun 2021. Demikian pula dengan produksi cabe, produksinya menurun dari 657 ton pada Tahun 2017 menjadi 264,4 ton pada Tahun 2021.

Sementara itu produksi perkebunan ditunjukkan dengan produksi kopi yang mengalami peningkatan dari angka 3.153 ton pada Tahun 2017 menjadi 4.482 ton pada Tahun 2021. Produksi cengkeh yang mengalami peningkatan dari 147 ton pada Tahun 2017 menjadi 194 ton pada Tahun 2021. Untuk tanaman kakao, capaian kinerjanya cenderung mengalami penurunan dari angka 1.364 ton pada Tahun 2017 menurun menjadi 1.334 ton pada Tahun 2021.

Pada bidang peternakan, populasi kerbau dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 populasi kerbau sebanyak 26.094 ekor dan meningkat pada Tahun 2018 menjadi 26.275 ekor, namun pada Tahun 2021 populasi kerbau menurun menjadi 25.391 ekor. Populasi babi dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 memperlihatkan angka peningkatan. Pada Tahun 2017 populasi ternak babi 298.971 ekor sampai Tahun 2021 populasi babi meningkat menjadi 342.457 ekor. Populasi ternak sapi potong di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dari angka 7.006 ekor pada tahun 2017 menjadi 2.250 ekor pada Tahun 2021. Populasi kambing juga mengalami peningkatan dari angka 9.387 ekor menjadi 12.273 ekor pada Tahun 2021. Produksi telur mengalami peningkatan dari 526.440 kg menjadi 681.281 kg pada Tahun



2021. Berkaitan dengan kesehatan hewan, angka morbiditas (kesakitan) hewan menunjukkan angka fluktuatif. Pada Tahun 2017 angka morbiditas kerbau sebanyak 7.828 ekor, kemudian berturut-turut pada tahun 2018 sampai Tahun 2021 sebanyak 7.883 ekor, 7.658 ekor, 7.714 ekor dan 8.126 ekor. Secara rinci kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021 tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi padi	Ton	203.642,10	232.030,35	209.330,72	181.663,00	174.740,00
2	Produksi Jagung	Ton	4.457,52	2.446,30	9.061	12.766	620
3	Produktifitas padi perhektar	Ton /ha	6,48	6,64	6,68	6,70	6,70
4	Persentase Lahan Sawah Untuk Pertanian	%	5	5	5	6	6
5	Produksi Bawang merah	Ton	7,2	250	165	37,5	39,75
6	Produksi Cabe	Ton	657	512	228	138	264,4
7	Produksi Kopi	Ton	3.153	3.171	3.219	3.948	4.482
8	Produksi Cengkeh	Ton	147	148	175	184	194
9	Produksi Kakao	Ton	1.364	1.348	1.304	1.288	1.334
10	Populasi Kerbau	Ekor	26.094	26.275	25.526	25.713	25.391
11	Populasi Babi	Ekor	298.971	306.156	314.940	339.824	342.457
12	Populasi Sapi potong	Ekor	7.006	7.129	7.179	7.361	7.250
13	Populasi Kambing	Ekor	9.387	10.644	11.603	12.164	12.273
14	Populasi Ayam ras pedaging	Ekor	8.900	9.946	9.990	10.246	10.446
15	Populasi Ayam ras petelur	Ekor	487	0	0	0	4.500
16	Produksi Daging sapi	Kg	51.235	48.754	53.717	42.769	58.096
17	Produksi Daging kambing	Kg	1.202	961	936	1.594	1.252
18	Produksi Daging ayam ras pedaging	Kg	82.588	72.146	78.656	37.729	135.708
19	Produksi telur	Kg	526.440	644.303	645.181	637.899	681.281
20	Angka morbiditas hewan						
	- Sapi	Ekor	2.102	2.139	2.154	2.208	1.302
	- Kerbau	Ekor	7.828	7.883	7.658	7.714	8.126
	- Kambing	Ekor	2.816	3.193	3.481	3.649	2.067
	- Babi	Ekor	89.691	91.847	94.482	101.947	132.362

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3.3.4 Perdagangan

Pada urusan perdagangan, pemerintah daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 5 kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan



pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standardisasi perlindungan konsumen. Kewenangan dalam perijinan dan pendaftaran perusahaan untuk saat ini belum tersedia data di Kabupaten Tana Toraja, lingkungnya ada di penanaman modal.

Pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yaitu pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Pelaksanaan kewenangan dalam standardisasi perlindungan konsumen dilaksanakan dengan melaksanakan kinerja capaian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 persentase UTP 33,33 %, pada Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 50,00 % Namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 menurun menjadi 12,49 % dan 11,10 %. Pelaksanaan kewenangan dalam stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dicapai dengan kinerja dengan indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah. Capaian kinerja indikator ini mengalami stagnasi mulai dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 pada angka 82,19 %. Namun untuk kinerja cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 berada pada angka 18,25 % namun pada Tahun 2020 cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang menurun menjadi 7,04 %. Pada Urusan Perdagangan, capaian indikator kinerja dari Tahun 2017 - 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase UTP yang ditera	%	33,33	50,00	12,49	11,10	12.40
2	Perkembangan nilai ekspor	%	- 53,49	89,06	- 18,18	- 8,90	N/A
3	Cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang	%	18,25	14,45	13,75	7,04	N/A
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	82,19	82,19	82,19	82,19	N/A

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, 2021



2.3.3.5 Perindustrian

Urusan perindustrian pada lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Kondisi industri kecil dan menengah yang berkembang di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 persentase industri kecil dan menengah yang berkembang sejumlah 53,65 % namun pada Tahun 2021 menjadi 65,75 %. Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT sempat mengalami peningkatan, yang semula pada Tahun 2017 sebesar 25,00 % meningkat menjadi 35,05 % pada Tahun 2018. Namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 7,63 % dan 3,33 %.

Pelaksanaan kewenangan dalam perencanaan pembangunan industri menunjukkan trend peningkatan positif. Capaian kinerja persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi pada Tahun 2017 sebesar 31,71 % dapat meningkat menjadi 83,53 % pada Tahun 2020. Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB juga mengalami peningkatan. Tahun 2017 berada pada angka 15,86 % meningkat menjadi 19,70 % pada Tahun 2019. Capaian kinerja pada urusan perindustrian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	16,03	13,41	8,20	15,27	N/A
2	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	53,65	19,60	33,17	65,75	N/A
3	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT	%	25,00	35,05	7,63	3,33	N/A
4	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	31,71	28,60	25,21	83,53	N/A
5	Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB	%	7,91	7,52	8,06	7,69	7,85

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, 2021



2.3.4 Urusan Pendukung Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat DPRD

Urusan pendukung pemerintahan salah satunya adalah Sekretariat DPRD. Capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat dari tersedianya rencana kinerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten Tana Toraja. Untuk capaian kinerja tersebut, dari awal RPJMD sampai akhir RPJMD semuanya tersedia rencana kinerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Demikian pula dengan kinerja indikator tersusunnya dan terintegrasinya program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 semua dokumen tersusun. Indikator terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD, capaiannya dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 semua terintegrasi. Secara rinci kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021 tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.47

Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak	Ada	ada	Ada	ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	ada	Ada
3	Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja, 2022



2.3.4.2 Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Indikator kinerja tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja, diantaranya yaitu dari peringkat dan status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun peringkat dan status kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48

Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017–2021

NO	URAIAN	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai SAKIP	Nilai	N/A	C	C	CC	CC

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja, 2022

2.3.5 Unsur Penunjang Pemerintahan

2.3.5.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib. Perencanaan Pembangunan memiliki kewenangan menyiapkan perencanaan kabupaten dalam hal ini RPJMD, dan RKPD. Berdasarkan hasil evaluasi, perencanaan Kabupaten Tana Toraja telah tersedia dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030. Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026. Untuk perencanaan tiap tahun telah tersedia dokumen perencanaan berupa RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen perencanaan RTRW ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031.



Untuk capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat dari persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian kinerja indikator ini dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu 100 %. Secara rinci kinerja Urusan Pengelolaan Perencanaan dan Kelitbangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021 tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.49

Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	100	100
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3.5.2 Keuangan

Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap APBD dari tahun 2017 sampai Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 persentase SILPA terhadap APBD yaitu 11 %, pada Tahun 2020 meningkat menjadi 13 %. Tahun 2021 tidak dilaksanakan perubahan anggaran.

Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, kinerja dapat terlihat dari indikator persentase belanja pendidikan (20%) dari APBD. Pada Tahun 2017, capaian kinerja sebanyak 86 % kemudian pada Tahun 2021 menjadi 18.61 % artinya belum mencapai target *mandatory spending* sebesar 20 %. Persentase belanja kesehatan (10%) juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 realisasi capaian kinerja persentase belanja kesehatan yaitu 93 % dan pada Tahun 2021 pada angka 12.53 % atau sudah memenuhi target *mandatory spending* bidang kesehatan sebesar 10%. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah belum berubah dalam kurun waktu Tahun 2017



sampai dengan Tahun 2021 yakni tetap pada Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk penetapan APBD dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tepat waktu menetapkan APBD. Secara rinci kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021 tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.50
Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	Persentase SILPA	%	100	100	100	51	-*
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	6	1	3	13	-*
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	86	79	81	41	18.61
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	93	82	91	46	12.53
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	92	89	87	45	-**
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	123	81	78	64	61.15
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Toraja, 2022

-* Tidak Ada Perubahan APBD TA. 2021

-** Tahun 2021 sudah tidak membagi belanja menjadi belanja langsung dan tidak langsung

2.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur penunjang yang mengelola ASN. Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepegawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pemberhentian ASN dan pensiun. Kinerja urusan penunjang kepegawaian adalah persentase pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang difasilitasi BKPSDM Kabupaten Tana Toraja pada tahun berjalan, persentase pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi



pemerintah dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada Tahun Tahun 2017 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 100 %. Namun pada Tahun 2018 sampai Tahun 2020 capaian kinerja 0%.

Capaian kinerja Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 sampai Tahun 2018, capaian pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 100 %. Namun pada Tahun 2019 capaian pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural menurun 78,75 %. Demikian pula pada Tahun 2020 capaian pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural menurun, hanya 6,26 %.

Capaian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun Pada Tahun 2017 jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah hanya berisi 17 jabatan. Pada Tahun 2018 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yaitu 25. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yaitu berturut-turut 30 dan 34 jabatan yang terisi.

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah pada Tahun 2017 sampai Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 sebesar 690. Pada Tahun 2018 jumlahnya turun menjadi 710, namun pada Tahun 2020 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah meningkat lagi menjadi 798.

Capaian jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 sebanyak 203 orang kemudian pada Tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah menjadi 444 orang. Meskipun tahun sebelumnya mengalami peningkatan, pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 436 orang dan 318 orang. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.51

Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	100%	0%	0%	0%	N/A
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	100%	100%	78,75%	6,25%	N/A
3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Org	17	25	30	34	N/A
4.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Org	690	739	710	798	N/A
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Org	203	444	436	318	N/A

Sumber : BKPSDM Kabupaten Tana Toraja, 2021

2.3.6 Unsur Pengawas

2.3.6.1 Inspektorat

Fungsi pengawasan internal pemerintahan memiliki peran yang penting dalam rangka mengendalikan dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Melalui pengawasan ini diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya yang hemat. Kinerja fungsi penunjang pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain Persentase tindak lanjut temuan, Persentase pelanggaran pegawai dan Jumlah temuan BPK.

Capaian tindak lanjut temuan dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017, tindak lanjut temuan yaitu 55 %. Untuk Tahun 2018 mengalami peningkatan pada angka 70 %. Namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, tindak lanjut temuan mengalami



penurunan masing-masing menjadi 40 % dan 33 %. Sedangkan pada Tahun 2021, persentase tindak lanjut temuan mengalami peningkatan menjadi 74 %.

Capaian persentase pelanggaran pegawai juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 pelanggaran pegawai sebanyak 2 kasus. Pada Tahun 2019 pelanggaran pegawai turun menjadi 1 kasus. Tahun 2020 dan Tahun 2021 terdapat 4 kasus pelanggaran pegawai.

Jumlah temuan BPK dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 temuan BPK sebanyak 98 temuan, pada Tahun 2018 turun menjadi 33 temuan. Pada Tahun 2019 jumlah temuan BPK kembali meningkat menjadi 73 temuan. Namun pada Tahun 2020 temuan BPK turun menjadi 42 temuan, sedangkan Tahun 2021 jumlah temuan BPK mengalami sedikit peningkatan menjadi 44 temuan. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52

Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	55	70	40	33	74
2	Persentase pelanggaran pegawai	Kasus	N/A	2	1	4	4
3	Jumlah temuan BPK	Temuan	98	33	73	42	44

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.3.7.1 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Unsur Pemerintahan Umum meliputi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Untuk unsur pemerintahan umum di Daerah, dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan



Masyarakat dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2017 sebesar 80 %, Tahun 2018 sebesar 70,6 % dan pada Tahun 2021 sebesar 80 %. Untuk capaian tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu/pilkada hanya diperoleh mulai Tahun 2018 sampai Tahun 2020. Pada Tahun 2018 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu/pilkada sebanyak 60 %, meningkat pada Tahun 2017 menjadi 82 %, dan pada Tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu/pilkada berada pada angka 80,65 %. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Pemerintahan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53

Kinerja Urusan Pemerintahan Umum
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SAT.	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	%	80	70,6	75	66,67	80
2	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan	%	80	70,6	75	66,67	80
3	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	%	N/A	60	82	80,65	N/A

Sumber : Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.4 Aspek Daya Saing Daerah.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Capaian Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Kondisi ini meningkat seiring dengan peningkatan PDRB perkapita, yang menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat terus mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen paling dominan dalam struktur PDRB Kabupaten Tana Toraja, sehingga perubahan pada konsumsi (naik-turun) secara langsung mempengaruhi perekonomian daerah. Jika dilihat lebih mikro, pengeluaran konsumsi rumah tangga



perkapita dalam setahun nilainya cenderung naik, tapi kenaikannya tidak begitu mencolok. Tahun 2017, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mencapai Rp 8.768.364, naik menjadi Rp 11.949.360 pada Tahun 2021. Meskipun pada Tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 8.910.168. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

ASPEK DAYA SAING DAERAH		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah/kapita/thn)	8.768.364	9.601.836	8.910.168	10.332.516	11.949.360

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi Pangan perkapita mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2017 senilai Rp. 5.173.308 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2018 menjadi Rp. 5.143.812, pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 5.775.924 dan Rp. 6.290.268. Demikian pula dengan pengeluaran konsumsi non pangan juga mengalami fluktuasi dimana Tahun 2017 sebesar Rp. 3.595.044, meningkat menjadi Rp. 4.458.024 pada tahun 2018 tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi Rp. 3.239.376. Tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 4.556.604 dan Rp. 5.629.092.

Jika melihat kondisi tahun 2020 maka kondisi Pandemi Covid-19 tidak begitu berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi makanan masyarakat dimana masyarakat tetap tidak menahan pengeluarannya dari segi makanan dan non makanan meskipun dari segi pendapatan mengalami penurunan pendapatan. Data selengkapnya terkait pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tabel berikut :

Tabel 2.55

Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita
Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

ASPEK DAYA SAING DAERAH		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran konsumsi Pangan perkapita	5.173.308	5.143.812	5.670.792	5.775.924	6.290.268



ASPEK DAYA SAING DAERAH		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
2.	Pengeluaran konsumsi non Pangan perkapita	3.595.044	4.458.024	3.239.376	4.556.604	5.629.092
3.	Persentase Pengeluaran konsumsi Pangan perkapita	59,00	53,57	63,64	55,90	52,77
4.	Persentase Pengeluaran konsumsi non Pangan perkapita	41,00	46,43	36,36	44,10	47,23

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.4.1.3 Net Ekspor Barang dan Jasa (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Capaian net ekspor barang dan jasa Kabupaten Tana Toraja selama kurun waktu lima tahun masih bernilai negatif meskipun semakin meningkat. Jika melihat kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi dengan capaian tahun 2021 yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan mulainya perbaikan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tana Toraja. Data terkait net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56

Net Ekspor Barang dan Jasa
Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

ASPEK DAYA SAING DAERAH		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah), (indikator keterbukaan ekonomi)	-684.772,05	-624.822,16	-793.063,58	-660.590,34	-574.044,66
2.	Net Ekspor Barang dan Jasa (%), (indikator keterbukaan ekonomi)	-11,31	-9,16	-10,6	-8,73	-7,10

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.4.1.4 Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menggambarkan komposisi penduduk. Indikator ini merupakan salah satu indikator demografi yang menggambarkan perbandingan antara banyaknya penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif dalam membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan usia tidak produktif begitupun sebaliknya. Tinggi rendahnya angka



ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30 (tiga puluh), angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Berdasarkan data BPS, Tahun 2017, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 67,47 orang. Tahun 2018 turun menjadi 66,98 orang. Tahun 2019 turun menjadi 66,57 orang, pada tahun 2020 kembali turun menjadi 66,25 orang dan pada tahun 2021 menjadi 44,96 orang. Meskipun angka beban ketergantungan Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2021 sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya tetapi masih termasuk kedalam golongan daerah dengan Angka Beban Ketergantungan Tinggi.

Tabel 2.57

Rasio Ketergantungan Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

ASPEK DAYA SAING DAERAH		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio ketergantungan	67,47	66,98	66,57	66,25	44,96
2.	Tingkat Ketergantungan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.4.1.5 Angka Kriminalitas

Kemampuan sebuah daerah bersaing dengan daerah lain untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah tak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tapi faktor sosial juga tidak kalah pentingnya. Salah satu indikator aspek sosial adalah kemampuan daerah menangani kriminalitas. Menangani kriminalitas merupakan syarat mutlak jika sebuah daerah ingin meningkatkan daya saing, sebab daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi membuat aktivitas sosial-ekonomi terganggu dan akhirnya mempengaruhi daya saing daerah.

Sebagian besar penanganan tindakan kriminal tidak berada dibawah kewenangan pemerintah daerah, tapi menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Meski begitu, kerjasama antara pemangku kepentingan, relevan dilaksanakan jika angka kriminalitas bisa ditangani dengan baik. Di Kabupaten Tana Toraja, angka kriminalitas yang tertangani terjadi fluktuasi. Pada Tahun 2017 tercatat sebesar 266 kasus kriminilitas yang tertangani dari 319 kasus atau sebesar 83.39%, Tahun 2018 sebanyak 390 kasus kriminilitas yang tertangani dari 411 kasus atau



sebesar 94.89%, Tahun 2020 sebanyak 353 kasus kriminalitas yang tertangani dari 383 kasus atau sebesar 92.169%, kemudian pada Tahun 2021 terdapat 187 angka kriminalitas yang tertangani dari 234 kasus atau sebesar 79.91%. Hal ini menjadi salah satu fokus permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Tana Toraja lima tahun kedepan, yang mana kondisi ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan nilai budi pekerti pada masyarakat Tana Toraja.

Tabel 2.58
Angka Kriminalitas di Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

ASPEK DAYA SAING DAERAH		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka kriminalitas	319	411	N/A	383	234
2.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	266	390	N/A	353	187
3.	Presentase Kriminalitas yang Tertangani (%)	83.39	94.89	N/A	92.16	79.91

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

2.4.2.1 Panjang Jalan

Kabupaten Tana Toraja memiliki luas wilayah 213.188,69 Ha dan terbagi ke dalam 19 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang pada tahun 2020 yaitu 1.180,3 km (jalan kewenangan Kabupaten Tana Toraja) (Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022). Dari jumlah tersebut panjang jalan pada tahun 2020 dengan permukaan aspal sepanjang 218,3 km, permukaan kerikil/tanah sepanjang 660,2 km permukaan tanah sepanjang 161,2 km dan lainnya sepanjang 140,6 km. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2020 sepanjang 667,15 km atau sekitar 56,52 %. (Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022).

2.4.2.2 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Tana Toraja merupakan wilayah yang strategis karena merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan merupakan daerah tujuan wisata. Terminal di wilayah Kabupaten Tana Toraja melayani transportasi baik dalam kota maupun keluar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada Tahun 2020 jumlah orang yang melalui terminal mengalami penurunan



dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni hanya sebanyak 1.560.320 orang, tetapi kembali meningkat pada tahun 2021 sebanyak 2.540.000. (sumber Dinas Perhubungan, 2022).

2.4.2.3 Luas Wilayah Kebanjiran

Sesuai Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030, ditetapkan kawasan rawan bencana banjir ditetapkan di Kecamatan Makale.

2.4.2.4 Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Sulawesi Selatan, ditentukan Kota Makale sebagai kawasan perkotaan.

Sesuai Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030, Pusat Kegiatan Lokal (eksisting) (PKLp) ditentukan kawasan perkotaan Bittuang yang potensial dikembangkan sebagai gerbang wisata penghubung kawasan wisata budaya di kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan kawasan wisata Tana Toraja; dan kawasan perkotaan sekitar Bandara baru Ge'tengan Kecamatan Mengkendek, yang potensial dikembangkan menjadi kota simpul transportasi udara.

2.4.2.5 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran/Rumah Makan

Jumlah restoran/Rumah Makan yang ada di Kabupaten Tana Toraja meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 jumlah rumah makan/restoran sebanyak 38 unit dan pada Tahun 2018 sampai Tahun 2021 berturut-turut 42 unit, 42 unit, 80 unit dan 84 unit. (Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022).

2.4.2.6 Pelayanan Air Bersih

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas PUPR, pada tahun 2019 baru mencapai 27,286 % kemudian Tahun 2020 menjadi 27,951 %



dan pada Tahun 2021, Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak meningkat menjadi 71,57 % dari seluruh penduduk di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini menjadi indikasi peningkatan pembangunan, karena indikator pengguna air bersih menjadi salah satu indikator kunci pembangunan. (Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tana Toraja, 2022).

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi. Kasus kriminal dapat dilihat pada jumlah narapidana. Pada Tahun 2017 jumlah narapidana hanya 56 orang, pada Tahun 2018 meningkat sebanyak 121 orang, pada Tahun 2019 sebanyak 155 orang dan narapidana pada Tahun 2020 yaitu 161 orang.

Jumlah narapidana yang paling menonjol pada Tahun 2019 yaitu pada kasus perlindungan anak sebanyak 14 kasus disusul pada kasus pencurian sebanyak 10 kasus, kemudian pada kasus penggunaan narkoba sebanyak 4 kasus.

2.4.3.2 Kemudahan Perizinan

Pelayanan perizinan di Kabupaten Tana Toraja saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan melalui SIMPEL (Sistem pelayanan Elektronik). Berikut ditampilkan secara rinci jenis perizinan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin

Tabel 2.59
Jenis Izin dan Lama Proses Pengurusannya

NO.	JENIS PERIZINAN	JANGKA WAKTU PELAYANAN
1.	Izin penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Puskesmas	2 hari
2.	Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB) selain rumah tinggal dengan luas sampai 100 m ²	7 hari
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 hari
4.	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	5 hari
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk usaha skala menengah dan besar; sekarang diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS)	Badan Usaha 5 Jam
6.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari



NO.	JENIS PERIZINAN	JANGKA WAKTU PELAYANAN
7.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1 hari
8.	Izin Usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan	5 hari
9.	Izin warung internet/computer	5 hari

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tana Toraja, 2022

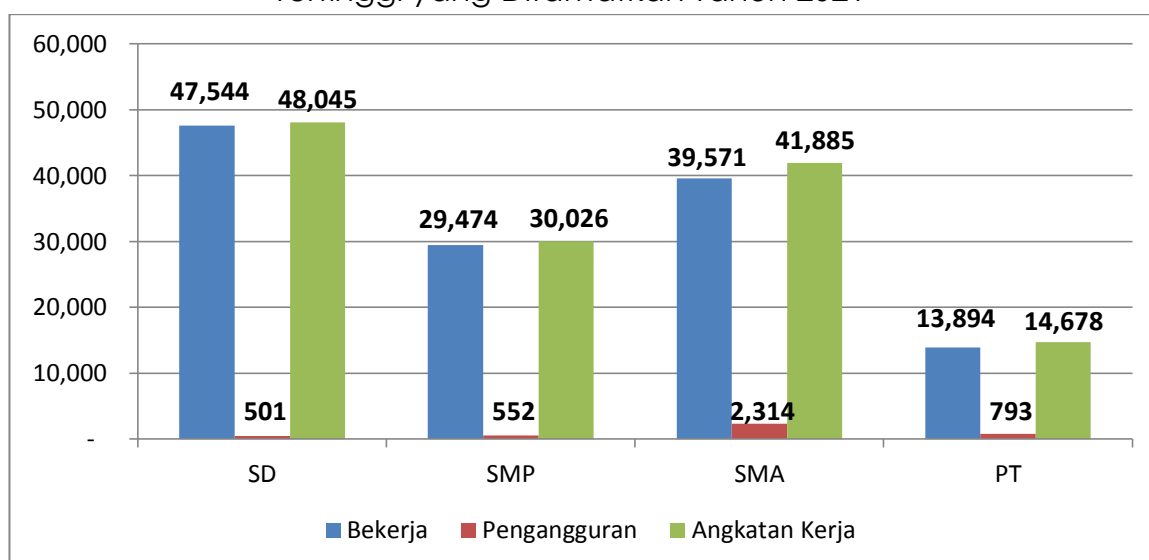
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

Grafik 2.27

Persentase Penduduk Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tana Toraja berpendidikan SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah kelompok lulusan SMA sederajat dan kelompok lulusan SMP dan terakhir adalah Perguruan Tinggi.

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

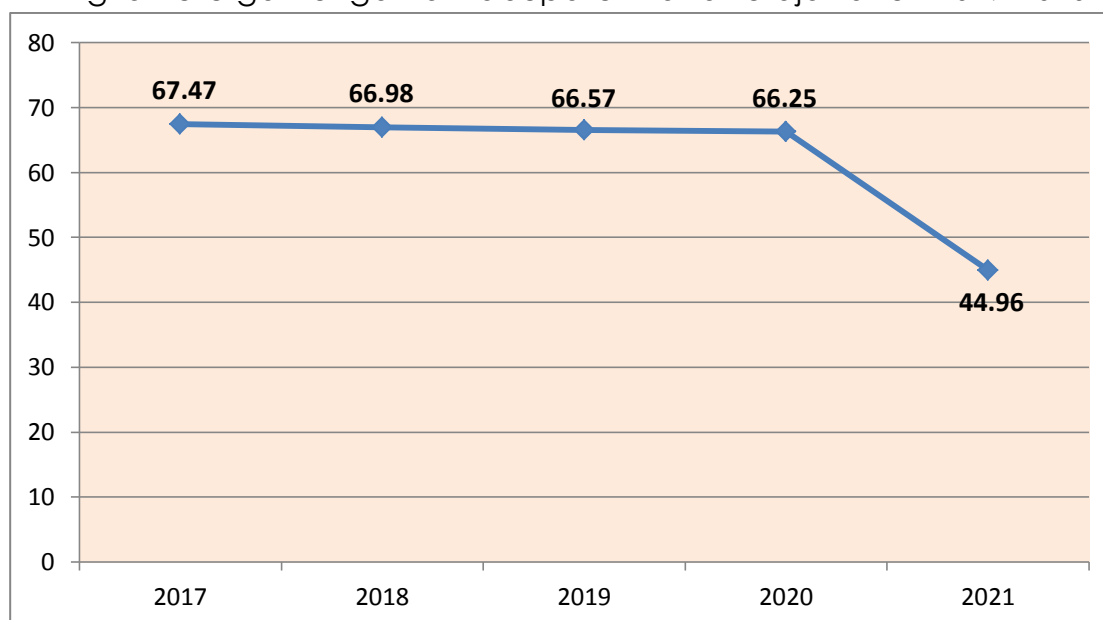
Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Tana Toraja dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 rasio ketergantungan penduduk Tana Toraja 67,47 %, pada Tahun 2018 turun menjadi 66,98 %, pada Tahun 2019 rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) turun lagi menjadi 66,57 %. Untuk Tahun 2020 rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan menjadi 66,25 %, sedangkan pada Tahun 2021 berada pada angka 44,96 %.



Dengan demikian pada Tahun 2021 dapat diketahui bahwa setiap 100 (seratus) orang usia produktif di Kabupaten Tana Toraja menanggung 44.96 orang usia non produktif, dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30 (tiga puluh), angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Ratio ketergantungan penduduk Kab. Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.28

Angka Ketergantungan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

2.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. RPJMD Perubahan Tana Toraja 2021-2026 menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 9 Indikator Tujuan dan 11 Indikator Sasaran yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Tana Toraja. Capaian IKU Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.60
Capaian IKU Bupati Tana Toraja Tahun 2020-2021

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
					Target	Capaian	Tingkat Capaian %
Tujuan 1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	CC (52)	CC (54)	C (46,84)	86.74
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan	Predikat SAKIP	Angka	CC (54)	CC (58)	CC (54.03)	93.16
		Opini BPK	Nilai	WDP	WDP	WDP	100.00
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	Persen	86.96	87.30	83.27	93.58
Tujuan 2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan	Indeks kesehatan	Angka	82	82.05	82.15	100.12
Sasaran 3	Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	73.30	73.80	73.40	99.48
Tujuan 3	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68.758	69.27	69.49	100.32
Sasaran 4	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan minat baca masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	65.87	65.95	66.82	101.32
Sasaran 5	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	68.50	68.95	68.77	99.74
Tujuan 4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0.28	1.50	5.19	346.00
		Tingkat Kemiskinan	Persen	12.10	12.10	10.29	117.59
		PDRB Perkapita	Juta Rp.	32.20	32.20	28.35	88.04
Sasaran 6	Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)	Persen	23.45	23.65	23.42	99.03
Tujuan 5	Perluasan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM, Koperasi, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, serta peningkatan iklim investasi yang kondusif	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2.60	2.60	3.10	83.87
Sasaran 7	Meningkatnya sektor UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	7.69	7.75	7.85	101.29



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
					Target	Capaian	Tingkat Capaian %
Tujuan 6	Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan revitalisasi kearifan adat-budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Persen	0.85	1.00	0.70	70.00
Sasaran 8	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata	Kunjungan Wisatawan	wisatawan	94.819	94.819	78.293	82.57
Tujuan 7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	N/A	66.26	75.85	114.47
Sasaran 9	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	Persen	50	50	16.57	33.14
Tujuan 8	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Secara Berkelanjutan	Gini Ratio	Angka	0.348	0.348	0.378	92.06
Sasaran 10	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	59.34	61.99	61.99	100.00
Tujuan 9	Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Toleran, Ramah, Berkualitas dengan Melibatkan seluruh Elemen Masyarakat dalam Bingkai Kebangsaan dan Kebhinekaan	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Angka	144	138	187	135.51
Sasaran 11	Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas Kehidupan berbangsa dan Bermasyarakat	Persentase Kasus Kriminalitas yang Tertangani	Persen	80	82	79.91	97.45



Tabel 2.61

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Tingkat Capaian s/d Tahun Berjalan (%)
Tujuan 1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	C (46,84)	BB (75)	62.45
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan	Predikat SAKIP	Angka	CC (54.03)	A (81)	65.48
		Opini BPK	Nilai	WDP	WTP	50.00
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	Persen	83.27	90.10	92.42
Tujuan 2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Indeks kesehatan	Angka	82.15	83	98.96
Sasaran 3	Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	73.40	75.50	97.21
Tujuan 3	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69.49	71.81	96.77
Sasaran 4	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan minat baca masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	66.82	67.00	99.73
Sasaran 5	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	68.77	78.32	87.81
Tujuan 4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.19	7.50	69.20
		Tingkat Kemiskinan	Persen	10.29	11.50	111.76
		PDRB Perkapita	Juta Rp.	28.35	37.00	76.62
Sasaran 6	Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)	Persen	23.42	26.30	89.05
Tujuan 5	Perluasan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM, Koperasi, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, serta peningkatan iklim investasi yang kondusif	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.10	1.80	58.06
Sasaran 7	Meningkatnya sektor UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	7.85	8.40	93.45



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Tingkat Capaian s/d Tahun Berjalan (%)
Tujuan 6	Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan revitalisasi kearifan adat-budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Persen	0.70	4.00	17.50
Sasaran 8	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata	Kunjungan Wisatawan	wisatawan	78.293	1.508.053	5.20
Tujuan 7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	75.85	68.95	110.01
Sasaran 9	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	Persen	16.57	100	16.57
Tujuan 8	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Secara Berkelanjutan	Gini Ratio	Angka	0.378	0.300	39.37
Sasaran 10	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	61.99	81.23	76.31
Tujuan 9	Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Toleran, Ramah, Berkualitas dengan Melibatkan seluruh Elemen Masyarakat dalam Bingkai Kebangsaan dan Kebhinekaan	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Angka	187	95	196.84
Sasaran 11	Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas Kehidupan berbangsa dan Bermasyarakat	Persentase Kasus Kriminalitas yang Tertangani	Persen	79.91	95	84.12



2.5.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah tahun 2017-2021 capaian indikator kinerja daerah (IKD) sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dijabarkan pada tabel berikut ini :



Tabel 2.62
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI							
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7.47	7.89	7.22	-0.28	5.19
2	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu orang	29.18	29.68	28.87	28.41	29.33
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12.62	12.75	12.34	10.12	10.29
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.60	3.07	2.74	2.60	3.10
5	Tingkat Angka Partisipasi Kerja	Persen	67.12	79.71	78.50	73.25	77.99
6	Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka	0.314	0.369	0.362	0.348	0.378
7	PDRB Perkapita	Juta Rp.	26.15	29.31	31.66	27.10	28.36
8	Laju Inflasi	Persen	3.95	4.19	2.24	1.21	2.08
KESEJAHTERAAN SOSIAL							
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	66.82	67.66	68.25	68.75	69.49
	• Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72.56	72.82	73.15	73.30	73.40
	• Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.25	13.50	13.58	13.80	13.86
	• Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.93	7.94	8.02	8.26	8.51
	• Pengeluaran Perkapita	Ribu/org/thn	6.801	7.087	7.253	7.217	7.434
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	87.18	87.86	88.18	87.97	88.46
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	73.99	74.14	69.32	68.50	68.77
ASPEK PELAYANAN UMUM							
PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
PENDIDIKAN							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	74,28	75,00	75,20	75,30	112,00



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga	196	196	203	217	242
3	Prosentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	Persen	37,23	39	36,13	45,50	52,60
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	Persen	110,99	106,90	109,48	107,99	116,60
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	Persen	96,88	93,60	103,91	106,13	110,60
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	Persen	99,36	97,45	97,45	98,48	97,21
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	Persen	82,23	78,58	78,58	81,83	77,26
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD	Persen	0	1,83	0,50	0,30	0,38
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Persen	0	1,27	0,20	0,10	0,11
10	Angka Kelulusan dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	Persen	99,61	99,61	99,78	99,88	100,00
11	Angka Kelulusan dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/MA	Persen	98,51	98,51	98,80	99,00	100,00
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	Persen	101,3	101,3	101,4	101,4	100,0
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA	Persen	91,6	91,60	92,00	92,00	97,61
14	Persentase Ruang Kelas SDKondisi Baik	Persen	20,9	20,84	21,25	22,0,	73,00
15	Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	Persen	22,26	25,12	40,03	41,00	83,00
16	Persentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	Persen	14,2	18,2	40	49	55
17	Persentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	Persen	22	23,2	47	57	63
18	Rasio Guru/Siswa SD	Rasio	1:13	1:17	1:15	1:15	1:15
19	Rasio Guru/Siswa SMP	Rasio	1:14	1:17	1:15	1:14	1:14
20	Persentase Penduduk Usia > 15 Tahun Melek Huruf	Persen	93,70	95,80	98,80	99,00	97,89
21	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	Persen	95,93	95,93	97,55	97,8	97,89
22	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	Persen	85,15	86,20	86,80	86,90	91,30
23	Persentase Pendidik SD Memiliki Sertifikasi	Persen	50,70	51,63	52,62	52,78	29,70
24	Persentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	Persen	63,20	65,30	67,22	67,50	26,24
KESEHATAN							
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	2,57	1,67	7,96	4,93	0



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	6,16	4,44	2,27	5,3	0
3	Angka Kematian Ibu	per 100000 KH	154	83	28	56	0
4	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	0,23	1,59	1,13	0,71	7,80
5	Persentase Balita Stunting	Persen	22,74	22,59	36,22	7,56	21,10
6	Rasio Puskesmas terhadap Penduduk	Rasio	1 : 11.025	1 : 11.087	1 : 11.143	1 : 11.143	1:16.253
7	Rasio jumlah tempat tidur Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio	1 : 764	1 : 659	1 : 663	1 : 663	1 : 674
8	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai permenkes 43 Tahun 2019	Persen	4,7	4,7	4,7	4,7	31,0
9	Persentase apotek dan toko obat yang berijin	Persen	100	100	100	100	100
10	BOR (Bed Occupancy Rate)	Persen	90.89	81.05	93.92	93.92	47.67
11	AVLOS (Average Length Of Stay)	Hari	4.6	4.21	4.05	4.05	4,59
12	NDR (Net Death Rate)	Persen	17.55	17.04	17.72	16.60	29,73
13	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	Nilai	76.33	80.5	95.5	90.0	83,27
14	Persentase Kelurahan/Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Persen	98	100	100	100	100
15	Persentase Kelurahan/Desa ODF (Open Defecation Free)	Persen	23	61	60	54	100
16	Persentase Rumah ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Persen	55,6	59,0	59,34	56,7	70
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Persen	58,28	58,95	60,10	60,21	77,41
2	Prosentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	28	30	32	32	35,20
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	473.540	378.470	158.950	711.150	914.840
4	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	1 : 263	1 : 228	1 : 229	1 : 230	1 : 228
5	Panjang Jalan dilalui roda empat	Km	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
6	Persentase kondisi mantap jalan	Persen	49.85	50.13	52.66	69.37	67.72
7	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	Km	473,540	378,470	158,950	711,150	914.840



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
8	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	37.82	30.23	12.70	56.80	73.07
9	% Kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL	Persen	Belum ada data				
10	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	1.15	2.15	3.15	4.15	5.15
11	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	1.15	2.15	3.15	4.15	5.15
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,170	0,173	0,173	0,144	0,177
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	84,98	86,25	86,69	86,98	90,13
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0.137	0.132	0.126	0.101	0,101
4	Prosentase Rumah tinggal bersanitasi	Persen	88,47	93,13	98,03	90,04	90.13
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Rasio	NA	0,43	0,43	0,43	0,43
2	Cakupan penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100
SOSIAL							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	0.084	0.25	0.10	34,5	34,5
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	0.106	0.309	0.180	0.030	0,83
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Orang	56	56	56	80	0
PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
TENAGA KERJA							
1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	10	15	10	10	20



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan	Orang	40	40	40	40	0
3	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	20.40
4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	Persen	100	100	100	100	100
5	Prosentase penempatan transmigrasi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	87.50
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	20.00	20.00	22.22	13,03	13,03
2	Rasio KDRT perempuan dan anak	Org	2	3	3	3	6
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Kasus	19	17	27	31	61
4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	16	17	21	19	
5	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Kasus	4	15	4	23	7
6	Presentasi kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	%	12	12	12	12	
PANGAN							
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg	113.33	95.78	64.33	56.17	89,5
2	Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari (kalori)	105.49	100.42	100.07	98.79	100
3	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari (Protein)	112.18	101.57	101.01	99.13	100,68
4	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	76.33	65	87.01	75.49	95,5
5	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	96.9	76.2	77.57	79.19	80,66
6	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rupiah	6.801	7.087	7.253	7.217	7.367



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
PERTANAHAN							
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	1.945.679 M2 (0.17 %)	5.296.319 M2 (0.46 %)	3.913.407 M2 (0.34 %)	3.590.159 M2 (0.31 %)	5.285.912 M2 (0.46 %)
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	1 (100%)	2 (100%)	2 (28.6%)	3 (100%)	Tidak terdapat kasus tanah Negara
3	Penyelesaian izin lokasi	Persen	N/A	2 (100%)	3 (100%)	N/A	Tidak terdapat penyelesaian izin lokasi
LINGKUNGAN HIDUP							
1	Terselenggaranya KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota	Ya/Tdk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	100	100	100	100
3	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)	Persen	N/A	N/A	N/A	25	16.57
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas air	Indeks	N/A	65	55	55	62.73
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara;	Indeks	N/A	86.38	85.45	85.45	88.98
6	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	6	7	3	3	9
7	Cakupan Limbah B3 Fasum/Fasos/Usaha yang diawasi	Persen	N/A	N/A	N/A	17.86	15.00
8	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
9	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	20	25	28	28	30
10	Persentase sampah yang tertangani	Persen	52.79	32.57	35.08	33.33	18.91
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	86,4	76,3	78,9	83,8	92
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	86,4	76,3	78,9	83,8	86,6
4	Persentase bayi berakte kelahiran	Persen	86	89	90	93	98



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
5	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	N/A	N/A	N/A	69	54
6	Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran	Persen	N/A	N/A	N/A	79	81
7	Persentase pasangan berakta perkawinan	Persen	N/A	N/A	N/A	39	95
8	Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
9	Persentase lembaga yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
10	Persentase Penyajian Profil Kependudukan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Desa	70	83	83	83	83
2	Jumlah BUMDes yang telah terbentuk	BUMDES	112	112	112	112	112
3	Persentase Lembang yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	Persen	100	100	100	100	100
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	47	50	50	50	52
5	Persentase PKK aktif	Persen	60	65	70	75	75
6	Jumlah Posyandu aktif	Jumlah	336	336	448	448	448
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Jumlah Peserta KB Baru	Orang	5.607	4.375	3.307	2.706	4.610
2	Jumlah Peserta KB Aktif	Orang	24.547	25.327	25.346	26.435	25.712
3	Jumlah Kelompok Akseptor	Orang	87	87	87	87	87
4	Jumlah Klinik KB	Unit	26	26	26	26	26
5	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	Orang	805	828	782	750	830
6	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	68.04	N/A	68.14	65.92	68.44
7	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
8	Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	100	100	100	100	100
PERHUBUNGAN							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	3,870,150	4,848,022	4,807,187	1,780,480	1.950.000
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Unit	2,240	2,091	1,955	1,191	-
4	Jumlah Orang Melalui Terminal Pertahun	Orang	2,465,210	2,628,622	2,480,450	1,560,320	2.540.000
5	Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	Persen	60	60	65	70	72
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Keberadaan Website Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Unit	1	1	1	1	1
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	60.00	60.00	65.00	68.26	71.67
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	N/A	N/A	3.58	4.98	6.37
4	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Persen	N/A	N/A	30.0	30.0	63.0
5	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah	Persen	N/A	N/A	13.0	13.0	29.0
6	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	19	19	19	19	19
10	Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)	Angka	10	10	10	10	10
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	Persen	95,93	93,64	89,53	51,15	52,00
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	15,73	9,81	7,32	3,18	52,00
3	Persentase koperasi yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen	Persen	12,2	8,1	10,4	10,3	8,22
4	Persentase tingkat pertumbuhan UKM	Persen	12,05	52,11	62,81	121,29	11,17
5	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi Izin usaha	Persen	N/A	N/A	N/A	0.6	0.9
6	Persentase Koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan	Persen	N/A	N/A	N/A	13.79	12.06
7	Prosentase koperasi yang memiliki kategori SEHAT	Persen	N/A	N/A	N/A	10.34	10.92
8	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi	Persen	N/A	N/A	N/A	8.62	7.47
9	Persentase Koperasi yang terfasilitasi untuk diberdayakan	Persen	N/A	N/A	N/A	10.34	10.91
10	Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan	Persen	N/A	N/A	N/A	0.97	1.16
11	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	Persen	N/A	N/A	N/A	0.95	1.21
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	N/A	35	35	35	19
2	Persentase wirausaha muda	Persen	N/A	20	25	25	5
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	N/A	45	45	45	30
5	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	N/A	76	78	78	107
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	N/A	88	88	88	88
7	Jumlah prestasi olahraga	Kali	N/A	2	3	3	3
8	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Persen	N/A	76	78	40	10
9	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	N/A	N/A	N/A	0	0
10	Presentase Peningkatan SDM Kepramukaan	Persen	N/A	N/A	N/A	0	25
STATISTIK							



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku Tana Toraja Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PERSANDIAN							
1	Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)	Angka	10	10	10	10	10
2	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KEBUDAYAAN							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg.	1	1	1	0	1
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya budaya	30	40	1	0	2
4	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	11	11	11	11	15
5	Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Persen	N/A	N/A	N/A	0	11
6	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Persen	N/A	N/A	N/A	26.16	30.84
7	Presentase sejarah lokal yang disusun/dibukukan	Persen	N/A	N/A	N/A	0	13.33
8	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	N/A	N/A	11.57	13.22
9	Presentase pengelolaan museum	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
PERPUSTAKAAN							
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp	12.311	12.349	12.624	12.630	12.930
2	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	82	84	85	24	27
3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	2.028	2.082	2.096	732	9.085
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	2.406	2.444	2.493	2.499	2.649
KEARSIPAN							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip	Persen	77	85	89	89	90



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	secara baku						
PELAYANAN URUSAN PILIHAN							
KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Produksi perikanan	Ton	420	489,94	571,3	689,21	712,55
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/ tahun	13,5	14,59	14,94	15	15,4
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Orang	515	517	517	519	524
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	14	20,17	17,16	18,9	20,60
6	Jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR)	Unit	20	25	30	30	30
7	Produksi Benih	Ekor	810.000	850.000	960.000	1.100.000	1.200.000
8	Produksi produk hasil olahan perikanan	Kg	2.950	3.520	3.800	4.030	4.280
PARIWISATA							
1	Kunjungan wisata	orang	1.199.102	1.375.701	1.041.347	94.577	78.293
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	2	2	2	3	3
3	Jumlah Obyek wisata unggulan	Objek Wisata	15	15	15	15	12
4	Jumlah Obyek destinasi yang ibangun/ dikembangkan	Objek Wisata	7	8	9	11	3
5	Persentase SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/ memenuhi standar kompetensi	Persen	50	50	63	63	67
6	Prosentase obyek wisata yang dipromosikan	Persen	64	66	66	66	80
7	PAD sektor pariwisata	Rupiah	1.485.719.001	3.682.998.600	5.324.310.000	959.391.500	702.504.500
PERTANIAN							
1	Produksi padi	Ton	203.642,10	232.030,35	209.330,72	181.663,00	174.740,00
2	Produksi Jagung	Ton	4.457,52	2.446,30	9.061	12.766	620
3	Produktifitas padi perhektar	Ton /ha	6,48	6,64	6,68	6,70	6,70
4	Persentase Lahan Sawah Untuk Pertanian	Persen	5	5	5	6	6



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
5	Produksi Bawang merah	Ton	7,2	250	165	37,5	39,75
6	Produksi Cabe	Ton	657	512	228	138	264,4
7	Produksi Kopi	Ton	3.153	3.171	3.219	3.948	4.482
8	Produksi Cengkeh	Ton	147	148	175	184	194
9	Produksi Kakao	Ton	1.364	1.348	1.304	1.288	1.334
10	Populasi Kerbau	Ekor	26.094	26.275	25.526	25.713	25.391
11	Populasi Babi	Ekor	298.971	306.156	314.940	339.824	342.457
12	Populasi Sapi potong	Ekor	7.006	7.129	7.179	7.361	7.250
13	Populasi Kambing	Ekor	9.387	10.644	11.603	12.164	12.273
14	Populasi Ayam ras pedaging	Ekor	8.900	9.946	9.990	10.246	10.446
15	Populasi Ayam ras petelur	Ekor	487	0	0	0	4.500
16	Produksi Daging sapi	Kg	51.235	48.754	53.717	42.769	58.096
17	Produksi Daging kambing	Kg	1.202	961	936	1.594	1.252
18	Produksi Daging ayam ras pedaging	Kg	82.588	72.146	78.656	37.729	135.708
19	Produksi telur	Kg	526.440	644.303	645.181	637.899	681.281
20	Angka morbiditas hewan						
	• Sapi	Ekor	2.102	2.139	2.154	2.208	1.302
	• Kerbau	Ekor	7.828	7.883	7.658	7.714	8.126
	• Kambing	Ekor	2.816	3.193	3.481	3.649	2.067
	• Babi	Ekor	89.691	91.847	94.482	101.947	132.362
PERDAGANGAN							
1	Persentase UTP yang ditera	Persen	33,33	50,00	12,49	11,10	
2	Perkembangan nilai ekspor	Persen	- 53,49	89,06	- 18,18	- 8,90	
3	Cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang	Persen	18,25	14,45	13,75	7,04	
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	Persen	82,19	82,19	82,19	82,19	



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
PERINDUSTRIAN							
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	16,03	13,41	8,20	15,27	
2	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	Persen	53,65	19,60	33,17	65,75	
3	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT	Persen	25,00	35,05	7,63	3,33	
4	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Persen	31,71	28,60	25,21	83,53	
5	Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB	Persen	15,86	18,06	19,70	N/A	
PENDUKUNG URUSAN							
SEKRETARIAT DPRD							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak	Ada	ada	Ada	ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	ada	Ada
3	Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	ada	Ada
SEKRETARIAT DAERAH							
1	Nilai SAKIP	Nilai	N/A	C	C	CC	CC
PENUNJANG URUSAN							
PERENCANAAN							
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KEUANGAN							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	Persentase SILPA	Persen	100	100	100	51	_*
3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	6	1	3	13	_*
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	86	79	81	41	18.61
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	93	82	91	46	12.53
6	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa	Persen	123	81	78	64	61.15
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	100	0	0	0	
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	Persen	100	100	78,75	6,25	
3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Org	17	25	30	34	
4.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Org	690	739	710	798	
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Org	203	444	436	318	
PENGAWASAN							
INSPEKTORAT							



NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	55	70	40	33	74
2	Persentase pelanggaran pegawai	Kasus	N/A	2	1	4	4
3	Jumlah temuan BPK	Temuan	98	33	73	42	44
PEMERINTAHAN UMUM							
KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	%	80	70,6	75	66,67	80
2	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan	%	80	70,6	75	66,67	80
3	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	%	N/A	60	82	80,65	N/A
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	rupiah/kapita/ tahun	8.768.364	9.601.836	8.910.168	10.332.516	11.949.360
	Pengeluaran konsumsi Pangan perkapita	Rupiah	5.173.308	5.143.812	5.670.792	5.775.924	6.290.268
	Pengeluaran konsumsi non Pangan perkapita	Rupiah	3.595.044	4.458.024	3.239.376	4.556.604	5.629.092
	Persentase Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-11,31	-9,16	-10,6	-8,73	-7,10
	Rasio ketergantungan	Angka	67,47	66,98	66,57	66,25	44,96
	Angka kriminilitas	Kasus	319	411	N/A	383	234
	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Kasus	266	390	N/A	353	187



2.5.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kab. Tana Toraja

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2020 dan tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2021

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
DINAS PENDIDIKAN				
1	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	85.19	91.61
2	Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	6.10
3	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	75.30	21.85
4	Presentase pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	0	50
5	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	86.90	97.89
6	Presentase pengendalian perizinan PAUD, pendidikan non formal dan pendidikan dasar yang terlayani	%	80	100
DINAS KESEHATAN				
1	Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100
2	Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100
3	Cakupan Pemberian PMT Balita	%	100	55
4	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	93.56
5	Persentase cakupan pelayanan Bayi dan Balita	%	100	94.67
6	Cakupan Puskesmas	%	110.53	110.53
7	Persentase Fasyankes yang Memiliki Tenaga Sesuai Permenkes 43 Tahun 2009	%	80	31



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
8	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas	%	100	40
9	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	%	100	78
10	Persentase Puskesmas melaksanakan upaya promkes, advokasi & pemberdayaan masyarakat	%	100	100
RSUD LAKIPADADA				
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	%	96.02	83.27
2	Prosentase Pencapaian SPM Rumah Sakit	%	92.24	94.64
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	60.21	77.41
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Air Minum curah Lintas Kabupaten/Kota	%	81.04	100
3	Persentase Sampah yang Tertangani	%	35.08	18.91
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota	%	50	100
5	Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	%	32	35.20
6	Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0.11	0.101
7	Persentase Bangunan Pemerintah yang tertata dengan Baik	%	90	90
8	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	1	1
9	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	69.37	67.72
10	Persentase ASN yang memperoleh Pelatihan Keterampilan Jasa Konstruksi	%	30	30
11	Jumlah penerbitan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah/lahan	Rekomendasi	38	105
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100
2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	90.04	90.13
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	86.69	90.13
4	Cakupan peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum pada kawasan kota penyangga	%	27.78	33.33
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten	%	100	100
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	%	100	100
2	Persentase warga negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
DINAS SOSIAL				
1	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	%	75	0
2	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	100	34.5
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100
4	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
1	Dokumen perencanaan Tenaga Kerja	Dok.	0	0
2	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	80.09	100
3	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	70.79	20.40
4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	100	100
5	Persentase lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	-	-
6	Prosentase penempatan transmigrasi	%	100	87.50
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	87.97	88.46
2	Prosentase Korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	50	61
3	Persentase kecamatan yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga	%	0	0
4	Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate	%	40	40
5	Persentase kecamatan yang memiliki forum anak	%	16	100
6	Prosentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	50	61
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
1	Persentase Kecamatan yang memiliki kelompok Pengelola Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	%	21	31.57
2	Cakupan Desa/Kelurahan yang menerapkan Rumah Pangan Lestari	%	17.61	24.50
3	Persentase Lembang/Kelurahan yang rawan pangan	%	26.42	17.0
4	Cakupan wilayah kecamatan pelaksanaan pengawasan	%	10.5	31.57
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.90	20
6	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	670.13	712
7	Jumlah produk perikanan yang dipasarkan	Ton	3.480	4,280
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	0	100
2	Indeks kualitas air	Nilai	NA	62.73
3	Indeks kualitas udara	Nilai	89.61	88.98



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
4	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	25	16.57
5	Cakupan Limbah B3 Fasum/Fasos/Usaha yang diawasi	%	17.86	15.00
6	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	%	25.81	14.86
7	Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA	%	0	4.76
8	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	%	14.28	14.28
9	Jumlah penerima penghargaan dibidang lingkungan hidup	Orang/ Lembaga	0	1
10	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100
11	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Melalui 3R	%	10.38	30
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Persentase Penduduk ber KTP-El per satuan penduduk	%	83	92
2	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	69	54
3	Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran	%	79	81
4	Persentase pasangan berakta perkawinan	%	39	95
5	Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan	%	100	100
6	Persentase lembaga yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public	%	100	100
7	Prosentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG				
1	Cakupan batas desa dan sarana prasarana desa yang baik	%	83	83
2	Presentase kawasan perdesaan yang dibangun pada kecamatan	%	0	0
3	Presentase Desa yang Memiliki RPJMdes, RKPdes, dan APBDes dan BUMDES	%	100	100
4	Persentase kelembagaan lembaga kemasyarakatan lembang/kelurahan yang difasilitasi dan dibina	%	50	50
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	100	100
2	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	65.92	68.44
3	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan	%	100	100
DINAS PERHUBUNGAN				
1	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	70	72
2	Jumlah Orang Melalui Terminal per Tahun	orang	1.560.320	2.540.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	65	70
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	%	30	63
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah	%	13	29
4	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	10	19
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi Izin usaha	%	0.6	0.9
2	Persentase Koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan	%	13.79	12.06
3	Prosentase koperasi yang memiliki kategori SEHAT	%	10.34	10.92
4	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi	%	8.62	7.47
5	Persentase Koperasi yang terfasilitasi untuk diberdayakan	%	10.34	10.91
6	Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan	%	0.97	1.16
7	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	%	0.95	1.21
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1	Persentase Potensi investasi yang dikelola	%	57.14	35.50
2	Persentase Realisasi Investasi PMDN/PMA	%	52	5
3	Persentase Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (Tepat Waktu)	%	94.44	99.44
4	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	%	100	100
5	Persentase jumlah data informasi pendukung penanaman modal yang tersedia	%	100	100
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	%	40	10
2	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	0	0
3	Presentase Peningkatan SDM Kepramukaan	%	0	25
DINAS KEBUDAYAAN				
1	Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	0	11
2	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	26.16	30.84
3	Presentase sejarah lokal yang disusun/dibukukan	%	0	13.33
4	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	11.57	13.22
5	Prosentase pengelolaan museum	%	100	100
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
1	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	1.69	2.65



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku	%	89	90
3	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
DINAS PARIWISATA				
1	Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan	%	63.15	63.16
2	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan	%	100	80
3	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual	produk	NA	0
4	Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata	%	78.57	100
DINAS PERTANIAN				
1	Produksi Padi (Ton)	ton	181.596	174.740
2	Produksi Jagung (Ton)	ton	12.924	620
3	Produksi Kopi (Ton)	ton	3.948	4.482
4	Produksi Kakao (Ton)	ton	1.288	1.334
5	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	Ton/Ha	4.7	6.70
6	Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	Ton/Ha	6.6	8.98
7	Produksi Daging Kerbau (Kg)	Kg	334.30	342.457
8	Produksi Daging Sapi (Kg)	Kg	42.769	58.096
9	Produksi Daging Babi (Kg)	Kg	749.379	1.123.205
10	Produksi Telur (Kg)	Kg	637.899	681.281
11	Persentase penggunaan benih padi bersertifikat	%	6.90	8.90
12	Jumlah Penggunaan Varietas Kopi Lokal Toraja bersertifikasi (Varietas)	Varietas	2	0
13	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (Unit)	%	6.67	50
14	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Unit)	Unit	25	23
15	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Unit)	Unit	20	3
16	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	%	11.57	19.93
17	Persentase penurunan serangan OPT	%	10-20	40
18	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	%	100	100
19	Persentase Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani/KEP	%	0.12	1.29
20	Persentase Ketersediaan Penyuluh terhadap Kelompok Tani/Ternak	%	2.50	4.54
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
1	Persentase perusahaan yang memiliki izin	%	25.56	27.67
2	Laju pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	Nilai	1.89	1.09
3	Cakupan penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok	%	68.42	68.42
4	Persentase UTP yang Di Tera	%	11.10	12.40
5	Persentase produk unggulan yang dipasarkan	%	44.44	44.44
6	Persentase kelompok industri yang terfasilitasi	%	23.53	23.53



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT DAERAH				
1	Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	100	100
2	Persentase kebijakan Pemerintahan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan sesuai rencana	%	100	100
3	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan sesuai rencana	%	100	100
SEKRETARIAT DPRD				
1	Prosentase PROLEGDA yang terealisasi	%	72	36.36
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	80	100
2	Prosentase konsistensi capaian program yang memenuhi target sesuai dokumen perencanaan	%	80	100
3	Cakupan kemanfaatan penelitian dan pengembangan	%	100	100
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
1	Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	%	100	50
2	Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	%	100	100
3	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Bersertifikat	%	40	42
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
1	Persentase Peningkatan PAD	%	-15.34	0.63
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Persentase ASN berkinerja baik	%	87.98	88.08
2	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural	%	42.82	80.02
3	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	%	30	35
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
INSPEKTORAT DAERAH				
1	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan BPK-RI	%	63	74
2	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Diakomodir menjadi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah	%	100	100
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN MAKALE				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	75	77
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	80	80



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	24	21
KECAMATAN MAKALE UTARA				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	80	81
2	Cakupan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100
KECAMATAN MAKALE SELATAN				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	80	85
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	50	55
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	12	10
KECAMATAN SANGALLA				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	80	85
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	80	80
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	5	4
KECAMATAN SANGALLA UTARA				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	80	81
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	2	2
KECAMATAN SANGALLA SELATAN				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	75	77
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	80	80
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	24	21
KECAMATAN MENGKENDEK				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	79.2	81
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	66.67	73.33
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	30	37



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	76	78
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	80	84
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	30	27
KECAMATAN SALUPUTTI				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	80	81
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	60	65
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	42	37
KECAMATAN REMBON				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	80	82
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	6	6
KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	70	74
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	70	70
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	N/A	15
KECAMATAN RANTETAYO				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	80	81
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	10	8
KECAMATAN KURRA				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	80	82
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	80	83.33
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	13	11



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
KECAMATAN BONGGAKARADENG				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	78	80
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	11	10
KECAMATAN RANO				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	88	90
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	78	80
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	15	12
KECAMATAN BITUANG				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	76	78
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	80	81
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	56	43
KECAMATAN MASANDA				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	70	70
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	70	70
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	14	8
KECAMATAN SIMBUANG				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	81	82
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	15	15
KECAMATAN MAPPAK				
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	80	81
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	10	8



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021
1	2	3	4	5
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS				
1	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	75	75
2	Capaian kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik	%	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	20	30
4	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang tepat sasaran	%	100	100
5	Cakupan Kegiatan Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	%	100	100
ASPEK DAYA SAING				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah/ kapita/ tahun	10.332.528	11.949.360
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rupiah/ kapita/ tahun	4.556.604	5.659.092
3	Net Eksport Barang dan Jasa (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	-8,77	-7.10
4	Angka kriminilitas yang tertangani	Angka	353	187
5	Rasio ketergantungan	Rasio	65,84	44.96

2.5.4 Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan program periode RPJMD Kabupaten Tana Toraja 2021-2026. Sejumlah 120 program penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang dilaksanakan tahun 2021 dengan jumlah indikator outcome 149 untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021. Berikut evaluasi terhadap capaian indikator kinerja program penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 pada tabel berikut ini :



Tabel 2.64

Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2021

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
DINAS PENDIDIKAN					
Program Pengelolaan Pendidikan					
1	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	91.61	Belum Tercapai
2	Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	6.10	Belum Tercapai
3	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	100	21.85	Belum Tercapai
Program Pengembangan Kurikulum					
4	Presentase pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	60	60	Tercapai
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
5	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	%	87.65	97.89	Melampaui
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan					
6	Presentase pengendalian perizinan PAUD, pendidikan non formal dan pendidikan dasar yang terlayani	%	85	100	Melampaui
DINAS KESEHATAN					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
7	Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	Tercapai
8	Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	Tercapai
9	Cakupan Pemberian PMT Balita	%	100	55	Belum Tercapai
10	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	93.56	Belum Tercapai
11	Persentase cakupan pelayanan Bayi dan Balita	%	100	94.67	Belum Tercapai
12	Cakupan Puskesmas	%	110.53	110.53	Tercapai



No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
13	Persentase Fasyankes yang Memiliki Tenaga Sesuai Permenkes 43 Tahun 2009	%	85	31	Belum Tercapai
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					
14	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas	%	100	40	Belum Tercapai
15	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	%	100	78	Belum Tercapai
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
16	Persentase Puskesmas melaksanakan upaya promkes, advokasi & pemberdayaan masyarakat	%	100	100	Tercapai
RSUD LAKIPADADA					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
17	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	%	100	83.27	Belum Tercapai
18	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit	%	96.32	94.64	Belum Tercapai
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					
19	Persentase Sampah yang Tertangani	%	36.09	18.91	Belum Tercapai
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
20	Persentase warga Negara yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab./Kota	%	52	100	Melampaui
Program Penyelenggaraan Jalan					
21	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	70.32	67.72	Belum Tercapai
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					
22	Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	%	35.20	35.50	Melampaui
Program Pengembangan Permukiman					
23	Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0.10	0.101	Tercapai
Program Penataan Bangunan Gedung					
24	Persentase Bangunan Pemerintah yang tertata dengan Baik	%	90	90	Tercapai
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya					
25	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	-	-	Sesuai
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
26	Jumlah penerbitan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah/lahan	Rek.	50	105	Melampaui
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
27	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	61.51	77.41	Melampaui



No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
28	Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan air minum curah Lintas Kabupaten/Kota	%	82.01	100	Melampaui
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					
29	Cakupan peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum pada kawasan kota penyangga	%	27.88	-	Belum Tercapai
Program Kawasan Permukiman					
30	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	90.05	90.13	Melampaui
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					
31	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	86.69	90.13	Melampaui
Program Pengembangan Perumahan					
32	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	Tercapai
KANTOR SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN					
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
33	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	Tercapai
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
34	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten	%	100	100	Tercapai
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA					
Program Penanggulangan Bencana					
35	Prosentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	Tercapai
36	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	Tercapai
DINAS SOSIAL					
Program Pemberdayaan Sosial					
37	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	%	100	34.5	Belum Tercapai
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
38	Presentase Warga Negara Korban Bencana Kab./Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	83.0	Belum Tercapai



No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
Program Penanganan Bencana					
39	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	Tercapai
Program Rehabilitasi Sosial					
40	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	100	100	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					
41	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	73.33	100	Melampaui
Program Penempatan Tenaga Kerja					
42	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	70.79	20.40	Belum Tercapai
Program Hubungan Industrial					
43	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	100	100	Tercapai
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					
44	Prosentase penempatan transmigrasi	%	100	87.50	Belum Tercapai
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
45	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	88.05	88.46	Tercapai
Program Perlindungan Perempuan					
46	Prosentase Korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	50	61	Melampaui
Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
47	Persentase kecamatan yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga	%	0	0	Sesuai
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					
48	Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate	%	40	40	Tercapai
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
49	Persentase kecamatan yang memiliki forum anak	%	80	100	Melampaui
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					
50	Persentase kecamatan yang memiliki kelompok Pengelola Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	%	26	31.57	Melampaui
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
51	Cakupan Desa/ Kelurahan yang menerapkan Rumah Pangan Lestari	%	22.01	24.50	Melampaui



No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
Program Pengawasan Keamanan Pangan					
52	Cakupan Wilayah Kecamatan pelaksanaan pengawasan	%	21	31.57	Melampaui
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
53	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	684	712	Melampaui
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
54	Jumlah produk perikanan yang dipasarkan	ton	3.520	4.280	Melampaui
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					
55	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	23	20	Belum Tercapai
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
56	Indeks Kualitas Air	Angka	52.60	62.73	Melampaui
57	Indeks Kualitas Udara	Angka	86.87	88.98	Melampaui
Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
58	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	0	100	Melampaui
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					
59	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)	%	25	16.57	Belum Tercapai
Program Pengelolaan Persampahan					
60	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Melalui 3R	%	10.35	30	Melampaui
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					
61	Cakupan Limbah B3 Fasus/Fasos/Usaha yang diawasi	%	17.86	15.00	Belum Tercapai
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
62	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	%	25.81	14.86	Belum Tercapai
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH					
63	Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA	%	0	4.76	Melampaui
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
64	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	%	14.25	14.28	Tercapai
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
65	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	Tercapai
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Program Pencatatan Sipil					
66	Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran	%	81	81.00	Tercapai
67	Persentase pasangan berakta perkawinan	%	40	95	Melampaui



No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
68	Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan	%	100	100	Tercapai
69	Persentase lembaga yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public	%	100	100	Tercapai
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG					
Program Administrasi Pemerintahan Desa					
70	Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, dan APBDes dan BUMDES	%	100	100	Tercapai
Program Peningkatan Kerjasama Desa					
71	Persentase kawasan perdesaan yang dibangun pada kecamatan	%	0	0	Sesuai
Program Penataan Desa					
72	Cakupan Desa dan Sarana Prasarana Desa Yang Baik	%	83	83	Tercapai
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					
73	Persentase kelembagaan lembaga kemasyarakatan lembang/kelurahan yang difasilitasi dan dibina	%	50	50	Tercapai
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
Program Pengendalian Penduduk					
74	Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	100	100	Tercapai
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					
75	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	67.54	68.44	Melampaui
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
76	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan	%	100	100	Tercapai
DINAS PERHUBUNGAN					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
77	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	74	72	Tercapai
78	Jumlah Orang Melalui Terminal per Tahun	orang	1.654.790	2.540.000	Melampaui
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					
79	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	%	63	63	Tercapai
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					



No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
80	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	70	70	Tercapai
DINAS KOPERASI DAN UKM					
Program Pengembangan UMKM					
81	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	%	1.21	0.9	Belum Tercapai
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					
82	Persentase Koperasi yang terfasilitasi untuk diberdayakan	%	11.49	10.91	Belum Tercapai
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					
83	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi Izin usaha	%	0.70	0.90	Melampaui
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					
84	Persentase Koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan	%	12.07	12.07	Tercapai
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					
85	Prosentase koperasi yang memiliki kategori SEHAT	%	11.49	10.92	Belum Tercapai
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					
86	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi	%	8.62	7.47	Belum Tercapai
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					
87	Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan	%	0.97	1.16	Melampaui
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP					
Program Pelayanan Penanaman Modal					
88	Persentase Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (Tepat Waktu)	%	94.55	99.44	Melampaui
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
89	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	%	100	100	Tercapai
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
90	Persentase Potensi Investasi yang dikelola	%	66.67	35.50	Belum Tercapai
Program Promosi Penanaman Modal					
91	Persentase Realisasi Investasi PMDN/PMA	%	5	5	Tercapai
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
92	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	45	0	Belum Tercapai
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
93	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	%	50	10	Belum Tercapai
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					
94	Presentase Peningkatan SDM Kepramukaan	%	50	25	Belum Tercapai
DINAS KEBUDAYAAN					
Program Pengembangan Kebudayaan					



No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
95	Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	11.11	11.00	Tercapai
Program Pembinaan Sejarah					
96	Presentase sejarah lokal yang disusun/dibukukan	%	13.33	13.33	Tercapai
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya					
97	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	13.22	13.22	Tercapai
Program Pengembangan Kesenian Tradisional					
98	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	30.84	30.84	Tercapai
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
Program Pembinaan Perpustakaan					
99	Persentase peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	2.65	2.65	Tercapai
Program Pengelolaan Arsip					
100	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	90	90	Tercapai
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					
101	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	100	100	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
DINAS PARIWISATA					
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					
102	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual	Produk	0	0	Sesuai
Program Pemasaran Pariwisata					
103	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan	%	100	80	Belum Tercapai
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
104	Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan	%	63.15	63.16	Tercapai
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
105	Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata	%	100	100	Tercapai
DINAS PERTANIAN					
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					
106	Produksi Padi	ton	182.504	174.740	Belum Tercapai
107	Produksi Jagung	ton	13,053	620	Belum Tercapai
108	Produksi Kopi	ton	4,027	4.482	Melampaui
109	Produksi Kakao	ton	1,314	1.334	Melampaui
110	Produktivitas Padi	Ton/ha	4.9	6.70	Melampaui
111	Produktivitas Jagung	Ton/ha	6.8	8.98	Melampaui
112	Produksi Daging Kerbau	Kg	344,224	342.457	Belum Tercapai
113	Produksi Daging Sapi	Kg	45,688	58.096	Melampaui
114	Produksi Daging Babi	Kg	778,103	1.123.205	Melampaui
115	Produksi Telur	Kg	671,784	681.281	Melampaui



No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
116	Persentase penggunaan benih padi bersertifikat	%	6.90	8.90	Melampaui
117	Jumlah Penggunaan Varietas Kopi Lokal Toraya Bersertifikasi	Varietas	2	0	Belum Tercapai
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
118	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	%	8.33	50	Melampaui
119	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	unit	39	23	Belum Tercapai
120	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	unit	8	3	Belum Tercapai
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
121	Persentase penurunan serangan OPT	%	20-30	40	Melampaui
Program Perizinan Usaha Pertanian					
122	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	%	100	100	Tercapai
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					
123	Persentase Penurunan kasus penyakit hewan menular	%	12.76	19.93	Melampaui
Program Penyuluhan Pertanian					
124	Persentase ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama petani/KEP	%	0.13	1.29	Melampaui
125	Persentase ketersediaan penyuluh terhadap kelompok tani/ternak	%	2.60	4.54	Melampaui
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
126	Laju pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	%	1.09	1.09	Tercapai
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					
127	Persentase UTP yang Di Tera	%	12.40	12.40	Tercapai
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					
128	Cakupan penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok	%	68.42	68.42	Tercapai
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					
129	Persentase produk unggulan yang dipasarkan	%	44.44	44.44	Tercapai
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					
130	Persentase kelompok industri yang terfasilitas	%	23.52	23.53	Tercapai
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					
131	Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin	%	27.67	27.67	Tercapai
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
132	Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	100	100	Tercapai



No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
133	Persentase kebijakan Pemerintahan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan sesuai rencana	%	100	100	Tercapai
Program Perekonomian dan Pembangunan					
134	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan sesuai rencana	%	100	100	Tercapai
SEKRETARIAT DAERAH					
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					
	Prosentase PROLEGDA yang terealisasi	%	100	36.36	Belum Tercapai
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
135	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	Tercapai
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					
136	Cakupan kemanfaatan penelitian dan pengembangan	%	100	100	Tercapai
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAAERAH					
Program Pengelolaan Keuangan					
137	Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	%	100	50	Belum Tercapai
138	Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	%	100	100	Tercapai
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
139	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Bersertifikat	%	45	42	Tercapai
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					
140	Persentase Peningkatan PAD	%	3.26	0.63	Belum Tercapai
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					
141	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Teknis, manajerial, sosial kultur)	%	35	35	Tercapai
Program Kepegawaian Daerah					
142	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	%	67.04	80.02	Melampaui
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
Program Penyelenggaraan Pengawasan					
143	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan BPK-RI	%	65	74	Melampaui



No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					
144	Perentase Kebijakan Pengawasan yang diakomodir menjadi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah	%	100	100	Tercapai
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS					
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
145	Capaian kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik	%	100	100	Tercapai
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
146	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	75	75	Tercapai
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					
147	Cakupan Kegiatan Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	%	100	100	Tercapai
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					
148	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang tepat sasaran	%	100	100	Tercapai
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat					
149	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	%	30	30	Tercapai

Sesuai dengan Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 dari 149 total indikator terdapat 35 indikator melampaui dari target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 74 indikator yang telah sesuai dengan target, sedangkan 40 indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Banyaknya indikator yang belum tercapai disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran terkait penanganan covid-19 sehingga telah mengganggu perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

2.5.5 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Tana Toraja diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing 6 (enam) bidang urusan dan jenis pelayanan pada RKPD Kabupaten Tana Toraja. Adapun indikator SPM



untuk tahun 2021 dari 29 indikator, terdapat 16 indikator yang telah tercapai dan 13 indikator yang belum tercapai.

Tabel 2.65
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional Tahun 2021	Capaian SPM 2021	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
PENDIDIKAN			
Pendidikan Dasar			
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	91.61 %	Belum Tercapai
Pendidikan Kesetaraan			
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	6.10 %	Belum Tercapai
Pendidikan Anak Usia Dini			
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	21.85 %	Belum Tercapai
KESEHATAN			
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	93.56 %	Belum Tercapai
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	89.4 %	Belum Tercapai
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Persentase Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	94.38 %	Belum Tercapai
Pelayanan Kesehatan Balita			
Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	50.21 %	Belum Tercapai
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	97 %	Belum Tercapai
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	11 %	Belum Tercapai
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	87 %	Belum Tercapai
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	9 %	Belum Tercapai
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			



Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional Tahun 2021	Capaian SPM 2021	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	Sesuai
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Persentase Jumlah Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	91 %	Belum Tercapai
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	Sesuai
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	Sesuai
PEKERJAAN UMUM			
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	100 %	Sesuai
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik			
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100 %	Sesuai
PERUMAHAN RAKYAT			
Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni			
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %	Sesuai
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			
Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100 %	Sesuai
TRANTIBUMLINMAS			
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	100 %	Sesuai
Pelayanan informasi rawan bencana			
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	Sesuai
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Sesuai
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			



Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional Tahun 2021	Capaian SPM 2021	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	Sesuai
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	55.56 %	Belum Tercapai
SOSIAL			
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti			
Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	Sesuai
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	Sesuai
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			
Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	Sesuai
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	100 %	Sesuai
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota			
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	Sesuai

2.5.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor



59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkatan kabupaten. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2020 dari 17 tujuan terdapat 74 indikator Capaian target dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.66
Capaian Target Indikator TPB/SDG's
Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021

NO	TUJUAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET PROV.	CAPAIAN TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN				
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-8%	7%	12.7%	Dinas Sosial
1.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	90%	75%	100%	Dinas Kesehatan
1.3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	2.8 Juta Rumah Tangga	178.594 Rumah Tangga	13.292 Rumah Tangga	Dinas Sosial
1.4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	100%	100%	28.60%	Dinas PRKP
1.5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	100%	15.18	Dinas PRKP
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat		-	97.21	Dinas Pendidikan
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat		-	77.26	Dinas Pendidikan
1.8	Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77.40%	77.40%	73.00%	Dinas Dukcapil
2	TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN				
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	22.10%	7.41%	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Menurun	33.86%	16.26%	Dinas Kesehatan
2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil	28%	33.87%	35.80	Dinas Kesehatan
2.4	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	50%	44%	60.03%	Dinas Kesehatan
2.5	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan 54,5 kg/kap./thn	57.67	79.19	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA				
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	306	104	3	Dinas Kesehatan
3.2	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	-	0	Dinas Kesehatan



NO	TUJUAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET PROV.	CAPAIAN TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
3.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	24	-	18	Dinas Kesehatan
3.4	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	245	158	61	Dinas Kesehatan
3.5	Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	< 1	0.0014	Dinas Kesehatan
3.6	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	75%	100%	Dinas Kesehatan
3.7	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	83%	100%	Dinas Kesehatan
4	TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA				
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.			98%	Dinas Pendidikan
4.2	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.			70.12%	Dinas Pendidikan
4.3	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	-	-	54.32%	Dinas Pendidikan
4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	-	-	116.60 thn	Dinas Pendidikan
4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	-	-	110.26 thn	Dinas Pendidikan
4.6	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8.8 thn	8.11 thn	7.96 thn	Dinas Pendidikan
4.7	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	96.10%	93.78%	96.96%	Dinas Pendidikan
4.8	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	meningkat	93.78%	100%	Dinas Pendidikan
4.9	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	meningkat	93.78%	100%	Dinas Pendidikan
4.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	75.50 thn	Dinas Pendidikan
4.11	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	-	-	70.26%	Dinas Pendidikan
5	TUJUAN 5 : MENCAPI MENCAPI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN				
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	16	10	90	Dinas PP dan PA
5.2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	-	-	28	Dinas PP dan PA
5.3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70%	70%	100%	Dinas PP dan PA
5.4	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	-	-	0.67	Dinas Komunikasi & Informatika



NO	TUJUAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET PROV.	CAPAIAN TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
6	TUJUAN 6 : KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN				
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	100%	100%	84.12%	Dinas PRKP
6.2	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Meningkat	Meningkat		Dinas Kesehatan
6.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Meningkat	Meningkat	83.31	Dinas PRKP
6.4	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	-	-	159	Dinas Kesehatan
7	TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA				
7.1	Bauran energi terbarukan	-	-	-	-
8	TUJUAN 8 : PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA				
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	meningkat	9.29%	5.19%	Bappeda
8.2	PDB per kapita	50 juta	48.21 juta	28.36 juta	Bappeda
8.3	Persentase tenaga kerja formal	51%	44.97%	73.74%	Dinas Nakertrans
8.4	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	20%	11.17%	Dinas Koperasi UKM
8.5	Upah rata-rata per jam pekerja			18.295	Dinas Nakertrans
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	4.56%	4.71%	Dinas Nakertrans
8.7	Persentase setengah pengangguran	Menurun	menurun	63.11	Dinas Nakertrans
8.8	Jumlah wisatawan mancanegara	20 juta (skala nasional)	151.763 Wisman	100 Wisman	Dinas Pariwisata
8.9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	meningkat	6.000.000	78.193	Dinas Pariwisata
9	TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI				
9.1	Jumlah bandara	-	-	2	Kementerian Perhubungan, Dinas Bina Marga Prop. Sulsel, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
9.2	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	meningkat	14.25%		Dinas Perdagangan



NO	TUJUAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET PROV.	CAPAIAN TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
9.3	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	> PDB industry manufactur	9.25%		Dinas Perdagin
9.4	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	-	-	0.77	Dinas Komunikasi dan Informasi
9.5	Proporsi individu yang mengusasi/memiliki telpon genggam	-	-	0.67	Dinas Komunikasi dan Informasi
9.6	Proporsi individu yang menggunakan internet	-	-	0.70	Dinas Komunikasi dan Informasi
10	TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTARNEGARA				
10.1	Koefisien Gini*	0.36	0.36	0.378	Bappeda
11	TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
11.1	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	80%	80%	18.91	Dinas Lingkungan Hidup
12	TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN				
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	150 Juta Ton (skala nasional)	-	90.50	Dinas Lingkungan Hidup
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 ton/hari (skala Nasional)	20 ton/hari	7.5	Dinas Lingkungan Hidup
13	TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA				
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	1 dok.	0	BPBD
14	TUJUAN 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
-	-	-	-	-	-
15	TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI				
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	meningkat	55.65	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
15.2	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	meningkat	22 KPH	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	meningkat	1 dok.	0	Dinas Lingkungan Hidup
16	TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN				



NO	TUJUAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET PROV.	CAPAIAN TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
16.1	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	-	-	56	Dinas PP & PA
16.2	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	-	-	56	Dinas PP & PA
16.3	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	meningkat	60 org	13.33%	Dinas Dinas PP & PA
16.4	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	-	-		BKPSDM
16.5	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	-	-	73	Dinas Dukcapil
16.6	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	-	-	0.041	Kantor Kesbangpol
16.7	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	-	-	0.96	Kantor Kesbangpol
17	TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
17.1	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	-	-	0.77	Dinas Komunikasi & Informatika
17.2	Proporsi individu yang menggunakan internet	-	-	0.70	Dinas Komunikasi & Informatika
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	meningkat	PM	95.48	Bappeda
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	meningkat	PM	100	Bappeda

2.6 Evaluasi Pelaksanaan RKPD

2.6.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu

Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.67
Kategori Pencapaian Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun (Permendagri 27/2014)
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90%
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Tabel 2.68
Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021

No.	OPD	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(%)	Kategori	(%)	Kategori
1	Dinas Pendidikan	91,00	ST	86,41	T
2	Dinas Kesehatan	95,93	ST	88,88	T
3	RSUD Lakiwadada	96,79	ST	93,72	ST
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,54	T	66,71	S
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	81,25	T	79,71	T
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	95,71	ST	75,26	T
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87,50	T	77,99	T
8	Dinas Sosial	86,67	T	80,94	T
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	90,20	ST	93,81	ST
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	89,29	T	82,20	T
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	95,96	ST	91,33	ST
12	Dinas Lingkungan Hidup	90,31	ST	71,33	S
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88,03	T	84,55	T
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	87,95	T	78,65	T
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89,20	T	80,82	T
16	Dinas Perhubungan	89,23	T	67,55	S
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	87,92	T	85,10	T
18	Dinas Koperasi dan UKM	92,10	ST	85,10	T
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	97,05	ST	93,49	ST
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	96,75	ST	91,76	ST
21	Dinas Kebudayaan	78,17	T	73,69	S
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84,38	T	84,38	T
23	Dinas Pariwisata	81,65	T	84,20	T



No.	OPD	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(%)	Kategori	(%)	Kategori
24	Dinas Pertanian	95,11	ST	85,28	T
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	78.65	T	74.72	S
26	Sekretariat Daerah	97,22	ST	90,86	ST
27	Sekretariat DPRD	71,41	S0	65,58	S
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	97.26	ST	94.80	ST
29	BPKAD	83,25	T	83,25	T
30	Badan Pendapatan daerah	90,52	ST	93,47	ST
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	79.17	T	68.65	S
32	Inspektorat	72.89	S	66.63	S
33	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	95,09	ST	86,92	T
Rata-rata (%)		88,41	T	82,05	T

Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Tahun Toraja Tahun 2020

Adapun telaahan hasil evaluasi antara lain :

1. Realisasi kinerja diperoleh 88,41 %. Pencapaian ini di kateorikan Tinggi (T) Hal ini dapat dicapai oleh karena adanya komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja hasil atau keluaran dari yang direncanakan.
2. Tidak terdapat program yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. Hal ini terjadi karena OPD melaksanakan program sesuai dengan target kinerja hasil atau keluaran dari yang direncanakan.
3. Faktor-faktor pendukung tercapainya target kinerja program antara lain adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah serta adanya komitmen OPD dalam memenuhi target kinerja hasil atau keluaran dari yang direncanakan.



Tabel 2.69

Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM TIDAK SAMA			
		RPJMD	RKPD	RENJA- PD	APBD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	Dinas Pendidikan	5	5	5	4	5	5	4	4	-	-	1	1
2	Dinas Kesehatan	5	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	2
3	RSUD Lakipadada	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	5	5	3	5	5	3	3	7	-	2	9
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	8	8	4	8	8	4	4	-	-	4	4
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	6	7	7	6	6	-	-	1	1
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	8	8	5	8	8	5	5	-	-	3	3
12	Dinas Lingkungan Hidup	11	9	9	8	9	9	8	8	2	-	1	3
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	5	4	4	2	4	4	2	2	1	-	2	3
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	3	3	3	3	3	3	3	1	-	-	1
16	Dinas Perhubungan	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	3	5	5	3	3	-	-	2	2
18	Dinas Koperasi dan UKM	8	8	8	5	8	8	5	5	-	-	3	3
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	2	2	2	2	2	2	2	4	-	-	4



No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM TIDAK SAMA			
		RPJMD	RKPD	RENJA- PD	APBD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
21	Dinas Kebudayaan	6	5	5	5	5	5	5	5	1	-	-	1
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4	4	3	4	4	3	3	-	-	1	1
23	Dinas Pariwisata	5	5	5	4	5	5	4	4	-	-	1	1
24	Dinas Pertanian	7	6	6	5	6	6	5	5	1	-	1	2
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	6	6	6	6	6	6	6	1	-	-	1
26	Sekretariat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
27	Sekretariat DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4	4	3	4	4	3	3	-	-	1	1
29	BPKAD	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
30	Badan Pendapatan daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
32	Inspektorat	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
33	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
	Jumlah	167	147	147	124	147	147	124	124	20	0	23	43



Tabel 2.70
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEGIATAN			KEGIATAN YANG SAMA			KEGIATAN TIDAK SAMA		
		RKPD	RENJA	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
1	Dinas Pendidikan	16	16	12	16	12	12	-	4	4
2	Dinas Kesehatan	10	10	10	10	10	10	-	-	-
3	RSUD Lakipadada	3	3	3	3	3	3	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	8	12	8	8	-	4	4
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14	14	11	14	11	11	-	3	3
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10	10	8	10	8	8	-	2	2
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	7	7	7	7	7	-	-	-
8	Dinas Sosial	14	14	13	14	13	13	-	1	1
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	17	8	17	8	8	-	9	9
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13	13	10	13	10	10	-	3	3
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	18	18	10	18	10	10	-	8	8
12	Dinas Lingkungan Hidup	15	15	14	15	14	14	-	1	1
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	17	17	17	17	17	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	9	9	7	9	7	7	-	2	2
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	9	9	9	9	9	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	11	11	9	11	9	9	-	2	2
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	12	8	12	8	8	-	4	4
18	Dinas Koperasi dan UKM	15	15	10	15	10	10	-	5	5
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	6	6	6	6	6	-	-	-
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	14	11	14	11	11	-	3	3
21	Dinas Kebudayaan	13	13	11	13	11	11	-	2	2
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15	15	9	15	9	9	-	6	6
23	Dinas Pariwisata	15	15	13	15	13	13	-	2	2
24	Dinas Pertanian	15	15	15	15	15	15	-	-	-
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12	12	10	12	10	10	-	2	2
26	Sekretariat Daerah	21	21	21	21	21	21	-	-	-
27	Sekretariat DPRD	13	13	12	13	12	12	-	1	1
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15	10	15	10	10	-	5	5
29	BPKAD	13	13	12	13	12	12	-	1	1
30	Badan Pendapatan daerah	10	10	9	10	9	9	-	1	1
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	12	12	12	12	12	12	-	-	-
32	Inspektorat	10	10	9	10	9	9	-	1	1
33	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	10	10	10	10	10	10	-	-	-
	Jumlah	416	416	344	416	344	344	0	72	72



Tabel 2.71
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN YANG SAMA			SUB KEGIATAN TIDAK SAMA		
		RKPD	RENJA	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
1	Dinas Pendidikan	104	104	42	104	42	42	-	62	62
2	Dinas Kesehatan	90	90	26	90	26	26	-	64	64
3	RSUD Laki Padada	6	6	3	6	3	3	-	3	3
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62	62	19	62	19	19	-	43	43
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	27	27	11	27	11	11	-	16	16
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22	22	12	22	12	12	-	10	10
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	17	15	17	15	15	-	2	2
8	Dinas Sosial	34	34	23	34	23	23	-	11	11
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27	27	13	27	13	13	-	14	14
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32	32	16	32	16	16	-	16	16
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	37	37	11	37	11	11	-	26	26
12	Dinas Lingkungan Hidup	37	37	17	37	17	17	-	20	20
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76	76	19	76	19	19	-	57	57
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	28	28	16	28	16	16	-	12	12
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	37	37	26	37	26	26	-	11	11
16	Dinas Perhubungan	16	16	11	16	11	11	-	5	5
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	41	41	25	41	25	25	-	16	16
18	Dinas Koperasi dan UKM	28	28	17	28	17	17	-	11	11
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	20	20	14	20	14	14	-	6	6
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	20	20	16	20	16	16	-	4	4
21	Dinas Kebudayaan	16	16	16	16	16	16	-	0	0
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	61	61	23	61	23	23	-	38	38
23	Dinas Pariwisata	44	44	17	44	17	17	-	27	27
24	Dinas Pertanian	88	88	21	88	21	21	-	67	67
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21	21	16	21	16	16	-	5	5
26	Sekretariat Daerah	48	48	43	48	43	43	-	5	5
27	Sekretariat DPRD	57	57	28	57	28	28	-	29	29
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41	41	17	41	17	17	-	24	24
29	BPKAD	54	54	47	54	47	47	-	7	7
30	Badan Pendapatan daerah	47	47	15	47	15	15	-	32	32
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	35	35	34	35	34	34	-	1	1
32	Inspektorat	40	40	22	40	22	22	-	18	18
33	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	27	27	20	27	20	20	-	7	7
	Jumlah	1.340	1.340	671	1.340	671	671	-	669	669



2.6.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun Berjalan

RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2023. Adapun komposisi program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.72

Komposisi program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022

No.	PERANGKAT DAERAH	RKPD/RENJA OPD			APBD/DPA OPD			DEVIASI RKPD & APBD (RKPD-APBD)		
		Prog.	Keg.	Sub Keg.	Prog.	Keg.	Sub Keg.	Prog.	Keg.	Sub Keg.
1	Dinas Pendidikan	5	10	104	3	9	42	2	1	62
2	Dinas Kesehatan	4	17	90	3	9	26	1	8	64
3	RSUD Laki Padada	2	4	6	2	3	3	0	1	3
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13	20	62	7	10	19	6	10	43
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5	13	27	2	5	11	3	8	16
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	8	22	3	7	12	0	1	10
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	7	17	2	7	15	0	0	2
8	Dinas Sosial	5	12	34	5	12	23	0	0	11
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	13	27	4	7	13	2	6	14
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	17	32	6	10	16	1	7	16
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	17	37	3	6	11	5	11	26
12	Dinas Lingkungan Hidup	10	18	37	8	12	17	2	6	20
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	19	76	5	10	19	0	9	57
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	5	10	28	3	7	16	2	3	12
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	13	37	4	11	26	0	2	11
16	Dinas Perhubungan	2	9	16	2	5	11	0	4	5
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	11	41	4	9	25	1	2	16
18	Dinas Koperasi dan UKM	8	13	28	7	12	17	1	1	11
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	10	20	4	7	14	2	3	6
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	12	20	4	10	16	0	2	4
21	Dinas Kebudayaan	5	9	16	5	9	16	0	0	0
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14	61	3	12	23	1	2	38
23	Dinas Pariwisata	5	14	44	4	9	17	1	5	27
24	Dinas Pertanian	7	25	88	5	11	21	2	14	67
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8	13	21	7	11	16	1	2	5
26	Sekretariat Daerah	3	18	48	3	17	43	0	1	5
27	Sekretariat DPRD	2	15	57	2	12	28	0	3	29
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	15	41	3	9	17	1	6	24



No.	PERANGKAT DAERAH	RKPD/RENJA OPD			APBD/DPA OPD			DEVIASI RKPD & APBD (RKPD-APBD)		
		Prog.	Keg.	Sub Keg.	Prog.	Keg.	Sub Keg.	Prog.	Keg.	Sub Keg.
29	BPKAD	3	13	54	2	7	47	1	6	7
30	Badan Pendapatan daerah	2	10	47	2	7	15	0	3	32
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3	12	35	3	12	34	0	0	1
32	Inspektorat	3	11	40	3	8	22	0	3	18
33	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	7	12	27	7	12	20	0	0	7
	Jumlah	165	434	1340	130	304	671	35	130	669

2.6.3 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja

2.6.3.1 Faktor Pendorong

Capaian kinerja yang telah berhasil dicapai secara maksimal disebabkan oleh :

- Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.
- Adanya kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD.
- Adanya proses Musrenbang dan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Adanya dukungan dana yang tersedia baik APBD, Tugas Pembantuan, APBN dan Partisipasi Swasta/BUMN/BUMD, masyarakat.

2.6.3.2 Faktor Penghambat

Capaian kinerja tingkat kepuasan masyarakat yang tidak tercapai secara maksimal khususnya di pelayanan publik yang telah disurvei secara sampel yaitu di Rumah Sakit Lakipadada antara lain :

- Belum optimalnya pelayanan penerangan Listrik dan air minum.
- Masih rendahnya pelayanan dan penegakan disiplin pegawai.
- Masih rendahnya akses informasi.
- Belum terbangunnya SOP dan SPM pada OPD.
- Masih rendahnya cinta lingkungan dan kebersihan lingkungan.
- Belum optimalnya jasa pelayanan umum.

2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang merumuskan dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.



Rumusan kebijakan umum yang ada menghasilkan berbagai program yang efektif untuk mencapai sasaran, sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah .

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Identifikasi Permasalahan pembangunan tiap urusan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi perangkat daerah menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan dikabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Masih terdapat Warga negara usia 7 – 15 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)
- b. Masih terdapat warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)
- c. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar
- d. Masih rendahnya Presentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi.
- e. Masih Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar
- f. Masih kurangnya ruang perpustakaan pada pendidikan dasar
- g. Masih rendahnya presentase pendidik yang memiliki sertifikasi pada pendidikan dasar



- h. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil.
2. Kesehatan
 - a. Belum optimalnya Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)
 - b. Masih rendahnya persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
 - c. Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
 - d. Masih kurangnya proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik.
 - e. Masih rendahnya persentase kondisi mantap jalan
 - f. Masih kurangnya kualitas akses pada daerah terisolir dan daerah daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota
 - g. Masih rendahnya persentase sampah yang tertangani
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Belum optimalnya Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)
 - b. Masih rendahnya persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
 - c. Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
 - d. Masih kurangnya proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik.
 - e. Masih rendahnya persentase kondisi mantap jalan
 - f. Masih kurangnya kualitas akses pada daerah terisolir dan daerah daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota
 - g. Masih rendahnya persentase sampah yang tertangani
4. Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman
 - a. Masih rendahnya persentase Rumah tinggal bersanitasi
 - b. Masih rendahnya persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni
 - c. Masih rendahnya cakupan peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum pada kawasan kota penyangga
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.



- b. Masih rendahnya rasio cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
- 6. Sosial
 - a. Masih rendahnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
 - b. Masih rendahnya persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang dibina
 - c. Masih rendahnya jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- 1. Tenaga Kerja
 - a. Masih kurangnya Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan
 - b. Masih rendahnya persentase pencari kerja yang ditempatkan
 - c. Masih kurangnya persentase penempatan transmigrasi
- 2. Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 - a. Belum optimalnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
 - b. Masih rendahnya persentase kecamatan yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga
 - c. Masih rendahnya persentase Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate
 - d. Belum optimalnya penanganan Korban kasus kekerasan terhadap perempuan
 - e. Belum optimalnya penanganan Korban kasus kekerasan terhadap anak
 - f. Belum optimalnya peran lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG)
- 3. Pangan
 - a. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama (Beras, jagung dan kedelai).
 - b. Masih rendahnya ketersediaan energi perkapita.
 - c. Masih rendahnya ketersediaan protein perkapita



- d. Belum optimalnya pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
4. Pertanian
 - a. Masih minimnya Persentase luas lahan bersertifikat.
 - b. Belum optimalnya jangkauan dan pemahaman Reforma Agraria pada pemerintah daerah
 - c. Belum tersedianya Perda LP2B yang berbasis spasial dan terintegrasi dengan RTR agar dapat berfungsi sebagai perangkat pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
5. Lingkungan Hidup
 - a. Masih rendahnya persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)
 - b. Masih rendahnya hasil pengukuran indeks kualitas air
 - c. Masih rendahnya hasil pengukuran indeks kualitas udara
 - d. Masih rendahnya cakupan Limbah B3 Fasum/Fasos/Usaha yang diawasi
 - e. Masih rendahnya persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
 - f. Masih rendahnya persentase sampah yang tertangani
 - g. Masih rendahnya Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sector pembangunan.
 - b. Belum optimalnya rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
 - c. Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen administrasi kependudukan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Masih redahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik
 - b. Masih rendahnya Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
 - c. Masih rendahnya persentase PKK Aktif
 - d. Masih belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa



8. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
 - a. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - b. Masih rendahnya persentase PUS peserta KB Aktif
9. Perhubungan
 - a. Belum optimalnya kinerja Uji Kir Angkutan Umum
 - b. Masih rendahnya Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik
 - c. Masih diperlukannya upaya peningkatan pelayanan pada terminal penumpang
 - d. Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan sesuai jumlah dan standar
10. Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya Cakupan Layanan Telekomunikasi
 - b. Masih rendahnya cakupan layanan akses internet
 - c. Masih rendahnya Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah
 - d. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah
11. Koperasi dan UKM
 - a. Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relative terbatas. Hal ini menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
 - b. Masih rendahnya jumlah koperasi aktif, akibat terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pengurus koperasi;
 - c. Tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaan proses produksi dan teknologi.
 - d. Masih rendahnya Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan
12. Penanaman Modal



- a. Terhambatnya investasi yang disebabkan antara lain belum tersedianya aturan kemudahan berinvestasi
 - b. Belum optimalnya upaya pemberian dukungan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyederhanaan perizinan
13. Kepemudaan dan Olahraga
- a. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar;
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. Kurang optimalnya peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.
 - d. Kurangnya pembinaan kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
- a. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
 - b. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi
15. Persandian
- a. Perlunya peningkatan Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)
16. Kebudayaan
- a. Masih kurangnya optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya,serta nilai-nilai budaya lokal
17. Perpustakaan
- a. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan;
 - b. Belum optimalnya SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat
18. Kearsipan
- a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di instansi Pemerintah daerah.
 - b. Terbatasnya kualitas SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi



C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
 - a. Masih rendahnya produksi perikanan
 - b. Masih rendahnya konsumsi ikan
 - c. Masih kurangnya Jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR)
 - d. Belum optimalnya Produksi produk hasil olahan perikanan
2. Pariwisata
 - a. Berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan akibat Pandemi Covid-19
 - b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta pemasaran destinasi pariwisata
 - c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata.
 - d. Rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tentang sadar wisata dan kewirausahaan.
 - e. Kurangnya inovasi dan kreasi produk wisata dan produk UKM sektor pariwisata.
 - f. Masih rendahnya PAD sektor pariwisata
3. Pertanian
 - a. Terbatasnya jumlah tenaga kerja pertanian termasuk kapasitas dan kualitas SDM pertanian;
 - b. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - c. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian
 - d. Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada tingkat produktivitas;
 - e. Terjadi rentan Terhadap Kerawanan Pangan
 - f. Masih minimnya penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
 - g. Degradasi kualitas lahan disebabkan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan;
 - h. Meningkatnya alih fungsi lahan;
 - i. Terbatasnya infrastruktur pengairan dan jalan usaha tani;



- j. Ketersediaan benih/bibit unggul bermutu belum cukup;
 - k. Belum optimalnya penggunaan pestisida/obatobatan pertanian yang ramah lingkungan;
 - l. Masih kurangnya alat dan mesin pertanian
4. Perdagangan
- a. Masih rendahnya Persentase UTP yang ditera
 - b. Masih kurangnya cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang
 - c. Belum optimalnya Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah
5. Industri
- a. Masih rendahnya Cakupan bina kelompok pengrajin
 - b. Masih rendahnya Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT
 - c. Masih rendahnya persentase industri kecil dan menengah yang berkembang
 - d. Masih kurangnya Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi
 - e. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah;
 - f. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah
 - g. Minimnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

D. Urusan pendukung pemerintahan

- 1. Sekretariat DPRD
 - a. Masih rendahnya capaian Prosentase PROLEGDA yang terealisasi
- 2. Sekretariat Daerah
 - a. Capaian nilai SAKIP belum memenuhi target

E. Urusan Penunjang Pemerintahan

- 1. Perencanaan
 - a. Ketersediaan data terkini yang belum akurat
 - b. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan hasilhasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah



- e. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah
2. Keuangan
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.
 - b. Masih rendahnya Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Bersertifikat
 - c. Masih rendahnya Persentase Peningkatan PAD
 3. Kepegawaian dan Diklat
 - a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;
 - b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier

F. Unsur Pengawasan

1. Pengawasan
 - a. Masih rendahnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
 - c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD
 - d. Penyelesaian Rekomendasi Tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal maupun internal hasil audit masih belum cukup memadai

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
 - a. Masih rendahnya Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi
 - b. Belum Optimalnya keterlibatan lembaga keumatan.

2.8 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di masa mendatang serta pemanfaatan potensi daerah untuk dikelola secara tepat agar dapat menjadi modal



pembangunan. Perumusan isu strategis merupakan bagian penting dan akan menentukan proses penyusunan rencana pembangunan, untuk itu isu strategis harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dengan memperhatikan isu global, isu nasional dan isu daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah melalui prioritas pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2023.

2.8.1 Isu Global

Isu global merupakan potensi permasalahan maupun potensi peluang yang bersifat global yang berpotensi untuk mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023, yang meliputi :

A. Pandemi Covid-19

Persebaran pandemic COVID-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. COVID-19 varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Varian baru omicron menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional, meskipun angka kematian telah menurun.

Vaksinasi yang telah dimulai sejak tahun 2021 terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemic COVID-19 menuju pencapaian herd immunity, hal ini terlihat bahwa walaupun terjadi lonjakan varian Delta, namun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan trend positif.

B. Inflasi

Sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik, tingkat inflasi Kabupaten Tana Toraja pada triwulan IV 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan pada triwulan laporan utamanya disumbang oleh cabai rawit, cabai merah, tempe, minyak goreng, dan transportasi. Kenaikan harga ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan konsumsi masyarakat seiring perayaan HBKN Natal dan momen pergantian tahun sementara pasokan barang kurang. Selain itu, harga minyak goreng juga meningkat seiring dengan tren peningkatan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang masih berlanjut di bulan Desember 2021.



C. Perubahan Iklim

Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution) menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam komitmen Pemerintah, dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah kabupaten melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada aspek adaptasi dilakukan penguatan kapasitas masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah daerah yang rentan.

D. Transformasi Digital

Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Transformasi digital para pelaku UMK di Tana Toraja tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian. Selain peningkatan kinerja UMKM, pemanfaatan transformasi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun.



2.8.2 Isu Nasional

A. Defisit APBD dan Investasi

Defisit transaksi berjalan pada semester I 2021 tetap rendah didukung oleh surplus neraca perdagangan. Transaksi berjalan pada semester I 2021 mencatat defisit yang rendah sebesar 3,0 miliar dolar AS, setelah mencatat surplus 1,8 miliar dolar AS pada semester II 2020. Pemulihan ekonomi global seiring meluasnya proses vaksinasi menyebabkan kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia sehingga mendorong perbaikan kinerja ekspor Indonesia. Beberapa komoditas utama seperti CPO, besi dan baja, batu bara, bijih logam, kimia organik, serta kendaraan bermotor berkontribusi pada kinerja ekspor, ditopang oleh kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok dan AS, seiring dengan perbaikan ekonomi yang berlangsung lebih cepat di negara tersebut. Sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan permintaan domestik yang berangsur pulih, kinerja impor juga meningkat cukup tinggi pada paruh pertama 2021 sehingga menahan surplus neraca perdagangan lebih lanjut. Peningkatan impor terjadi menyeluruh pada seluruh jenis kelompok barang, terutama pada bahan baku dan bahan konsumsi. Defisit transaksi berjalan juga dikontribusikan oleh peningkatan defisit neraca jasa sejalan dengan aktivitas impor sehingga menyebabkan peningkatan pembayaran freight jasa transportasi. Selain itu, pemulihan kondisi domestik juga tercermin pada peningkatan pembayaran imbal hasil investasi langsung sejalan dengan membaiknya kinerja korporasi sektor migas dan nonmigas sehingga mendorong defisit neraca pendapatan primer. Sementara, neraca pendapatan sekunder membukukan kenaikan surplus di tengah relatif stabilnya transfer personal terkait penerimaan remitansi.

B. Rantai Nilai

Laju perekonomian Indonesia 2022 diperkirakan semakin meningkat didukung perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada 2022. Perbaikan ekonomi global yang terus berlangsung tersebut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain Purchasing Managers' Index (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, Bank



Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi the Fed sebagai respons tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasokan dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menguatnya keterkaitan antarwilayah dalam rantai nilai (value chains) yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi penggunaan input antara domestic dan wilayah lain untuk produksi di dalam satu wilayah. Dengan kata lain aktivitas produksi di suatu wilayah semakin terkait dengan wilayah lain dan proporsi penggunaan input yang mengandalkan dari dalam wilayah sendiri menurun yang berimplikasi pada kebijakan penguatan konektivitas dan system logistic antar wilayah guna memperkuat integrase perekonomian wilayah.

C. Inflasi dan Daya Beli

Inflasi 2021 tercatat rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi 2020 sebesar 1,68% (yoy), meskipun berada di bawah kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat rendah sebesar 1,56% (yoy) sedikit menurun dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, nilai tukar yang stabil, dan ekspektasi inflasi yang terjaga, serta pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal. Inflasi volatile food terkendali sebesar 3,20% (yoy), didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang tetap terjaga serta sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Inflasi kelompok administered prices meningkat dari tahun lalu menjadi sebesar 1,79% (yoy), antara lain sejalan dengan kenaikan tarif angkutan



udara di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan kenaikan cukai tembakau.

Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan bangkit dan meningkat pada 2022, terutama didukung akselerasi konsumsi swasta dan investasi di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor. Hal ini tercermin dari kenaikan indikator hingga Desember 2021 seperti mobilitas masyarakat di berbagai daerah, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Sumber pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan mulai berimbang, kontribusi permintaan domestik diperkirakan meningkat, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terlu diwaspadai.

2.8.3 Isu Daerah

A. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja, yang memerlukan perhatian adalah belum tercapainya target nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kabupaten Tahun 2021 yaitu CC dengan Nilai 54 untuk Reformasi Birokrasi dan CC dengan nilai 58. Pada tahun 2021, nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Toraja hanya mencapai 48,64 dengan nilai C dan nilai SAKIP hanya mencapai angka 54,03 (CC). Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kabupaten Tana Toraja adalah mengimplementasikan manajemen dan anggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan dengan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja.

B. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berdampak pada luka memar (*scarring effect*), khususnya bagi pembangunan social yang membutuhkan penguatan pemulihan social, khususnya pada peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sampai dengan tahun 2021 telah berhasil meningkatkan capaian kinerja pembangunan terkait



peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 68,75 pada Tahun 2020 menjadi 69,49 pada tahun 2021, walaupun nilai tersebut masih dibawah nilai provinsi dan nasional.

C. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Perbaikan ekonomi pada tahun 2021 yang digambarkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 5,19 persen pada Tahun 2021 setelah terpuruk sebesar - 0,28 persen pada tahun 2020 diharapkan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan juga dapat berkontribusi pada meningkatnya peran UMKM dalam rangka mendukung perkuatan ekonomi local.

Upaya penguatan peran UMKM dalam perkuatan ekonomi Kabupaten Tana Toraja peran dan fasilitasi pemerintah untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi pada fokus peningkatan produktivitas antara lain meningkatkan nilai tambah produk UMKM, meningkatkan akses informasi terkait pembiayaan dan pemasaran, dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial pelaku UMKM dan koperasi.

D. Kualitas Infrastruktur yang Menunjang Perekonomian

Dalam pembangunan infrastruktur konektivitas yang mendukung produktivitas untuk mencapai transformasi ekonomi masih menghadapi tantangan antara lain pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan pendukung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Tana Toraja pemenuhannya masih perlu dioptimalkan keandalan dan pemerataan konektivitasnya untuk mendukung arus distribusi barang dan jasa serta komoditas unggulan wilayah. Hal ini tergambarkan pada capaian kemantapan jalan kabupaten tahun 2021 yang hanya sebesar 67,72 persen. Sedangkan pada layanan transportasi, beberapa tantangan yang masih memerlukan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah belum optimalnya layanan, sarana dan prasarana pada beberapa simpul transportasi dan terbatasnya fasilitas keselamatan jalan pada beberapa ruas jalan di Kabupaten Tana Toraja.



2.9 Inovasi Daerah

Pengembangan dan penerapan suatu inovasi dapat menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif atau daya saing daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan inovasi daerah dalam berbagai sektor terus didorong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan senantiasa memperhatikan dan penekanan pada tujuan dan arah pembangunan daerah maupun penguatan potensi dan kearifan lokal yang ada.

Berikut ini sejumlah bentuk inovasi daerah yang telah diinisiasi, diterapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.73

Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021

NO.	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
TAHUN 2020			
1.	TATAPAN (Toraja Tanpa Pasung)	Inovasi "Tatapan" selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Inovasi ini juga selaras dengan salah satu pilar pembangunan pemerintah Kabupaten Tana Toraja yaitu "Jangan biarkan Rakyatku Sakit". Dengan adanya inovasi ini, berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat secara umum dan ODGJ yang mengalami pasung pada khususnya. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mengupayakan agar "Toraja Tanpa Pasung" sehingga ODGJ juga dapat merasakan kebebasan dan mendapatkan perlakuan selayaknya manusia lainnya. Inovasi ini juga melibatkan kerjasama yang erat lintas sektor. Inovasi "Tatapan" diharapkan	RSUD Lakipadada



NO.	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		<p>mampu untuk membebaskan pasien pasung, sehingga mereka bisa mendapatkan kebebasan dan hak asasi manusia selayaknya manusia normal lainnya. Selain itu, inovasi ini diharapkan dapat menjamin pelayanan kesehatan bagi ODGJ secara berkelanjutan serta memberikan jaminan kepada mereka untuk mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan terhadap pemasungan dan tekanan akibat pemasungan</p>	
2.	<p>CEK BUDI DENGAN MINI DUK (Cegah Bunih Diri dengan Mini International Neuropsychiatric Interview Education)</p>	<p>Inovasi ini digagas dengan melihat kondisi bahwa tingginya kasus bunuh diri khususnya di Tana Toraja akibat berbagai himpitan persoalan terlebih pada saat terjadinya pandemic Covid-19</p> <p>Tujuan dari inovasi ini adalah untuk melakukan skrining/deteksi awal resiko terjadinya bunih diri baik yang dialami oleh dirinya sendiri, keluarga ataupun lingkungannya dengan menggunakan tools / instrumen penilaian MINI ICD-10 (<i>Mini International Neuropsychiatric Interview</i>).</p> <p>Upaya-upaya telah dilakukan bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun kerjasama lintas sektor dan lintas instansi yang terkait, meliputi upaya peningkatan edukasi dan pencegahan bunuh diri (promotif dan preventif), pengobatan (kuratif) dan rehabilitasi. Salah satu upaya promotif dan preventif yang dilakukan adalah skrining risiko bunuh diri dengan menggunakan tools / instrumen penilaian MINI ICD-10 (<i>Mini International Neuropsychiatric Interview</i>). MINI-10 dirancang sebagai suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis</p>	<p>RSUD Lakipadada & Bagian Kesra Setda</p>



NO.	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		<p>gangguan psikiatri utama dari International Classification of Diseases (World Health Organization, 1993). Skrining melalui MINI-10 ini dicetak dalam bentuk manual maupun elektronik (melalui aplikasi Google Forms) yang dapat diakses oleh setiap masyarakat untuk mendeteksi risiko bunuh diri, baik yang dialami oleh dirinya sendiri, keluarga ataupun lingkungannya. Bagi yang terskrining dapat menghubungi tenaga profesional yang terdiri dari psikiater, psikolog, dokter umum dan tenaga konselor.</p> <p>Selain itu, mengupayakan edukasi pencegahan bunuh diri dengan bekerja sama dengan lintas sektor terkait, seperti pemerintah tingkat kecamatan, kementerian agama kabupaten Tana Toraja, Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja, pemerhati kesehatan jiwa di Tana Toraja, Kepolisian & kejaksaan, insan pers / media massa, dinas sosial dan lain-lain untuk sosialisasi giat cegah bunuh diri di kabupaten Tana Toraja</p>	
3.	LAPAK DUKCAPIL (Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	<p>Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tana Toraja "LAPAK DUKCAPIL" merupakan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran langsung yang di laporkan dari Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas. Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin pengakuan kepada setiap warga negara melalui sistem kependudukan yang diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat dalam pengakuan status pribadi dirinya dan status hukum yang melindunginya.</p> <p>Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO.	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		<p>Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana di daerah berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan sesuai dengan pencanangan "GISA" (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). "LAPAK DUKCAPIL" hadir untuk menjawab masalah dengan mempercepat proses pelayanan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Kelahiran secara Langsung dan pelayanan online melalui Telepon/WhatsApp, ini dilakukan agar masyarakat mudah dapat mengurus dokumen penduduk dengan praktis khususnya Kutipan Akta Perkawinan dan Kelahiran. Setelah inovasi ini dilaksanakan, banyak manfaat sudah dirasakan oleh masyarakat. Waktu pelayanan pun lebih cepat dan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan dapat dirasakan secara langsung. Masyarakat pun dalam pengurusan lebih efektif dan efisien serta tanpa mengeluarkan biaya transport. Dampak lainnya adalah meningkatnya jumlah penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Kelahiran, yang mengakibatkan jumlah data Pelayanan Penerbitan Dokumen Penduduk menjadi valid dan kurangnya jumlah keluhan permohonan pelayanan dari 4 menjadi tidak ada (zero complaint).</p>	
TAHUN 2021			
1.	Sinergitas Dengan Masyarakat Pendeder	Sinergitas dengan masyarakat Pendeder adalah salah satu solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan bibit ikan ukuran 5–8 cm bagi masyarakat pembudidaya ikan. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama dengan memanfaatkan lahan sawah masyarakat sebagai lokasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



NO.	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		<p>pendederan di Kelurahan Lamunan Kecamatan Makale untuk memproduksi bibit ikan ukuran 5 - 8 cm. Bibit ikan ukuran 1-3 cm produksi Balai Benih Ikan Sangalla' disebar ke lahan masyarakat untuk dibesarkan (pendederan ke II) dengan masa pemeliharaan 21 hari kalender untuk memproduksi bibit ikan ukuran 3-5 cm selanjutnya dilakukan pendederan ke III dengan masa pemeliharaan 21 hari kalender. Selama masa pemeliharaan pembesaran, dilakukan pendampingan dari petugas Balai Benih Ikan Sangalla' dan Bidang Budidaya Perikanan serta penyuluh perikanan berupa teknik/cara pengolahan dasar kolam (lahan) serta cara penebaran dan pemeliharaan bibit yang baik dan benar sampai panen. Hasil dari kegiatan pembesaran ini kemudian dilakukan pembagian antara masyarakat pendeder pemilik lahan dengan Balai Benih Ikan Sangalla sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, selanjutnya bagian untuk Balai Benih Ikan Sangalla' di serahkan ke masyarakat sekitar lokasi pendederan untuk kegiatan pembesaran selanjutnya sampai mencapai ukuran ikan konsumsi.</p>	
2.	Pendampingan Terpadu Kelompok Wanita Tani	<p>Pendampingan Terpadu Kelompok Wanita Tani adalah suatu inovasi yang dilakukan secara terpadu antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Penyuluh Pertanian Lapangan dari Dinas Pertanian mulai dari pemberian bibit/benih tanaman sayuran (Sarana dan Prasarana), pemeliharaan, pengolahan pasca panen dan pemasaran. Dalam pelaksanaannya,</p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan



NO.	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		<p>Pendampingan Terpadu Kelompok Wanita Tani meliputi langkah-langkah / tahapan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kelompok (CP/CL) - Penetapan Kelompok dan Pendamping Kelompok - Sosialisasi Kegiatan - Pembagian sarana dan prasarana - Pendampingan dimulai dari pembibitan, Penanaman, Pembuatan pupuk organik dan pemupukan, Penanganan Pasca panen dan pemasaran 	
3	Pengembangan Kelembagaan Air	<p>Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.</p> <p>Inovasi ini digagas guna menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi di daerah Tana Toraja</p>	Dinas PRKP
4.	TURU' MA' WAIMATA / TURUT BERDUKA CITA	<p>Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Tana Toraja terkait kepemilikan Akta Kematian mendorong pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja menciptakan sebuah inovasi Pelayanan Akta Kematian yang lebih di kenal dengan layanan "Turu' Ma' Waimata / Turut Berduka Cita".</p> <p>Akta Kematian merupakan dokumen yang sangat penting</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO.	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		<p>bagi individu maupun negara karena kepemilikan Akta Kematian dapat digunakan untuk mengurus Asuransi, pensiun, pengurusan warisan dan penetapan kejelasan status janda atau duda dalam KTP. Bagi negara Akta Kematian juga penting sebagai data statistik Negara.</p> <p>Inovasi "Turu' Ma' Waimata / Turut Berduka Cita" hadir untuk menjawab dan memecahkan masalah dengan mempercepat proses pelayanan penerbitan Kutipan Akta Kematian Secara Online secara Langsung (stelse aktif) dan pelayanan online melalui Telepon/WhatsApp, ini dilakukan agar masyarakat dapat mengurus dokumen penduduk dengan praktis khususnya Kutipan Akta Kematian.</p>	
5.	"KINAWAKOMI" (Ketersediaan Informasi Pengguna Wadah Komunikasi)	<p>KINAWAKOMI dalam Bahasa daerah Toraja adalah sebuah petuah lama berbasis kearifan local yang artinya "himbauan kepada semua orang untuk senantiasa berperilaku baik". Hal itu sejalan dengan pesan moral di era kekinian agar semua orang dapat tetap hidup berdampingan dengan saling terintegrasi. Demikian pula dalam menggunakan teknologi informasi, sebagai pengguna wadah komunikasi berbasis teknologi informasi masyarakat seyogianya tetap berperilaku baik melalui etika bermedia social dan tidak menyebarkan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoax). Keberadaan informasi sekarang ini belum tersedia di setiap Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja yang dapat diakses secara langsung berbasis informasi teknologi. Melalui inovasi yang</p>	



NO.	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		digagas ini diharapkan setiap Lembang/Kelurahan di Kabupaten Tana Toraja mempunyai laman website yang diupdate setiap hari berisi informasi potensi Lembang/Kelurahan serta fitur pengaduan masyarakat yang akan diteruskan kepada dinas terkait karena website ini terintegrasi dengan website kabupaten.	



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2023 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Dalam kondisi tekanan akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mengalami perbaikan di level yang lebih tinggi dibandingkan kinerja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tana Toraja mampu mempertahankan kinerja lebih baik dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, terlihat pada capaian Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja sebesar 5,19% dan masih di atas dari angka Pertumbuhan ekonomi Povinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,65% dan nasional pada posisi 3,69%.

Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut, Tahun 2023 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesain transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-maupun sasaran pembangunan jangka panjang.

Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan ekonomi 5,59-6,41%; Tingkat Kemiskinan 10,83%; Tingkat Pengangguran Terbuka 2,92%; Gini Rasio 0,3195 dan PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 33,15 Juta.



3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Fokus kebijakan ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Adanya keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas pada perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka usaha yang akan dilakukan adalah :

1. Menciptakan stabilitas dan ketentraman ekonomi agar terjaga baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah;
2. Menyediakan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
3. Pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai instansi/lembaga melalui pengembangan jaringan sistem ekonomi.

Peningkatan ketahanan ekonomi melalui pertanian, peternakan, perikanan, daya saing sektor pariwisata dan produktivitas kopi, daya dukung infrastruktur, aksesibilitas, konektivitas, tata ruang, pengelolaan air baku, perumahan, pemukiman dan pemerataan pembangunan terutama wilayah khusus.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara, termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula namun setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemic pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antar negara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat,



berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (scarring effect).

Luka memar tecermin juga dari kondisi keuangan korporasi yang pada akhirnya menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (leverage) meningkat sejak pandemi baik di negara maju maupun negara berkembang. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga dilaporkan terjadi di Amerika Serikat dan Cina. Sementara itu, isu perubahan kebijakan Cina terkait rencana peralihan ke energi terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyaknya perusahaan padat karbon yang menghadapi profitabilitas lebih rendah dan kerentanan likuiditas.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Dinamika ini mendorong pelaku pasar memprakirakan kenaikan Fed Funds Rate lebih cepat, yakni pada paruh I-2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami rebound di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, Januari 2022) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 4,4 persen dari 4,9 persen pada tahun 2022, yang



utamanya didorong oleh risiko seperti perkembangan varian Omicron, keberlanjutan gangguan rantai pasok, krisis energi, konflik Ukraina-Rusia, serta tekanan peningkatan inflasi. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 4,1 dan 4,5 persen.

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda.
2. Dampak luka memar pandemi pada korporasi dan stabilitas sistem keuangan.
3. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko asset kripto.
4. Tuntutan ekonomi keuangan hijau.
5. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan.

3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Proses pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antar provinsi maupun antar subsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih berkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami berkontraksi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan *learning loss* dan *learnings penalty*. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN 2020– 2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar



ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diperkirakan akan menurunkan skor PISA ketitik terendah dalam dua dekade terakhir. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekalipun terdapat base effect). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diperkirakan lebih rendah pada tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diperkirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diperkirakan tidak setinggi di tahun 2021; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan supply-demand beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diperkirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diperkirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan sustainability yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku



domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 3,69 % (C to C) . Kemudian pada tahun 2022 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,7-6,0 % sedangkan tahun 2023 sebesar 5,3–5,9 %. Dengan target tersebut, Indonesia dibidik masih menyandang predikat Upper-Middle Income Countries. Sehingga kedepan pemerintah menyiapkan lima langkah untuk meningkatkan investasi, yakni finalisasi Rancangan Undang-Undang terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan, pemberian fasilitas investasi seperti percepatan perizinan berusaha di kementerian, lembaga, dan daerah melalui sistem Online Single Submission terintegrasi, pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, hingga kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor.

Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin Bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk.

Pemerintahpun optimistis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi) berlanjut hingga 2023, meski tidak dapat dipungkiri bahwa pandemic Covid-19 masih akan mewarnai tahun depan dan proses pengendalian Covid-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai herd immunity.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau



3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Tana Toraja secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Tana Toraja sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian diperkirakan :

1. Lemahnya pertumbuhan ekonomi
2. Lemahnya peluang berusaha
3. Meningkatnya angka pengangguran
4. Meningkatnya kerawanan pangan dan sosial
5. Menurunnya derajat kesehatan dan kualitas hidup
6. Meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi
7. Meningkatnya inflasi
8. Menurunnya daya beli masyarakat
9. Melemahnya pelayanan publik
10. Menurunnya jasa pariwisata
11. Menurunnya kesejahteraan pegawai
12. Melemahnya peluang dan jaringan pasar
13. Menurunnya mutu pendidikan
14. Melemahnya semangat, kreatifitas dan inovasi ASN
15. Regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran provinsi dan pusat disesuaikan dengan peran dan kontribusi daerah
16. Pemulihan perekonomian maupun pembangunan infrastruktur terhambat sebagai dampak pasca pandemi Covid-19
17. Penurunan kontribusi sektor pariwisata dan jasa pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pasca pandemi Covid-19.

Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian daerah Tahun 2023 diperkirakan :

1. Jumlah penduduk, kondisi ini disatu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi;
2. Ketersediaan infrastruktur wilayah melalui sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi investor;



3. Iklim investasi yang kondusif seperti rendahnya angka kriminalitas, kondisi ini mempengaruhi kelancaran usaha dan aktifitas ekonomi;
4. Meningkatnya jumlah pengangguran serta pertumbuhan ekonomi yang akan melambat akibat pasca pandemi Covid-19.

Dengan melihat kondisi Kabupaten Tana Toraja yang saat ini masih bergelut dengan wabah Covid-19, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2023 Kabupaten Tana Toraja memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59-6,41 persen sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06–6,59 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30-5,90 persen. Angka kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 diproyeksikan 10,83 % sementara Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan 2,92 %.

Selanjutnya Capaian Target Tahun 2021, Target Pencapaian Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Capaian Tahun 2021, Asumsi Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja.

No.	Indikator Makro	Sat.	Capaian Tahun 2021	Asumsi Capaian 2022	Target Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	69,49	69,91	70,66
2	Angka Kemiskinan	%	10,29	12,05	10,83
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,10	2,50	2,92
4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,19	3,50	5,59-6,41
5	PDRB per Kapita	Juta (Rp)	28,35	32,70	33,15
6	Rasio Gini	%	0,378	0,335	0,319

Sumber : Bappeda Kab. Tana Toraja, 2022 Diolah

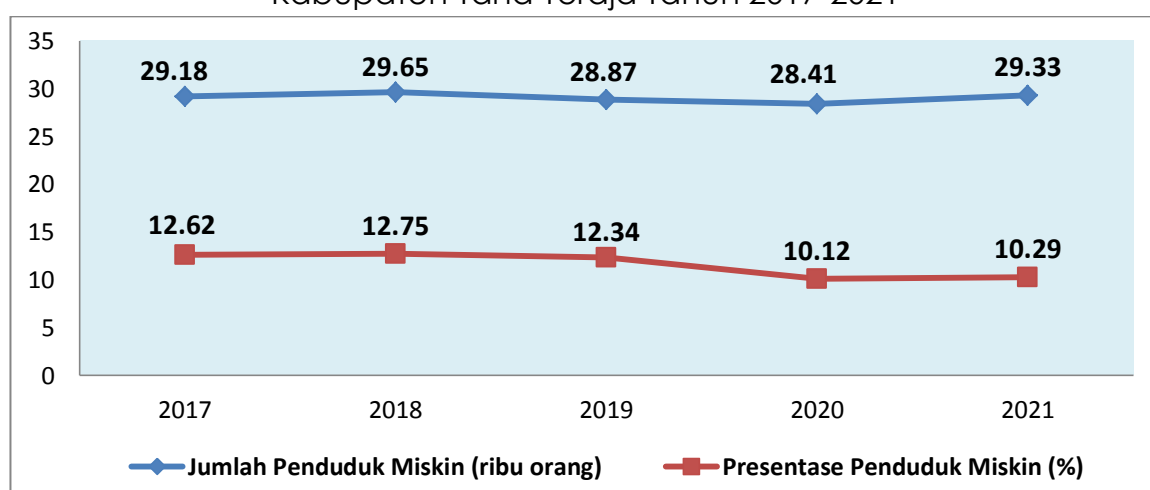
3.1.1.3 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Menurut data BPS, Pada Tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja mencapai 12,62 persen atau 29,18 ribu orang, meningkat menjadi 12,75 persen atau 29,65



ribu orang pada Tahun 2018. Tahun 2019 presentase penduduk miskin sebesar 12,34 persen atau 28,87 ribu orang, kemudian mengalami penurunan menjadi 10,12 persen atau 28,41 ribu orang pada tahun 2020 dan 10,29 persen atau 29,33 ribu orang pada Tahun 2021. Penurunan ini seiring dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 salah satunya melalui perbaikan bantuan perlindungan sosial utamanya untuk penduduk miskin.

Grafik 3.1
Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Menurut data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Presentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja berada pada urutan 7 (tujuh) besar diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan dengan urutan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Selayar dan Kabupaten Tana Toraja.

3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Tana Toraja masih tergolong tinggi yaitu pada Tahun 2017 sebesar 5,60 % pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 menurun menjadi 3,07 % dan 2,74 %. Kemudian pada Tahun 2020 turun menjadi 2,60%. Pada Tahun 2021, TPT Kabupaten Tana Toraja sebesar 3,09 %, masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,72 % dan Nasional sebesar 6,49 %.

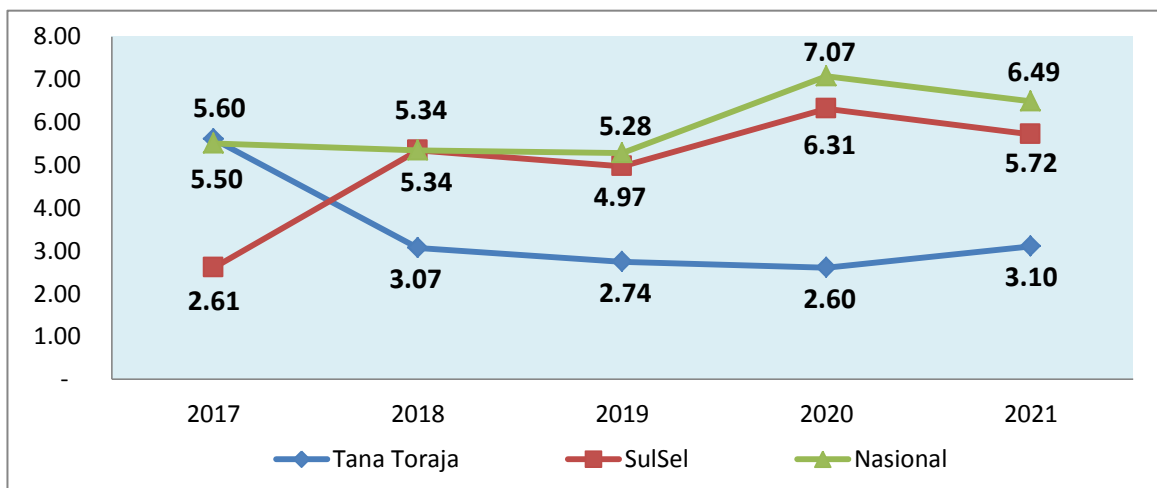
Penurunan jumlah TPT di Kabupaten Tana Toraja sebagian besar dipengaruhi oleh tenaga kerja yang menggeluti lapangan pekerjaan



dibidang pertanian. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang terbesar di Kabupaten Tana Toraja. Tenaga kerja di sektor ini tidak terlalu terdampak terhadap dampak pandemi Covid-19. Tenaga kerja yang terjun ke usaha bidang pertanian dapat menurunkan jumlah pengangguran terbuka. Selain itu tenaga kerja ada juga yang berkecimpung di sektor perdagangan dan industri. Penurunan TPT juga terjadi karena terserapnya tenaga kerja diberbagai sektor usaha serta pengaruh positif dari pelatihan tenaga kerja. Dengan kata lain tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tana Toraja lebih banyak yang bekerja pada sektor informal. Selengkapnya TPT dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 3.2

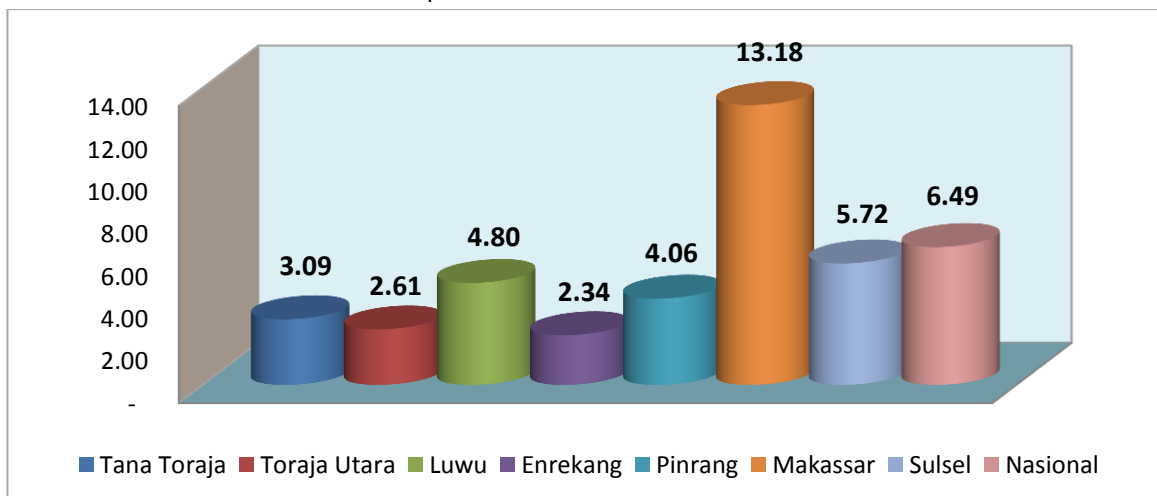
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Grafik 3.3

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2022

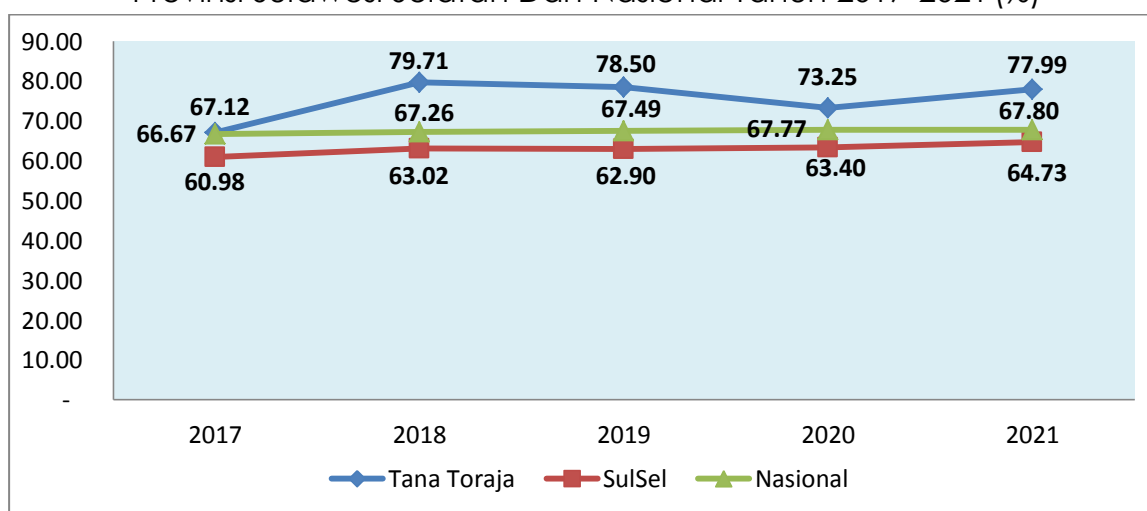


Indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan penduduk usia produktif terhadap kegiatan produksi barang dan jasa adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/daerah. Semakin tinggi TPAK, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah tersebut ingin terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga produktivitas daerah dapat didorong, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bonus demografi Kabupaten Tana Toraja akan menjadi bencana demografi.

TPAK Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan tren fluktuatif. Pada Tahun 2017, TPAK Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 67,12 persen, meningkat menjadi 79,71 persen pada Tahun 2018. Peningkatan ini utamanya didorong oleh meningkatnya jumlah pencari kerja. Kemudian TPAK mengalami penurunan menjadi 73,25 persen pada Tahun 2020 yang dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang tidak masuk angkatan kerja bertambah banyak. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 77,99 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.4

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2022

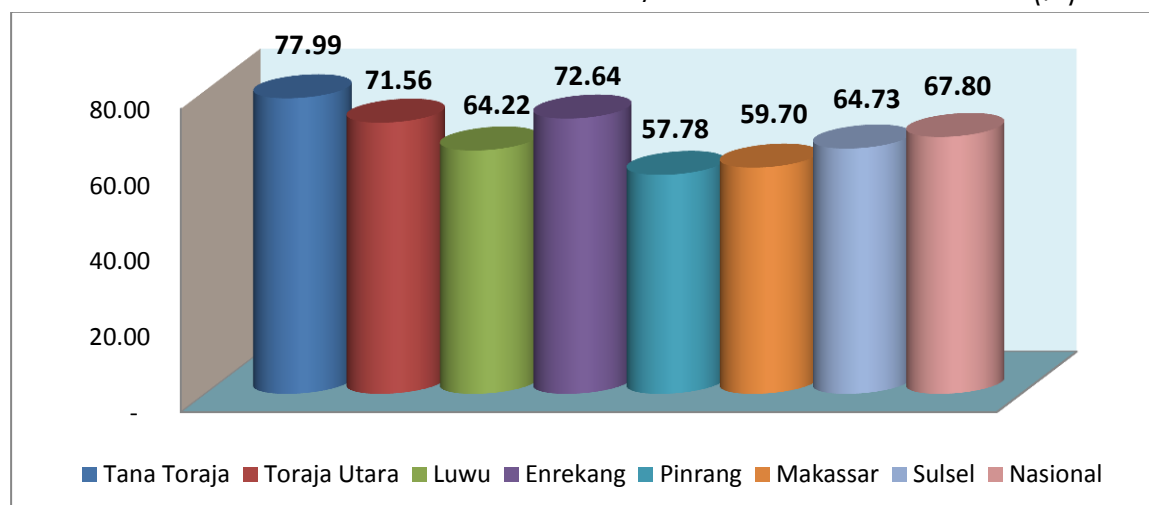
Pada Tahun 2021, TPAK Kabupaten Tana Toraja sebesar 77,99 persen, berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 64,73 persen dan Nasional sebesar 67,80 persen. Sementara jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, TPAK Kabupaten Tana Toraja lebih tinggi



dibanding dengan Toraja Utara (71,56 persen), Enrekang (72,64 persen), dan Pinrang (57,78 persen).

Grafik 3.5

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Tana Toraja, Prov. Sulsel dan Nasional Serta Kab./Kota Sekitar Tahun 2021 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Dilihat dari segi Pengeluaran perkapita Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 hingga Tahun 2021, pengeluaran perkapita laki-laki jauh lebih baik dibandingkan dengan perempuan yaitu Tahun 2017 sebesar Rp.10.053 ribu dan Rp.4.908 ribu. Pada Tahun 2018 pengeluaran perkapita laki-laki menjadi sebesar Rp.10.461 ribu, sedangkan untuk perempuan Tahun 2018 sebesar Rp.5.135 ribu dan Tahun 2019 menjadi sebesar Rp.10.714 ribu dan Rp.5.227 ribu, Tahun 2020 pengeluaran perkapita laki-laki menjadi sebesar Rp.10.614 ribu sedangkan untuk perempuan sebesar Rp. 5.208 ribu, dan untuk tahun 2021 pengeluaran perkapita laki-laki menjadi sebesar Rp.10.986 ribu sedangkan untuk perempuan sebesar Rp. 5.336 ribu. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

NO.	TAHUN	USIA HARAPAN HIDUP		HLS		RRLS		PENGELUARAN PER KAPITA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	2017	70,59	74,42	13,22	13,72	8,49	7,77	10.053	4.908
2.	2018	70,83	74,66	13,23	14,01	8,50	7,78	10.461	5.135
3.	2019	71,20	75,00	13,24	14,09	8,51	7,94	10.714	5.227
4.	2020	71,37	75,13	13,50	14,10	8,73	8,21	10.614	5.208
5.	2021	71,48	75,22	13,51	14,16	8,74	8,49	10.986	5.336

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

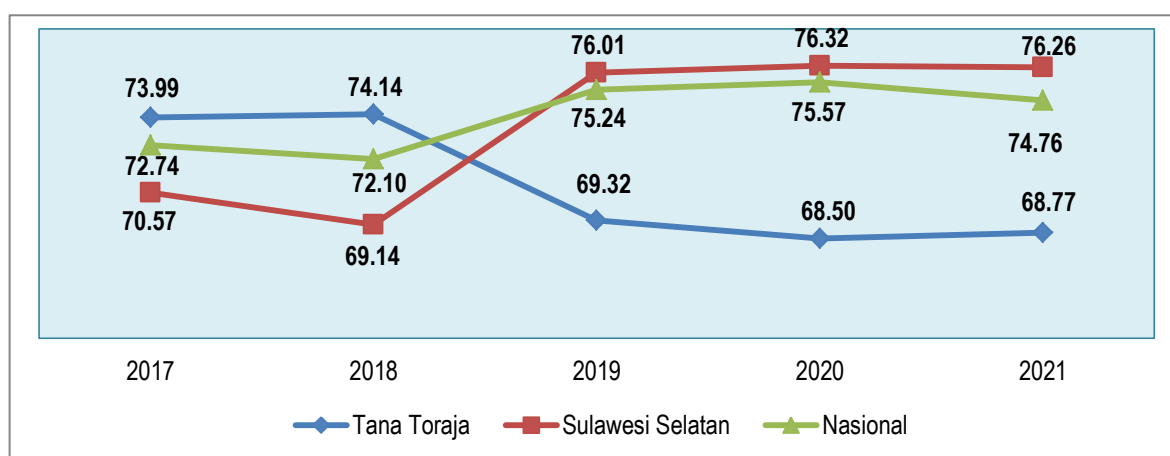


Salah satu faktor penentu daya saing suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal kemampuan, kapabilitas, maupun produktivitasnya. Secara komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir setara. Artinya, pembangunan yang dicapai, separuhnya ditentukan oleh perempuan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan, perlu adanya kesetaraan gender, yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan. Namun demikian, sampai sekarang kesetaraan gender di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami fluktuasi, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 73,99 menjadi sebesar 74,14 namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 69,32 pada Tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 68,50 dan meningkat menjadi 68,77 pada tahun 2021. Kondisi tersebut sejalan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sama-sama mengalami fluktuasi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 3.6

Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

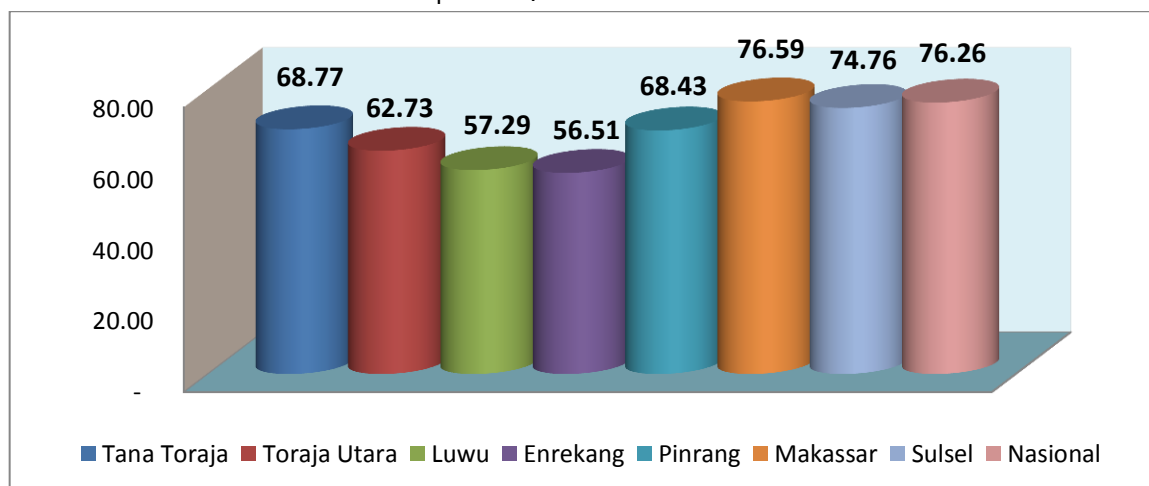
Pada Tahun 2021, IDG Kabupaten Tana Toraja sebesar 68,77, berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 76,26 dan Nasional



sebesar 74.76 serta berada di posisi ke-10 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 3.7

Perbandingan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2022

Salah satu komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020 perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen mengalami fluktuatif, yaitu dari 20 persen pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 22,22 persen. Namun Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 13,33 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah perempuan yang ingin masuk atau bisa masuk dalam parlemen di Tana Toraja mengalami penurunan, sehingga dominasi laki-laki masih kuat.

Tabel 3.3

Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	20,00	20,00	22,22	13,33	13.33
2	Perempuan sebagai tenaga Profesional (%)	55,58	56,64	55,23	58,60	59.57
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	40,55	41,07	42,67	43,00	43.48

Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

3.1.1.5 Pendapatan Perkapita (PDRB)

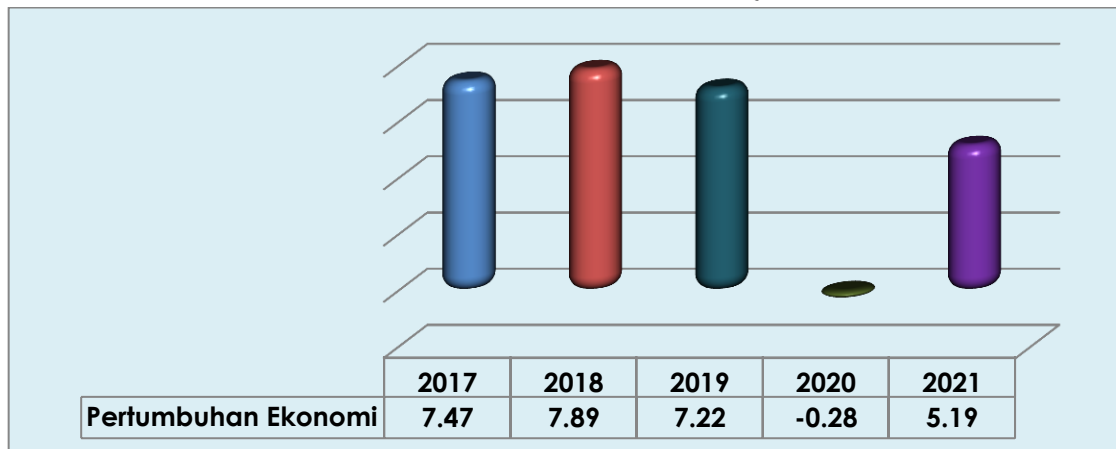
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan yang



sangat signifikan akibat dari adanya pandemic Covid-19. Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2017 sebesar 7,47 %. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 7,89 % dan tahun 2019 turun menjadi 7,22 %. Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi -0,28 % karena pandemi Covid-19 namun meningkat menjadi 5,19 % pada tahun 2021. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.8

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 – 2021

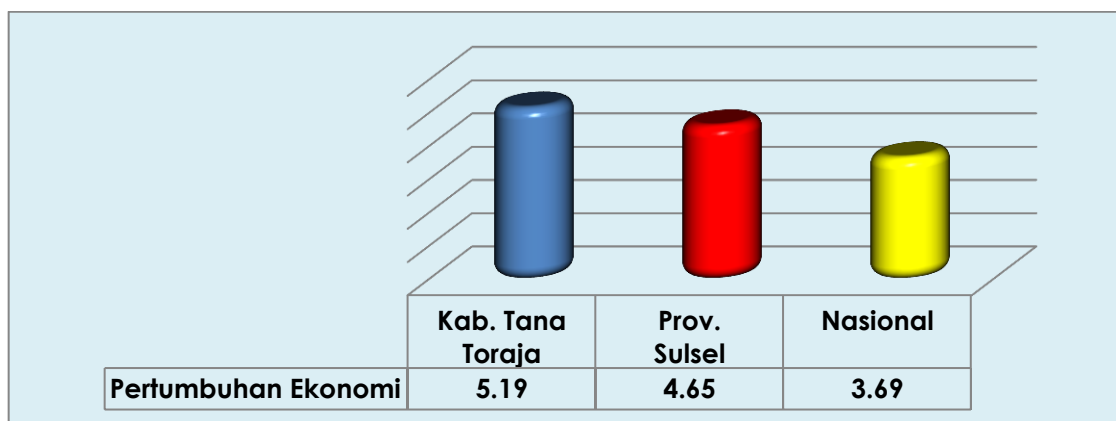


Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 tergolong tinggi apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional. Nilai pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 yaitu 5,19 % sedangkan pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 4,65 %. Untuk tingkat Nasional, nilai pertumbuhan perekonomian hanya 3,69 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.9

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022



Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun terus membaik. Hal ini dapat terlihat dari angka PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2021 sebesar Rp. 8.087,09 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.571,14 miliar rupiah. Kondisi perekonomian Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun terus membaik, ditunjukkan dengan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang selalu mengalami peningkatan, terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar)		% Terhadap Sulawesi Selatan
	Sulawesi Selatan	Tana Toraja	
2021	545.230,03	8.087,09	1,48

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Tabel 3.5

PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Tana Toraja dengan Wilayah
yang Setara (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sidrap	40,24	43,25	46,01	44,12	47,19
2	Pinrang	43,95	48,29	52,05	49,84	53,41
3	Enrekang	31,28	32,81	35,36	33,54	36,06
4	Tana Toraja	26,15	29,31	31,96	27,10	28,36
5	Toraja Utara	33,80	37,84	41,50	37,37	39,16
6	Makassar	95,67	106,23	116,87	125,32	133,31
7	Palopo	36,83	40,32	43,02	43,66	46,52
Sulawesi Selatan		43,82	47,82	52,64	55,68	59,66

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Tabel 3.6

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDRB Kabupaten Tana Toraja
atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 – 2021

Tahun	PDRB Berlaku Prov. Sulawesi Selatan (Juta)	PDRB Berlaku Kab. Tana Toraja (Juta)	% PDRB Kab. Tana Toraja terhadap Prov. Sulawesi Selatan
2017	415.588.200,98	6.054.907,73	1,46
2018	461.719.487,85	6.824.872,59	1,48
2019	504.321.740,00	7.479.773,62	1,48
2020	504.478.540,00	7.571.142,15	1,50
2021	545.230.030,00	8.087.090,00	1,48

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022



Tabel 3.7
Distribusi PDRB menurut lapangan Usaha atas dasar harga berlaku
Tahun 2017 – 2021

Lapangan Usaha PDRB	Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah) Harga Berlaku				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	1.561,59	1.712,90	1.728,64	1.775,46	1.893,82
B. Pertambangan Dan Penggalian	88,22	94,57	102,91	103,29	106,22
C. Industri Pengolahan	478,12	513,22	608,24	582,11	635,00
D. Pengadaan Listrik Dan Gas	6,83	6,83	8,07	8,62	9,59
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	5,68	6,26	6,83	7,33	7,70
F. Konstruksi	776,98	889,40	1.004,92	974,19	1.059,05
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	1.021,60	1.191,73	1.341,10	1.332,96	1.476,05
H. Transportasi Dan Pergudangan	149,80	167,84	188,92	175,15	200,71
I. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	97,39	110,09	122,76	112,92	121,91
J. Informasi Dan Komunikasi	237,51	269,56	301,93	335,63	356,96
K. Jasa Keuangan Dan Asuransi	186,21	207,42	222,64	226,75	243,94
L. Real Estate	315,36	340,21	373,67	408,98	424,65
M,N. Jasa Perusahaan	5,08	5,77	6,21	6,06	6,45
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	503,41	602,35	670,50	678,77	647,03
P. Jasa Pendidikan	326,63	368,45	417,18	443,52	463,12
Q. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	171,57	197,06	220,82	251,95	273,73
R,S,T,U. Jasa Lainnya	121,93	139,99	158,89	147,18	160,75
PDRB	6.054,91	6.824,87	7.479,77	7.571,14	8.087,09

Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Perkembangan angka PDRB Kabupaten Tana Toraja mengalami perubahan struktur yang cukup nyata. Kegiatan ekonomi Kabupaten Tana Toraja dilihat dari sisi besaran nominal PDRB selama periode Tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan angka PDRB (atas dasar harga berlaku) yang selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 misalnya nilainya telah mencapai sekitar 8.087,09 Miliar Rupiah.

Karakteristik penting yang melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat perubahan struktural dan pergeseran sektoral. Komponen utama dari perubahan struktural ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang pertanian ke non pertanian.

Perkembangan perekonomian sebagaimana tersebut diatas, baik langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap



pencapaian kinerja pada segala bidang, terutama yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi indikator penilaian tingkat kesejahteraan manusia sebagai dampak pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pertumbuhan riil ekonomi Kabupaten Tana Toraja dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan pada Tahun 2021 menunjukkan sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,63% dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar minus 5.83 %. Berdasarkan data distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Tana Toraja masih didominasi oleh sektor pertanian dan konstruksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Menurut Kategori Tahun 2021

Kategori	Uraian	Distribusi (%)	Laju Pertumbuhan (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,42	6,32
B	Pertambangan dan Penggalian	1,31	1,29
C	Industri Pengolahan	7,85	7,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	7,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	4,03
F	Konstruksi	13,10	2,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,26	8,58
H	Transportasi dan Pergudangan	2,48	11,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,51	7,39
J	Informasi dan Komunikasi	4,41	6,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,02	3,45
L	Real Estate	5,25	3,82
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	5,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,00	-5,83
P	Jasa Pendidikan	5,73	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,38	8,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,99	8,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	5,19

Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu instrumen yang dapat menggambarkan kinerja pembangunan di suatu daerah. Selain itu IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses



hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dll. Indeks ini juga mampu memberikan gambaran perbandingan pembangunan antar waktu dan perbandingan antar daerah, dalam hal ini antar kabupaten. Perkembangan IPM sangat ditentukan oleh perkembangan ketiga komponen yang membentuknya yakni Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan dan Dimensi Standar Hidup Layak.

Pada Tahun 2021 IPM Kabupaten Tana Toraja sebesar 69,49 berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 72,24 dan dibawah Nasional sebesar 72,29 serta berada di posisi ke-16 diantara 24 Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Angka IPM Kabupaten Tana Toraja dan daerah Sekitar
Tahun 2018- 2021

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM			
		2018	2019	2020	2021
7300	SULAWESI SELATAN	70,90	71,66	71,93	72,24
7315	Pinrang	70,62	71,12	71,26	71,45
7316	Enrekang	72,15	72,66	72,76	72,91
7318	Tana Toraja	67,66	68,25	68,75	69,49
7326	Toraja Utara	68,49	69,23	69,33	69,75
7371	Kota Makassar	81,73	82,25	82,25	82,66
7373	Kota Palopo	77,30	77,98	78,06	78,38

Sumber Data : BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun, 2022

Capaian IPM Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2021 tergolong tingkat "Sedang" (Nilai IPM diantara $60 \leq \text{IPM} < 70$). Pada periode Tahun 2018-2021, Nilai IPM Kabupaten Tana Toraja terus mengalami peningkatan yang dari tahun ke tahun sejalan dengan perbaikan dan pengembangan dimensi Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup Layak. Kecepatan laju IPM ini di pengaruhi oleh peningkatan yang cukup signifikan dari Dimensi Kesehatan dan Standar Hidup Layak. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Tana Toraja masih menitik beratkan pada dimensi pendidikan dan kesehatan, belum merata untuk ketiga dimensi penyusun IPM. Dengan harapan bahwa melalui pendidikan dan kesehatan penduduk yang baik akan meningkatkan peluang penduduk Tana Toraja mendapatkan pekerjaan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.10

IPM Kabupaten Tana Toraja menurut Komponennya Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Sat.	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kesehatan						
	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,56	72,80	73,15	73,30	73,40
2	Pendidikan						
	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,93	7,94	8,02	8,26	8,51
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,25	13,50	13,58	13,80	13,86
3	Standar Hidup						
	Pengeluaran Perkapita	Rp (000)	6.801	7.087	7.253	7.217	7.434
	IPM		66,82	67,66	68,25	68,75	69,49

Sumber Data : Publikasi BPS Provinsi 2022

Di samping itu pengukuran pembangunan manusia idealnya sangat erat kaitannya dengan beberapa aspek kehidupan manusia itu sendiri antara lain daya beli masyarakat, dinamika aspek ini sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan selain pengangguran, yang bekerja pun masih diperhadapkan pada masalah upah yang masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR), produktivitas rendah, tidak adanya jaminan sosial dan sebagainya.

3.1.1.6 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang/jasa secara umum. Perhitungan inflasi mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. IHK memberikan informasi mengenai perkembangan naik atau turunnya harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Untuk penyusunan IHK, BPS melakukan Survei Harga Konsumen (SHK) setiap bulan dan Survei Biaya Hidup (SBH) setiap lima tahun di kabupaten/kota terpilih. Di Sulawesi Selatan, terdapat lima kabupaten/kota terpilih sebagai sampel, yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Bone (Watampone), dan Bulukumba. Perhitungan angka inflasi dapat dilakukan di masing-masing kabupaten/kota atau diagregasi hingga level provinsi dan nasional.

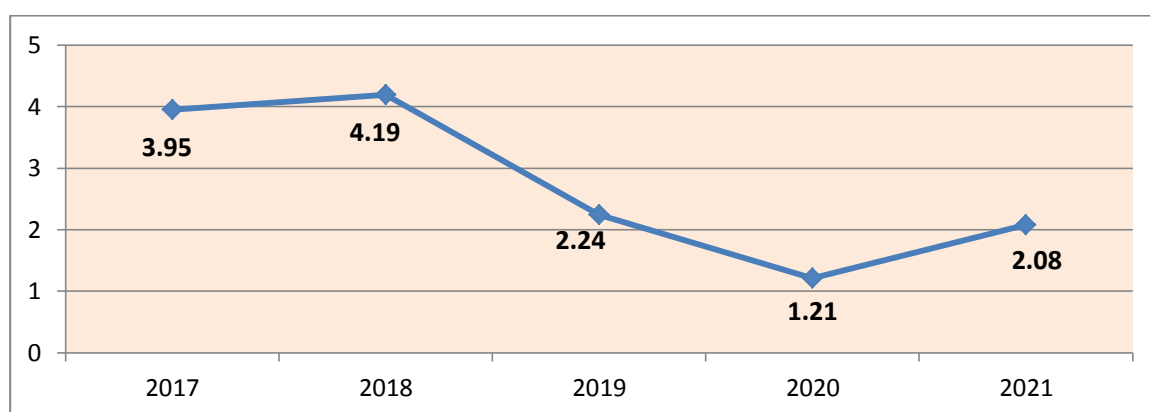
Inflasi Kabupaten Tana Toraja merujuk pada inflasi Kota Palopo. Pada Tahun 2021, tingkat inflasi mencapai 2,08 persen, lebih tinggi dibanding dengan Tahun 2020 yang berada pada angka 1,21 persen. Peningkatan ini



dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga seluruh kelompok pengeluaran. Dari sebelas Kelompok Pengeluaran, lima diantaranya mengalami inflasi terbesar yaitu: Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,01 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 1,79 persen; Kelompok Makanan, minuman dan Tembakau sebesar 1,44 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,18 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya sebesar 1,15 persen.

Grafik 3.10

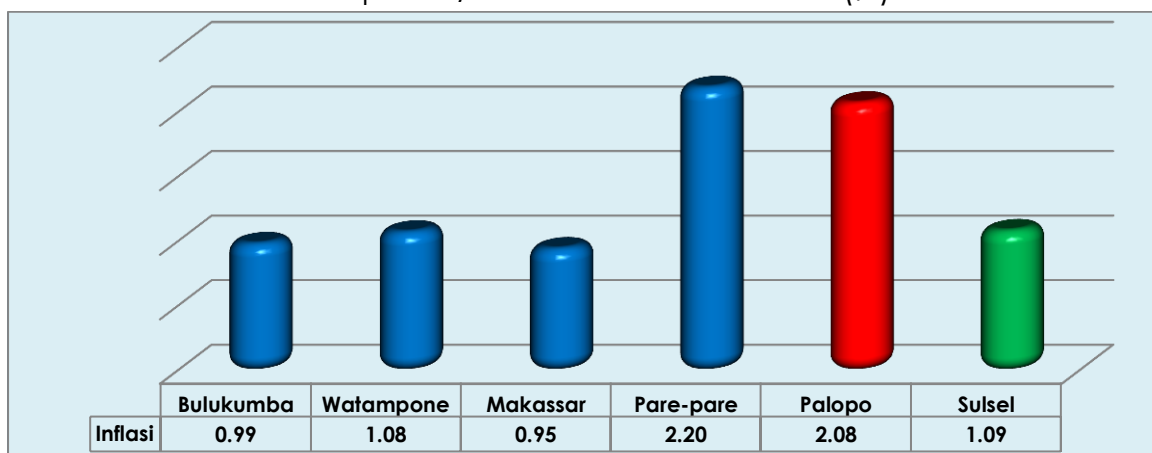
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2022

Grafik 3.11

Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2021 (%)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD



Kabupaten Tana Toraja terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian anggaran yang dilakukan diharapkan efektif dengan memberi kepuasan kepada masyarakat yang *pro growth*, *pro job*, *pro poor* dan *pro environment*, sehingga dalam memproyeksikan pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2023 diperlukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja dengan tingkat yang moderat pada Tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,59 – 6,41%;
2. Tingkat inflasi daerah pada Tahun 2023 diperkirakan sebesar 2.47% – 2.71%;
3. Adanya pengalihan pajak dari pusat ke daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah lebih dari 5% - 10%.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*).

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada



penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Sebagai RKP tahun keempat dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 RKP 2023 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu PN1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; PN3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan PN 7 : Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

RKP 2023 menetapkan Indikator Makro yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-3,6 Persen, Tingkat Kemiskinan 7,0-8,0 persen, Rasio Gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,29-73,35.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja

Arah kebijakan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ditujukan terutama untuk mendukung Misi 4 yaitu **Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya** dengan fokus mempercepat pemulihan ekonomi dengan memberdayakan usaha masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu Peningkatan nilai tambah produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran dan pengembangan agrowisata serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM, industri rumah tangga dan ekonomi kreatif. Arah kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target indikator



pembangunan Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2023. Target Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Target Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023		
			Target RPJMD Kab. Tana Toraja	Target RKPD Kab. Tana Toraja	Target RKPD Provinsi SulSel
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,18	70,66	73,17
2	Tingkat Kemiskinan	%	12,00	10,83	7,75-8,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,35	2,92	5,69
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,50	5,59 – 6,41	5,06 – 6,59
5	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	33,15	33,15	65,98
6	Rasio Gini	%	0,325	0,319	0,376-0,381

Sumber : Bappeda Kab. Tana Toraja, 2022 Diolah

3.2 Arah Kebijakan keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Dalam rangka menjawab kebijakan pembangunan daerah perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan instrument fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola



secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Peningkatan kasus Covid-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah, penurunan pendapatan daerah, serta peningkatan belanja dan pembiayaan daerah. Dampak pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah Pusat, provinsi, sampai ke Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian. Salah satu Upaya pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu kebijakan keuangan di daerah di masa pandemi covid-19, pemerintah daerah diberikan beberapa wewenang, diantaranya adalah untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dana, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menguraikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD Kabupaten Tana Toraja terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 Rp. 1,108,713,266,675.71 menurun menjadi Rp. 1,098,537,667,153.01 pada Tahun 2021. Hal ini sebagai imbas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyerang semua lini. Terutama sektor pariwisata yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Proyeksi pendapatan pada Tahun 2023 ditargetkan pada angka Rp. 1,222,525,000,000.00, dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai pemerintah daerah. Untuk Tahun 2024 pendapatan diproyeksikan pada angka Rp. 1,278,883,000,000.00. Kondisi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi ekonomi tahun 2023 akan lebih baik dari kondisi tahun sebelumnya sehingga pemerintah telah optimis dalam menargetkan pendapatan daerah. Selanjutnya realisasi Belanja daerah Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 (tahun berjalan) serta proyeksi pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kab. Tana Toraja Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No. Rek	Uraian (PP No. 58/2005)	Jumlah						
		Realisasi Tahun 2020	No. Rek	Uraian (PP No. 12/2019)	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1.	PENDAPATAN DAERAH	1,108,713,266,675.71	4.	PENDAPATAN DAERAH	1,098,537,667,153,01	1,170,671,349,000	1,222,525,000,000	1,278,883,000,000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	103,574,033,543.15	4.1	Pendapatan Asli Daerah	104,229,036,894,01	125,500,000,000	119,800,000,000	126,050,000,000
1.1.1	Pajak Daerah	10,977,830,368.50	4.1.1	Pajak Daerah	13.007.509.669,00	16,250,000,000	12,950,000,000	13,550,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	6,366,279,253.75	4.1.2	Retribusi Daerah	6.916.344.113,00	16,000,000,000	8,550,000,000	10,350,000,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,599,872,702.00	4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.489.122.352,00	9,000,000,000	8,700,000,000	8,800,000,000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	77,630,051,218.90	4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.816.060.760,01	84,250,000,000	89,600,000,000	93,350,000,000
1.2	Dana Perimbangan	648.551.491.882,00	4.2.	Pendapatan Transfer	922.170.271.694,00	1,010,206,349,000	1,037,975,000,000	1,085,108,000,000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	15,643,206,472.00	4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	879.005.244.626,00	949.137.977.000	964,600,000,000	1,008,350,000,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	544,504,787,000.00	4.2.01.01	Dana Perimbangan	754.231.210.626,00	838.227.837.000	831,500,000,000	869,100,000,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	88,403,498,410.00	4.2.01.05.	Dana Desa	124.774.034.000,00	110.910.140.000	133,100,000,000	139,250,000,000
			4.2.02.	Transfer Antar Daerah	43.165.027.068,00	61.068.372.000	73,375,000,000	76,758,000,000
			4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	38.946.655.068,00	57.000.000.000	41,400,000,000	43,308,000,000
			4.2.02.02	Bantuan Keuangan	4.218.372.000,00	4.068.372.000	31,975,000,000	33,450,000,000



No. Rek	Uraian (PP No. 58/2005)	Jumlah						
		Realisasi Tahun 2020	No. Rek	Uraian (PP No. 12/2019)	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1.3	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	356.587.741.251,56	4.3	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	72.138.358.565,00	34.965.000.000	64,750,000,000	67,725,000,000
1.3.1	Hibah	46,359,588,773.00	4.3.01.	Pendapatan Hibah	28.101.016.487,00	34.965.000.000	20,800,000,000	21,750,000,000
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	38,444,804,838.56	4.3.02.	Dana Darurat	-	0	0	0
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	109,331,348,239.00	4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	44.037.342.078,00	0	43,950,000,000	45,975,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dana Pemerintah Lainnya	38,966,470,400.00						
1.3.6	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa/Lembang	123,485,529,000.00						
	Jumlah Pendapatan	1,108,713,266,675.71		Jumlah Pendapatan	1,098,537,667,153,01	1.170.671.349.000	1,222,525,000,000	1,278,883,000,000

Sumber Data : BPKAD dan Bappeda Kab. Tana Toraja, 2022



3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun demikian, komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Tana Toraja belum sebanding dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD yang berarti meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan adalah :

1. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pajak dan retribusi;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan kewajiban warga negara;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan termasuk pendayagunaan



- aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan BLUD;
4. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana transfer umum dan Dana transfer khusus;
 5. Sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan yang intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi;
 6. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi;
 7. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar OPD terkait serta peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah;
 8. Penyempurnaan dan pemutakhiran data base pajak daerah serta optimalisasi data perpajakan;
 9. Ekstensifikasi dan Pengkajian jenis pajak dan retribusi yang baru;
 10. Tersedianya regulasi pajak dan retribusi daerah yang jelas dan tepat guna.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan



Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Tahun 2023 diharapkan telah memasuki penyesuaian terhadap kebijakan new normal pasca Pandemi Covid-19 serta secara bertahap dapat menyelesaikan permasalahan fundamental yang dihadapi Kabupaten Tana Toraja. Belanja Pemerintah Daerah sebagai salah satu instrument utama kebijakan fiskal, didorong agar lebih optimal dengan mulai menggunakan spending better yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (result based), efisiensi kebutuhan dasar serta antisipatif.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.3.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta



Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan



peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja modal meliputi :

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan



- yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.3.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.3.4 Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada Pemerintah Desa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun



Anggaran 2023, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2022 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum (block grant) dan bantuan khusus (specific grant), antara lain Alokasi Dana Desa (ADD).

Prioritas Pembangunan Daerah sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD 2021-2026 yang akan datang. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Secara rinci proyeksi belanja daerah Tahun 2023 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.13

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kab. Tana Toraja Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No. Rek	Uraian (PP No.58/2005)	Jumlah						
		Realisasi Tahun 2020	No. Rek	Uraian (PP No.12/2019)	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
2.	BELANJA DAERAH	998,025,797,653.57	5	BELANJA DAERAH	1.049.639.256.471,57	1.170.671.349.000	1,223,993,832,000	1,279,058,066,000
2.1	Belanja Tidak Langsung	716,888,874,500	5.1	Belanja Operasi	708.893.954.125,57	770.936.371.903	780,442,414,000	805,315,752,000
2.1.1	Belanja Pegawai	412,138,651,824.00	5.1.1	Belanja Pegawai	440.418.577.118,00	496.809.159.174	499,178,985,000	511,658,460,000
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	248.220.956.741,57	246.988.856.729	266,963,429,000	264,457,292,000
2.1.3	Belanja Subsidi	1,500,000,000.00	5.1.4	Belanja Subsidi	1.373.697.200,00	575.640.000	2,000,000,000	2,000,000,000
2.1.4	Belanja Hibah	59,822,711,478.00	5.1.5	Belanja Hibah	18.061.428.266,00	25.671.316.000	12,000,000,000	60,000,000,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	18,000,000.00	5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	819.294.800,00	891.400.000	300,000,000	200,000,000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten dan Desa	332,377,150.00						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Desa	186,562,034,048.00	5.2	Belanja Modal	155.404.494.851,00	215.145.279.097	241,836,418,000	230,117,314,000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	56,515,100,000.00	5.2.1	Belanja Tanah	0	500.000.000	5,000,000,000	0
			5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	40.268.649.540,00	43.672.731.646	33,000,000,000	37,000,000,000
2.2	Belanja Langsung	281,136,923,154	5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	30.161.338.486,00	38.474.269.426	70,711,963,000	55,615,543,000
			5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.400.315.825,00	131.351.922.225	131,124,455,000	137,501,771,000
			5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	574.191.000,00	1.146.355.800	2,000,000,000	0
			5.3	Belanja Tidak Terduga	3.557.364.000,00	18.000.000.000	10,000,000,000	10,000,000,000
			5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.557.364.000,00	18.000.000.000	10,000,000,000	10,000,000,000



No. Rek	Uraian (PP No.58/2005)	Jumlah						
		Realisasi Tahun 2020	No. Rek	Uraian (PP No.12/2019)	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
			5.4	Belanja Transfer	181.783.443.495,00	166.589.698.000	191,715,000,000	200,625,000,000
			5.4.01	Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/ Desa**)	244.598.427,00	400.000.000	500,000,000	500,000,000
				Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	129.631.427,00	150.000.000	500,000,000	500,000,000
				Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	114.967.000,00	250.000.000		
			5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	181.538.845.068,00	166.189.698.000	191,215,000,000	200,075,000,000
				Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	181.538.845.068,00	166.189.698.000	191,215,000,000	200,075,000,000
	Jumlah Belanja	998,025,797,653.57		Jumlah Belanja	1.049.639.256.471,57	1.170.671.349.000	1,223,993,832,000	1,279,058,066,000

Sumber Data : BPKAD & Bappeda Kab. Tana Toraja, 2022



Merujuk Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp. 1,223,993,832,000** yang dialokasikan pada Belanja Operasi sebesar **Rp. 747,442,414,000**, Belanja Modal sebesar Rp. **241,836,418,000**, Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 10,000,000,000**, serta Belanja Transfer sebesar Rp. **191,715,000,000**. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023.

Berdasarkan data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan fasilitas Sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** di Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 204.451.400.000,-** atau **16,70 persen** dari total Belanja Daerah sebesar **Rp. 1,223,993,832,000,-** dengan rincian alokasi sebagai berikut :

Tabel 3.14

Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2023

No.	Bidang Urusan	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
1.	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	74,500,000,000	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	113.611,400,000	Dinas Kesehatan & RSUD LakiPadada
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	550,000,000	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	120,000,000	Dinas Kesehatan



No.	Bidang Urusan	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	3,900,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	550,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	880,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	330,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Penanggulangan Bencana	300,000,000	BPBD
6.	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	360,000,000	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	200,000,000	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	150,000,000	Dinas Sosial
TOTAL			204.451.400.000	

Sumber : Bappeda Kab. Tana Toraja, 2022 Diolah

Disamping itu dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut, telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mana nomenkelatur perangkat daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Tabel 3.15
Proyeksi Pagu Belanja Daerah Tahun 2023

No.	OPD	Pagu RKPD TA. 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	213,947,000,000
2	Dinas Kesehatan	119,783,400,000
3	RSUD LakiPadada	100,537,000,000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131,146,332,000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20,670,000,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11,874,000,000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,317,000,000
8	Dinas Sosial	5,229,000,000
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,398,000,000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,051,000,000
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5,978,000,000
12	Dinas Lingkungan Hidup	4,198,000,000
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,992,000,000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembang	3,989,000,000
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8,812,000,000
16	Dinas Perhubungan	5,573,000,000
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3,576,000,000
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3,751,000,000
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,081,000,000
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3,788,000,000
21	Dinas Kebudayaan	3,025,000,000
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,356,000,000
23	Dinas Pariwisata	10,239,000,000
24	Dinas Pertanian	29,756,000,000
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4,858,000,000
26	Sekretariat Daerah	34,135,000,000
27	Sekretariat DPRD	29,483,000,000
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,723,000,000
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	264,510,000,000
30	Badan Pendapatan Daerah	7,515,000,000
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,878,000,000
32	Inspektorat Daerah	11,048,000,000
33	Kecamatan	149,425,500,000
34	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	5,351,600,000
Total Pagu		1,223,993,832,000

Sumber : Bappeda, 2022 Diolah

Dengan berakhirnya agenda pembangunan milenium (MDGs) pada Tahun 2015, Indonesia bersama-sama dengan 193 negara lainnya sepakat untuk mengadopsi agenda pembangunan global yang dinamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Belajar dari



pengalaman MDGs lalu, kini Indonesia berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Indonesia tidak ingin kehilangan momentum dan euphoria implementasi SDGs masyarakat dunia.

Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Sebagai upaya pencapaian target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RKPD. Sehingga dalam mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengalokasikan Anggaran sebesar **Rp. 335,809,332,000,-** atau **27,44 persen** dari total Belanja Daerah sebesar Rp. **1.223.993.832.000,-** untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian Target-target TPB/SDGs agar dapat sejalan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Tabel 3.16
Proyeksi Alokasi Anggaran Program Pembangunan terhadap
TPB/SDG's Tahun 2023

No.	Tujuan TPB/Sdgs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
1	Tujuan 1	1 Program Rehabilitasi Sosial	360,000,000
	Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun;	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	119,100,000,000
		3 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	120,000,000
		4 Program Pengelolaan Pendidikan	74,500,000,000
		5 Program Pengembangan Kurikulum	150,000,000
		6 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150,000,000
		7 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	75,000,000
		8 Program Kawasan Permukiman	175,000,000
		9 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	815,000,000
		10 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5,500,000,000
		11 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	200,000,000
		12 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12,000,000,000
		13 Program Penyelenggaraan Jalan	95,214,332,000
		14 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	150,000,000
		15 Program Hubungan Industrial	50,000,000
		16 Program Penempatan Tenaga Kerja	165,000,000
		17 Program Pemberdayaan Sosial	1,080,000,000
		18 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6,150,000,000
		19 Program Pengendalian Penduduk	55,000,000
		20 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	300,000,000
		21 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5,200,000,000
		22 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5,160,000,000



No.	Tujuan TPB/Sdgs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
		23 Program Pencatatan Sipil	155,000,000
2	Tujuan 2	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	550,000,000
	Tanpa Kelaparan : Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;	2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	750,000,000
		3 Program Pengawasan Keamanan Pangan	75,000,000
		4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		5 Program Pengelolaan Pendidikan	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		6 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	350,000,000
		7 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
3		Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Di Semua Usia;	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas : Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua;	1 Program Pengelolaan Pendidikan	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
5	Tujuan 5 Kesetaraan Gender : Mencapai Kesetaraan	1 Program Perlindungan Perempuan	270,000,000
		2 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	160,000,000
		3 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	75,000,000



No.	Tujuan TPB/Sdgs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	4 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	175,000,000
		5 Program Pengelolaan Pendidikan	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		6 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
6	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		2 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,500,000,000
		3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,500,000,000
7	Tujuan 7	Bukan kewenangan Daerah Kab. Tana Toraja	
Energi Bersih dan Terjangkau : Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua;			
8	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua	1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1,425,000,000
		2 Program Perencanaan Tenaga Kerja	-
		3 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		4 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 2
9	Tujuan 9 Industri, Inovasi Dan Infrastruktur : Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Kreatif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi;	1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	925,000,000
		2 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan & Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	20,000,000
		3 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	175,000,000



No.	Tujuan TPB/Sdgs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
		4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100,000,000
10	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan : Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara;	1 Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		2 Program Kawasan Permukiman	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		4 Program Pengelolaan Pendidikan	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		5 Program Hubungan Industrial	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
11	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan	1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		2 Program Penyelenggaraan Jalan	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
		3 Program Penanggulangan Bencana	250,000,000
		4 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 6
		5 Program Kawasan Permukiman	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
12	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Berkelanjutan : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan;	1 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 6
13	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Program Penanggulangan Bencana	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 11
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan & Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 9
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 8



No.	Tujuan TPB/Sdgs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
14	Tujuan 14	Bukan kewenangan Daerah Kab. Tana Toraja	
	Ekosistem Lautan : Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan		
15	Tujuan 15	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 6
	Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggunaan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati		
16	Tujuan 16	1 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 5
		2 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 5
		3 Program Perlindungan Khusus Anak	35,000,000
		3 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 5
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif Di Semua Tingkat		
17	Tujuan 17	1 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 2



No.	Tujuan TPB/Sdgs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.	2 Program Pencatatan Sipil	Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
TOTAL			335,809,332,000

Sumber : Bappeda Kab. Tana Toraja, 2022 Diolah

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Peran pembiayaan daerah adalah menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang deficit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang. penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
2. Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup deficit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman



Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
2. Mengoptimalkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;
4. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
5. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja atau memperluas kemitraan.



Tabel 3.17

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

No. Rek.	Uraian (PP No.58/2005)	Jumlah						
		Realisasi Tahun 2020	No. Rek	Uraian (PP No.12/2019)	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	36.456.486.410,23	6	PEMBIAYAAN DAERAH	56.095.331.105,40	0,00	1,468,832,000.00	175,066,000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	36.456.486.410,23	6,1	Penerimaan Pembiayaan	56.095.331.105,40	0,00	6,468,832,000,00	5,175,066,000
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	36.456.486.410,23	6.1.01	SILPA	56.095.331.105,40	0,00	6,468,832,000,00	5,175,066,000
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36.456.486.410,23	6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.095.331.105,40	0,00	6,468,832,000,00	5,175,066,000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	5.000.000.000	5.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00



No. Rek.	Uraian (PP No.58/2005)	Jumlah						
		Realisasi Tahun 2020	No. Rek	Uraian (PP No.12/2019)	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan	36.456.486.410,23		Surplus / Defisit	56.095.331.105,40	0,00	1.468.832.000,00	175.066,000

Sumber Data : BPKAD & Bappeda Kab. Tana Toraja, 2022



3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perhitungan kerangka pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja daerah.

Mendasarkan pada proyeksi pendapatan pada tabel sebelumnya, Kebijakan Kemampuan Keuangan Daerah di prioritaskan pada pemenuhan Belanja Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Operasi antara lain terdiri belanja pegawai, belanja bunga, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja barang/jasa dan belanja hibah sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari rencana penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang.

Tabel 3.18

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2024

Uraian	Sesuai PP 12 Tahun 2019			
	Realisasi (Rp)	Asumsi Capaian (Rp)	Target (Rp)	Proyeksi (Rp)
	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	1.098.537.667.153,01	1,177,670,000,000	1,222,525,000,000	1,278,883,000,000
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	56.095.331.105,40	8,086,040,000	6,468,832,000	5,175,066,000
Total Penerimaan	1.154.632.998.258,41	1,185,756,040,000	1,228,993,832,000	1,284,058,066,000
Pengeluaran Pembiayaan				
Penyertaan Modal pada BIMD	0	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.154.632.998.258,41	1,180,756,040,000	1,223,993,832,000	1,279,058,066,000

Sumber Data : BPKAD & Bappeda Kab. Tana Toraja, 2022 Diolah

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang akan ditetapkan sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan alokasi anggaran lebih dahulu, setelah itu kemudian



Prioritas II dan Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas alokasi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, pembangunan infrastruktur daerah, pengawasan dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya dalam rangka peningkatan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, gini ratio dan penurunan tingkat pengangguran;
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah melalui program unggulan Kepala Daerah. Program ini berhubungan langsung dengan kepentingan publik dan memiliki nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat serta memiliki daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah;
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang merupakan program prioritas di tingkat OPD yang berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi, serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas.

Tabel 3.19

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 – 2024

NO	URAIAN	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	PROYEKSI	
			TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5
I.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.180,756,040,000	1,223,993,832,000	1,279,058,066,000
1	Prioritas I	301,147,440,000	311,567,732,000	340,956,566,000
2	Prioritas II	297,271,000,000	309,504,100,000	321,782,500,000
3	Prioritas III	582,337,600,000	602,922,000,000	616,319,000,000

Sumber : BPKAD & Bappeda Kab. Tana Toraja 2022, diolah.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kecamatan. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026.

Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 serta Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada RKP 2023;
2. Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi yang dijabarkan pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 guna mencapai visi misi yang ditetapkan dalam arah kebijakan Tahun 2023;



4. Konsistensi antara kebijakan Provinsi dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan provinsi maupun kabupaten;
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada Tahun 2023. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan selama 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menentukan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2021 - 2026. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 merupakan Penjabaran Penggalan ke tiga arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030, Penelaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan memperhatikan Prioritas program-program pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Selain itu penyusunan prioritas pembangunan juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan antara lain: 1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, 2) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat, dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Maksimal (SPM), dan 3) Urgensitas Penanganan Isu strategis dan isu global, dalam hal ini Sustainable Development Goals (SDGs).



Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021– 2026 yaitu: **“Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru”**. Visi ini mengandung empat pokok visi di dalamnya yakni Tana Toraja Bangkit, Tana Toraja Produktif, Tana Toraja Tangguh dan Tatanan Kehidupan Baru, yang merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2026.

Tabel 4.1

Penjelasan Visi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026

VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru	Bangkit	Suatu keadaan dimana Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja berupaya menghadirkan tindakan nyata guna memulihkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat Pandemi Covid 19 dan berupaya menghidupkan aktifitas sosial masyarakat dan menggerakkan kegiatan perekonomian daerah dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga 5 tahun ke depan jumlah masyarakat miskin berkurang, produktivitas dan pendapatan masyarakat meningkat, tingkat pengangguran menurun, jumlah masyarakat terdidik meningkat, derajat kesehatan masyarakat meningkat, akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang dibutuhkan mudah dijangkau, serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat makin membaik. Demikian pula halnya dengan kesejahteraan seluruh jajaran aparat pemerintahan pada semua tingkatan pun meningkat
	Produktif	Suatu kondisi dimana masyarakat menjadi semakin sejahtera karena kesiapan serta kesungguhan Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah yaitu Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Air Tawar disamping bidang-bidang usaha potensial lainnya (Ekonomi Kreatif, UMKM, dan Sektor Jasa) agar senantiasa produktif dan dapat memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	Tangguh	Bahwa pembangunan Kabupaten Tana Toraja 5 tahun ke depan akan menciptakan kondisi bagi munculnya prakarsa-prakarsa masyarakat, keswadayaan, semangat gotong-royong, kemampuan beradaptasi serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial-ekonomi-ekologi. Ketentraman hidup masyarakat pun akan terwujud karena didukung oleh kehidupan Kerohanian masyarakat yang semakin berkualitas, terbangunnya tatanan kehidupan yang memiliki sikap kebersamaan, persaudaraan, kepedulian, kesetiakawanan sosial, rukun dan toleran serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya
	Tatanan Kehidupan Baru	Suatu keadaan yang ditandai dengan kesiapan dan kesungguhan Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan adaptasi terhadap Tatanan Kehidupan Baru (new normal) akibat pandemic Covid-19. Pandemic Covid-19 mengharuskan masyarakat Kabupaten Tana Toraja hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat 'berdamai' dengan COVID-19. Tujuan new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19

Sumber : RPJMD Kab. Tana Toraja Tahun 2021 - 2026

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli berbasis kinerja yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (E-Governance);
2. Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan;
3. Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan belajar-mengajar;
4. Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air



Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya;

5. Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup;
6. Membangun, memperbaiki, dan memelihara Infrastruktur (Jalan, jembatan dan Drainase) serta Sarana Prasarana publik vital;
7. Menguatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati.

Tabel 4.2

Perumusan Penjelasan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2021 – 2026

VISI : "TANA TORAJA BANGKIT, PRODUKTIF DAN TANGGUH MENYONGSONG TATANAN KEHIDUPAN BARU"			
No.	Misi	PENJELASAN MISI	POKOK VISI
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli berbasis kinerja yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (E-Governance)	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih (clean governance), dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (menerapkan E-Governance)	Bangkit
2	Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan	Membangun dan mengembangkan sistem mitigasi bencana non alam (Pandemi Covid-19) yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pengendalian serta meningkatkan akses penduduk terhadap layanan kesehatan dan mengupayakan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata	Bangkit, Tatanan Kehidupan Baru
3	Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan belajar-mengajar	Meningkatkan akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan mengupayakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata dengan menekankan pada perbaikan sarana prasarana pendidikan di berbagai wilayah dan peningkatan kualitas proses belajar-mengajar serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Bangkit



VISI : "TANA TORAJA BANGKIT, PRODUKTIF DAN TANGGUH MENYONGSONG TATANAN KEHIDUPAN BARU"			
No.	Misi	PENJELASAN MISI	POKOK VISI
4	Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya	Memperluas aktivitas ekonomi di berbagai wilayah dengan mendorong usaha-usaha yang potensial dan prospektif melalui pemberdayaan usaha masyarakat. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk/komoditas unggulan daerah yang diusahakan secara luas oleh masyarakat	Produktif,
5	Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup	Mendorong kinerja pariwisata dengan mengembangkan seluruh potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Upaya ini akan didukung dengan pelestarian budaya, adat istiadat, kearifan lokal, termasuk lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Produktif, Tatanan Kehidupan Baru
6	Membangun, memperbaiki, dan memelihara Infrastruktur (Jalan, jembatan dan Drainase) serta Sarana Prasarana publik vital	Membangun dan mengembangkan infrastruktur dalam menguatkan inter-konektivitas antar wilayah (termasuk menjangkau lokasi terpencil/pelosok), dan irigasi mendukung pengembangan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, dan meningkatkan kualitas kawasan perumahan/permukiman	Tangguh
7	Menguatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati	Meningkatkan akhlak, moral, dan budi pekertidalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan guna mewujudkan tata kehidupan sosial yang penuh harmoni, toleran, dan saling menghormati	Tangguh, Tatanan Kehidupan Baru

Sumber : RPJMD Kab. Tana Toraja Tahun 2021 - 2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Terpilih Periode 2021-2026, ada 20 (dua puluh) program unggulan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19.
2. Stimulus modal usaha untuk percepatan pemulihan roda ekonomi.



3. Perluasan akses jaringan seluler/internet menjangkau minimal 80% wilayah.
4. Pendidikan dan Kesehatan Gratis.
5. Bea siswa S1 dan S2 bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.
6. Program layanan publik prima untuk urusan-urusan perizinan dan administrasi kependudukan.
7. Program penataan 6 (enam) kota kecamatan (Buakayu, Bittuang, Rembon, Rantetayo, Sangalla dan Ge'tengan-Mebali) sebagai persiapan menjadi kota penyanggah.
8. Program Lembang/Kelurahan Mandiri.
9. Program masyarakat sehat-cerdas-sejahtera.
10. Perbaikan infrastruktur, fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos) lembang/kelurahan-kecamatan-kota.
11. Peningkatan produksi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan air tawar.
12. Program inovasi pariwisata dan revitalisasi kearifan adat-budaya.
13. Pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati asli daerah.
14. Pemberdayaan peran perempuan, pemuda-mahasiswa, pers, lembaga keagamaan, lembaga adat dan sosial kemasyarakatan.
15. Program Tana Toraja bersih, asri, elok, nyaman dan aman.
16. Program birokrasi (ASN) peduli dan berkinerja tinggi.
17. Program bina iman dan amal bakti kesetiakawanan sosial.
18. Pengembangan ekonomi kreatif.
19. Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
20. Tana Toraja sebagai icon "eco culture tourism" Sulawesi Selatan.

Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut :



1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah ditetapkan;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C

Target dari Prioritas, tujuan dan sasaran tahun 2023 menjadi landasan RKPD Tahun 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel berikut :



Tabel 4.3

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

NO	PRIORITAS	TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET			
					RKPD TANA TORAJA TAHUN 2023	RPJMD TAHUN 2021-2026	RKPD SULSEL TAHUN 2023	RKP TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)			
1.	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	B (62)	B (62)	A (81 – 90)	-
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan	Nilai SAKIP	Angka	B (67)	B (67)	A (>80-90)	-
			Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat;	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	Angka	88,35	88,35	-	-
2.	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Nilai	82.22	82.22	78,23	-
		Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	74.6	74.6	-	-
3.	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70.66	70.18	73,17	73,50-73,53
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;	Indeks Pendidikan	Angka	66.30	66.30	67,05	-
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72.40	72.40	77,23	-
4.	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan dalam Mendukung Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat;	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,59 – 6,41	4,50	5,06-6,59	6,70 – 7,30
			Tingkat Kemiskinan	%	10.83	12.00	7,75-8,00	7,75 – 8,00
			PDRB Perkapita	Juta Rupiah	33.15	33.15	65,98	-



NO	PRIORITAS	TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET			
					RKPD TANA TORAJA TAHUN 2023	RPJMD TAHUN 2021-2026	RKPD SULSEL TAHUN 2023	RKP TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)			
		Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan;	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)	%	24,60	24,60	-	-
		Perluasan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan UMKM, Koperasi, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, serta Peningkatan Iklim Investasi yang kondusif.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.92	2.35	5,69	4,95-5,50
		Meningkatnya Sektor UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, Daya Saing Koperasi serta Daya Saing dan Investasi Daerah;	Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	7.98	7.98	-	-
5.	Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dan Revitalisasi Kearifan Adat-Budaya Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah;	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2	2	-	-
		Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata yang Variatif dan Inovatif Berbasis Kearifan Adat-Budaya serta Sumber Daya Alam Pariwisata;	Kunjungan wisatawan	Orang	892.864	892.864	-	-
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkualitas.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55	67,55	73,24	-
		Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)	%	100	100	-	-
6.	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat secara berkelanjutan	Gini Rasio	Angka	0.319	0.325	0,376-0,381	0,375-0,378
		Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah serta Sarana Prasarana Publik Vital.	Indeks layanan Infrastruktur	Angka	66.70	66.70	83,4	-



NO	PRIORITAS	TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET			
					RKPD TANA TORAJA TAHUN 2023	RPJMD TAHUN 2021-2026	RKPD SULSEL TAHUN 2023	RKP TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)			
7.	Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati	Mewujudkan Harmonisasi kehidupan Masyarakat yang Agamis, Toleran, Ramah, Berkualitas Dengan Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Bingkai Kebangsaan dan Kebhinnekaan; Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat.	Angka Kriminalitas	Angka	123	123	24.438	-
			Persentase kasus kriminalitas yang tertangani	%	86	86	-	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Tana Toraja, 2022



Tabel 4.4

Keselarasan Target Pencapaian Target Indikator Makro Nasional,
Provinsi Sulsel dan Kab. Tana Toraja Tahun 2023

No	Indikator Makro	Target		
		Nasional	Prov. Sulsel	Kab. Tana Toraja
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5,06 – 6,59	5,59 – 6,41
2.	Angka Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	7,75-8,00	10,83
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,3 – 6,0	5,69	2,92
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29 – 73,35	73,17	70,66
5.	Gini Ratio	0,375 – 0,378	0,376-0,381	0,319
6.	PDRB Perkapita (Juta Rp.)	-	65,98	33,15
7.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02	-	-
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 – 105	-	-
9.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105 – 107	-	-

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan nasional dan daerah yang disesuaikan dengan skala prioritas yang terdapat dalam arah kebijakan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 – 2026, Penelaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati dan prioritas program-program pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian**



Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. 9 (Sembilan) Misi tersebut adalah :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

A. Sasaran Ekonomi Makro

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

B. Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4-35.455,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1 persen dan 8,5-8,8 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Pembiayaan kebutuhan investasi pada tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank,



antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

C. Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan dan pemerataan wilayah secara spasial adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Koridor Pembangunan Wilayah Secara Spasial



Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta



kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan, yaitu:

- a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi melalui: (i) perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; (ii) penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik; (iii) peningkatan konektivitas transportasi darat, sungai, laut dan udara; (iv) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital; perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan; (v) meningkatkan pengawasan dan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); serta (vii) pemenuhan hak-hak transmigran sesuai mandat regulasi yang berlaku.
- b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan: (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; (ii) penetapan batas desa, (iii) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/ BUMDes Bersama; (iv) peningkatan pelayanan dasar desa, (v) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendampingan lokal desa; dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.



- c. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara melalui: (i) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas termasuk jaringan logistik dari desa ke pusat-pusat perdagangan baik pasar lokal, regional maupun internasional; dan (ii) pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak.

2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan yaitu:

- a. Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan antara lain melalui: (i) penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); (ii) pembangunan smelter pada kawasan potensial dalam mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA); (iii) penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; (iv) pelayanan perijinan dan investasi yang cepat; (v) penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung; (vi) pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha; (vii) penguatan kerjasama Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam



promosi dan pengembangan kawasan strategis; serta (viii) perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi global.

- b. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
- c. Pembangunan kota baru sebagai contoh untuk pengembangan kota publik inklusif yang terencana; dan
- d. Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, didukung oleh kebijakan pengelolaan ASN berbasis smart governance

3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan :

- a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
 - 1) Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain melalui:
 - (a) penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;
 - (b) penataan lembaga dan organisasi Pemerintah Daerah yang lebih efisien dan efektif;
 - (c) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien;
 - (d) peningkatan riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan;
 - (e) peningkatan



kapasitas aparatur daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah; (f) optimalisasi dana transfer daerah yang lebih produktif dan afirmatif bagi kemajuan daerah; (g) peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi; (h) pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, (i) peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak bagi percepatan pencapaian SPM, peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah

- 2) Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh diarahkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara sungguh-sungguh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab antara lain melalui: (a) penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; (b) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; (c) optimalisasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; serta (d) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
- 3) Pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat diarahkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat secara sungguh-sungguh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab antara lain melalui: (a) penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; (b) pengembangan wilayah adat Tabi, Saereri, La Pago, Me Pago, Anim Ha, Bomberai dan Domberai dalam mendukung perekonomian wilayah; (c) penguatan tata kelola pemerintahan



- yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; (d) optimalisasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; (e) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; serta (f) penguatan distrik sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa; dan
- 4) Pelaksanaan daerah khusus/daerah istimewa diarahkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara sungguh-sungguh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab antara lain melalui:
 - (a) pemberdayaan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berlandaskan pada budaya, adat istiadat dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - (b) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima;
 - (c) optimalisasi pengelolaan Dana Keistimewaan bagi penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; serta
 - (d) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja.
 - b. Pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, melalui :
 - 1) Penguatan peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha;
 - 2) Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha;
 - 3) Pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - 4) Perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan



dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah.

- c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
- 1) Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan daerah;
 - 2) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; dan
 - 3) Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.

4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan :

- a. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui: (i) peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; (ii) penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; dan (iii) penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui: (i) sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; (ii) penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; dan (iii) penetapan deliniasi batas wilayah adat;
- c. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan; dan
- d. Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan



meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan dan kota metropolitan antara lain melalui: (i) pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim; (ii) pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan; (iii) pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat; (iv) pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi; (v) pengembangan sistem peringatan dini multiancam bencana; (vi) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana; (vii) peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; (viii) peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana; (ix) perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multihak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; (x) peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah.

4.2.1.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema pembangunan RKP 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2023 serta kebijakan pembangunan Tahun 2023.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.**

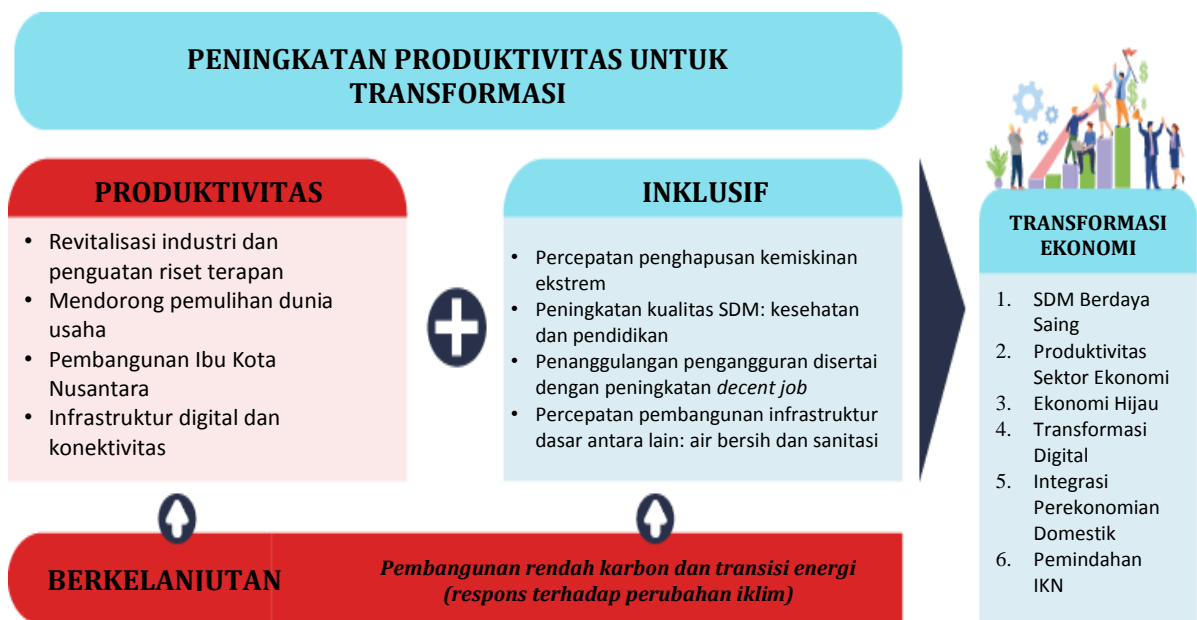
Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui



penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar 4.2

Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023



Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang



mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, adapun sasaran pembangunan Tahun 2023 adalah :

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan

Selain itu, indikator pembangunan Tahun 2023 juga menitikberatkan pada indikator Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan Tahun 2023 ditunjukkan oleh Tabel berikut :

Tabel 4.5

Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Target Nasional Tahun 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3 – 6,0
Rasio Gini (indeks)	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29 – 73,35
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	27,02
Nilai Tukar Petani: (nilai)	103 - 105
Nilai Tukar Nelayan: (nilai)	105 - 107

4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk Tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur



dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan Tahun 2023, disusun strategi pembangunan Tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi :
 - Penguatan Sistem Jaringan Sosial;
 - Penguatan Modernisasi Pertanian;
 - Peningkatan Pemerataan Pembangunan.
2. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan, dilaksanakan melalui strategi :
 - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional;
 - Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
3. Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job, dilaksanakan melalui strategi :
 - Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha, dilaksanakan melalui strategi :
 - Percepatan Revitalisasi Pariwisata;
 - Memperkuat Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, dilaksanakan melalui strategi :
 - Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri;
 - Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan.
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons terhadap Perubahan Iklim), dilaksanakan melalui strategi :
 - Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon;
 - Percepatan Transisi Energi.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, antara lain Air Bersih dan Sanitasi, dilaksanakan melalui strategi :
 - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi;
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital;
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi :
 - Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar di IKN



4.2.1.4 Prioritas Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuh Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
 - b) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI.
 - b) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong



- (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran sebagai berikut :
- a) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
 - c) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
 - d) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - e) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 - f) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
 - b) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
 - c) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
 - d) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - e) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
 - f) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
 - b) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling



- terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara;
- c) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
 - d) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sector energi (juta ton);
 - e) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).
6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim , dengan sasaran sebagai berikut :
- a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
 - c) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, , dengan sasaran sebagai berikut :
- a) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;



- b) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- c) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- d) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
- e) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN Tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Major Project dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada RKP Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 MP disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing PN.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan Tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi



Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Penerapan mekanisme Clearing House (CH) dalam perencanaan MP yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (not only sent but delivered). Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan cascading, executive summary, dan info memo MP; serta (3) intensifikasi pelibatan stakeholder dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (trilateral/multilateral meeting) guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP yang berorientasi pada pencapaian output MP pada Tahun 2024.

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang teralhir dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Tahun 2023 yaitu Pemantapan Kesejahteraan



melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Peningkatan Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table berikut :



Tabel 4.6

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target		
						RKPD Tahun 2023	P-RPJMD	Ranc. RKP
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/angka	A (81 – 90)	A (81 – 90)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/angka	A (>80–90)	A (>80–90)	
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/angka	A (4,51 – 5,0)	A (4,51 – 5,0)	
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,567-0,607	0,607	
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,4	83,4	
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,98	65,98	
			7	Tingkat Kemiskinan	%	7,75-8,00	7,45	7,00-8,00
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,69	5,69	5,30 – 6,00
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Rasio Gini	Angka	0,376-0,381	0,381	0,375-0,378



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target		
						RKPD Tahun 2023	P-RPJMD	Ranc. RKP
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10	IPM	Angka	73,13	73,05	73,50-73,53
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11	Indeks Pendidikan	Angka	67,05	67,05	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	Indeks Kesehatan	Angka	77,86	77,86	
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	77.23	77.23	
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14	Angka kriminalitas	Kasus	24,438	24,438	
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06–6,59	5,04–6,52	5,30-5,90
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16	Produktifitas Total Daerah	Rp / - Angkatan Kerja	77.349.122	77.349.122	
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17	IKLH	poin	73,24	72,84	
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	Juta Ton CO ₂ Eq	1,347	1,347	

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023



4.2.3 Sustainabel Development Goals/SDGs

Sustainable Development Goals/SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah salah satu arah prioritas pembangunan yang harus diperhatikan oleh seluruh wilayah dalam Negara kesatuan Negara Republik Indonesia termasuk Kabupaten Tana Toraja dalam perencanaan Pembangunan.

Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja juga ikut berkomitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Bagi pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa tujuan SGD's harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari target perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan kondisi topografi, Kabupaten Tana Toraja hanya melaksanakan 15 Tujuan dari 17 tujuan SGD's dengan jumlah indikator sebanyak 73 indikator yang akan menjadi fokus dalam pencapaian target TPB di Periode RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026. 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tersebut adalah :

1. Tanpa kemiskinan (No poverty), Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Tanpa kelaparan (Zero hunger), Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera (Good health and well-being), Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas (Quality education), Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan gender (Gender equality), Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.



6. Air bersih dan sanitasi layak (Clean water and sanitation), Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Decent work and economic growth), Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
8. Industri, inovasi dan infrastruktur (Industry, innovation, and infrastructure), Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
9. Berkurangnya kesenjangan (Reduced inequalities), Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
10. Kota dan komunitas berkelanjutan (Sustainable cities and communities), Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
11. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Responsible consumption and production), Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
12. Penanganan perubahan iklim (Climate action), Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
13. Ekosistem daratan (Life on land), Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
14. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (Peace, justice, and strong institutions), Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
15. Kemitraan untuk mencapai tujuan (Partnerships for the goals), Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.



Tabel 4.7

Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TORAJA	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi	Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	Mencegah dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia
Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat	Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat
	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan
	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
	Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
	Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati
Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
	Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
	Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara
Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati	Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
	Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan



4.2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 menguraikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan Dasar tersebut adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dimana kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Sementara Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normative sesuai standar teknis;
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial



Tabel 4.8

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang Mendukung atau terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TORAJA	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
	Pelayanan informasi rawan bencana
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	Pelayanan Kesehatan Balita
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	Pendidian Dasar
	Pendidikan Kesetaraan
	Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
Menguatkan interkonektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota



PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TORAJA	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleraan dan saling menghormati	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan nasional dan daerah yang disesuaikan dengan skala prioritas yang ada dalam Penggalan ke empat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030, Penelaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan prioritas program-program pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2023 serta untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, maka dirumuskan Tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 adalah : **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang inklusif Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing”**. Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi;
2. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan;



3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan;
4. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat;
5. Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
6. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
7. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table berikut :



Tabel 4.9

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan	Reformasi sistem pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib	Program Pengelolaan Keuangan	Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	100%	2,900,000,000	BPKAD
				Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100%		
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Bersertifikat	55%	1,300,000,000	BPKAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3.67%	1,300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	2,100,000,000	BAPPEDA
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan kemanfaatan penelitian dan pengembangan	100%	175,000,000	BAPPEDA
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan BPK-RI	70%	2.800.000.000	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perentase Kebijakan Pengawasan yang diakomodir menjadi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah	100%	600,000,000	Inspektorat
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Teknis, manajerial, sosial kultur)	50%	1,200,000,000	BKPSDM
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	83.61%	1,250,000,000	BKPSDM
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan sesuai rencana	100%	1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes dan BUMDES	100%	600.000.000	DPML
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (Tepat Waktu)	94.77%	125.000.000	Dinas PM & PTSP
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)		966.500.000	Kecamatan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa		494.000.000	Kecamatan
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran	83%	155.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase pasangan berakta perkawinan	50%		
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan	100%	120.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase lembaga yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public	100%						
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	83%	420.000.000	Dinas Komunikasi & Informatika			
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan farmasi dalam menunjang pemeliharaan kualitas pemenuhan SPM pelayanan di bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%	87.936.400.000	Dinas Kesehatan
				Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%		
				Cakupan Pemberian PMT Balita	100%		
				Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase cakupan pelayanan Bayi dan Balita	100%		Dinas Kesehatan
				Cakupan Puskesmas	110,53		
				IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	100	25.675.000.000	RSUD Lakipadada
				Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit	97,79%		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes yang Memiliki Tenaga Sesuai Permenkes 43 Tahun 2009	95%	125.000.000	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas	100%	550.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas melaksanakan upaya promkes, advokasi & pemberdayaan masyarakat	100%	120.000.000	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	100%	1.180.000.000	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab./Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	200.000.000	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	150.000.000	Dinas Sosial
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	53%	500.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengendalian Penduduk	Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	100%	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS peserta KB Aktif	69,52%	6.150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan	100%	300.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan minat baca masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjaga pemenuhan SPM pelayanan di bidang Pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan yang berbasis budaya lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Presentase pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100%	150.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	88.74%	150.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	74,500,000,000	Dinas Pendidikan
				Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		
				Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%		
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Presentase pengendalian perizinan PAUD, pendidikan non formal dan pendidikan dasar yang terlayani	100%	75.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Pengunjung Perpustakaan	12.30%	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku	94%	90.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Prosentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	100%	40.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, jabatan politik, dan pengambilan keputusan	Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,65	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Prosentase Korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	70%	275.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kecamatan yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga	64%	160.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate	60%	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kecamatan yang memiliki forum anak	100%	175.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat	Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Peningkatan nilai tambah produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, dan pengembangan agrowisata	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Padi (Ton)	184,334	5.500.000.000	Dinas Pertanian
				Produksi Jagung (Ton)	13,316		
				Produksi Kopi (Ton)	4,190		
				Produksi Kakao (Ton)	1,367		
				Produktivitas Padi (Ton/Ha)	5,3		
				Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	7,2		
				Produksi Daging Kerbau (Kg)	373,982		
				Produksi Daging Sapi (Kg)	46,565		
				Produksi Daging Babi (Kg)	838,712		
				Produksi Telur (Kg)	693,451		



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penggunaan benih padi bersertifikat	8.90%		
				Jumlah Penggunaan Varietas Kopi Lokal Toraya Bersertifikasi	2		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (Unit)	25.00%	12.000.000.000	Dinas Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Unit)	20		
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Unit)	10		
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan serangan OPT	10-20 %	130.000.000	Dinas Pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	100%	65.000.000	Dinas Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kasus penyakit hewan menular	14.29%	400.000.000	Dinas Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama petani/KEP	0,30%	425.000.000	Dinas Pertanian
				Persentase ketersediaan penyuluh terhadap kelompok tani/ternak	6,25%		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kecamatan yang memiliki kelompok Pengelola Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	36.80%	550.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan Desa/ Kelurahan yang menerapkan Rumah Pangan Lestari	35.85%	700.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Wilayah Kecamatan pelaksanaan pengawasan	52.60%	75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	712 Ton	1.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan yang dipasarkan	3.721 Ton	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	25 Ton	260.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya sektor UMKM, industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	100%	350.000.000	Dinas PM & PTSP
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi yang dikelola	77,78%	45.000.000	Dinas PM & PTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMDN/PMA	8,5%	50.000.000	Dinas PM & PTSP
			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	1,69%	200.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang terfasilitasi untuk diberdayakan	14,37%	200.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi Izin usaha	0,80%	35.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan	8,62%	250.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Presentase koperasi yang memiliki kategori SEHAT	14,36%	25.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi	9,77%	200.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase kawasan perdesaan yang dibangun pada kecamatan	26%	45.000.000	DPML



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	99,12%	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	96,04%	165.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bid. ketengakerjaan	100%	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase penempatan transmigrasi	100%	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Laju pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	1,71	50.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTP yang Di Tera	18,25%	30.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok	73,68%	400.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk unggulan yang dipasarkan	44,44%	40.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kelompok industry yang terfasilitasi	29,41%	1.425.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin	30,96%	110.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual	1 produk	50.000.000	Dinas Pariwisata



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	100%	360.000.000	Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan	2,42%	90.000.000	Dinas Koperasi & UKM
Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata	Peningkatan daya saing dan daya tarik destinasi melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan	100%	550.000.000	Dinas Pariwisata
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan	78,94%	6.000.000.000	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata	100%	1.200.000.000	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	100%	400.000.000	Dinas Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	Presentase sejarah lokal yang disusun/dibuku kan	40%	45.000.000	Dinas Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Cagar Budaya yang dilestarikan	22,31%	30.000.000	Dinas Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan	38,31%	350.000.000	Dinas Kebudayaan
			Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Penerapan teknologi ramah lingkungan serta penanganan dan pengurangan sampah secara terpadu	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,80
	Indeks Kualitas Udara	87,07					
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup			100%	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase Tingkat pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KeHaTi)			40%	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Melalui 3R			14,86%	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan Limbah B3 Fasus/Fasos/Usaha yang diawasi			20,14%	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	28.00%	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA	9.52%	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	42,85%	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang difindaklanjuti	100%	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sampah yan Tertangani	39,53%	320.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga Negara yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab./Kota	100%	2.500.000.000	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum pada kawasan kota penyangga	55,56%	5.200.000.000	Dinas PRKP
			Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%		
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	330.000.000	SATPOL PP & PK



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	Pemanfaatan infrastruktur jalan, irigasi, drainase, jembatan untuk mendukung aktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemanfaatan jaringan telekomunikasi untuk transformasi digital	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	91,79%	175.000.000	Dinas PRKP
			Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,07%	95.214.332.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	39,20%	2.050.000.000	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	78%	925.000.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah Orang Melalui Terminal per Tahun	2.119.451 orang		
			Program Penataan Desa	Cakupan Desa dan Sarana Prasarana Desa Yang Baik	86%	55.000.000	DPML
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	80%	450.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,76%	550.000.000	Dinas PRKP
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	3.900.000.000	Dinas PRKP
			Program Pengembangan Permukiman	Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,09%	6.000.000.000	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Pemerintah yang tertata dengan Baik	92%	320.000.000	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	1 Kws.	530.000.000	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah penerbitan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah/lahan	60 Rek.	220.000.000	Dinas PUPR			



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	63,29%	5.160.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan air minum curah Lintas Kabupaten/Kota	100%	6.500.000.000	Dinas PUPR
Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati	Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketertiban Umum dan Kondusivitas Kehidupan berbangsa dan Bermasyarakat	Penguatan moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	300.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kegiatan Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	100%	1.810.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang tepat sasaran	100%	900.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	60%	60.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	60%	700.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan SDM Kepramukaan	60%	150.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik	100%	762.600.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase PROLEGDA yang terealisasi	100%	6.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	100%	6.250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH



PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA	SASARAN PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase kebijakan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan sesuai rencana	100%		
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelembagaan lembaga kemasyarakatan lembang/kelurahan yang difasilitasi dan dibina	65%	815.000.000	DPML
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten	100%	880.000.000	SATPOL PP & PK



Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.10

Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2023

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	Transformasi Digital	Transformasi Digital	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi	Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati	Indeks reformasi birokrasi
						Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan	Predikat SAKIP Opini BPK
						Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik
2	Pengelolaan kesehatan belum optimal	Pandemi Covid-19	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Indeks kesehatan
						Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
3	Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SGD's)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia
						Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan minat baca masyarakat	Indeks Pendidikan
						Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender
4	Kinerja Perekonomian Daerah Menurun	Pandemi Covid-19	Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Kontraksi	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan PDRB Perkapita
						Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)



No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8
						Perluasan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM, Koperasi, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, serta peningkatan iklim investasi yang kondusif	Tingkat pengangguran terbuka
						Meningkatnya sektor UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
5	Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah masih rendah	Pandemi Covid-19	Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Kontraksi	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan revitalisasi kearifan adat-budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
						Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata	Kunjungan Wisatawan
						Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup
						Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)
6	Kualitas Infrastruktur Dasar Masih Rendah	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SGD's)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kualitas Infrastruktur yang menunjang perekonomian	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Secara Berkelanjutan	Gini Ratio
						Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	Indeks Layanan Infrastruktur



No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Menurunnya Nilai Budi Pekerti	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SGD's)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Nilai Budi Pekerti	Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati	<p>Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Toleran, Ramah, Berkualitas dengan Melibatkan seluruh Elemen Masyarakat dalam Bingkai Kebangsaan dan Kebhinekaan</p> <p>Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas Kehidupan berbangsa dan Bermasyarakat</p>	<p>Angka Kriminalitas yang Tertangani</p> <p>Persentase Kasus Kriminalitas yang Tertangani</p>



Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Adapun strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2023

VISI : “TANA TORAJA BANGKIT, PRODUKTIF DAN TANGGUH MENYONGSONG TATANAN KEHIDUPAN BARU”			
Misi 1 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Tanggap, Peduli Berbasis Kinerja Yang Didukung Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (E-Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dan pelayanan public yang didukung oleh peningkatan dan kuantitas SDM aparat dalam pengelolaan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses demi berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik	Reformasi sistem pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan informasi serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat
Misi 2 : Memantapkan Sistem Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Pandemi Covid-19 Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas dan akses layanan layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan farmasi dalam menunjang pemeliharaan kualitas pemenuhan SPM pelayanan di bidang kesehatan
Misi 3 : Memperbaiki Fasilitas Pendidikan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Belajar-Mengajar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan taraf Pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Memperluas akses, kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, yang didukung oleh pemerataan dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta peningkatan minat baca masyarakat dan penambahan koleksi buku perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjaga pemenuhan SPM pelayanan di bidang Pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan yang berbasis budaya lokal
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan akses dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan perempuan dan anak	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, jabatan politik, dan pengambilan keputusan
Misi 4 : Memulihkan Roda Perekonomian Daerah Melalui Pemberdayaan Usaha Masyarakat Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, Sektor Jasa, Dan Usaha-Usaha Produktif Lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemenuhan ketahanan pangan berkelanjutan	Peningkatan nilai tambah produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, dan pengembangan agrowisata



Perluasan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM, koperasi, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, serta peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya sektor UMKM, Industri rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta serta investasi daerah	Meningkatkan akses UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif terhadap sumber daya produktif, peningkatan iklim usaha yang kondusif, pengembangan produk dan pemasaran, dan penguatan kelembagaan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif
Misi 5 : Mengembangkan Potensi Pariwisata Yang Lebih Variatif, Inovatif Dan Terintegrasi Selaras Dengan Upaya Revitalisasi Kearifan Adat-Budaya Dan Tata Kelola Pelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan revitalisasi kearifan adat-budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata, peningkatan daya saing dan daya tarik destinasi, peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata terpadu, serta penguatan nilai kearifan dan adat-budaya daerah	Peningkatan daya saing dan daya tarik destinasi melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana	Penerapan teknologi ramah lingkungan serta penanganan dan pengurangan sampah secara terpadu
Misi 6 : Membangun, Memperbaiki dan Memelihara Infrastruktur (Jalan, Jembatan dan Drainase) serta Sarana-Prasarana Publik Vital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemerataan Pemerataan Pendapatan masyarakat secara berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah dan infrastruktur sosial serta sarana prasarana dan utilitas umum di setiap wilayah	Pemanfaatan infrastruktur jalan, irigasi, drainase, jembatan untuk mendukung aktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemanfaatan jaringan telekomunikasi untuk transformasi digital
Misi 7 : Menguatkan Peran-Serta Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh Kesetiakawanan Sosial Berbasis Akhlak, Moral, Budi Pekerti Dan Sikap Saling Menghormati			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam bingkai kebangsaan dan kebhinnekaan	Terwujudnya penegakan perundang-undangan, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan umat beragama, penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	Penguatan moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan

Sumber : RPJMD Kab. Tana Toraja Tahun 2021 - 2026

Fokus prioritas perencanaan Tahun 2023 yang hendak diwujudkan telah dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah, dimana isu strategis daerah ini telah dirumuskan berdasarkan berbagai kebijakan dan hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Tana Toraja. Adapun keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.12

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2023

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023
Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi
Pengelolaan Kesehatan Belum Optimal	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan
Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan
Kinerja Perekonomian Daerah Menurun	Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat
Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah Masih Rendah	Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup
Kualitas Infrastruktur Dasar Masih Rendah	Kualitas Infrastruktur yang Menunjang Kegiatan Perekonomian	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar



PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. TANA TORAJA TAHUN 2023
Manurunnya Nilai Budi Pekerti	Nilai Budi Pekerti	Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati

4.2.6 Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Tana Toraja terhadap Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Dalam rangka konsistensi antar rencana pembangunan mulai dari level nasional hingga Kabupaten kota, maka dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi Prioritas pembangunan. Adapun sinergitas dan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13

Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

NASIONAL	PROVINSI	KAB. TANA TORAJA
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2023		
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter	Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang inklusif Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat
	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan infrastruktur wilayah	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pembangunan manusia	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan
		Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan public	Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati



NASIONAL	PROVINSI	KAB. TANA TORAJA
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelestarian lingkungan hidup	Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan public	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2023 adalah Mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi melalui diversifikasi kegiatan ekonomi; Memantapkan perannya sebagai *hub* dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur; Mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah; Mendorong perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional; dan Menguatkan mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana. Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka hubungan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.14

Keselarsan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional	PN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN 7
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN 7
3.	Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3
4.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan minat baca masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3



No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional	PN
6.	Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PN 1
7.	Meningkatnya sektor UMKM, industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PN 1
8.	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	PN 6
9.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	PN 6
10.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PN 2
		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN 5
11.	Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas Kehidupan berbangsa dan Bermasyarakat	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN 4



Tabel 4.15

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2023)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2023)		PROGRAM PRIORITAS
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD 4	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				Program Perizinan Usaha Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Program Penyuluhan Pertanian
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Program Pengawasan Keamanan Pangan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Program Promosi Penanaman Modal
				Program Pengembangan UMKM
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2023)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2023)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				Program Rehabilitasi Sosial
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 6	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2023)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2023)		PROGRAM PRIORITAS
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 2	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Program Pemberdayaan Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				Program Penanganan Bencana
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Program Pengendalian Penduduk
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		PD 3	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
				Program Pembinaan Perpustakaan
				Program Pengelolaan Arsip
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2023)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2023)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Perlindungan Perempuan
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PD 7	Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 6	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Program Kawasan Permukiman



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2023)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2023)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Penataan Desa
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Program Pengembangan Perumahan
				Program Pengembangan Permukiman
				Program Penataan Bangunan Gedung
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	PD 5	Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	Program Pemasaran Pariwisata
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Pengembangan Kebudayaan
				Program Pembinaan Sejarah
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				Program Pengelolaan Persampahan
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2023)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2023)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				Program Penanggulangan Bencana
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi	Program Pengelolaan Keuangan
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2023)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2023)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Kepegawaian Daerah
				Program Perekonomian dan Pembangunan
				Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Program Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tana Toraja

Pokok-pokok pikiran DPRD yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPRD No. 01/KEP/PIM-DPRD/IV/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Reses DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk Masa Sidang II Tahun 2022 dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD dan RKPD.

Pelaksanaan Reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja. Pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD Tana Toraja Tahun 2023 terdiri dari :

I. Daerah Pemilihan 1 (Makale dan Makale Selatan)

a. Kecamatan Makale :

1. Peningkatan Jalan Poros Garonggong – Pambala.
2. Pembangunan Drainase Lingkungan Ariang yang sering banjir.
3. Pembangunan Drainase Lingkungan Sikolong.
4. Pentalutan Jalan Garonggong – Pambala.
5. Peningkatan Kualitas Air Bersih, Lingkungan Ariang.
6. Lanjutan Rabat Beton Gandang Batu - To'lambak, Lingkungan Sikolong.
7. Rehabilitasi Gedung SDN Inpres 215 To'ra'da'.
8. Perintisan Jalan Giririk – Ariang.
9. Perkerasan Jalan To'ra'da – Tosemba.
10. Penataan Gedung Poskesdes Lingkungan Ariang.
11. Pembangunan Jembatan Sungai Guririk, Lingkungan Marampa Mairi.
12. Perintisan Jalan Tani Pambala – Taka.
13. Pembangunan Jembatan Ariang – Botang.
14. Bantuan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas 30 Orang.
15. Pengadaan Mobiler SDN Inpres 215 To'ra'da.
16. Pelebaran/Rabat Beton Jalan Poros Kendenan – Manggau sebagai Akses Jalan ke Obyek Wisata Pango-Pango.
17. Pembangunan Jembatan Ta'ba'.



18. Pembangunan Lingkungan Tongkon.
19. Peningkatan Jalan Poros Palangka – Sarong.
20. Peningkatan Jalan Pangle – Tuan.
21. Peningkatan Jalan Lingkungan Kendenan – Rumbe’.
22. Lanjutan Pembukaan Jalan Tani Ta’ba’ – Palangka.
23. Pembukaan Jalan Tani Palangka – Sirope.
24. Masalah Pompanisasi di Kelurahan Batupapan sudah dimasukkan di Musrenbang tapi belum terealisasi.
25. Pembukaan Jalan Tani Pongrorrong tembus Wilayah Rante.
26. Jalan Tani Londo Sarambu belum terealisasi sampai sekarang.
27. Jalan Penghubung di Paliok yang menghubungkan Rantetayo – Madandan – Tonglo Lintas Kota dan Keluar Kota \pm 1 KM belum di cor (Rabat Beton).
28. Infrastruktur Jalan di Parombean belum selesai di cor \pm 200 Meter.
29. Di Bidang Penerangan di RT Parombean masih ada 15 KK yang listriknya kurang strom.
30. Bantuan Pupuk untuk Petani.
31. Masalah sampah di TPA.
32. Rehab Ruang Kelas SD dan SMP serta Perbaikan Lapangan Upacara bagi beberapa sekolah yang ada dalam Lingkup Dapil I Makale dan Makale Selatan.
33. Pembangunan Jalan pada setiap Kelurahan/Lembang yang ada di Kecamatan Makale dan Makale Selatan.
34. Pembangunan Jalan di Kelurahan Rante, Batupapan, Tarongko.
35. Masalah kelangkaan bantuan Pupuk Subsidi untuk petani, sulit didapatkan atau tidak tersedia di kios pupuk bersubsidi di Kecamatan Makale sehingga masyarakat mengusulkan agar Pemerintah bisa memantau kios-kios pupuk tersebut terutama pada waktu musim tanam masyarakat sulit untuk mendapatkan pupuk.
36. Masyarakat/Kelompok-kelompok Tani mengusulkan bantuan Traktor, Kultivator, Tangki Penyemprotan dan bibit-bibit sayuran.



37. Masyarakat mengusulkan pembangunan dan perbaikan/renovasi rumah-rumah ibadah serta pengadaan sarana dan prasarana Penunjang Peribadahan.
38. Bantuan Pelatihan Menjahit Pakaian Ma'tannun, Tata Rias (salon) kepada Kelompok Wanita Potensial di setiap kelompok yang sudah terbentuk.
39. Bantuan Pelatihan bagi Generasi Muda berupa Perbengkelan, Las Listrik dan lainnya.
40. Bantuan permodalan agar mereka bisa menjadi wanita dan pemuda yang produktif, dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
41. Usulan masyarakat meminta supaya ada peninjauan kembali adanya pemberhentian insentif untuk Kepala Lingkungan, Ketua RT dan Hansip, mengingat adanya tugas dan fungsi dalam wilayah kerjanya.
42. Pentalutan dan pelebaran jalan Poros Batupapan–Tampo–Lamunan. Alasannya banyak jalan sempit dan tebing hampir longsor masuk ke halaman Rumah Penduduk di Kelurahan Tampo.
43. Masih ada 2 Kepala Keluarga yang belum mendapatkan Program PKH di Kelurahan Tampo, padahal mereka punya anak sekolah yang dibiayai. Alasannya pihak kelurahan pilih kasih dan bahkan mereka dipimpong sana sini.
44. Mereka butuh keterampilan jahit menjahit, tata rias atau salon dan pelatihan buat kue-kue tradisional Toraja untuk kebutuhan acara Rambu Tuka' dan Rambu Solo' di Kelurahan Tampo.
45. Pemberdayaan Kelompok Dasawisma dalam Bidang Tata Rias/Salon, Pembuatan Tradisional, kursus menjahit di Kelurahan Tarongko.
46. Pembangunan Jalan Tani Guririk Kelurahan Tarongko.
47. Poros Simbulan – Buntu, Lingkungan Pasa' Kelurahan Tarongko.
48. Pembangunan USB SMPN Tarongko.
49. Pengadaan Handtraktor dan Kultivator bagi Kelompok Tani di Kelurahan Tarongko.
50. Pembangunan Jalan Lingkungan Burake Kecamatan Makale.



51. Perjelas Status Hibah Tanah di Kawasan Religi Buntu Burake Kec. Makale.
52. Pembangunan Jalan Starda ke Jalan Kantor Pertanian di Kelurahan Pantan.
53. Peningkatan dan perbaikan Jalan Poros Lamunan – Batupapan di Kelurahan Tampo yang sedianya dapat menjadi jalan alternative apabila terjadi kemacetan di Kota Makale.
54. Pembangunan dan Pemasangan Paping Blok di Halaman SD Tampo Kelurahan Tampo.
55. Pemberdayaan Orang Muda Burake di Obyek Wisata Religi Buntu Burake.
56. Pelebaran Jalan Poros Ke'pe'.
57. Membuat bahu jalan Poros Obyek Wisata untuk ditimbun tanah dan tumbuh rumput hijau yang dipelihara.
58. Membuat drainase dari SMK Pembangunan Burake ke SMK Pelangi.
59. Di Wilayah Kelurahan Buntu Burake ada Kerajinan Ma'Tannun, Pengrajin Manik-manik, Suling Bamboo dan Tari-tarian mohon untuk pendampingan dari pihak pemerintah atau pihak terkait.
60. Dengan Icon Pariwisata Buntu Burake membutuhkan Perencanaan/Tim Penyusun Master Plane.
61. Pembenahan Lampu Jalan pada semua titik sepanjang Jalan Poros Objek Wisata semua mati/tidak menyala.
62. Jalan Poros Bamba-Panglion sudah dua tahun dilebarkan tapi belum dirabat beton/aspal.
63. Permintaan mesin jahit untuk Kelompok Dasa Wisma dari 7 Kelompok Dasa Wisma masing-masing 5 mesin jahit per Kelompok diantaranya, DW. Mawar, DW. Torak, DW. Dahlia, DW. Sangbua, DW.Asoka, DW. Kamboja dan DW. Matahari.
64. Pembangunan Jembatan Pangle-Tuan di RT. Palangka.
65. Peningkatan Jalan Pangle-Tuan di RT. Pangke.
66. Penataan Kawasan SDN No. 103 Makale 6 di Kelurahan Manggau.
67. Peningkatan Jalan Poros Palangka – Sarong di RT.Palangka.



68. Penataan Kawasan Kantor Lurah Manggau di Kelurahan Manggau.
69. Peningkatan Jalan Poros Bassean- Sarong di Kelurahan Manggau.
70. Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Tondon Mamullu di Lingkungan Lallangan.
71. Pembuatan Dwikker di Jl. Gereja Kemah Injil ke Pa'pakandean Lingkungan Bulo.
72. Pembangunan Irigasi sambungan dari Lamunan ke Mamullu.
73. Renovasi Lantai 2 Masjid Sanawi Nurul Hidayah Tondon Mamullu di Lingkungan Lallangan.

b. Kecamatan Makale Selatan

1. Pembuatan Jalan Tani To'Bila-Kalua-Lonno, Kelurahan Tiromanda.
2. Bantuan Penggilingan Jagung, Kelurahan Tiromanda.
3. Bantuan Ternak Ayam dan Babi, Kelurahan Tiromanda.
4. Pengadaan Bibit Kakao, Kelurahan Tiromanda.
5. Bantuan Bibit Ikan Mas dan Nila Kelurahan Tiromanda.
6. Bantuan Komputer SDN. 113 Inpres Tiromanda, Kelurahan Tiromanda.
7. Pengadaan Lampu Jalan Poros Pasa' Buntu, Kelurahan Tiromnda.
8. Lanjutan Rabat Beton Poros Patekke ke Tondok Lemo ke Pattawanan Lembang Bo'ne Buntu Sisong.
9. Lanjutan Rabat Beton Tondok Lemo ke Pattawaran.
10. Peningkatan Jalan Poros Sapandeata-Patekke-Pattawaran, Lembang Patekke.
11. Peningkatan Jalan Poros Bera-Pangrata'-Randan Batu.
12. Lanjutan Rabat Beton Jalan Poros Sapandeata-Torroan Pattawaran, Lembang Pa'buaran.
13. Peningkatan dan Pembangunan Jalan Poros Patekke-Tondok Lemo-Pattawanan Lembang Bo'ne Buntu Sisong untuk menunjang potensi wisata dan sebagai akses distribusi hasil pertanian masyarakat.
14. Pembangunan Jalan ke Puskesmas Sanda Bilik.



15. Pembangunan Jalan Lamunan-Bera-Pangra'ta'.
16. Rabat Beton/Pelebaran Poros Bera-Pangra'ta' di Randan Batu.
17. Jembatan dan Perkerasan Jalan Pa'badongan-Pangra'ta'.
18. Lanjutan Rabat Beton Santung-Durian (1Km) di Lingkungan Donda.
19. Pembangunan Rabat Jalan dan Pembuatan Dekker di Lingkungan Santung.
20. Lanjutan Rabat Beton dan Talut Tanete-Barana (350 M) di Lingkungan Tanete.
21. Peningkatan Jalan Poros Bakki' (1.500 M) di Lingkungan Tombang.

SARAN DAN CATATAN :

1. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan/Rehab Jalan, Drainase penyediaan sarana serta Fasilitas Pendidikan, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendidikan dapat menindaklanjuti dan berpedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Diharapkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Perikanan dan Badan Ketahanan Pangan maupun Dinas Terkait Lainnya yang ada di Lingkup Kabupaten Tana Toraja, kiranya dapat memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat khususnya Petani.
3. Penyediaan Rumah Ibadah merupakan salah satu wujud dari bentuk toleransi beragama, hendaknya usulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah serta Sarana Prasarana Pendukung Peribadahan agar dapat terwujud, baik di Desa maupun di Kecamatan oleh instansi yang berwenang.
4. Mohon dilakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka pembukaan lapangan kerja bagi kelompok wanita pun para pengangguran baik yang produktif atau tidak, baik yang berpendidikan formal atau non formal di pedesaan serta pemberian permodalan awal dalam Usaha Kecil dan Menengah khususnya Daerah Pemilihan I (Satu) Kecamatan Makale dan Makale Selatan.



5. Program Pemerintah Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Gratis belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui.
6. Agar lapak-lapak di pasar Makale ditertibkan karena disinyalir ada yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur.
7. Posyandu agar diaktifkan, perlu kerjasama Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
8. Narkoba dan judi adalah musuh kita bersama, sehingga mulai dari sekarang kita harus giat memberikan edukasi ke masyarakat agar memerangi narkoba dimulai dari keluarga masing-masing.
9. Banyaknya hasil temuan kenakalan remaja yang sering nampak di tempat-tempat tertentu seperti di Pasar Makale, Pasar Seni dan di Lapangan Makale, perlu untuk mejadi perhatian dan ditertibkan oleh aparat atau instansi yang berwenang.
10. Bangunan yang ada di sekitar Lapangan Makale kelihatan kumuh dan sampah berserakan di mana-mana.
11. Persoalan persampahan yang tak kunjung selesai karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan diwilayahnya, dan bagi Pemerintah setempat harus terus menerus mengedukasi masyarakat agar mengadakan kerja bakti secara rutin.
12. Ditemukan ada kegiatan proyek yang dianggarkan dari APBD, tapi dikerjakan di tempat lain, hal ini perlu peninjauan dari intansi terkait agar tidak ada lagi kejadian seperti ini.
13. Kantor Kelurahan Bombongan, Kelurahan Lapandan dan Kelurahan Kamali Pentalluan belum ada yang tetap, perlu pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menjadi prioritas agar segera diadakan.
14. Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sangat urgen untuk segera ditegakkan dan disosialisasikan agar persoalan-persoalan seperti munculnya terminal bayangan, parkir disembarang



tempat, keberadaan kandang ternak, rumah kost, café-café dan kegiatan social kemasyarakatan lainnya dapat diatur dan tertib.

15. Sehubungan dengan Perda di atas, perlu kejelasan tentang penggunaan badan jalan terutama yang bersifat jalan provinsi atau jalan pusat, karena ada beberapa badan usaha seperti perbengkelan atau pres ban yang sering menggunakan badan jalan untuk kegiatan servis atau parkir kendaraan yang rusak. Di samping itu ada juga usaha toko atau gudang dan sejenisnya yang sering menggunakan badan jalan untuk parkir kendaraan maupun untuk kegiatan bongkar muat barang. Untuk itu Pemerintah Daerah diminta tegas dalam menertibkan izin bagi badan usaha atau oknum yang menggunakan badan jalan bukan pada peruntukannya.
16. Tanah Pemda yang ada di Kelurahan Rante yang kosong di sebelah Perumahan, dapat dijadikan lapangan sepak bola atau untuk kegiatan yang memerlukan tempat yang luas seperti upacara dan lainnya.
17. Menurut amanat dalam PP Nomor 73 Tahun 2005, tidak ada lagi istilah Kepala Lingkungan, RT, RW, dan diganti dengan istilah Lembaga Kemasyarakatan.
18. Program pemanfaatan pekarangan harus dimulai dari diri sendiri dimulai dari kantor masing-masing kemudian dikembangkan ke masyarakat.
19. Program Pemerintah dalam dunia pendidikan tentang “Kurikulum Merdeka Belajar”, bagi Lurah dan Kepala Lembang agar segera menghimbau setiap SD dan SMP didaerahnya masing-masing tentang pentingnya untuk menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar.
20. Setiap Lurah dan Kepala Lembang harus memberikan edukasi ke masyarakatnya tentang tujuan pemberian bantuan dari Program PKH, Dana Desa dan lainnya, jangan sampai malah membuat masyarakat terbuai dengan bantuan yang diberikan dan justru menjadi malas.



21. Kiranya Pemerintah Daerah dapat mengadakan pasar atau tempat khusus yang menyediakan pupuk dan bibit tanaman organik, dan dapat bekerjasama dengan Bumdes untuk distribusi bibit dan pupuk serta hasil pertanian dan tetap berkoordinasi dengan camat.
22. Perlu edukasi bagi pemangku jabatan terutama di sekolah-sekolah yang memiliki asset bangunan, bahwa setiap bangunan yang akan dirubah atau dirubuhkan terlebih dahulu harus memiliki rekomendasi dari instansi terkait, karena perubahan atau pergantian asset seperti bangunan tidak dapat dilakukan begitu saja.
23. Aparat kesehatan di masing-masing Kelurahan dan Lembang perlu untuk mengedukasi masyarakat tentang tujuan program KB sehingga tercipta keluarga sehat pada masing-masing wilayah.

II. Daerah Pemilihan 2 (Mengkendek dan Gandangbatu Sillanan)

a. Kecamatan Mengkendek :

1. Jalan Pariwisata di Lembang Gasing Palangka di Lembang Gasing.
2. Jembatan di Padang Lembang Gasing.
3. Pengerasan di Lembang Simbuang.
4. Pengadaan Tractor untuk Kelompok Tani.
5. Pengaspalan Jalan Poros Minanga-Bala.
6. Pengaspalan Jalan Lempe Dollok.
7. Pengerasan Jalan di Lembang Rante Dada.
8. Lanjutan Rabat Beton To'liku-Purapiso.
9. Pengadaan Tempat Sampah (Container) di Kelurahan Rantekalua'.
10. Renovasi Kantor Kelurahan Rantekalua'.
11. Penataan sekolah-sekolah mengenai sarana dan prasarana SD di Kelurahan Rantekalua' seperti bangunan dan pagar sekolah.
12. Penertiban pedagang pasar di Ge'tengan.



13. Penyambungan pipa PDAM ke rumah-rumah belum maksimal dan kurang lancar air ke rumah-rumah masyarakat di Kelurahan Rantekalua'.
14. Pengadaan mesin pemotong rumput di Kelurahan Rantekalua'.
15. Penertiban rumah-rumah kost di Kelurahan Rantekalua'.
16. Memberdayakan Kelompok-kelompok Dasa Wisma dan Pemuda di Kelurahan Rantekalua'.
17. Pembangunan Toilet di Sekolah SLTP N 1 Mengkendek.
18. Bantuan Handtraktor dan Kultivator ke Kelompok Tani di Kelurahan Rantekalua'.
19. Pembangunan Posyandu di Lingkungan Danglu Kelurahan Rantekalua'.
20. Pemasangan Lampu Jalan di Lingkungan Danglu Kelurahan Rantekalua'.
21. Pembangunan Jalan Tani dari Kesu ke Pa'to terus ke Buntu Kurin.
22. Peningkatan Penataan Lapangan Sepak Bola SMP 3 Mengkendek di Kelurahan Tampo.
23. Peningkatan Jalan dengan Pengerasan Jalan dari Ge'rek ke Rante Lion.
24. Pembangunan Jalan disekitar Bandara untuk akses pertanian masyarakat di sekitar bandara.
25. Pembangunan Jalan Kuni-Bastem untuk menghubungkan dua Kabupaten.
26. Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Pa'tengko-Batualu sebagai jalan alternatif untuk menghubungkan Tana Toraja-Toraja Utara.
27. Peningkatan Jalan Lingkar Bangkailan-Su'pi-Rante untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Lembang Simbuang dan Lembang Rante Dada Kecamatan Mengkendek.
28. Pembukaan Jalan Bunian Tengko.
29. Pentalutan sekitar Gereja Marintang.
30. Pembangunan Jalan Barana-Kalian.
31. Pentalutan sekitar Masjid Mamereng.



32. Pembangunan Pipanisasi To'tallang.
33. Pembangunan Jembatan To'tallang-Lebani'.
34. Pembangunan Jalan ke Gereja di Simbuang.

b. Kecamatan Gandangbatu Sillanan

1. Pengadaan Air Bersih Sillanan.
2. Embung di Lembang Garassik.
3. Perpipaian untuk Perkebunan di Lembang Garassik.
4. Jalan Tani di Lembang Lengke-Perindingan.
5. Pengadaan Tractor untuk Kelompok Tani.
6. Rabat Beton Jalan To'angka-Gari.
7. Rabat Beton Jalan Tani Tanete-Kanunang.
8. Rabat Beton Jalan To'angka-Panterean.
9. Rabat Beton Jalan Toke'-To'lamba-lamba'.
10. Rabat Beton Jalan Talondo-Parindu.
11. Renovasi Toilet dan Turap di sekitar Kantor Kelurahan Mebali.
12. Peningkatan Jalan Poros Tonga-Batu Bai ± 350 Meter.
13. Permintaan Tempat Sampah (Container) pada Kelurahan Mebali.
14. Pembuatan Sumur Bor untuk SD Inpres Mebali dan SLTP5 Mebali.
15. Pembuatan Jalan Setapak di SDN 219 di Ranteba'tan.
16. Peningkatan Pembangunan SDN 219 Inpres di Kelurahan Ranteba'tan.
17. Peningkatan Penataan Lapangan Olahraga di Ranteba'tan.
18. Pembangunan Jalan Poros Sillanan ke Perindingan terus ke Kaliangan.
19. Perintisan Jalan ke Buntu Induk (Se'pon Torian).
20. Pembangunan Jalan To'pinus ke Lempe.
21. Pembangunan Jalan Rabat di Tillo Batupepe.
22. Pembangunan Jalan Rabat di RT. Mandubulan-To'lindak.
23. Perintisan Jalan di Bang're.
24. Penataan Jalan di To'long dengan pemasangan gorong-gorong air di saluran air.
25. Pembangunan Penataan Jalan yang bermasalah di Bambang.



26. Pembangunan Jalan Poros di Bamba Salluan.
27. Perbaikan Jalan Poros Salubarani Ta'pan Kila'.
28. Perbaikan Jalan Poros Tabang Tendan Ku-lang.
29. Lanjutan Pekerjaan Jalan Poros Kaleakan-Perindingan yang sudah dilebarkan.
30. Tindak Lanjut Pengadaan Lampu Jalan Poros Kaduaja.
31. Peningkatan Jalan Wisata Poros To'karopi-Pangrapasan Lembang Pemanukan.
32. Perbaikan Jalan Poros Sendeng-Tanete Ata Lembang Pemanukan.

SARAN DAN CATATAN :

1. Bantuan Pupuk dan Bibit Pertanian serta Pakan Ternak Unggas, Babi dan Kerbau untuk Kelompok Tani.

III. Daerah Pemilihan 3 (Simbuang, Mappak, Rano dan Bonggakaradeng)

a. Kecamatan Simbuang :

1. Pemanfaatan Gedung Pustu Makkodo
2. Normalisasi Jalan Poros Sandangan-Petarian.
3. Pembangunan Jalan Poros Lekke' Binotok-Garappa' Lembang Makkodo.
4. Pembangunan Jalan Poros Garappak-Tekkoan Lembang Makkodo.
5. Pembangunan Jalan Tani Rea-Litak Lea Lembang Makkodo.
6. Lanjutan Rabat Beton Poros Lembang ke Dusun Kanan.
7. Pembukaan Jalan Tani Sese.
8. Pelebaran Jalan Dudun Balotono dan Kanan.
9. Pemanfaatan Gedung Puskesmas Baru Kecamatan Simbuang.
10. Perbaikan Jalan Akses (Rabat Beton) ke Kantor Kecamatan Simbuang.
11. Pembangunan Pengairan Tangtondok Lembang Simbuang Batu Tallu.
12. Pembangunan Pengairan Bamba Simbuang Lembang Simbuang Batu Tallu.
13. Pembangunan Jaringan Air Bersih Lembang Simbuang Batu Tallu.



14. Pembangunan Jalan Poros Lekke' Binotok-Garappa' Lembang Makkodo.
15. Pembangunan Jalan Poros Garappak-Tekkoan Lembang Makkodo.
16. Pembangunan Jalan Tani Rea-Litak Lea Lembang Makkodo.

b. Kecamatan Mappak :

1. Pembangunan Jalan Poros Buttu Didok Lembang Miallo.
2. Pembangunan Jalan Poros Kappuan Lembang Tanete.
3. Penataan Halaman Lapangan Upacara SMPN 2 Simbuang Kec. Mappak.
4. Pembangunan Jalan Ma'dandan-Salu Kapuan Lembang Tanete.
5. Pembangunan Jalan Poros Kampung Lombok Lembang Tanete.
6. Drainase Lapangan Kondodewata ± 250 Meter.
7. Pembangunan Jembatan Tappang Sumassan-Miallo.
8. Peningkatan Jalan Saruran-Batang Uru Lembang Butang.
9. Peningkatan Jalan Kondodewata.
10. Pembangunan Jalan Poros Buttu Didok Lembang Miallo.
11. Pembangunan Jalan Poros Kappuan Lembang Tanete.
12. Penataan Halaman Lapangan Upacara SMPN 2 Simbuang Kec. Mappak.
13. Pembangunan Jalan Ma'dandan-Salu Kapuan Lembang Tanete.
14. Pembangunan Jalan Poros Kampung Lombok Lembang Tanete.
15. Drainase Lapangan Kondodewata ± 250 Meter.
16. Pembangunan Jembatan Tappang Sumassan-Miallo.
17. Peningkatan Jalan Saruran-Batang Uru Lembang Butang.
18. Peningkatan Jalan Kondodewata.

c. Kecamatan Rano :

1. Pembangunan Jalan Kalimbuang-Turi.
2. Pembangunan Jalan Turi-Saruran.
3. Pembangunan Jalan Saruran-Tawan.
4. Pembukaan Jalan ke TPU Lancong-Madandan.



5. Pembangunan Irigasi Talang di Lembang Rano Tengah.
6. Pembangunan Irigasi Turi-Bila (500 Meter).
7. Pembangunan Irigasi Padang Lambe-Buttu Appang (800 Meter).
8. Pembangunan Irigasi Kale'mak-Bunbun (500 Meter).
9. Pentaludan Irigasi (50 Meter) di Lembang Rano Tengah.
10. Pembangunan Jalan Tani Saruran-Kandasule (500 Meter).
11. Peningkatan Jalan Burak-Tombang Lotong.
12. Peningkatan Jalan Burak-Ra'pa'.
13. Pembangunan Jembatan Ra'pa'-Salukuse.
14. Repitalisasi Sawah di Lembang Rano Tengah.
15. Pembangunan Irigasi Suppak-Burak.
16. Pembangunan Irigasi Sipate-Sitodo'.
17. Pembangunan Irigasi Sarassang.
18. Pembangunan Irigasi Sitodo'-Tanete.
19. Pembangunan Irigasi Rarea.
20. Peningkatan Jalan Maninnik.
21. Peningkatan Jalan Wisata Sarasa (Air Terjun).
22. Pengadaan Traktor 8 (Delapan) Unit.
23. Pembangunan Jembatan Irigasi Garegek (15 Meter)
24. Pentaludan SDN 356 Pagerengan.
25. Mobiler SDN 241 Kalimbua'.
26. Pembangunan Pustu Rano Tengah.
27. Pengadaan Bibit Bawang Merah, Jagung, Padi, dll di Lembang Rano Tengah.
28. Pengadaan Pipa Air Bersih Langdenan-Batutu Lembang Rano Utara.
29. Peningkatan Jalan Tani Pangalloan-Pangi.
30. Pembangunan MCK SMP 1 Bonggakaradeng.
31. Pembuatan Pagar SMP 6 Bonggakaradeng.
32. Pengadaan Mobile SDN 198 Rano.
33. Pengadaan Barang Inventaris Kampong Batutu (Papan, Balo', Alat Dapur, Kompor 1 Mata, Gelas Halus) di Lembang Rano Utara.
34. Pengadaan Amplifier Gereja Toraja Jemaat Batutu.



35. Rehab RKB SD Tombangkalua'.
36. Peningkatan Jalan Batutu-Saruran.
37. Penanganan Longsor Jalan Langsa –Lauang.
38. Pembangunan Jalan Puru-Saluwati'.
39. Pembangunan Irigasi Buka- Tando
40. Pengadaan Traktor untuk 8 Kelompok di Lembang Rano Utara.
41. Pengadaan Kultivator untuk 5 KWT Rano Utara.

d. Kecamatan Bonggakaradeng

1. Pengadaan Penerangan Jalan Umum.
2. Pembangunan Jalan Tani Landan-Po'pong-Tandung-Patti'.
3. Pembangunan dan Penataan Objek Wisata Air Terjun Sarasa Patuang dan Sarowo.
4. Pembangunan Jalan Poros Matangli-Sandangan.
5. Pembangunan Jalan Poros Sipe-Sandangan/Mappa'.
6. Lanjutan Irigasi Mabaya.
7. Peningkatan/Pentalutan Jalan To'bubun-Gereja Sandangan.
8. Peningkatan Jalan Buttu-To'saruran.
9. Peningkatan Jalan To'sappu'-Gattungan.
10. Pembukaan Jalan Tolayo-Patuang.
11. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Buakayu-Bau.
12. Pembangunan Jembatan Rangka Baja/Beton Meppajang.
13. Pembukaan/Peningkatan Jalan Ollon-Kendenan.
14. Pembukaan/Peningkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi Kendenan-To'do.
15. Pembukaan/Peningkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi Bulung-Mappak.
16. Rehabilitasi RKB SMPN 5 Bonggakaradeng.
17. Bantuan Hibah untuk Pembangunan Rumah Ibadah yang Sementara dalam Proses Pembangunan (Gereja Pandan dan Gereja Ollon).
18. Pengusulan Pembebasan Lokasi Kawasan Kehutanan Menjadi Kawasan atau Lahan Produksi Rakyat.
19. Bantuan Mobil Ambulance untuk Menunjang Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.
20. Peningkatan Jalan Matombon-Garoang.



21. Peningkatan Akses Jalan Menuju Objek Wisata Tebing Romantis dan Objek Wisata Ollon serta sarana Penunjang Objek Wisata.
22. Pembangunan Jalan Tani Bulung.
23. Pembangunan Jalan Tani Sadipe.
24. Anggaran Stimulan untuk Kelurahan.
25. Pelebaran Jalan Poros Sipe Salubalang ± 3.000 Meter.
26. Pelebaran Jalan Poros Takodo-Ratte ± 2.000 Meter.
27. Rabat Beton Takodo-Lamba' ± 300 Meter.
28. Rabat Beton Kambangulu-Palakka ± 300 Meter.
29. Rabat Beton Palummi-Kalebu' ± 400 Meter.
30. Rabat Beton Ratte-Talimbung ± 1.000 Meter.
31. Rabat Beton Poros Lemmu-Pianum ± 1.000 Meter.
32. Rabat Beton Jalan Tani Nusa ± 300 Meter.
33. Rehab Irigasi Nusa.
34. Lanjutan dan Rehab Irigasi Galeppo/Garutin ± 1.500 Meter.
35. Rehab Irigasi Tarra ± 800 Meter.
36. Rehab Irigasi Kaleppang ± 500 Meter.
37. Pembangunan Damparit Nusa.
38. Pembangunan Jalan Poros Takodo-Ratte.
39. Pentalutan Halaman Gereja Jemaat Maruangin.
40. Pembangunan Jalan Poros Kantor Koramil-Barobok.
41. Pembangunan Embung Salumalutu.
42. Penambahan Guru SD, SMP di Kelurahan Ratte Buttu.
43. Peningkatan Jalan/Rabat Beton Garolin-Puskesmas Buakayu.
44. Insentif Aparat Kelurahan (Kepala Lingkungan, RT, Hansip).
45. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Buakayu-Bau.
46. Pembangunan Jembatan Rangka Baja/Beton Meppajang.
47. Pembukaan/Peningkatan Jalan Ollon-Kendenan.
48. Pembukaan/Peningkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi Kendenan-To'do.
49. Pembukaan/Peningkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi Bulung-Mappak.
50. Rehabilitasi RKB SMPN 5 Bonggakaradeng.



51. Bantuan Hibah untuk Pembangunan Rumah Ibadah yang Sementara Dalam Proses Pembangunan (Gereja Pandan dan Gereja Ollon).
52. Pengusulan Pembebasan Lokasi Kawasan Kehutanan Menjadi Kawasan atau Lahan Produksi Rakyat.
53. Bantuan Mobil Ambulance untuk Menunjang Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.
54. Peningkatan Jalan Matombon-Garoang.
55. Peningkatan Akses Jalan Menuju Objek Wisata Tebing Romantis dan Objek Wisata Ollon serta Sarana Penunjang Objek Wisata.
56. Pembangunan Jalan Tani Bulung.
57. Pembangunan Jalan Tani Sadipe.
58. Peningkatan Jalan (Rabat Beton/Pelebaran) Jalan Kampung Sangayoka.
59. Peningkatan Jalan (Rabat Beton/Pelebaran) Jalan Kampung Salu.
60. Peningkatan Jalan (Rabat Beton/Pelebaran) Jalan Kampung Pelattangan.
61. Peningkatan Jalan (Rabat Beton/Pelebaran) Jalan Kampung Tombang (Lanjutan).
62. Peningkatan Jalan (Rabat Beton/Pelebaran) Jalan Kampung Malea.
63. Pembukaan Jalan Tani To'kalosi-Pelattangan.
64. Irigasi Perpipaian Leso.
65. Pembangunan Jembatan Kaluppang.
66. Subsidi Pemasangan Listrik PLN untuk Masyarakat Miskin.
67. Perbaikan Irigasi Leda-Garappa'.
68. Rabat Beton Leda-Poton-Garappa'.
69. Rabat Jalan Tani Bua-Leppangan.
70. Lanjutan Perintisan Jalan Wisata Poton-Ollon.
71. Lanjutan Rabat Beton Pa'taroan-Paken.
72. Pembangunan Jembatan Gantung Ka'tuan-Komba'.
73. Peningkatan Jalan Tani Bedeng-Leppangan.
74. Bantuan Bedah Rumah Yang Tidak Layak Huni.
75. Pembangunan Jalan Tani Landan-Po'pong-Tandung-Patti'.



76. Pembangunan dan Penataan Objek Wisata Air Terjun Sarasa Patuang dan Sarowo.
77. Pembangunan Jalan Poros Matangli-Sandangan.
78. Pembangunan Jalan Poros Sipe-Sandangan/Mappa'.
79. Lanjutan Irigasi Mabaya.
80. Peningkatan/Pentalutan Jalan To'bubun-Gereja Sandangan.
81. Peningkatan Jalan Buttu-To'saruran.
82. Peningkatan Jalan To'sappu'-Gattungan.
83. Pembukaan Jalan Tolayo-Patuang.
84. Pembangunan Jalan Tani Marue-Rano.

IV. Daerah Pemilihan 4 (Masanda, Bittuang, Saluputti dan Kurra)

a. Kecamatan Masanda

1. Pengadaan Mobiler di Sekolah-sekolah Kecamatan Masanda
2. Perlunya Pemetaan dan Penyebaran Guru secara merata baik pada Tingkat SD, SMP, dan SMA.
3. Masih adanya beberapa SD dan SMP yang belum memiliki Kepala Sekolah yang definitif sebagai konsekuensi pelaksanaan mutasi yang lalu.
4. Perlunya inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana belajar mengajar yaitu berupa kursi, meja, dan sarana belajar lainnya.
5. Masih ada beberapa sekolah yang membutuhkan Rehab Ruang dan Penambahan Ruang Kelas Belajar (RKB).
6. Masih perlunya sosialisasi dan informasi kepada seluruh warga masyarakat terkait Program Kesehatan Gratis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7. Perlunya penambahan sarana dan prasarana kesehatan pada Puskesmas, Pustu, dan Polindes yang ada.
8. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan paramedis kepada masyarakat yang membutuhkan.
9. Perlunya Penambahan Ruang Rawat Inap dan Renovasi Puskesmas dan Pustu pada beberapa wilayah.
10. Peningkatan Jalan Poding Ao'-Ratte.
11. Peningkatan Jalan Gotta-Kadundung.



12. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Palli'-Ekko Padang.
13. Peningkatan Jalan Barana'-Tondok Tua.
14. Peningkatan Jalan Lokko'-Pa'baladoan.
15. Penataan Kawasan Objek Wisata Pa'baladoan.
16. Penataan Objek Wisata Air Panas Kanan Lembang Belau.
17. Penataan Kawasan Pemukiman Kampung Kadundung Lembang Kandudung.
18. Penataan Kawasan Pemukiman Kampung Tappan Lembang Kandudung.
19. Pembangunan Drainase Langda-Ratte Lembang Kadundung.
20. Pengadaan Hand Traktor untuk kelompok-kelompok tani.
21. Pengadaan bibit-bibit padi untuk kelompok-kelompok tani.
22. Pengadaan bibit-bibit ikan untuk kelompok-kelompok tani.
23. Pengadaan bibit-bibit ternak babi untuk kelompok-kelompok tani.
24. Pengadaan pupuk untuk kelompok-kelompok tani.
25. Perlunya Hibah kepada kelompok-kelompok generasi muda.
26. Perlunya Hibah kepada rumah-rumah ibadah.
27. Perlunya Hibah kepada kelompok-kelompok kemasyarakatan (Pa'tondokan).

b. Kecamatan Bittuang

1. Perintisan Jalan Kampung Ratte Sarambu ke Bolokan Kec. Bittuang.
2. Perintisan Jalan Ratte Sarambu ke Berang Rante Karua Kec. Bittuang.
3. Penataan Objek Wisata Ratte Sarambu Kecamatan Bittuang.
4. Pengadaan Mobiler di sekolah-sekolah Kecamatan Bittuang.
5. Pembangunan Jembatan Tandung Lembang Tiroan Kecamatan Bittuang.
6. Perintisan Jalan Tani Tandung ke Tiroan Lembang Tiroan.
7. Penataan Halaman/Talut Tongkonan Tiroan Kecamatan Bittuang.

c. Kecamatan Saluputti :

1. Pembangunan Jalan Pattan Ulsalu Kecamatan Saluputti.



2. Penataan Halaman/Talut Tongkonan Ratte-Tanete Kecamatan Saluputti.
3. Perintisan Jalan Tani Ratte-Tanete Kecamatan Saluputti.
4. Pengadaan Alat-alat Pertanian Kelompok Tani di Kecamatan Saluputti.
5. Rabat Beton Jalan Sepang Pa'buaran Lembang Salu Kecamatan Saluputti.
6. Lanjutan Pembukaan Jalan Lingkungan Tenge'-Pa'batanan Kelurahan Ratte Kurre.
7. Pembukaan Jalan Sambiri-Kayuagin Lembang Ratte Talonge'.
8. Pembukaan Jalan Tangratte-Pokkaran

d. Kecamatan Kurra

1. Pengadaan Mobiler di Sekolah-sekolah Kecamatan Kurra.
2. Penanganan Tanah Longsor Jalan Poros Kalembang-Bambalu.
3. Pengadaan Tenda Besi Lingkungan Kalembang (Untuk Tempat Toma'sapan).
4. Perintisan Jalan Tani Jalan Lingkar ke Tempat Pemakaman Umum.
5. Pengadaan Baju Seragam Kelompok Dasawisma.
6. Bantuan Handtraktor untuk Petani.

V. Daerah Pemilihan 5 (Rembon, Rantetayo, Malimbong Balepe)

a. Kecamatan Rantetayo

1. Pembangunan Jembatan Manggi' yang menghubungkan Jalan ke Lembang Tonglo-Kelurahan Padangiring.
2. Rabat Beton Jalan Poros Pebatuan Kao' di Lembang Tonglo'.
3. Lanjutan Rabat Beton Jalan Poros Pebatuan-Surakan.
4. Perkerasan Jalan dan Pentalutan Poros Lemo-Tandioka'.
5. Pengadaan Alat/Mesin Caltifator Traktor di Lembang Tonglo.
6. TPA Tidak Dikelola Dengan Baik di Kelurahan Padangiring.
7. Pengolahan Air di Samping Bandara Bisa Dijadikan Sumber Pengairan untuk Wilayah Tonglo, Madandan, Padangiring dan Tarongko.
8. Selama Ini Tidak Ada Bantuan untuk TK-PAUD.
9. Pemagaran Pustu Tapparan 200 x 100 M di Kelurahan Tapparan.



10. Rehabilitasi Berat Pustu Tapparan.
11. Perbaikan Atap Kantor Kelurahan Tapparan.
12. Pentalutan Longsor Lombok Tosik-Marakka di Kelurahan Rantetayo.
13. Pentalutan Jalan Longsor Poros Rantetayo-Tapparan di Kelurahan Rantetayo.

b. Kecamatan Rembon

1. Pengusulan Gedung Sekolah PAUD di Kelurahan Talion.
2. Pengadaan Mobiler PAUD di Kelurahan Talion.
3. Peningkatan Pelayanan Posyandu di Kelurahan Talion.
4. Pengusulan Traktor, Mesin Pembabat, Bibit Ternak, Pakan Ternak untuk Para Petani di Kelurahan Talion.
5. Pengusulan Sarana Prasarana Jalan/Talut di Kelurahan Talion.
6. Pembinaan Kepada Anak-anak Remaja di Kelurahan Talion.
7. Pembinaan Kepada Anak-anak Yang Selalu Memegang HP/Gedget (Penggunaan Pelatihan Digital) di Kelurahan Talion.
8. Peningkatan Pelatihan/Keterampilan seperti : Menjahit, Salon, Seni Budaya, Tata Boga dan Tenun di Kelurahan Talion.
9. Perhatian Kepada Guru-Guru PAUD oleh Pemerintah di Kelurahan Talion.
10. Perhatian Pemerintah Terhadap Adu Kerbau dan Sabung Ayam Yang Mempengaruhi dan Merusak Anak-anak Sekolah di Kelurahan Talion.
11. Pengadaan Tenda Besi dan Peralatan Dapur untuk Lingkungan di Kelurahan Talion.
12. Pembangunan Jalan Kalua' Timbalayak Tokka' 1.000 M di Lembang Banga.
13. Lanjutan Rabat Tokka' Tombonan Pare 400 M di Lembang Banga.
14. Pentalutan Jalan Limbong Ullin 250 M di Lembang Banga.
15. Rabat Beton Jalan ke tempat Ibadah CK. Tanggoro Karassik 200 M di Lembang Banga.
16. Rabat Beton Jalan Ullin Kandak 300 M di Lembang Banga.
17. Pengerasan Jalan Salossok Jembatan Gantung 1.000 M di Lembang Banga.



18. Perkerasan Jalan Tokka Jembatan Gantung 1.000 M di Lembang Banga.
19. Pentalutan Tempat Ibadah Stasi Karassik 150 M di Lembang Banga.
20. Perbaikan Jalan Tandingan ke Posyandu 200 M di Lembang Banga.
21. Perintisan Jalan Bambakalaka Batulappak 1.000 M di Lembang Banga.
22. Pembukaan Jalan Tani Tumakke-Solo-Tarobok 500 M di Lembang Banga.
23. Perintisan Jalan Tani Objek Wisata Kuburan Batu Batu Lappa' 1.500 M di Lembang Banga.
24. Pembukaan Jalan Tani Lingkar Bamba-Bamba 500 M di Lembang Banga.
25. Lanjutan Rabat Beton Bamba-Bamba Buri' 250 M di Lembang Banga.
26. Rabat Beton Tumakke Papabatu 250 M di Lembang Banga.
27. Pengadaan Gedung PAUD Efrata Banga 60 M di Lembang Banga.
28. Lanjutan Bronjong Bantaran Sungai Pasar Rembon 300 M di Lembang Banga.
29. Penataan Lingkar Pasar Rembon 250 M di Lembang Banga.
30. Rabat Beton Jalan Tanete Babu ke To'semba 500 M di Lembang Banga.
31. Rabat Beton Jalan Pasar Rembon ke Jembatan Gantung 200 M di Lembang Banga.
32. Peningkatan Jalan Poros Takari-Jembatan Gantung 1.500 M di Lembang Banga.
33. Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Tandingan-Sandangan-Kelurahan Rembon 100 M di Lembang Banga.
34. Perintisan Jalan Lingkar Tandingan Landung 400 M di Lembang Banga.
35. Perintisan Jalan Sanasa ke Landung 500 M di Lembang Banga.
36. Peningkatan Jalan Durian ke Limbong Karassik 1.000 M di Lembang Banga.



37. Perintisan Jalan Rada ke Jembatan Rada 800 M di Lembang Banga.
38. Perintisan Jalan Tani Tombonan Pare ke Kalua' 1.000 M di Lembang Banga.
39. Pembangunan Jembatan Kanan, Kelurahan Talion.
40. Pengadaan/Pemasangan Aliran Listrik (PLN) di Lembang Kayuosing.
41. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah) di Lembang Kayuosing.
42. Bantuan 2 Traktor untuk Kampung Ma'rang dan Pangala' Lembang Kayuosing.
43. Pembangunan Kuping Jalan Lembang To'pao.
44. Peningkatan Jalan To'sendana-Depan Pangleon.
45. Peningkatan Jalan Busso- Po'pong To'pao.
46. Peningkatan Jalan Ratte-Dutiroan.
47. Pembangunan Irigasi Sangrapuan, Lembang Limbong.
48. Peningkatan Jalan Tampang Allo-Batu Sura'.
49. Peningkatan Jalan Batu Sura'-Tabang.
50. Peningkatan Jalan Poros Sarong-Kalembang.
51. Peningkatan Jalan Tabuan-Sangbua.
52. Pemetaan Halaman Sekolah di Lembang Sarapeang.
53. Bantuan Rumah Ibadah di Lembang Sarapeang.
54. Prioritas Jalan ke Balla-balla karena Jalan Penghubung ke Kabupaten, Sesesalu Utara RT Malolo dan Batupua di Lembang Palesan.
55. Lanjutan Rabat Beton Tumakke-Malolo di Lembang Palesan.
56. Posyandu di Lembang Palesan di Rehabilitasi (Renovasi).
57. Sawah di Ratte Rano Pengairan 1.050 M, Prioritas 14 Ha (Pipa 4 Inchi) di Lembang Palesan.
58. Pengadaan Alat Dapur untuk Karang Taruna Sesesalu.
59. Perbaikan Irigasi 2 Titik (Pangala dan Kayuosing) di Lembang Kayuosing.
60. Jembatan To'angin agar segera dibuat karena sangat dibutuhkan Masyarakat di Lembang Palesan.
61. Lanjutan Rabat Beton Takolo-Karapoan.



62. Pelatihan Menjahit dan Tata Rias di Lembang Palesan.
63. Bangunan Kelas Jauh di Ma'tang Lembang Kayuosing Sangat Membutuhkan Rehabilitasi.
64. Bantuan Rumah Ibadah Cabang Kebaktian di Lembang Palesan.
65. Rabat Beton Lebani-Tanete di Lembang Palesan.

c. Kecamatan Malimbong Balepe'

1. Pembangunan Jalan dari Se'seng ke Lembang Tando-Tando.
2. Pembangunan Jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat Sungai Kalando di Dusun Leppan maupun Lembang Balepe'.
3. Puskesmas di Dusun Leppan Leasa' (Pembangunannya masih tertunda).
4. Rabat Beton Jalan Lombo' Tabang-Pettingaloan, Malimbong.
5. Rabat Beton Jalan Sullukan-Batu Te'dek, Lembang Leppan.
6. Peningkatan Jalan Tonglo'-Talion Sarapeang, Lembang Kolesawangan.
7. Peningkatan Objek Wisata Talondo Tallu di Balamba Lambe'.
8. Peningkatan Jalan Pertanian di Ratte karena mayoritas masyarakat berkebun kopi.
9. Pembangunan Jembatan ke Barana' yang menghubungkan Barana'-Tammuan.
10. Rabat Jalan Poros Malimbong Battaran-Ratte, Kecamatan Saluputti.
11. Pengadaan Pipanisasi di Lembang Kolesawangan.
12. Peningkatan Jalan Poros ke Kecamatan Malimbong Balepe'.
13. Gedung Pertemuan/Aula di Kecamatan Malimbong Balepe' ditingkatkan.
14. Pembangunan Gedung Sekolah untuk SLTA di Kecamatan Malimbong Balepe'.
15. Pembangunan Tower di Lembang Balepe'.
16. Jalan Lingkar Rembon-Malimbong Balepe' belum tersentuh.
17. Perintisan Jalan Saluliang-Sepang Lembang Kolesawangan.
18. Pembangunan Irigasi Kalo' Baine Lembang Kolesawangan.
19. Perintisan Jalan Tani Ratte-Ratte Kuni'.
20. Perintisan Jalan Lambanan-Sapa'.
21. Perintisan Jalan Limbong Boko'-Lamban Ledo.



22. Pembangunan Kantor Lembang Leppan.
23. Rabat Beton Jalan Patappo-Londo ± 350 M.
24. Pembukaan Jalan Poros Kayuosing-Ratte, Malimbong Balepe'.
25. Pengadaan Alat dan Penambahan Modal Usaha untuk Usaha Mikro (UMKM).
26. Pengadaan Handtractor.
27. Pembangunan Irigasi dan Embung.
28. Bantuan Pengadaan 1 Unit Motor Trail untuk Petugas Puskesmas Kecamatan Malimbong untuk menjangkau Posyandu di Battayan di Balepe'.
29. Pembangunan Jalan Poros Pa'buaran-Objek Wisata Salu Liang, Lokasi Lembang Kolesawangan Kecamatan Malimbong.
30. Peningkatan Jalan Poros Lebani'-Sollongan, Kelurahan Malimbong, Kecamatan Malimbong Balepe'.
31. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan vaksinasi Lembang Lemo Menduruk secara khusus dan Kecamatan Malimbong pada umumnya per 14 Desember 2021

VI. Daerah Pemilihan VI (Sanggalla, Sanggalla Utara, Sanggalla Selatan, Makale Utara)

a. Kecamatan Sanggalla

1. Pembangunan Jembatan Jalan Poros Makale-Sanggalla di Lembang Turunan, Kecamatan Sanggalla.
2. Bantuan untuk Rumah Ibadah di Kecamatan Sanggalla.
3. Penataan Halaman SD Inpres 126 Garampa Kecamatan Sanggalla.
4. Penataan Halaman SMP Kristen Sanggalla.
5. Pentalutan dan Penataan Halaman SDN 122 Gantaran.
6. Pembangunan Ruangan untuk Kantor pada SDN 122 Gantaran, dimana selama ini menggunakan ruangan kelas.
7. Penataan Halaman SMP Negeri 2 Sanggalla dan Pembangunan Lapangan Multi Sport.
8. Pembangunan Pintu Gerbang SMP Negeri 2 Sanggalla.
9. SDN 122 Gantaran masih kekurangan Guru.
10. Pembangunan Jalan Poros Petarian Kelurahan Tongko Sarapung.



11. Penataan Halaman dan Pemagaran pada SDN 324 Kalembang, Kecamatan Sangalla.
12. Dibutuhkan Pembangunan Ruang Kelas Minimal 3 Ruangan untuk SMP Satap 3 Sangalla.
13. Pengadaan Air Bersih untuk Puskesmas Sangalla.
14. Pengadaan Pagar untuk Puskesmas Sangalla.
15. Perbaikan Jalan Poros Sangalla-Buntukalando, Kecamatan Sangalla.
16. Usulan Pemberian Honor kepada para Kepala Lingkungan, Ketua RT, Hansip dan Lembaga Adat.
17. Pembukaan Jalan di Ampan, Kelurahan Tongko Sarapung, Kecamatan Sangalla.
18. Pengadaan dan Pemanfaatan Teknologi Dross untuk para Petani.
19. Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan, Kelurahan dan Lembang, apalagi bagi petani yang belum masuk anggota kelompok tani.

b. Kecamatan Sangalla Utara

1. Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kelurahan Bebo' Lembang Tumbang Datu.
2. Bantuan Pemberdayaan Kelompok untuk Pertukangan, Seni Ukir, Kelompok Dasawisma dan Pandai Besi.
3. Bantuan Pemberdayaan untuk Pemuda Bebo' dan Lion Tondok Iring (Pengadaan Sound System).
4. Bantuan ALSINTAN (Tractor Tangan) di Kecamatan Sangalla Utara dan Makale Utara.
5. Pembangunan Jalan Lingkungan di Lembang dan Kelurahan.
6. Bantuan untuk UKM di Lembang dan Kelurahan di Kecamatan Sangalla Utara.
7. Penataan Objek Wisata di Kecamatan Sangalla Utara.
8. Pengadaan Air Bersih di Lembang dan Kelurahan di Kecamatan Sangalla Utara.
9. Perbaikan Instalasi Listrik di Lembang dan Kelurahan di Kecamatan Sangalla Utara.



10. Bantuan untuk Pemberdayaan Pemuda di Setiap Lembang dan Kelurahan di Kecamatan Sangalla Utara.
11. Bantuan untuk Pembangunan Rumah Ibadah di Dapil VI.
12. Pelatihan Kelompok-kelompok Usaha Kecil di Lembang dan Kelurahan.
13. Perbaikan Jaringan Listrik di Kecamatan Sangalla Utara dan Makale Utara.
14. Pembangunan Jalan Bo'ne Lembang Leatung Matallo.
15. Pembangunan Jalan Pasang Batu Lembang Leatung Matallo.
16. Penataan Kawasan Wisata Be'bo Tumbang Datu Kelurahan Bebo.
17. Pembangunan Jalan Patu'a Lembang Leatung Matallo.
18. Penambahan Kuota Subsidi Pupuk (Perbaikan RDKK).
19. Penambahan Bantuan Kesehatan (KIS dan KIT).
20. Penempatan Guru agar disesuaikan di Sekolah-sekolah.
21. Pembangunan Jalan Sangre-Pangambo'.
22. Pembangunan Jembatan dalam Kecamatan Sangalla' Utara.
23. Penempatan Guru agar betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah.

c. Kecamatan Sangalla Selatan

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Sangalla-Sangalla Selatan, mulai dari Makula' sampai Batualu Selatan yang rusak parah.
2. Pengelolaan Objek Wisata Permandian Makula' kalau bisa dikelola oleh Pokdawis Lembang Tokesan.
3. Tindak Lanjut Pariwisata Sullukan, Lembang Tokesan Kec. Sangalla Selatan.
4. Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sangalla' Selatan, apalagi bagi petani yang belum masuk anggota kelompok tani.
5. Bantuan Traktor di Kelurahan dan Lembang.
6. Penambahan Guru TK Silo di Lembang Tokesan.
7. Penambahan RKB TK Silo di Lembang Tokesan.
8. Pelebaran/Peningkatan Jalan To'tumbang-Mila'.



9. Bantuan Ternak Babi dan Ayam di tiap-tiap Dusun, Lembang Tokesan.
10. Perbaikan Jalan Wisata ke Kaero yang masih dalam wilayah Lembang Tokesan.
11. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tiga Titik di Lembang Raru Sibunuan dan pada jalan poros Lembang Tokesan sampai Batualu Selatan.
12. Pengadaan Air Bersih yang belum tersalurkan di Kecamatan Sangalla Selatan.
13. Perbaikan Jalan Pabontong, Dusun Wala Lembang Tokesan.
14. Bantuan Pembangunan Pastori Jemaat Padang Lembang Tokesan.
15. Rehabilitasi SDN 131 Balombong Tiga Ruangan.
16. Lanjutan Rabat Beton Poros Raru-Kombong 700 M, Lembang Raru Sibunuan.
17. Pengadaan Pagar, Kusen Pintu dan Kusen Jendela di Kantor Kecamatan Sangalla Selatan.
18. Pengisian Jabatan Struktural di Kecamatan Sangalla Selatan yang masih kosong.
19. Perintisan Jalan Poros Pangrante-Pasang, Lembang Tokesan.
20. Pentalutan Poros Dulang-Tumangke.
21. Usul Perbaikan Jalan Songgo sampai ke Marinding yang sudah sangat rusak yang menghubungkan Sangalla Selatan ke Kecamatan Mengkendek.
22. Normalisasi Sungai Lambanan (Pengerukan) karena sungai tersebut sangat merusak lahan persawahan.
23. Jalan ke Ta'ba' yang ada jembatan gantungnya dari bambu mohon Pembangunan Jembatan Permanen pada Jalan Poros Ta'ba', Lembang Batualu.
24. Rabat Beton Poros Kambelangi'-Pullanan 1 km, Lembang Tokesan.
25. Rabat Beton Poros Kambelangi'-Pasang, Lembang Tokesan.
26. Pemasangan Pipa Air dari Simbuang To'puang ke Tokesan sampai sekarang sudah rusak dan belum dipergunakan.



27. Kelanjutan Pembangunan SMA di Batualu sampai sekarang belum ada tindak lanjut dimana lahannya sudah siap.
28. Penambahan Guru PAUD di Sangalla Selatan mohon ditambah dari tenaga PNS.
29. KWT Lembang Tokesan memohon Handtraktor Kebun.
30. Peningkatan Jalan atau Rabat Beton ke Kendenan-Lambanan.
31. Pengadaan Pagar SMP Negeri 1 Sangalla' dan Pintu Gerbang SD Songgo.
32. Poskesdes Tokesan dan Tamporan sangat kekurangan peralatan bahkan tenaga yang ada di Poskesdes tidak aktif.

d. Kecamatan Makale Utara

1. Pembangunan Jalan Parampo-SD Inpres Lemo.
2. Rehabilitasi Kabel Bentangan dan Tiang di RT Kanan, Lingkungan Kalosi Kel. Lemo.
3. Pembangunan Jalan Tagari Bo'ne-Penduruan Kelurahan Lemo.
4. Penerangan Jalan Objek Wisata Lemo Kelurahan Lemo.
5. Pentalutan Jalan Poros Bungin-Tongkonan Lempangan.
6. Penatan Lingkungan RT. Kandian Litak Kelurahan Lion Tondok Iring.
7. Pengusulan Jalan Tani Kelurahan Lemo Kec. Makale Utara.
8. Pengadaan Lampu Jalan di Parampo Kelurahan Lemo.
9. Listrik di Kelurahan Sarira (Rorre) Membutuhkan Trafo.
10. Kelurahan Lemo Memohon Kepada Pihak Yang Berwenang untuk Menyelesaikan Sengketa Se'ke' Bontongan karena masalah ini sudah sangat lama sehingga masyarakat Lemo mengharapkan masalah ini cepat diselesaikan.
11. Terkait halaman Sekolah SDN 109 Tombang yang dijadikan jalan umum kendaraan, perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena sangat mengganggu proses belajar mengajar serta keamanan anak-anak sekolah.
12. Objek Wisata Lemo sekarang ini tidak pernah lagi dilirik oleh Pemerintah termasuk pembangunan Infrastruktur dan penunjang lainnya.
13. Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan, Kelurahan dan Lembang apalagi bagi petani yang belum masuk anggota kelompok tani.



14. Pembangunan Jembatan Beton Parampo.
15. Bantuan Ternak Babi di beberapa Kelurahan di Kecamatan Makale Utara.
16. Bantuan Penerangan Jalan di Kelurahan Lemo.
17. Pembukaan Jalan Daro-Pa'pakendek Kelurahan Lemo.
18. Bantuan Traktor di Lima Kelurahan di Kecamatan Makale Utara.
19. Bantuan Gengset di Kelurahan Bungin.
20. Bantuan Cultivator di Kelurahan Tambunan.
21. Pembangunan Jalan Pamumben Kelurahan Tondok Iring.
22. Pembukaan Jalan Kelurahan Sarira-Kambuno.
23. Bantuan Pengrajin Souvenir di Kelurahan Lemo dan Kelurahan Sarira.
24. Pembangunan Jalan Poros Pusing Kelurahan Sarira.
25. Pembangunan Jalan Bo'ne-Tagari Kelurahan Lemo.
26. Tenaga Pendidik Sangat Kurang di Makale Utara secara umum bahkan tenaga sukarela yang ada di sekolah-sekolah mohon diperhatikan.
27. Pembangunan Jalan To'angka-Gasing Kelurahan Lemo.
28. Pembukaan Jalan Kelurahan Lemo dan Kelurahan Sarira.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.

5.1. Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2023

Kerangka pendanaan pembangunan daerah adalah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan di Kabupaten Tana Toraja. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan kemampuan keuangan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program. Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III disajikan bahwa Penerimaan Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1.228.993.832.000,00. Setelah dikurangi dengan Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.5.000.000.000,00, maka Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan sebesar Rp.1.223.993.832.000,00 yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2023. Belanja daerah tahun 2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Belanja daerah tahun 2023 antara lain diarahkan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, pembangunan infrastruktur daerah, pengawasan dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya dalam rangka peningkatan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, gini ratio dan penurunan tingkat pengangguran serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

Untuk lebih jelasnya, kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022–2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2024

NO	KAPASITAS RIIL/BELANJA	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	1,180,756,040,000	1,223,993,832,000	1,279,058,066,000
5	Belanja Daerah	1,180,756,040,000	1,223,993,832,000	1,279,058,066,000
5.1	Belanja Operasi	739,216,983,000	780,442,414,000	805,315,752,000
5.1.1	Belanja Pegawai	487,003,888,000	499,178,985,000	511,658,460,000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	265,913,095,000	266,963,429,000	264,457,292,000
5.1.4	Belanja Subsidi	4.000.000.000	2.000.000.000	2,000,000,000
5.1.5	Belanja Hibah	13,000,000,000	12,000,000,000	60,000,000,000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	300,000,000	300,000,000	200,000,000
5.2	Belanja Modal	207,479,057,000	241,836,418,000	230,117,314,000
5.2.1	Belanja Tanah	5,000,000,000	5,000,000,000	0
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	35,000,000,000	33.000.000.000	37,000,000,000
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	54,351,559,000	70.711.963.000	55,615,543,000
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	113,127,498,000	131.124.455.000	137,501,771,000
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	2.000.000.000	0
5.3	Belanja Tidak Terduga	18,000,000,000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	18,000,000,000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	185,060,000,000	191.715.000.000	200,625,000,000
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa**) Bagi Hasil Pajak	500,000,000	500.000.000	500.000.000
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	184,560,000,000	191.215.000.000	200,075,000,000
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	184,560,000,000	191.215.000.000	200,075,000,000

Sumber Data : RPJMD Kab. Tana Toraja, Tahun 2021 - 2026.

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas dilakukan melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023. Prioritas



Pembangunan Daerah dijabarkan dari program prioritas yang ditawarkan oleh Kepala Daerah Terpilih pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yang merupakan bagian dari Visi, Misi, dan Program KDH yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya,. Dengan demikian, program prioritas pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.



Tabel 5.2

Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah	
					Target		Proyeksi			
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan	Program Pengelolaan Keuangan	Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	100%	2,900,000,000	100%	3,200,000,000	BPKAD	
				Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100%		100%			
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Bersertifikat	55%	1,300,000,000	60%	1,400,000,000		BPKAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3.67%	1,300,000,000	4,41	1,350,000,000		Badan Pendapatan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	2,100,000,000	100%	2,300,000,000		BAPPEDA
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan kemanfaatan penelitian dan pengembangan	100%	175,000,000	100%	200,000,000		BAPPEDA
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan BPK-RI	70%	2.800.000.000	70%	2,900,000,000		Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perentase Kebijakan Pengawasan yang diakomodir menjadi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah	100%	600,000,000	100%	650,000,000		Inspektorat



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kompetensi	50%	1,200,000,000	60%	1,250,000,000	BKPSDM
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN berkinerja baik	100%	1,250,000,000	100%	1,300,000,000	BKPSDM
				Persentase ASN yang menduduki jabatan structural	87%		93%		
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan sesuai rencana	100%	1.000.000.000	100%	1,100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, dan APBDes dan BUMDES	100%	600.000.000	100%	600.000.000	DPML
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (Tepat Waktu)	94.77%	125.000.000	95.13%	200.000.000	Dinas PM & PTSP
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	81	966.500.000	83	1.055.750.000	Kecamatan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	14	494.000.000	10	537.750.000	Kecamata
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran	83%	155,000,000	84%	160,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase pasangan berakta perkawinan		50%		
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan	100%	120.000.000	100%	125.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah	
					Target		Proyeksi			
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Persentase lembaga yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public	100%		100%			
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	83%	420.000.000	92%	450.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%	87.936.400.000	100%	93.000.000.000	Dinas Kesehatan	
			Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%	100%					
			Cakupan Pemberian PMT Balita	100%	100%					
			Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%					
			Persentase cakupan pelayanan Bayi dan Balita	100%	100%					
			Cakupan Puskesmas	110,53	110,53					
			IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	100	100					
			Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit	97.79%	25.675.000.000	98.43%	26.100.000.000	RSUD Lapidada		



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes yang Memiliki Tenaga Sesuai Permenkes 43 Tahun 2009	95%	125.000.000	95%	150.000.000	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas	100%	550.000.000	100%	575.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%		100%		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas melaksanakan upaya promkes, advokasi & pemberdayaan masyarakat	100%	120.000.000	100%	130.000.000	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	100%	1.180.000.000	100%	1.210.000.000	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab./Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	200.000.000	100%	250.000.000	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	150.000.000	100%	160.000.000	Dinas Sosial
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	53%	500.000.000	60%	500.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengendalian Penduduk	Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	100%	55.000.000	100%	70.000.000	Dinas PP dan KB



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS peserta KB Aktif	69,52%	6.150.000.000	69.56%	6.000.000.000	Dinas PP dan KB
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Dinas PP dan KB
3	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan minat baca masyarakat	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100%	150.000.000	100%	175.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	88.74%	150.000.000	89.28%	175.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	74,500,000,000	100%	85.000.000.000	Dinas Pendidikan
				Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		100%		
				Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%		100%		
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pengendalian perizinan PAUD, pendidikan non formal dan pendidikan dasar yang terlayani	100%	75.000.000	100%	100.000.000	Dinas Pendidikan			



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah			
					Target		Proyeksi					
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Pengunjung Perpustakaan	12.30%	200.000.000	15.69%	250.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	94%	90.000.000	96%	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	100%	40.000.000	100%	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,65	150.000.000	89,15	175.000.000	Dinas PPPA			
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	70%	275.000.000	80%	280.000.000	Dinas PPPA			
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kecamatan yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga	64%	160.000.000	100%	160.000.000	Dinas PPPA			
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate	60%	75.000.000	70%	80.000.000	Dinas PPPA			
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kecamatan yang memiliki forum anak	100%	175.000.000	100%	175.000.000	Dinas PPPA			
			4	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat	Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Padi (Ton)	184,334	5.500.000.000	185,255	5.800.000.000	Dinas Pertanian
							Produksi Jagung (Ton)	13,316		13,449		
Produksi Kopi (Ton)	4,190	4,274										
Produksi Kakao (Ton)	1,367	1,394										
Produktivitas Padi (Ton/Ha)	5.3	5.5										
Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	7.2	7.4										



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah	
					Target		Proyeksi			
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Produksi Daging Kerbau (Kg)	373,982		393,824			
				Produksi Daging Sapi (Kg)	46,565		46,856			
				Produksi Daging Babi (Kg)	838,712		844,170			
				Produksi Telur (Kg)	693,451		701,772			
				Persentase penggunaan benih padi bersertifikat	8.90%		9.90%			
				Jumlah Penggunaan Varietas Kopi Lokal Toraya Bersertifikasi	2		0			
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (Unit)	25.00%		33.33%			Dinas Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Unit)	20	12.000.000.000	20	11.000.000.000		
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Unit)	10		10			
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan serangan OPT	10-20 %	130.000.000	10-15 %	150.000.000		Dinas Pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	100%	65.000.000	100%	65.000.000		Dinas Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kasus penyakit hewan menular	14.29%	400,000,000	16.67%	400,000,000		Dinas Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama petani/KEP	0,30%	425.000.000	0,30%	450.000.000		Dinas Pertanian



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah	
					Target		Proyeksi			
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Persentase ketersediaan penyuluh terhadap kelompok tani/ternak	6,25%		6,25%			
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kecamatan yang memiliki kelompok Pengelola Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	36.80%	550.000.000	42.10%	550.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan Desa/ Kelurahan yang menerapkan Rumah Pangan Lestari	35.85%	700.000.000	45.28%	730.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Wilayah Kecamatan pelaksanaan pengawasan	52.60%	75.000.000	68.40%	80.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	712 Ton	1.250.000.000	726 Ton	1.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan yang dipasarkan	3.721 Ton	100.000.000	3.850 Ton	120.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	25 Ton	260.000.000	26 Ton	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Meningkatnya sektor UMKM, industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	100%	350.000.000	100%	350.000.000	Dinas PM & PTSP	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi yang dikelola	77.78%	45.000.000	88.89%	55.000.000	Dinas PM & PTSP	
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMDN/PMA	8.5%	50.000.000	10.5%	100.000.000	Dinas PM & PTSP	
			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	1,69%	200.000.000	1,93%	200.000.000	Dinas Koperasi dan UKM	



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang terfasilitasi untuk diberdayakan	14,37%	200.000.000	15,52%	250.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi Izin usaha	0,80%	35.000.000	0,90%	35.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan	8,62%	250.000.000	6,90%	300.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang memiliki kategori SEHAT	14,36%	25.000.000	15,43%	30.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi	9,77%	200.000.000	9,77%	250.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kawasan perdesaan yang dibangun pada kecamatan	26%	45.000.000	42%	45.000.000	DPML
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	99,12%	150.000.000	99,13%	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	96,04%	165.000.000	98,25%	175.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	100%	90.000.000	100%	95.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Laju pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	1,71	50.000.000	2,31	70.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTP yang Di Tera	18,25%	30.000.000	21,75%	30.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok	73.68%	400.000.000	78.95%	400.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk unggulan yang dipasarkan	44.44%	40.000.000	55.56%	40.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kelompok industry yang terfasilitasi	29.41%	1.425.000.000	35.29%	1.450.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin	30.96%	110.000.000	32.86%	125.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual	1 produk	50.000.000	1 produk	55.000.000	Dinas Pariwisata
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	100%	360.000.000	100%	370.000.000	Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan	2,42%	90.000.000	2,90%	100.000.000	Dinas Koperasi & UKM



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan	100%	550.000.000	100%	600.000.000	Dinas Pariwisata
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan	78,94%	6.000.000.000	94,74%	5.000.000.000	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Dinas Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang disusun/dibuku kan	40%	45.000.000	60%	45.000.000	Dinas Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	22.31%	30.000.000	27.27%	30.000.000	Dinas Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	38.31%	350.000.000	42.99%	400.000.000	Dinas Kebudayaan
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52.80	1.500.000.000	52.90	1.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara	87.07		87.17		



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	150.000.000	100%	165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)	40%	50.000.000	50%	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Melalui 3R	14,86%	70.000.000	15.30%	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan Limbah B3 Fasus/Fasos/Usaha yang diawasi	20.14%	35.000.000	21.86%	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	28.00%	20.000.000	29.00%	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA	9.52%	50.000.000	14.28%	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	42,85%	15.000.000	57.14%	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	30.000.000	100%	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sampah yang Tertangani	39,53%	320.000.000	41,11%	350.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga Negara yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab./Kota	100%	2.500.000.000	100%	3.000.000.000	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum pada kawasan kota penyangga	55,56%	5.200.000.000	66,67%	5.500.000.000	Dinas PRKP
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	300.000.000	100%	350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%		100%		
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	330.000.000	100%	350.000.000	SATPOL PP & PK



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	91,79%	175.000.000	92,88%	200.000.000	Dinas PRKP
			Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,07%	95.214.332.000	76,18%	103.367.566.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	39,20%	2.050.000.000	41,20%	2.500.000.000	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	78%	925.000.000	80%	950.000.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah Orang Melalui Terminal per Tahun	2.119.451 orang		2.200.570 orang		
			Program Penataan Desa	Cakupan Desa dan Sarana Prasarana Desa Yang Baik	86%	55.000.000	88%	55.000.000	DPML
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	80%	450.000.000	85%	550.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,76%	550.000.000	89,33%	600.000.000	Dinas PRKP
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	3.900.000.000	100%	4.500.000.000	Dinas PRKP
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,09%	6.000.000.000	0,08%	8.000.000.000	Dinas PUPR			



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Pemerintah yang tertata dengan Baik	92%	320.000.000	93%	350.000.000	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	1 Kws.	530.000.000	1 Kws.	600.000.000	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah penerbitan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah/lahan	60 Rek.	220.000.000	65 Rek.	250.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	63,29%	5.160.000.000	64,18%	6.000.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah Lintas Kabupaten/Kota	100%	6.500.000.000	100%	7.500.000.000	Dinas PUPR
7	Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati	Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketertiban Umum dan Kondusivitas Kehidupan berbangsa dan Bermasyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	300.000.000	90%	300.000.000	Kantor Kesbangpol
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kegiatan Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	100%	1.810.000.000	100%	1.815.000.000	Kantor Kesbangpol
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang tepat sasaran	100%	900.000.000	100%	900.000.000	Kantor Kesbangpol
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	60%	60.000.000	70%	65.000.000	Kantor Kesbangpol



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Proyeksi		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	60%	700.000.000	65%	750.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan SDM Kepramukaan	60%	150.000.000	65%	160.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik	100%	762.600.000	100%	892.000.000	Kantor Kesbangpol
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase PROLEGDA yang terealisasi	100%	6.500.000.000	100%	7.000.000.000	Sekretariat DPRD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	100%	6.250.000.000	100%	6.500.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan sesuai rencana	100%		100%		
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelembagaan lembaga kemasyarakatan lembang/kelurahan yang difasilitasi dan dibina	65%	815.000.000	69%	815.000.000	DPML
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten	100%	880.000.000	100%	900.000.000	SATPOL PP & PK

Sumber Data : BAPPEDA Tana Toraja, 2022



5. 3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan, ditetapkan rencana program dan kegiatan Tahun 2023 beserta pagu indikatif pendanaannya. Program dan kegiatan prioritas tersebut dapat dilaksanakan baik melalui belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD untuk tahun berikutnya (prakiraan maju 1 tahun) dan tahun yang direncanakan, pendanaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 juga ditempuh melalui sumber-sumber yang lain yaitu dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dapat dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program/kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra OPD dengan kriteria sebagai berikut :

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Secara lebih rinci prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif pembangunan daerah Tahun 2023 Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dalam Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
1 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan pelayanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		1 Tahun	54 Orang/bulan	12 Bulan	175,621,699,641	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan	1 Tahun	168,991,791,600
1 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tercapainya pelayanan kepada aparatur Sipil Negara		100 %	0 Paket	95 %	33,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,190,000
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	tercapainya pelayanan kepada aparatur Sipil Negara		100 %	1 Paket	95 %	875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	26,000,000
1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	tercapainya pelayanan kepada aparatur Sipil Negara		100 %	0 Paket	95 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	tercapainya pelayanan kepada aparatur Sipil Negara		100 %	0 Paket	95 %	8,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	tercapainya pelayanan kepada aparatur Sipil Negara		100 %	0 Dokumen	95 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	tercapainya pelayanan kepada aparatur Sipil Negara		100 %	0 Paket	95 %	161,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercapainya pelayanan kepada aparatur Sipil Negara		100 %	0 Laporan	95 %	530,456,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kegiatan perkantoran menjadi lancar Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Anak Usia 7 - 12 Tahun Peningkatan pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0 Unit	90 %	40,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kegiatan perkantoran menjadi lancar Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Anak Usia 7 - 12 Tahun Peningkatan pelayanan administrasi kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	10,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110,081,000				84,693,000					
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meningkatnya pelayanan administrasi		12 Bulan	0 Laporan	90 %	57,681,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	57,748,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	meningkatnya pelayanan administrasi		12 Bulan	0 Laporan	90 %	26,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	0
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	meningkatnya pelayanan administrasi		12 Bulan	0 Laporan	90 %	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	26,945,000
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188,880,000				0					
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	terperliharnya kendaraan dinas dan gedung kantor		12 Bulan	0 Unit	12 Bulan	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	0
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	terperliharnya kendaraan dinas dan gedung kantor		12 Bulan	0 Unit	12 Bulan	171,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	0
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					68,174,184,915				71,422,722,402						
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					39,870,022,515				38,893,032,000					
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	presentase pemeliharaan/penambahana ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Toraja, Saluputi, Pattan Ulusalu	50 Sekolah	10 Ruang		39,708,147,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		presentase pemeliharaan/penambahana ruang kelas baru	50 Sekolah	629,000,000
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	presentase pemeliharaan/penambahana ruang kelas baru	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			50 Sekolah	1 Unit		161,875,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		presentase pemeliharaan/penambahana ruang kelas baru	50 Sekolah	25,200,000
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					23,597,400,000				25,739,845,202					
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Bertambahnya Ruang belajar/Laboratorium, Perpustakaan, Ruang Guru	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Meningkatnya Minat belajar siswa		50 RKB	1 Ruang	90 %	23,597,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bertambahnya Ruang belajar/Laboratorium, Perpustakaan, Ruang Guru	50 RKB	535,077,600
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					4,706,762,400				5,130,740,800					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase warga negara usia 4-6 tahun yang belum mendapatkan peyanaan pendidikan dasar Persentase warga negara usia 4-6 tahun yang belum mendapatkan peyanaan pendidikan dasar	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Membangun karakter warga negara usia belajar 4-6 Tahun		20 Gedung 20 Sekolah PAUD	2 Unit	90 %	4,706,762,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara usia 4-6 tahun yang belum mendapatkan peyanaan pendidikan dasar Persentase warga negara usia 4-6 tahun yang belum mendapatkan peyanaan pendidikan dasar	20 Gedung 20 Sekolah PAUD	251,457,600	
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								40,000,000					21,000,000	
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								40,000,000						21,000,000
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pewmerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya perhitungan untuk pemerataan tenaga pendidik dan tenaga pendidik		1 paket	0 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pewmerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik	1 paket	10,000,000	
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								130,000,000					143,000,000	
1 01 05 2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								130,000,000					55,000,000	
1 01 05 2.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah penerbitan izin PAUD dan dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Keluarnya izin mendirikan PAUD		21 Izin	0 Dokumen	95 %	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penerbitan izin PAUD dan dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	21 Izin	55,000,000	
TOTAL									245,064,911,556					240,941,397,002	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							179,570,200,000					181,805,200,000					
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						71,681,240,046					72,735,200,000					
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					212,000,000					24,000,000					
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersediannya dokumen perencanaan perangkat daerah		95	12 bulan	1 Dokumen	100 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	12 bulan	12,000,000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersediannya dokumen perencanaan perangkat daerah		95	12 bulan	1 Laporan	100 persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	12 bulan	12,000,000
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					35,421,140,046					37,030,000,000					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya hak-hak ASN kesehatan		95	tahun	12 Orang/bulan	100 persen	35,391,140,046	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	tahun	37,000,000,000
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terbayarnya hak-hak ASN kesehatan		95	tahun	1	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	tahun	30,000,000
1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					345,000,000					345,000,000					
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	terlaksananya penilaian kinerja tenaga kesehatan		95	persen	12 Paket	100 persen	46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	46,000,000
1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya penilaian kinerja tenaga kesehatan		95	persen	12 BULAN	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	20,000,000
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	terlaksananya penilaian kinerja tenaga kesehatan		95	persen	2 Dokumen	100 persen	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	54,000,000
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	terlaksananya penilaian kinerja tenaga kesehatan		95	persen	9 Orang	100 persen	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	225,000,000
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3,136,200,000					3,136,200,000					
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan		95	persen	12 Paket	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	30,000,000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan		95	persen	12 Paket	100 persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	60,000,000
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan		95	persen	12 Paket	100 persen	10,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	10,200,000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan		95	persen	12 Paket	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	20,000,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan		95	persen	3 Dokumen	100 persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	6,000,000
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan		95	persen	12 Paket	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	10,000,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan		95	persen	12 Laporan	100 persen	3,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	3,000,000,000
1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30,636,900,000					30,370,000,000					
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	tersedianya sarana penunjang untuk mendukung pelayanan		95	persen	1 Unit	100 persen	436,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	persen	470,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	tersedianya sarana penunjang untuk mendukung pelayanan		95 persen	4 Unit	100 persen	24,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	24,000,000,000
1	02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	tersedianya sarana penunjang untuk mendukung pelayanan		95 persen	12 Unit	100 persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	300,000,000
1	02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	tersedianya sarana penunjang untuk mendukung pelayanan		95 persen	5 Unit	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	100,000,000
1	02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	tersedianya sarana penunjang untuk mendukung pelayanan		95 persen	1 Unit	100 persen	5,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	5,000,000,000
1	02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	tersedianya sarana penunjang untuk mendukung pelayanan		95 persen	24 Unit	100 persen	400,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	400,000,000
1	02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	tersedianya sarana penunjang untuk mendukung pelayanan		95 persen	12 Unit	100 persen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	100,000,000
1	02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								520,000,000					420,000,000
1	02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya administrasi perkantoran untuk mendukung kegiatan		95 persen	100 Laporan	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	0
1	02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	terlaksananya administrasi perkantoran untuk mendukung kegiatan		95 persen	12 Laporan	100 persen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	120,000,000
1	02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	terlaksananya administrasi perkantoran untuk mendukung kegiatan		95 persen	12 Laporan	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	100,000,000
1	02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	terlaksananya administrasi perkantoran untuk mendukung kegiatan		95 persen	12 Laporan	100 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	200,000,000
1	02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								1,410,000,000					1,410,000,000
1	02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	kendaraan operasional layak difungsikan		95 persen	1 Unit	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	30,000,000
1	02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kendaraan operasional layak difungsikan		95 persen	31 Unit	100 persen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	500,000,000
1	02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	kendaraan operasional layak difungsikan		95 persen	12 Unit	100 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	200,000,000
1	02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kendaraan operasional layak difungsikan		95 persen	1 Unit	100 persen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	400,000,000
1	02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kendaraan operasional layak difungsikan		95 persen	4 Unit	100 persen	280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	280,000,000
1	02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								105,767,938,754					106,315,000,000
1	02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								28,380,000,000					28,380,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	pelayanan kesehatan di PKM semakin meningkat dengan adanya sarana dan prasarana		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	3 unit 0 Unit	100 persen	12,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	12,000,000,000	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	pelayanan kesehatan di PKM semakin meningkat dengan adanya sarana dan prasarana		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Unit	100 persen	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1,000,000,000	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	pelayanan kesehatan di PKM semakin meningkat dengan adanya sarana dan prasarana		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	2 Unit	100 persen	600,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	600,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	pelayanan kesehatan di PKM semakin meningkat dengan adanya sarana dan prasarana		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	2 Unit	100 persen	60,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	60,000,000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	pelayanan kesehatan di PKM semakin meningkat dengan adanya sarana dan prasarana		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Unit	100 persen	60,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	60,000,000	
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	pelayanan kesehatan di PKM semakin meningkat dengan adanya sarana dan prasarana		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	2 Unit	100 persen	120,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	120,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	pelayanan kesehatan di PKM semakin meningkat dengan adanya sarana dan prasarana		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Unit	100 persen	600,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	600,000,000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	pelayanan kesehatan di PKM semakin meningkat dengan adanya sarana dan prasarana		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	2 Unit	100 persen	1,440,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1,440,000,000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	pelayanan kesehatan di PKM semakin meningkat dengan adanya sarana dan prasarana		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Unit	100 persen	6,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	6,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	22 Orang	100 persen	1,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1,000,000,000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	22 Orang	100 persen	1,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1,000,000,000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	22 Orang	100 persen	300,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	300,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Orang	100 persen	866,441,754	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	970,000,000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Orang	100 persen	970,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	350,000,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Orang	100 persen	71,053,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	550,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Orang	100 persen	850,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	850,000,000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Orang	100 persen	29,903,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	80,000,000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Orang	100 persen	30,803,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	70,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Orang	100 persen	600,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	350,000,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Orang	100 persen	123,957,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	300,000,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Orang	100 persen	32,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	30,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Dokumen	100 persen	270,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	270,000,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Dokumen	100 persen	300,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	300,000,000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Dokumen	100 persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	150,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Dokumen	100 persen	400,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	400,000,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Dokumen	100 persen	400,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	400,000,000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 Dokumen	100 persen	300,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	300,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat			100 Dokumen	100 persen	441,920,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	500,000,000	
1.02.02.2021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)		meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	600,000,000	
1.02.02.2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)		meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	422,954,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	450,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)		meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	57,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	400,000,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)		meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	1,156,307,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	600,000,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)		meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	40,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	40,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0 Orang	100 persen	350,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	350,000,000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0 Dokumen	100 persen	400,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	400,000,000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0 Dokumen	100 persen	20,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	20,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0 Dokumen	100 persen	3,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	3,000,000,000
1	02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	meningkatnya pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0 Unit	100 persen	2,700,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	cakupan pemberian PMT balita cakupan puskesmas persentase cakupan pelayanan bayi dan balita persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persentase penduduk atau warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	2,700,000,000
1	02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								650,000,000				850,000,000
1	02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	tersedianya prasarana alat komunikasi di puskesmas		100 persen	0 Dokumen	100 persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi	100 persen	300,000,000
1	02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	tersedianya prasarana alat komunikasi di puskesmas		100 persen	0 Dokumen	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi	100 persen	300,000,000
1	02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi		tersedianya prasarana alat komunikasi di puskesmas		100 persen		100 persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi	100 persen	250,000,000
1	02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								415,000,000				415,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	persentase pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan mutunya persentase penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan dan diawasi perizinannya	tersedianya izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah		100 persen 100 persen 100 persen		100 persen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan mutunya persentase penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan dan diawasi perizinannya	100 persen 100 persen 100 persen	75,000,000	
1	02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	persentase pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan mutunya persentase penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan dan diawasi perizinannya	tersedianya izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah		100 persen 100 persen 100 persen		100 persen	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan mutunya persentase penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan dan diawasi perizinannya	100 persen 100 persen 100 persen	170,000,000	
1	02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	persentase pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan mutunya persentase penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan dan diawasi perizinannya	tersedianya izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah		100 persen 100 persen 100 persen		100 persen	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan mutunya persentase penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan dan diawasi perizinannya	100 persen 100 persen 100 persen	170,000,000	
1	02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							671,021,200				1,375,000,000	
1	02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							180,339,000				175,000,000	
1	02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah pelaksanaan pengendalian izin praktek	terbitnya izin praktek tenaga kesehatan		100 persen		100 persen	72,339,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah pelaksanaan pengendalian izin praktek	100 persen	75,000,000	
1	02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah pelaksanaan pengendalian izin praktek	terbitnya izin praktek tenaga kesehatan		100 persen		100 persen	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah pelaksanaan pengendalian izin praktek	100 persen	100,000,000	
1	02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							395,338,000				800,000,000	
1	02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase tenaga kesehatan yang harus terpenuhi disetiap fasyankes yang sesuai permenkes	terpenuhinya tenaga kesehatan di puskesmas		80 persen		100000 penduduk	95,338,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase tenaga kesehatan yang harus terpenuhi disetiap fasyankes yang sesuai permenkes	80 persen	400,000,000	
1	02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	persentase tenaga kesehatan yang harus terpenuhi disetiap fasyankes yang sesuai permenkes	terpenuhinya tenaga kesehatan di puskesmas		80 persen		100000 penduduk	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase tenaga kesehatan yang harus terpenuhi disetiap fasyankes yang sesuai permenkes	80 persen	400,000,000	
1	02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							95,344,200				400,000,000	
1	02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang melanjutkan pendidikan	meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan		20 persen		100 persen	95,344,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase tenaga kesehatan yang melanjutkan pendidikan	20 persen	400,000,000	
1	02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							1,080,000,000				1,080,000,000	
1	02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							170,000,000				170,000,000	
1	02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase toko obat yang mempunyai izin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	terbitnya apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal	100 persen	0 Dokumen	100 persen	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase toko obat yang mempunyai izin	100 persen	170,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
1	02	04	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					170,000,000				170,000,000				
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	terlaksananya pengawasan sertifikat alkes kelas 1 dan PKRT kelas 1	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	terbitnya sertifikat untuk sarana produksi alkes kesehatan dan perbekalan rumah tangga kelas 1		100 persen	4 Dokumen	100 persen	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	terlaksananya pengawasan sertifikat alkes kelas 1 dan PKRT kelas 1	100 persen	170,000,000
1	02	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					170,000,000				170,000,000				
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	frekuensi pelaksanaan penertiban sertifikat produksi pangan IRT		terbitnya sertifikat produksi pangan industri dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman		100 persen		100 persen	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	frekuensi pelaksanaan penertiban sertifikat produksi pangan IRT	100 persen	170,000,000
1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					190,000,000				190,000,000				
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			190,000,000
1	02	04	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					190,000,000				190,000,000				
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			190,000,000
1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					190,000,000				190,000,000				
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			190,000,000
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					370,000,000				300,000,000				
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100,000,000				0				
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								100,000,000	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					170,000,000				0				
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100,000,000				300,000,000				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			300,000,000
TOTAL								179,570,200,000				181,805,200,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD LAKIPADADA

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD LAKIPADADA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1																		
1	02																	
1	02	01																
1	02	01	2.02															
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Kab. Tana Toraja, Makale Utara, Tambunan	100 %	276 Orang	100 %	18,212,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah	100 %	0
1	02	01	2.10															
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pelayanan BLUD	Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Tana Toraja, Makale Utara, Tambunan	100 %	100 %	100 %	56,650,000,000	Pendapatan dari BLUD		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	56,916,000,000
1	02	02																
1	02	02	2.01															
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pembangunan Sarana RS	Persentase Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	Kab. Tana Toraja, Makale Utara, Tambunan	100 %	1 Paket	85 %	10,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	15,000,000,000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	Kab. Tana Toraja, Makale Utara, Tambunan	100 %	1 Unit	85 %	1,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1,000,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	Kab. Tana Toraja, Makale Utara, Tambunan	100 %	1 Paket	85 %	9,675,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	5,100,000,000
1	02	02	2.02															
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya operasional pelayanan rumah sakit	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penanganan Emergency	Kab. Tana Toraja, Makale Utara, Tambunan	90 %	1 Paket	90 %	5,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	90 %	5,000,000,000
TOTAL										100,537,000,000							83,016,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										16,470,000,000		17,513,000,000				
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10,844,999,998		11,313,000,000			
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,106,999,998		6,138,000,000		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	35 Orang/bulan	100 %	6,099,999,998	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,128,000,000
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	28 Dokumen	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										293,700,000		410,000,000		
1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	0 Unit	95 %	57,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,000,000
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	35 Paket	95 %	136,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	150,000,000
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	4 Orang	95 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	200,000,000
1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										977,564,000		1,115,000,000		
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	20 Paket	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	150,000,000
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	50 Paket	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	80,000,000
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	120 Dokumen	100 %	5,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	0 Laporan	100 %	801,804,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	850,000,000
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								949,800,000					1,000,000,000
1 04 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	2 Unit	95 %	873,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	850,000,000
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	3 Unit	95 %	76,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	150,000,000
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								295,936,000					380,000,000
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	50 Laporan	95 %	150,256,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	150,000,000
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	3 Laporan	95 %	102,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	165,000,000
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	20 Laporan	95 %	29,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	15 Laporan	95 %	14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,221,000,000					2,270,000,000
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan DPRKP	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	1 Unit	95 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	70,000,000
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan DPRKP	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	35 Unit	95 %	146,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	600,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan DPRKP	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 %	10 Unit	95 %	2,015,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,600,000,000
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								2,600,000,000					3,000,000,000
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								300,000,000					300,000,000
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Persentase Warga Korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Tersedianya Dokumen Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 % 95 %	1 Dokumen	95 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Persentase Warga Korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)	100 % 95 %	300,000,000
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								2,300,000,000					2,700,000,000
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Warga Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Tersedianya Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi atau direlokasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	0 0	20 Unit Rumah	95 persen	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	0 0	1,100,000,000
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Warga Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Tersedianya Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi atau direlokasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	0 0	20 Unit Rumah	95 persen	1,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	0 0	1,600,000,000
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								175,000,000					200,000,000
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								100,000,000					100,000,000
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang tertata	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	90,04 %	1 Dokumen	70 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	90,04 %	100,000,000
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								75,000,000					100,000,000
1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman yang tertata	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Meningkatkan Kawasan Permukiman yang tertata	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	90,04 %	1 Dokumen	80 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan Permukiman yang tertata	90,04 %	100,000,000
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								250,000,002					300,000,000
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								250,000,002					300,000,000
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Terlaksananya Perbaikan RTLH	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	90 %	7 Unit Rumah	90 %	250,000,002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	90 %	300,000,000
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								2,600,000,000					2,700,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					2,600,000,000				2,700,000,000					
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum pada Kawasan Kota Penyangga	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Meningkatnya Urusan Penyelenggaraan Perumahan	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	27,78 %	1 Dokumen	30 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum pada Kawasan Kota Penyangga	27,78 %	100,000,000
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum pada Kawasan Kota Penyangga	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Meningkatnya Urusan Penyelenggaraan Perumahan	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	27,78 %	0 Lokasi	30 %	2,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum pada Kawasan Kota Penyangga	27,78 %	2,500,000,000
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum pada Kawasan Kota Penyangga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Meningkatnya Urusan Penyelenggaraan Perumahan	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	27,78 %	5 Laporan	30 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum pada Kawasan Kota Penyangga	27,78 %	100,000,000
TOTAL												16,470,000,000			17,513,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1 05 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %	2 Dokumen	1 Tahun	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	4,500,000
1 05 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	14 Bulan	1 Tahun	6,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	6,000,000,000
1 05 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	148 Stel	1 Tahun	249,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	249,700,000
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	3 orang	1 Tahun	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	135,000,000
1 05 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	14 Buah	1 Tahun	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	16,800,000
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 Bulan	1 Tahun	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Exs Bacaan dan Perundangan disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 Bulan	1 Tahun	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	5,000,000
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	711 OK	1 Tahun	485,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	479,300,000
1 05 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
		3,540,000,000												
		3,540,000,000												

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan BMD-PD Perangkat Daerah		100 %	3 unit	1 Tahun	3,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	3,500,000,000
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan BMD-PD Perangkat Daerah		100 %	5 unit	1 Tahun	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	40,000,000
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65,440,000					65,600,000
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	12 Bulan	1 Tahun	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	27,000,000
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Satuan Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air dan Listrik yang dipakai	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	12 Bulan	1 Tahun	36,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	36,480,000
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	12 Bulan	1 Tahun	1,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	2,120,000
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								149,360,000					284,100,000
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	1 unit	1 Tahun	32,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	38,630,000
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	31 Unit	1 Tahun	102,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	102,110,000
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	17 unit	1 Tahun	14,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	143,360,000
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								880,000,000					880,000,000
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								845,000,000					845,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Penanganan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Daerah		100 %	12 Bulan	1 Tahun	704,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	704,000,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Satlinmas	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Daerah		100 %	188 orang	1 Tahun	141,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	141,000,000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					35,000,000				35,000,000				
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah kegiatan sosialisasi Perda, Perbub	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Daerah		100 %	14 Kec	1 Tahun	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	35,000,000
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					330,000,000				330,000,000				
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					330,000,000				330,000,000				
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah/Kabupaten		100 %	100 %	1 Tahun	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	120,000,000
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pemadaman & Pengendalian Kebakaran	Terwujudnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah/Kabupaten		100 %	100 %	1 Tahun	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	110,000,000
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terwujudnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah/Kabupaten		100 %	1 Paket	1 Tahun	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100,000,000
TOTAL										11,874,000,000				11,990,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										5,063,088,922		5,958,700,000				
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,131,055,922		3,658,700,000			
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,948,048,422		2,200,000,000		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	12 Persen	28 Orang/bulan	12 Bulan	1,948,048,422	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	12 Persen	2,200,000,000
1	06	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										76,000,000		83,200,000		
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya pakaian dinas harian pakaian khusus dan perlengkapannya dan tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	28 Paket	12 Bulan	76,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	83,200,000
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										806,602,500		843,500,000		
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	12 Paket	12 Bulan	4,047,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	5,000,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	12 Paket	12 Bulan	1,906,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	5,000,000
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	12 Paket	12 Bulan	2,484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	5,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	12 Paket	12 Bulan	13,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	14,000,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	12 Dokumen	12 Bulan	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	19,000,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	12 Laporan	12 Bulan	777,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	795,500,000
1	06	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										94,740,000		135,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	1 Unit	12 Bulan	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	25,000,000
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	35 Unit	12 Bulan	29,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	60,000,000
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	5 Unit	12 Bulan	31,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	50,000,000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							121,715,000				182,000,000		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	12 Laporan	12 Bulan	96,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	120,000,000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	12 Bulan	12 Bulan	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	32,000,000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							83,950,000				215,000,000		
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	1 Unit	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	50,000,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	8 Unit	12 Bulan	51,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	80,000,000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	95 Persen	22 Unit	12 Bulan	12,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	20,000,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							1,366,357,000				1,555,000,000		
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)							119,460,000				250,000,000		
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimbingan teknis bagi calon warga KAT	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	50 Keluarga	12 Bulan	63,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	100 Persen	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimbingan teknis bagi calon warga KAT	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	2 Keluarga	12 Bulan	55,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	100 Persen	50,000,000
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							1,246,897,000					1,305,000,000	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	19 Kecamatan	12 Bulan	191,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	100 Persen	250,000,000
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	19 Kecamatan	12 Bulan	659,027,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	100 Persen	625,000,000
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	19 Kecamatan	12 Bulan	346,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	100 Persen	400,000,000
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	100 Persen	30,000,000
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							356,626,000					365,000,000	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							276,976,000					230,000,000	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	50 KK	12 Bulan	119,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	100 Persen	70,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	90 Orang	12 Bulan	157,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	100 Persen	160,000,000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								79,650,000					135,000,000
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	150 Orang	12 Bulan	48,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	100 Persen	105,000,000
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	49 Dokumen	12 Bulan	31,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	100 Persen	30,000,000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								59,050,000					190,000,000
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								16,325,000					35,000,000
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelayanan rujukan bagi anak terlantar		100 Persen	20 Orang	12 Bulan	16,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	35,000,000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								42,725,000					155,000,000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya data fakir miskin yang di verifikasi dan validasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	19 Kecamatan	12 Bulan	42,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	75,000,000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								150,000,000					190,000,000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								114,000,000					140,000,000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	78 Orang	12 Bulan	114,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 Persen	140,000,000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								36,000,000					50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake	100 Persen	10 Orang	12 Bulan	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	100 Persen	50,000,000
TOTAL									5,063,088,922				5,958,700,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan		95 %	25 Orang/bulan	25 Orang	1,630,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	1,660,000,000
2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas		1 Tahun	17 Paket	17 Orang	42,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Tahun	0
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Tersedianya Kelengkapan Komponen Instalasi Listrik	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		95 %	1 Tahun	95 %	868,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	1,400,000
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		95 %	12 Paket	95 %	1,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	0
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		95 %	1 Tahun	95 %	25,216,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	25,000,000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Tersedianya Bahan Bacaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		95 %	1 Tahun	95 %	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	2,000,000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		95 %	1 Tahun	95 %	170,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	130,000,000
2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang Mendukung Lancarnya Tugas dan Fungsi		95 %	1 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	300,000,000
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	07	01	2.08	38,814,500														
					65,600,000													

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah penunjang urusan surat-menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		95 %	60 jenis	95 %	14,390,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	23,000,000
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		95 %	1 Tahun	95 %	16,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	35,000,000
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		95 %	6 jenis	95 %	4,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	4,000,000
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		95 %	1 Tahun	95 %	3,944,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	3,600,000
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								28,350,000					47,000,000
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		95 %	7 Unit	95 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	42,000,000
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		95 %	7 Unit	95 %	1,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	2,000,000
2 07 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		95 %	20 Unit	95 %	950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	1,000,000
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		95 %	10 Unit	95 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	2,000,000
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								163,000,000					150,000,000
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								163,000,000					150,000,000
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Berkompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih		100 %	100 %	20 Orang	163,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 %	150,000,000
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								50,400,000					50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								15,000,000				15,000,000			
2	07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans		Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pemberi Kerja dan Pekerja				100 %	200 perusahaan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100 %	15,000,000
2	07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								35,400,000				35,000,000			
2	07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Jumlah Perusahaan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi untuk Mencegah Perselisihan				100 %	90 %	75 Perusahaan	35,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	100 %	35,000,000
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								89,993,000				95,000,000			
3	32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								89,993,000				95,000,000			
3	32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								89,993,000				95,000,000			
3	32 03 2.01 06	Pelatihan Transmigrasi	Persentase Penempatan Transmigrasi	Jumlah Kelompok Wanita Transmigrasi Lokal yang Berkompeten		Meningkatnya Keahlian Warga Transmigrasi untuk Menunjang Perekonomian Keluarga Transmigrasi				100 %	20 Orang	90 %	89,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penempatan Transmigrasi	100 %	95,000,000
TOTAL									2,262,826,500					2,701,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
2													
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	08									2,770,118,766			119,000,000
2	08	01								2,241,518,766			119,000,000
2	08	01	2.01							2,750,000			0
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0 Laporan	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	01	2.02							1,861,528,766			0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/bulan	1,861,528,766	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	01	2.05							34,000,000			0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0 Paket	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0 Orang	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	01	2.06							264,120,000			0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket	1,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			0 Dokumen	4,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	256,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	01	2.08							20,000,000			18,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18,000,000
2	08	01	2.09							59,120,000			101,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0 Unit	50,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90,000,000
2	08	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1 tahun	8,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11,000,000
2	08	02								53,950,000			0
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
2	08	02	2.01							27,800,000			0
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			0 Dokumen	27,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
2	08	02	2.02							26,150,000			0
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota												

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Organisasi		26,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								183,700,000					0
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								183,700,000					0
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Layanan		183,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								97,600,000					0
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								97,600,000					0
2 08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen		97,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								36,150,000					0
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								36,150,000					0
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen		36,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								157,200,000					0
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								157,200,000					0
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				0 Organisasi		157,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
TOTAL									2,770,118,766				119,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										3,397,912,500		8,107,500,000				
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,397,912,500		3,607,500,000			
2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,934,122,100		2,989,000,000		
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan gaji dn Tunjangan		1 Tahun	28 Orang/bulan	1 Tahun	2,934,122,100	Dana Perimbangan		Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun	2,870,000,000
2	09	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										53,200,000		18,000,000		
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Daerah PNS Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Daerah PNS	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Adat PNS		28 pasang 28 Stel	28 Paket	28 Pasang	53,200,000	Dana Perimbangan		Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Daerah PNS Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Daerah PNS	28 pasang 28 Stel	0
2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										209,275,000		226,000,000		
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 unit	10 Paket	4 buah	16,000,000	Dana Perimbangan		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	40,000,000
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 unit	2 Paket	4 buah	3,375,000	Dana Perimbangan		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	20,000,000
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 unit	2 Dokumen	4 buah	6,000,000	Dana Perimbangan		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	6,000,000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 unit	280 Laporan	4 buah	183,900,000	Dana Perimbangan		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	160,000,000
2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										53,715,400		165,000,000		
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan		1 tahun	1 Laporan	1 Tahun	13,505,400	Dana Perimbangan		Tersedianya penunjang urusan pemerintahan	1 tahun	100,000,000
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan		1 tahun	3 Laporan	1 Tahun	39,000,000	Dana Perimbangan		Tersedianya penunjang urusan pemerintahan	1 tahun	40,000,000
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan		1 tahun	1 Laporan	1 Tahun	1,210,000	Dana Perimbangan		Tersedianya penunjang urusan pemerintahan	1 tahun	15,000,000
2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										147,600,000		158,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	terpeliharanya kendaraan dinas		32 unit	41 Unit	32 unit	141,000,000	Dana Perimbangan		terpeliharanya kendaraan dinas	32 unit	82,000,000
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	terpeliharanya kendaraan dinas		32 unit	3 Unit	32 unit	6,600,000	Dana Perimbangan		terpeliharanya kendaraan dinas	32 unit	15,000,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan													
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Ikan		698 Ton	1 Unit	800000 ekor	92,600,000	Dana Perimbangan		Jumlah Produksi Perikanan budidaya	698 Ton	300,000,000
TOTAL									3,490,512,500					10,627,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										3,211,760,504		2,573,871,000			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,932,160,504		2,207,371,000		
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,997,688,504		1,886,000,000	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya kesejahteraan pegawai	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	22 orang	22 Orang/bulan	22 orang	1,997,688,504	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup	22 orang	1,886,000,000
2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										31,200,000		82,800,000	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang dilayani	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Terwujudnya disiplin pegawai	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	26 setel	95 %	31,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang dilayani	95 %	23,000,000
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										237,108,000		128,570,000	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya tata kelola administrasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	1 Paket	95 %	950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	95 %	5,232,500
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Meningkatnya tata kelola administrasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	0 Paket 1 paket	95 %	2,608,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	95 %	5,232,500
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya tata kelola administrasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	1 Paket	95 %	5,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	95 %	5,232,500
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Meningkatnya tata kelola administrasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	1 jenis	95 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	95 %	5,232,500
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	Meningkatnya tata kelola administrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100 kali	95 %	225,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	95 %	107,640,000
2	11	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										536,110,000		27,600,000	
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan	95 %	2 Unit	95 %	511,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	95 %	9,200,000
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan	95 %	1 Unit	95 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	95 %	4,600,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan	95 %	2 Unit	95 %	21,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	95 %	4,600,000
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35,244,000					38,701,000
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa surat menyurat yang tersedia	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	49 jenis	95 %	18,204,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	95 %	15,701,000
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dibayarkan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	3 jenis	95 %	16,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	95 %	16,100,000
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	1 paket	95 %	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	95 %	6,900,000
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								94,810,000					43,700,000
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan	95 %	8 Unit	95 %	46,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	95 %	17,825,000
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan	95 %	6 Unit	95 %	10,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	95 %	4,025,000
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan	95 %	1 Unit	95 %	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	95 %	4,025,000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								42,800,000					0
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								28,500,000					0
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks kualitas air, udara, tanah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas air, udara, tanah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72.03 %	72 %	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kualitas air, udara, tanah	72 %	0
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								14,300,000					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Indeks kualitas lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	1 Laporan	72 %	14,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks kualitas lingkungan hidup	72 %	0
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								51,000,000					30,000,000
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								51,000,000					30,000,000
2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Ha		25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha		25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								35,000,000					6,000,000
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								35,000,000					6,000,000
2 11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase limbah B3 yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Meningkatnya limbah B3 yang tertangani	Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen	50 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase limbah B3 yang tertangani	50 %	6,000,000
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								16,600,000					8,000,000
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								16,600,000					8,000,000
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,54 %	1 Laporan		16,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	47,54 %	4,000,000
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								48,250,000					15,000,000
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								48,250,000					15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Lembaga		15,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		17,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,500,000	
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang		15,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,500,000	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								17,650,000				45,000,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								17,650,000				45,000,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Entitas		17,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								13,800,000				0	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								13,800,000				0	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 %	100 %		13,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	48 %	0
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								54,500,000				180,000,000	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah								54,500,000				180,000,000	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang tertangani melalui 3R	Pelatihan pembuatan kerajinan dari sampah plastik		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,80 %	1 Kegiatan		15,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani melalui 3R	16,80 %	15,000,000
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani melalui 3R	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan	16,80 %	20 Ton		12,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani melalui 3R	16,80 %	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani melalui 3R	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,80 %	30 Buah		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani melalui 3R	16,80 %	15,000,000
TOTAL									3,211,760,504					2,573,871,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										4,992,000,000		5,015,000,000				
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,101,850,000		3,781,000,000			
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3,500,000		10,500,000		
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		1 Tahun	1 Dokumen	12 Bulan	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	1 Tahun	3,500,000
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,345,426,000		2,800,000,000		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan berjalan Dengan Baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		95 Persen	35 Orang/bulan	1 Tahun	3,345,426,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan berjalan Dengan Baik	95 Persen	2,800,000,000
2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										158,550,000		168,000,000		
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95 persen	55 Paket	12 Bulan	37,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 persen	38,000,000
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95 persen	40 Orang	12 Bulan	90,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 persen	20,000,000
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95 persen	6 Orang	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 persen	60,000,000
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										395,140,000		481,128,000		
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		95 Persen	5 Paket	1 Tahun	1,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 Persen	2,300,000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		95 Persen	8 Paket	1 Tahun	187,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 Persen	355,988,000
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		95 Persen	4 Paket	1 Tahun	1,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 Persen	2,039,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		95 Persen	20 Paket	1 Tahun	12,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 Persen	13,320,000
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		95 Persen	3 Dokumen	1 Tahun	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 Persen	3,000,000
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		95 Persen	1 Laporan	1 Tahun	190,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 Persen	89,481,000
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								75,600,000					159,672,000
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan daerah Berjalan Dengan Baik	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95 Persen	1 Unit	1 Tahun	37,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan daerah Berjalan Dengan Baik	95 Persen	25,000,000
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan daerah Berjalan Dengan Baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95 Persen	1 Unit	1 Tahun	37,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan daerah Berjalan Dengan Baik	95 Persen	25,000,000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60,884,000					69,000,000
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan daerah berjalan Dengan Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		95 Persen	12 Laporan	1 Tahun	37,461,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan daerah berjalan Dengan Baik	95 Persen	28,000,000
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan daerah berjalan Dengan Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		95 Persen	12 Laporan	1 Tahun	19,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan daerah berjalan Dengan Baik	95 Persen	32,000,000
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan daerah berjalan Dengan Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		95 Persen	12 Laporan	1 Tahun	4,223,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan daerah berjalan Dengan Baik	95 Persen	5,000,000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								62,750,000					89,200,000
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah		95 Persentase	11 Unit	1 Tahun	19,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 Persentase	19,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah		95 Persentase	1 Unit	1 Tahun	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 Persentase	18,700,000
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah		95 Persentase	5 Unit	1 Tahun	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik	95 Persentase	20,000,000
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								876,150,000					910,000,000
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk								409,500,000					301,000,000
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase pelayanan Pendaftaran Penduduk Berjalan Dengan Baik	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Terlaksananya kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk		95 Persen	1 Paket	1 Tahun	409,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan Pendaftaran Penduduk Berjalan Dengan Baik	95 Persen	300,000,000
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								466,650,000					534,500,000
2 12 02 2.03 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Pendaftaran Penduduk Berjalan Dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Pendaftaran Penduduk		95 Persen	3 Dokumen	1 Tahun	466,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Pendaftaran Pendaftaran Penduduk Berjalan Dengan Baik	95 Persen	230,000,000
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								7,000,000					150,000,000
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil								7,000,000					25,000,000
2 12 03 2.01 05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Berjalan Dengan Baik	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		95 Persen	1 Paket	1 Tahun	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Berjalan Dengan Baik	95 Persen	20,000,000
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								7,000,000					49,000,000
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan								7,000,000					49,000,000
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Berjalan Dengan Baik	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Tersusunnya Profil Kependudukan		95 Persen	444 Dokumen	1 Tahun	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Berjalan Dengan Baik	95 Persen	49,000,000
TOTAL									4,992,000,000					5,015,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											4,947,384,000		5,332,750,000		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,598,104,000		2,607,750,000	
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,955,000,000		1,955,000,000
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1,955,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,955,000,000	
2	13	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											126,100,000		132,750,000
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	16,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,750,000	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											373,004,000		372,000,000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000	
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	2,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	303,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
2	13	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											35,000,000		35,000,000
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAH
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36,000,000				40,000,000		
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000
2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73,000,000				73,000,000		
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1,569,310,000					1,795,000,000		
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					1,569,310,000				1,795,000,000		
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				112 Dokumen	199,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				7 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				112 Dokumen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				112 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				50 Orang	149,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				112 Dokumen	125,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				112 Dokumen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa					112 Dokumen	200,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					112 Dokumen	124,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					159 Dokumen	99,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						779,970,000				780,000,000		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						779,970,000				780,000,000		
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					15 Lembaga	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					10 Dokumen	129,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					1 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					2 Dokumen	250,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000
2	13	05	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					100 Keluarga	100,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL									4,947,384,000				5,332,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										12,092,503,812		17,131,252,150				
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,479,365,112		3,883,716,750			
2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,928,542,712		3,162,500,000		
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Maksimalnya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 Persen	20 Orang/bulan	85 Persen	1,928,542,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 Persen	3,162,500,000
2	14	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										16,100,000		23,000,000		
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Maksimalnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 Persen	23 Paket	95 Persen	16,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 Persen	23,000,000
2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										341,344,400		439,466,750		
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 Persen	5 Paket	92 Persen	52,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 Persen	86,250,000
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 Persen	6 Paket	92 Persen	36,294,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 Persen	46,000,000
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 Persen	1 Dokumen	92 Persen	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 Persen	3,041,750
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 Persen	1 Laporan	92 Persen	250,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 Persen	304,175,000
2	14	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										19,528,000		40,250,000		
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Maksimalnya Pelayanan Administrasi, Program dan Informasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 Persen	1 Laporan	92 Persen	18,328,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 Persen	28,750,000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Maksimalnya Pelayanan Administrasi, Program dan Informasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 Persen	1 Laporan	92 Persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 Persen	11,500,000
2	14	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										173,850,000		218,500,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang layak pakai	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 Persen	43 Unit	43 unit	163,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 Persen	201,250,000
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang layak pakai	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 Persen	15 Unit	43 unit	10,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 Persen	17,250,000
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								393,174,000					528,137,500
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								135,642,000					172,500,000
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Kecamatan Yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Penanganan Terpadu Isi Kependudukan di Kampung KB	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Dokumen Grand Design Kependudukan	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	135,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kecamatan Yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Penanganan Terpadu Isi Kependudukan di Kampung KB	100 Persen	172,500,000
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								257,532,000					355,637,500
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Cakupan Kecamatan Yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Penanganan Terpadu Isi Kependudukan di Kampung KB	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tersedianya Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	53,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kecamatan Yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Penanganan Terpadu Isi Kependudukan di Kampung KB	100 Persen	79,350,000
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cakupan Kecamatan Yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Penanganan Terpadu Isi Kependudukan di Kampung KB	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tersedianya Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,725,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Kecamatan Yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Penanganan Terpadu Isi Kependudukan di Kampung KB	100 Persen	46,287,500
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Cakupan Kecamatan Yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Penanganan Terpadu Isi Kependudukan di Kampung KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	197,277,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Kecamatan Yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Penanganan Terpadu Isi Kependudukan di Kampung KB	100 Persen	230,000,000
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								7,082,052,700					9,873,147,900
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								2,546,510,000					3,839,960,400

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	0 Organisasi	75 Persen	4,970,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	72,737,500
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	1 Dokumen	75 Persen	25,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	33,062,500
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		69,48 Persen	1 Dokumen	75 Persen	70,640,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	93,421,400
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		69,48 Persen	1 Laporan	75 Persen	592,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	747,500,000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	1 Laporan	75 Persen	1,714,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	2,300,000,000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		69,48 Persen	1 Laporan	75 Persen	138,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	201,250,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				854,168,000					1,134,187,500				
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Tersedianya Tenaga Penyuluh yang berkualitas	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	0 Unit	85 Persen	88,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	103,500,000
2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Tersedianya Tenaga Penyuluh yang berkualitas	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	1 Laporan	85 Persen	2,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	11,500,000
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya Tenaga Penyuluh yang berkualitas		69,48 Persen	318 Orang	85 Persen	763,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	920,000,000
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1,061,924,700					1,840,000,000				
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pelayanan KB kepada masyarakat atau ketersediaan alokon di Faskes	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	1 Laporan	12 bulan	92,046,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	115,000,000
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya pelayanan KB kepada masyarakat atau ketersediaan alokon di Faskes	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	0 Orang	12 bulan	780,380,700	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	1,380,000,000
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Meningkatnya pelayanan KB kepada masyarakat atau ketersediaan alokon di Faskes		69,48 Persen	1 Unit	12 bulan	154,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	230,000,000
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pelayanan KB kepada masyarakat atau ketersediaan alokon di Faskes	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	1 Laporan	12 bulan	24,948,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	57,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Meningkatnya pelayanan KB kepada masyarakat atau ketersediaan alokon di Faskes	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	1 Laporan	12 bulan	9,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	57,500,000
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								2,619,450,000				3,059,000,000	
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Maksimalnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	0 Organisasi	85 Persen	4,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	11,500,000
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Maksimalnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB		69,48 Persen	40 Kampung	85 Persen	2,335,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	2,702,500,000
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase PUS Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Maksimalnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	69,48 Persen	1 Laporan	85 Persen	280,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PUS Peserta KB Aktif	69,48 Persen	345,000,000
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								2,137,912,000				2,846,250,000	
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								1,991,923,000				2,645,000,000	
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 Persen	7 Kelompok	19 Kecamatan	17,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	100 Persen	40,250,000
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100 Persen	29 Unit	19 Kecamatan	527,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	100 Persen	690,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 Persen	651 Orang 0 Kelompok	19 Kecamatan	69,523,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	100 Persen	115,000,000
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 Persen	651 Orang	19 Kecamatan	1,359,480,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	100 Persen	1,725,000,000
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 Persen	1 Laporan	19 Kecamatan	18,295,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	100 Persen	74,750,000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								145,989,000					201,250,000
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya capaian pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarag melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	100 Persen	0 Organisasi	19 Kecamatan	145,989,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan UPPKS) di Setiap Kecamatan	100 Persen	201,250,000
TOTAL									12,092,503,812					17,131,252,150

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	16														8,469,317,000			6,700,083,000	
2	16	01													3,014,433,000			2,753,577,000	
2	16	01	2.02												1,880,647,000			1,880,647,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kesejahteraan ASN		95 %	21 Orang/bulan	95 %		1,880,647,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	1,880,647,000
2	16	01	2.04												185,000,000			231,250,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																		
2	16	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi		95 %	12 Dokumen	95 %		185,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	231,250,000
2	16	01	2.05												118,200,000			118,200,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur		100 %	22 Paket	90 %		83,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	83,200,000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur		100 %	1 Orang	90 %		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	35,000,000
2	16	01	2.06												227,139,000			249,900,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik		95 %	1 Paket	95 %		5,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	5,500,000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik		95 %	1 Dokumen	95 %		2,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	2,400,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik		95 %	319 Laporan	95 %		219,779,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	242,000,000
2	16	01	2.07												442,400,000			95,580,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik		95 %	15 Unit	95 %		442,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	95,580,000
2	16	01	2.08												44,297,000			47,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik		95 %	12 Laporan	95 %		30,097,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	32,500,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik		95 %	12 Laporan	95 %		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	12,000,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik		95 %	12 Laporan	95 %		2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	2,500,000
2	16	01	2.09												116,750,000			131,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik		95 %	1 Unit	95 %		17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	25,000,000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik		95 %	4 Unit	95 %		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	26,000,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselenggaranya pelayanan perkantoran dengan baik		95 %	26 Unit	95 %		72,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	80,000,000
2	16	02													823,054,000			814,676,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																		
2	16	02	2.01												823,054,000			814,676,000	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dengan baik		75 % 80 %	1 Dokumen	75 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	75 % 80 %	90,000,000	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dengan baik		75 % 80 %	1 Dokumen	75 %	34,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	75 % 80 %	34,138,000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dengan baik		75 % 80 %	1 Kegiatan	75 %	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	75 % 80 %	63,000,000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dengan baik		75 % 80 %	1 Dokumen	75 %	34,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	75 % 80 %	34,138,000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Layanan Hubungan Media	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dengan baik		75 % 80 %	1 Layanan	75 %	94,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	75 % 80 %	94,200,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dengan baik		75 % 80 %	1 Orang	75 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	75 % 80 %	15,000,000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dengan baik		75 % 80 %	3 Dokumen	75 %	483,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pencapaian target retribusi menara telekomunikasi dan meningkatnya pelayanan jaringan telekomunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	75 % 80 %	484,200,000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4,631,830,000						3,131,830,000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					4,631,830,000							3,131,830,000
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat daerah yang mengelola e-government		73 %	1 Dokumen	73 %	38,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	73 %	38,065,000
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Perangkat daerah yang mengelola e-government		73 %	1 Dokumen	73 %	334,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	73 %	334,550,000
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Perangkat daerah yang mengelola e-government		73 %	1 Unit	73 %	265,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	73 %	265,000,000
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Perangkat daerah yang mengelola e-government		73 %	2 Paket	73 %	3,900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	73 %	2,400,000,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Jumlah aparaturnya yang telah mengikuti bintek bidang teknologi informasi dan komunikasi	Perangkat daerah yang mengelola e-government		73 %	135 Orang	73 %	24,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	73 %	24,965,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Perangkat daerah yang mengelola e-government		73 %	1 Dokumen	73 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	73 %	35,000,000
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Perangkat daerah yang mengelola e-government		73 %	1 Dokumen	73 %	34,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	73 %	34,250,000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					32,335,000						33,335,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					32,335,000						33,335,000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					32,335,000						33,335,000	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase cakupan pengamanan informasi Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian		95 % 19 %	1 Laporan	100 %	32,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan pengamanan informasi Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	95 % 19 %	33,335,000
TOTAL										8,501,652,000						6,733,418,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										3,262,765,000		3,298,000,000			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,618,605,000		2,777,000,000		
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										600,000		600,000	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya bahan evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	0 0	3 Laporan	3 dokumen	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 0	600,000
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,276,000,000		2,276,000,000	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 persen	27 Orang/bulan	29 PEGAWAI	2,276,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	95 persen	2,276,000,000
2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										199,400,000		201,600,000	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang terbeli	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya jasa pelayanan administrasi Umum	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 persen	11 Paket	100 %	6,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang terbeli	95 persen	6,500,000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang terbeli	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya jasa pelayanan administrasi Umum	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 persen	6 Paket	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang terbeli	95 persen	7,500,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang terbeli	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Meningkatnya jasa pelayanan administrasi Umum	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 persen	5 Dokumen	100 %	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang terbeli	95 persen	3,600,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang terbeli	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya jasa pelayanan administrasi Umum	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 persen	200 Laporan	100 %	184,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang terbeli	95 persen	184,000,000
2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										75,605,000		141,000,000	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	60 Laporan	1 tahun	31,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	95 %	31,000,000
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	2 Laporan	1 tahun	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	95 %	36,500,000
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	10 Laporan	1 tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	95 %	70,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	95 %	5 Laporan	1 tahun	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	95 %	3,500,000
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								67,000,000					72,800,000
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya jasa pelayanan administrasi Umum	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	0 0	2 Unit	95 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dana	0 0	26,800,000
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya jasa pelayanan administrasi Umum	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	0 0	8 Unit	95 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dana	0 0	15,000,000
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya jasa pelayanan administrasi Umum		0 0	25 Unit	95 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dana	0 0	26,000,000
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								35,100,000					35,000,000
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								35,100,000					35,000,000
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dana	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	0 0	1 Unit Usaha	1 tahun	35,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dana	0 0	35,000,000
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								100,350,000					100,000,000
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								100,350,000					100,000,000
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja		Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan		35 Unit Usaha		100,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								51,060,000					31,000,000
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								51,060,000					31,000,000
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dana	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengurus dan pelaku UKM anggota Koperasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	0 0	22 Unit Usaha	100 %	31,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dana	0 0	11,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dana	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengurus dan pelaku UKM anggota Koperasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	0 0	10 Unit Usaha	100 %	20,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dana	0 0	20,000,000
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								200,250,000					100,000,000
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								200,250,000					100,000,000
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dilaksanakan pelatihan pemahaman pengetahuan koperasi bagi SDM koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Terlaksananya kegiatan Pelatihan bagi pengurus koperasi	Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan	35 Koperasi	35 Orang	95 %	200,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dilaksanakan pelatihan pemahaman pengetahuan koperasi bagi SDM koperasi	35 Koperasi	100,000,000
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								75,150,000					75,000,000
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								75,150,000					75,000,000
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan		30 Unit Usaha		75,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								92,250,000					90,000,000
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								92,250,000					90,000,000
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan		220 Dokumen		20,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan		500 Unit Usaha		15,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan		600 Unit Usaha		15,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan		70 Unit Usaha		20,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan		4 Orang		20,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							90,000,000					90,000,000	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							90,000,000					90,000,000	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan		30 Unit Usaha		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,000,000	
TOTAL									3,262,765,000				3,298,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										11,906,676,450		1,501,849,000		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,906,676,450		1,501,849,000	
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										11,906,676,450		1,501,849,000
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Orang/bulan		11,906,676,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,501,849,000
TOTAL												11,906,676,450		1,501,849,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										3,788,000,000		770,000,000			
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,389,750,000		20,000,000		
2	19	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										10,000,000		0	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	12 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0
2	19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,000,000,000		0	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang/bulan	100 %	2,000,000,000	Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0
2	19	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										20,000,000		20,000,000	
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan Kelengkapannya		100 %	1 Paket	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	20,000,000
2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										295,000,000		0	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,000,000			0		
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44,750,000			0		
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	8 Unit	100 %	34,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	0
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								700,000,000			590,000,000		
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								650,000,000			590,000,000		
2 19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Cangkupan Pembinaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Meningkatnya Pemuda Kader yang diberdayakan	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Orang	50 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cangkupan Pembinaan Kepemudaan	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Cangkupan Pembinaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Meningkatnya Pemuda Kader yang diberdayakan	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	74 Orang	50 %	590,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cangkupan Pembinaan Kepemudaan	100 %	590,000,000
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000					0
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Cangkupan Pembinaan Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	12 Dokumen	100 %	50,000,000	Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cangkupan Pembinaan Kepemudaan	60 %	0
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								548,250,000					0
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								218,250,000					0
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 %	1 Dokumen	100 %	68,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	53 %	0
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 %	20 Orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	53 %	0
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								300,000,000					0
2 19 03 2.04 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 %	1 Dokumen	100 %	300,000,000	Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	53 %	0
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								30,000,000					0
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 %	1 Dokumen	100 %	30,000,000	Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	53 %	0
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								150,000,000					160,000,000
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								150,000,000					160,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase Peningkatan SDM Kepramukaan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %		100 %	150,000,000	Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan SDM Kepramukaan	60 %	160,000,000
TOTAL													3,788,000,000						770,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.00 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.00 DINAS KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2																	
2																	
2	22									3,110,521,500					3,428,000,000		
2	22	01								2,070,521,500					2,132,000,000		
2	22	01	2.02							1,839,000,000					1,850,000,000		
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji ASN		100 persen	17 Orang/bulan tahun		1,839,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 persen	1,850,000,000
2	22	01	2.05														
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Lancarnya administrasi kepegawaian		100 persen	18 Paket	100 persen	11,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 persen	13,000,000
2	22	01	2.06														
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Publikasi	Lancarnya kegiatan administrasi kantor		100 persen	10 paket	1 tahun	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 persen	6,000,000
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya kegiatan administrasi kantor		100 persen	100 Persen	1 tahun	158,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 persen	160,000,000
2	22	01	2.08														
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase Jasa Surat Menyurat				100 Persen		11,941,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,000,000
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,000,000
2	22	01	2.09														
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah		100 persen	1 Unit	1 tahun	29,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 persen	21,000,000
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah		100 persen	3 Unit	1 tahun	5,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 persen	6,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.00 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.00 DINAS KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 22 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah		100 persen	1 Unit	1 tahun	2,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 persen	3,000,000
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								450,000,000					602,000,000
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								400,000,000					561,000,000
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya daerah		100 persen	10 Objek	100 persen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	100 persen	410,000,000
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000					41,000,000
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional		100 persen	5 Objek	1 kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	100 persen	41,000,000
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								490,000,000					607,000,000
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								490,000,000					607,000,000
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisiona; yang dikembangkan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Tercapainya kelompok sanggar yang di bina		38,31 persen	100 Orang	10 kelompok	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesenian tradisiona; yang dikembangkan	38,31 persen	51,000,000
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase kesenian tradisiona; yang dikembangkan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	Tercapainya kelompok sanggar yang di bina		38,31 persen	10 Sertifikat	10 kelompok	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesenian tradisiona; yang dikembangkan	38,31 persen	46,000,000
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisiona; yang dikembangkan	Jumlah Kegiatan Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	Tercapainya kelompok sanggar yang di bina		38,31 persen	3 Kegiatan	10 kelompok	380,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesenian tradisiona; yang dikembangkan	38,31 persen	510,000,000
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								50,000,000					46,000,000
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000					46,000,000
2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Presentase sejarah lokal yang disusun/dibukukan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah		40 persen	2 Dokumen	2 buku	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase sejarah lokal yang disusun/dibukukan	40 persen	46,000,000
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								50,000,000					41,000,000
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								50,000,000					41,000,000
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya		22,31 persen	4 Objek	100 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase cagar budaya yang dilestarikan	22,31 persen	41,000,000
TOTAL									3,110,521,500					3,428,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										2,579,017,000		3,790,000,000				
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,229,517,000		3,590,000,000			
2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										18,360,000		80,000,000		
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		100 persen	2 Dokumen	2 buku	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan PD	100 persen	20,000,000
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen		100 persen	2 Dokumen	2 buku	2,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan PD	100 persen	20,000,000
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penunjang urusan PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	2 buku	2,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan PD	100 persen	20,000,000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen		100 persen	4 Laporan	2 buku	4,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan PD	100 persen	20,000,000
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		100 persen	15 Laporan	2 buku	3,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan PD	100 persen	0
2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,582,770,000		1,590,000,000		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase administrasi keuangan PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan PNS		17 orang	17 Orang/bulan	17 orang	1,536,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi keuangan PD	17 orang	1,500,000,000
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase administrasi keuangan PD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	gaji dan tunjangan PNS		17 orang	17 Dokumen	17 orang	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi keuangan PD	17 orang	25,000,000
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase administrasi keuangan PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	gaji dan tunjangan PNS		17 orang	12 Dokumen	17 orang	7,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi keuangan PD	17 orang	10,000,000
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase administrasi keuangan PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	gaji dan tunjangan PNS		17 orang	1 Laporan	17 orang	4,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi keuangan PD	17 orang	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase administrasi keuangan PD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan gaji dan tunjangan PNS Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			17 orang	4 Laporan	17 orang	6,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi keuangan PD	17 orang	15,000,000
2	23	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	persentase administrasi keuangan PD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			17 orang	2 Dokumen 2 Dokumen	17 orang	8,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi keuangan PD	17 orang	15,000,000
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					19,875,000								35,000,000
2	23	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	persentase barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			90 persen	1 Dokumen	90 persen	5,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase barang milik daerah	90 persen	7,000,000
2	23	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase barang milik daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			90 persen	1 Laporan	90 persen	6,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase barang milik daerah	90 persen	7,000,000
2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			90 persen	1 Laporan	90 persen	7,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase barang milik daerah	90 persen	7,000,000
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					138,200,000								355,000,000
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			17 orang	0 Eksemplar 34 Paket	17 orang	44,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	17 orang	45,000,000
2	23	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			17 orang	1 Dokumen	17 orang	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	17 orang	20,000,000
2	23	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			17 orang	1 Dokumen	17 orang	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	17 orang	20,000,000
2	23	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			17 orang	2 Dokumen	17 orang	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	17 orang	20,000,000
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					269,830,000								552,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase administrasi umum sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah jenis peralatan		90 persen	12 Paket	1 paket	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi umum sesuai standar	90 persen	17,000,000
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase administrasi umum sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah jenis peralatan		90 persen	1 Paket	1 paket	3,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi umum sesuai standar	90 persen	50,000,000
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase administrasi umum sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah jenis peralatan		90 persen	1 Paket	1 paket	20,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi umum sesuai standar	90 persen	25,000,000
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase administrasi umum sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah jenis peralatan		90 persen	1 Paket	1 paket	10,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi umum sesuai standar	90 persen	30,000,000
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase administrasi umum sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jumlah jenis peralatan		90 persen	144 Dokumen	1 paket	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi umum sesuai standar	90 persen	200,000,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase administrasi umum sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah jenis peralatan		90 persen	92 Laporan	1 paket	200,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi umum sesuai standar	90 persen	200,000,000
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						38,500,000							588,000,000
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan barang milik daerah jumlah pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	jumlah meja komputer		1 paket 10 unit	1 Unit	10 unit	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah pengadaan barang milik daerah jumlah pengadaan barang milik daerah	1 paket 10 unit	200,000,000
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan barang milik daerah jumlah pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jumlah meja komputer		1 paket 10 unit	1 Unit	10 unit	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah pengadaan barang milik daerah jumlah pengadaan barang milik daerah	1 paket 10 unit	328,000,000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99,482,000							70,000,000
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa penunjang urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis jasa penunjang		1 paket	12 Laporan	1 paket	20,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		tersedianya jasa penunjang urusan PD	1 paket	25,000,000
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa penunjang urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	jumlah jenis jasa penunjang		1 paket	12 Laporan	1 paket	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		tersedianya jasa penunjang urusan PD	1 paket	40,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa penunjang urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jumlah jenis jasa penunjang		1 paket	1 Laporan	1 paket	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tersedianya jasa penunjang urusan PD	1 paket	5,000,000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62,500,000			320,000,000				
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah barang milik daerah yang dipelihara		jumlah kendaraan yang terpelihara		6 unit		6 unit	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	6 unit	120,000,000
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	jumlah kendaraan yang terpelihara		6 unit	6 Unit	6 unit	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	6 unit	120,000,000
2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	jumlah kendaraan yang terpelihara		6 unit	1 Unit	6 unit	11,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	6 unit	25,000,000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jumlah kendaraan yang terpelihara		6 unit	6 Unit	6 unit	9,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	6 unit	15,000,000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					349,500,000			200,000,000				
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					274,500,000			100,000,000				
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	jumlah layanan perpustakaan elektronik		12,30 persen	1 Layanan	1 buah	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	12,30 persen	15,000,000
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	jumlah layanan perpustakaan elektronik		12,30 persen	10 Perpustakaan	10 buah	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	12,30 persen	10,000,000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	jumlah layanan perpustakaan elektronik		12,30 persen	12 Perpustakaan	12 buah	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	12,30 persen	10,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	jumlah layanan perpustakaan elektronik		12,30 persen	50 Eksemplar	1 buah	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	12,30 persen	5,000,000
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								75,000,000					100,000,000
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	persentase pembudayaan gemar membaca	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	sosialisasi dan bahan		50 orang	50 Lokus	50 orang	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pembudayaan gemar membaca	50 orang	25,000,000
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	persentase pembudayaan gemar membaca	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	sosialisasi dan bahan		50 orang	2 Perpustakaan	50 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pembudayaan gemar membaca	50 orang	50,000,000
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								235,460,000					350,000,000
2 24 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								15,000,000					200,000,000
2 24 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								15,000,000					200,000,000
2 24 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan barang milik daerah jumlah pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	jumlah meja komputer		1 paket 10 unit	1 Unit	10 unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah pengadaan barang milik daerah jumlah pengadaan barang milik daerah	1 paket 10 unit	200,000,000
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								69,760,000					100,000,000
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								30,180,000					40,000,000
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	jumlah arsip dinamis yang sudah dikelola		94 persen	250 Berkas	94 persen	25,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	94 persen	25,000,000
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	jumlah arsip dinamis yang sudah dikelola		94 persen	250 Berkas	94 persen	5,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	94 persen	15,000,000
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								20,650,000					30,000,000
2 24 02 2.02 01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	persentase pengelolaan arsip statis daerah	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	jumlah arsip statis yang dikelola secara baku		35 naskah	35 Arsip	35 naskah	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pengelolaan arsip statis daerah	35 naskah	20,000,000
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	persentase pengelolaan arsip statis daerah	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip statis yang dikelola secara baku		35 naskah	35 Arsip	35 naskah	5,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pengelolaan arsip statis daerah	35 naskah	10,000,000
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								18,930,000					30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	persentase pengelolaan SIJKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	jumlah arsip yang diakses melalui aplikasi		1 paket	1 Pengguna	1 paket	9,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pengelolaan SIJKN	1 paket	15,000,000
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan SIJKN	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah arsip yang diakses melalui aplikasi		1 paket	3 Laporan	1 paket	9,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pengelolaan SIJKN	1 paket	15,000,000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					150,700,000							50,000,000	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					150,700,000								50,000,000
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	jumlah dokumen arsip yang diamankan dan dilestarikan		100 persen	1 Arsip	1 paket	131,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	100 persen	25,000,000
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	jumlah dokumen arsip yang diamankan dan dilestarikan		100 persen	250 Berkas	1 paket	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	100 persen	25,000,000
TOTAL												2,814,477,000					4,140,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										59,319,336,000		19,412,000,000
3 26 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,347,576,000		2,509,000,000
3 26 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										13,670,000		29,000,000
3 26 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	a. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	4,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	6,000,000
3 26 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	a. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 Laporan	1 dokumen	9,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	12,000,000
3 26 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,007,200,000		1,543,000,000
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Orang/bulan		2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,450,000,000
3 26 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan		7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,000,000
3 26 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										56,800,000		39,000,000
3 26 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket		46,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,000,000
3 26 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										468,610,000		474,000,000
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		36,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen		3,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,000,000	
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Laporan		398,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			420,000,000	
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								468,530,000				110,000,000	
3 26 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		468,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000	
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,546,000				84,000,000	
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		50,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan		24,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,000,000	
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								257,220,000				230,000,000	
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit		38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36,000,000	
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit		13,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			94,000,000	
3 26 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		205,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								53,216,760,000				13,791,000,000	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								53,000,000,000				13,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lokasi		53,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				13,000,000,000
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							198,760,000						525,000,000
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Unit		198,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota							18,000,000						71,000,000
3 26 02 2.04 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				45 Dokumen		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,000,000
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							1,605,000,000						1,827,000,000
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							1,605,000,000						1,827,000,000
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,000,000
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Laporan		1,565,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,800,000,000
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							1,150,000,000						1,250,000,000
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							1,150,000,000						1,250,000,000
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				80 Orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				280 Orang		1,050,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,050,000,000
TOTAL									59,319,336,000					19,412,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3																		
3	27									25,627,185,900								58,074,553,273
3	27	01								9,863,489,400								13,058,693,273
3	27	01	2.02							8,249,954,400								10,695,512,700
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan		8,249,954,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,688,962,700
3	27	01	2.05										91,000,000					122,500,000
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		91,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				97,500,000
3	27	01	2.06										487,440,000					1,278,225,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,000,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		468,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,269,825,000
3	27	01	2.07										468,830,000					35,000,000
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		468,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	27	01	2.08										85,015,000					328,455,573
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				87,998,873
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				124,049,200
3	27	01	2.09										481,250,000					560,000,000
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				515,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit		23,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
3 27 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1,648,250,000				5,646,000,000	
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								50,000,000				3,696,600,000	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 VUB		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			190,000,000	
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain								1,598,250,000				1,778,250,000	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11870 Ekor		1,598,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,598,250,000	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								13,609,101,500				13,907,000,000	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian								2,372,500,000				7,445,000,000	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		173 Dokumen		2,372,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,722,500,000	
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian								11,236,601,500				6,400,000,000	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Terbangunnya/Terehabilitasi, Embung Pertanian	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit 6 Unit	6 Unit	5 Unit	11,236,601,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5 unit 6 Unit	1,050,000,000	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								230,165,000				24,763,760,000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								230,165,000				24,713,760,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 Laporan		230,165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,624,000,000	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								276,180,000				474,400,000	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								276,180,000				474,400,000	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1299 Unit		4,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			234,900,000	
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77 Unit		271,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			154,000,000	
TOTAL									25,627,185,900				58,074,553,273	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
3 30 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
3 30 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	31 Orang/bulan	100 %	2,551,972,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	2,468,000,000
3 30 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
3 30 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	14 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	0
3 30 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 Paket	95 %	323,224,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	1,900,000
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	29 Paket	95 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	3,700,000
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Paket	95 %	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	2,800,000
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen	95 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	3,200,000
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	140 Laporan	95 %	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	260,000,000
3 30 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
3 30 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Meningkatnya Kegunaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	15 Unit	95 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								28,037,500				18,500,000	
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	49 Laporan	95 %	24,077,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	13,000,000
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	95 %	3,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	5,500,000
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								68,560,000				73,900,000	
3 30 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	15 Unit	48.78 %	66,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	70,000,000
3 30 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 Unit	48.78 %	2,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	3,900,000
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								77,400,000				125,000,000	
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang								77,400,000				125,000,000	
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Meningkatnya Perusahaan yang memiliki Izin	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.96 %	53 Dokumen	805 Izin	77,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	30.96 %	125,000,000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								82,100,000				70,000,000	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								50,000,000				55,000,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana distribusi perdagangan	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.71 %	20 Unit	953 Unit	50,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatnya Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	1.71 %	55,000,000
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								32,100,000				15,000,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Kelompok Pedagang yang dibina	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.71 %	508 Dokumen	9.15 %	32,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	1.71 %	15,000,000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								387,350,000				400,000,000	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								387,350,000				400,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terciptanya Kestabilan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi harga barang kebutuhan pokok	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	365 Hari	288 Laporan	14 Wilayah	387,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terciptanya Kestabilan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	365 Hari	400,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								61,500,000					30,000,000
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								61,500,000					30,000,000
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Terciptanya Pasar tertib Ukur	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Tertibnya Alat UTP yang beredar di Pasar	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	238 Orang	18.25 %	61,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terciptanya Pasar tertib Ukur	8 Unit	30,000,000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								98,100,000					40,000,000
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								98,100,000					40,000,000
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya produk unggulan yang dipasarkan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Larisnya Produk Unggulan yang dipasarkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.44 %	8 UMKM	4 Jenis	98,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya produk unggulan yang dipasarkan	44.44 %	40,000,000
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								1,655,378,000					1,450,000,000
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								1,655,378,000					1,450,000,000
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								1,655,378,000					1,450,000,000
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kelompok Industri yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Tersedianya Sentra Binaan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.41 %	1 Dokumen	18 Sentra	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kelompok Industri yang Terfasilitasi	29.41 %	50,000,000
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Meningkatnya Kelompok Industri yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tersedianya Sentra Binaan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.41 %	18 Dokumen	18 Sentra	500,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatnya Kelompok Industri yang Terfasilitasi	29.41 %	575,000,000
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya Kelompok Industri yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tersedianya Sentra Binaan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.41 %	131 Dokumen	18 Sentra	1,105,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kelompok Industri yang Terfasilitasi	29.41 %	825,000,000
TOTAL									5,598,472,000					4,987,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01	PERENCANAAN																
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	23 Orang/bulan	23 Pegawai	2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	23 Paket	2 paket	16,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	3 Orang	2 paket	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan		100 %	160 Paket	3 Paket	33,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan		100 %	20 Dokumen	3 Paket	5,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan		100 %	350 Laporan	3 Paket	681,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	50 Laporan	3 Kegiatan	56,587,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Laporan	3 Kegiatan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	27 Laporan	3 Kegiatan	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								191,752,000					0
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100 %	1 Unit	3 Kegiatan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100 %	15 Unit	3 Kegiatan	149,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100 %	13 Unit	3 Kegiatan	7,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1,605,823,000					0
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								1,055,823,000					0
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang dilaksanakan		100 %	1 Berita Acara	3 Kegiatan	88,739,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	0
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang dilaksanakan		100 %	1 Berita Acara	3 Kegiatan	286,687,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	0
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKRD)	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang dilaksanakan		100 %	3 Dokumen	3 Kegiatan	680,397,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	0
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								550,000,000					0
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pembangunan		100 %	4 Laporan	4 Dokumen	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	0
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								500,000,000					0
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								500,000,000					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Capaian Program yang memenuhi target sesuai Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 %	1 Laporan	1 Kegiatan	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konsistensi Capaian Program yang memenuhi target sesuai Dokumen Perencanaan	100 %	0
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								250,000,000					0
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								250,000,000					0
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								250,000,000					0
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Cakupan Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan		100 %	1 Dokumen	8 Dokumen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	100 %	0
TOTAL									5,723,000,000					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02		KEUANGAN										42,516,264,500		84,839,347,860		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										39,787,745,000		82,179,493,378		
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4,916,000		4,119,968	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renja 2023	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	95 %	3,081,000		Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2,000,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Renja 2023	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	95 %	1,835,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2,119,968
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										19,743,704,500		53,493,877,882	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Tertibnya administrasi keuangan		95 %	1 Tahun	12 Bulan	19,733,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	26,746,234,710
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD/SKPD BPKAD	Tertibnya administrasi keuangan		95 %	1 Tahun	12 Bulan	8,122,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	26,746,234,710
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tertibnya administrasi keuangan		95 %	100 %	12 Bulan	1,439,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	640,751
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	tersedianya Laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	Tertibnya administrasi keuangan		95 %	100 %	12 Bulan	573,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	767,711
5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1,544,000		1,631,304	
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah	Terlaksananya rekon dan laporan BMD SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah		95 %	100 %	100 %	1,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah	95 %	1,631,304
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										287,203,000		205,535,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya pakaian dinas ASN SKPD	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		95 %	78 pasang	100 %	133,807,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	105,535,500
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya laporan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai SKPD	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		95 %	100 %	100 %	3,396,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	0
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		95 %	6 Orang	100 %	150,000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	100,000,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								617,320,500				696,638,131	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	7 Paket	12 Bulan	4,062,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	3,732,756
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi umum		95 %	100 %	12 Bulan	4,422,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	0
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum		95 %	30000 Paket	12 Bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	14,000,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum		95 %	12 bulan	12 Bulan	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	0
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Terlayannya tamu dengan baik	Terlaksananya pelayanan administrasi umum		95 %	100 %	12 Bulan	45,286,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	12 Bulan	549,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	678,905,375
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								616,507,000					500,000,000
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah		95 %	2 Unit	100 %	499,597,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	0
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah		95 %	10 Unit	100 %	116,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	0
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								18,306,075,000					26,980,319,855
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	100 %	4,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	8,305,300
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon dan Internet	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95 %	1 Tahun	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	5,793,965,075
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95 %	1 Tahun	100 %	18,001,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	21,178,049,480
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								210,475,000					297,370,738
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Terbayarnya pajak, pemeliharaan kendaraan dinas	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah		95 %	1 Tahun	12 Bulan	168,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	239,544,425
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah		95 %	1 Tahun	12 Bulan	12,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	17,853,750
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah		95 %	1 Tahun	12 Bulan	30,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	39,972,563

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								1,935,638,500			1,722,092,054	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								783,989,000			934,329,058	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	108 Dokumen	6 Tahapan	166,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	100 %	151,360,125
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	108 Dokumen	6 Tahapan	169,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	100 %	150,169,875
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	Terverifikasinya dokumen DPA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	312 eks	6 Tahapan	109,534,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	100 %	79,826,100
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	362 Dokumen	6 Tahapan	92,619,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	100 %	117,438,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	Tersedianya dokumen sah DPA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	70 buku	6 Tahapan	140,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	100 %	223,604,333
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	Tersedianya dokumen sah DPA SKPD Perubahan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	70 eks	6 Tahapan	102,271,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	100 %	211,930,625
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	Tersedianya ASB	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	100 %	6 Tahapan	2,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penandatanganan Persetujuan bersama RanperdaAPBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					103,612,000				77,329,220					
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tertibnya Penatausahaan Keuangan Daerah		100 %	12 Dokumen	12 Bulan	9,881,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	10,458,330
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Terbitnya anggaran kas dan SPD	Tertibnya Penatausahaan Keuangan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	7,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya asistensi/supervisi dan monev dana transfer	Tertibnya Penatausahaan Keuangan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	23,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Tersedianya laporan penerimaan dan pengeluaran kasda, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/penyetoran PFK	Tertibnya Penatausahaan Keuangan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	14,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	12,299,250
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya rekon sp2d	Tertibnya Penatausahaan Keuangan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	13,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	15,293,390
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertibnya Penatausahaan Keuangan Daerah		100 %	150 Orang	12 Bulan	34,881,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	39,278,250
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					545,972,500				710,433,776					
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tercapainya Program pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan Pemda		100 %	19 Laporan	100 %	247,167,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Program pengelolaan keuangan daerah	100 %	10,580,000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya Program pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Tersedianya laporan keuangan Pemda		100 %	3 Laporan	100 %	2,085,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Program pengelolaan keuangan daerah	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tercapainya Program pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemda		100 %	1 Dokumen	100 %	92,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Program pengelolaan keuangan daerah	100 %	135,020,638
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya Program pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemda		100 %	3 Dokumen	100 %	147,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Program pengelolaan keuangan daerah	100 %	256,082,288
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Program pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan keuangan Pemda		100 %	800 Orang	100 %	56,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Program pengelolaan keuangan daerah	100 %	0
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								502,065,000					0
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tercapainya Pengelolaan SIPD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Menjamin koneksitas aplikasi SIPD dengan SIPKD termasuk migrasi data dan Pemeliharannya		12 Bulan	76 Dokumen	100 %	360,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Pengelolaan SIPD	12 Bulan	0
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan SIPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Menjamin koneksitas aplikasi SIPD dengan SIPKD termasuk migrasi data dan Pemeliharannya		12 Bulan	108 Orang	100 %	141,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya Pengelolaan SIPD	12 Bulan	0
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								792,881,000					937,762,428
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								792,881,000					937,762,428
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Tertibnya pengelolaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	220 Dokumen	100 %	59,762,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100 %	60,000,000
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tertibnya pengelolaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	76 Dokumen	100 %	35,211,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100 %	0
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tertibnya pengelolaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	76 Laporan	100 %	32,014,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100 %	115,960,768

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Tertibnya pengelolaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	220 Laporan	100 %	138,165,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100 %	176,610,618
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Tertibnya pengelolaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	200 Laporan	100 %	158,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100 %	158,409,050
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Tertibnya pengelolaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	53 Laporan	100 %	97,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100 %	115,936,963
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tertibnya pengelolaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	53 Dokumen	100 %	140,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100 %	159,043,850
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya rekon dan laporan BMD SKPD	Tertibnya pengelolaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	100 %	117,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100 %	1,631,304
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Tertibnya pengelolaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	52 Dokumen	100 %	12,913,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100 %	150,169,875
TOTAL												42,516,264,500					84,839,347,860	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02	KEUANGAN											6,356,831,500		7,956,000,000		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,966,704,500		6,606,000,000	
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,141,819,000		1,600,000,000
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Orang/bulan		4,141,819,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,600,000,000	
5	02	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											296,000,000		296,000,000
5	02	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen		296,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			296,000,000	
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											294,620,000		870,000,000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket		4,751,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			105,000,000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket		144,149,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,000,000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		145,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			180,000,000	
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											5,000,000		500,000,000
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85,000,000	
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											159,265,500		560,000,000
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		46,465,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		112,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000	
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											70,000,000		330,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1,390,127,000				1,350,000,000	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1,390,127,000				1,350,000,000	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		81,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			152,500,000	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Obyek Pajak		1,066,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		8,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		113,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			305,000,000	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		76,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000	
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		44,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,000,000	
TOTAL									6,356,831,500				7,956,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6 01	INSPEKTORAT DAERAH										16,501,568,000			18,533,400,000
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,446,238,000			13,247,000,000
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,050,000			4,500,000
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen		1,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000	
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen		800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000	
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan		3,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000	
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,501,000,000			9,000,000,000
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan		7,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,000,000,000	
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan		1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,550,505,000			1,025,000,000
6 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50 Dokumen		54,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang		1,495,705,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,020,000,000	
6 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang		800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										66,840,000			827,500,000
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket		2,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan		4,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,000,000					20,000,000
6 01 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								102,243,000					190,000,000
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan		600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan		42,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		59,163,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,199,600,000					2,180,000,000
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit		174,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				105,000,000
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit		5,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000,000
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								4,443,430,000					4,368,200,000
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								2,866,250,000					3,694,900,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Laporan		1,209,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,849,000,000	
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan		58,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,000,000	
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				29 Laporan		658,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			792,700,000	
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 Laporan 0 Laporan		116,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			546,700,000	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				8 Laporan		473,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			478,500,000	
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan		116,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				8 Dokumen		233,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								1,577,180,000				673,300,000	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5 Laporan		63,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				24 Laporan		1,513,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			673,300,000	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								611,900,000				918,200,000	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan								12,000,000				15,000,000	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi								599,900,000				903,200,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				8 perangkat daerah		109,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			466,400,000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				2 perangkat daerah		116,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			54,600,000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan		245,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			109,200,000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah		128,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			273,000,000	
TOTAL									16,501,568,000				18,533,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
8 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
8 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai		100 %	24 Orang/bulan	100 %	1,983,243,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,226,000,000
8 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya Kinerja, Disiplin dan Pengetahuan Aparatur		100 %	24 Paket	100 %	62,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,072,000
8 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kinerja, Disiplin dan Pengetahuan Aparatur		100 %	4 Orang	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	212,000,000
8 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran dengan Baik		100 %	2 Dokumen	100 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,088,000
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran dengan Baik		100 %	612 Laporan	100 %	447,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	436,720,000
8 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
8 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan Tupoksi		100 %	6 Unit	100 %	658,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	70,000,000
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan Tupoksi		100 %	17 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,630,000
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan Tupoksi		100 %	12 Unit	100 %	123,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	79,500,000
8 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
		69,064,000												
		119,520,000												

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran dengan Baik		100 %	1 Tahun	100 %	69,064,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	75,000,000
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								64,250,000					0
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Dinas		100 %	15 Unit	15 unit	64,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								2,401,570,000					2,544,000,000
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								2,401,570,000					2,544,000,000
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Jumlah Sosialisasi/Pertemuan Pembinaan Kebangsaan	Meningkatnya Rasa Cinta Tana Air		100 %	2 kegiatan	100 %	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 %	2,120,000,000
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Jumlah Pertemuan/Dialog antar suku	Meningkatnya Rasa Cinta Tana Air		100 %	4 kali	100 %	201,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 %	212,000,000
8 01 02 2.01 06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga	Meningkatnya Rasa Cinta Tana Air		100 %	2 kali	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 %	212,000,000
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								1,319,552,448					1,902,720,000
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								1,319,552,448					1,902,720,000
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Capaian Kegiatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik Capaian Kegiatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik	Jumlah Partai Politik yang difasilitasi	Meningkanya Pembinaan Politik dan Sosial Kemasyarakatan		100 % 100 %	9 Parpol	100 %	662,552,448	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kegiatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik Capaian Kegiatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik	100 % 100 %	1,360,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Capaian Kegiatan Peran Partai Polilik dan Pendidikan Politik Capaian Kegiatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Sosialisasi yang dilaksanakan	Meningkanya Pembinaan Politik dan Sosial Kemasyarakatan		100 % 100 %	3 Kegiatan	100 %	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kegiatan Peran Partai Polilik dan Pendidikan Politik Capaian Kegiatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik	100 % 100 %	482,300,000
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Capaian Kegiatan Peran Partai Polilik dan Pendidikan Politik Capaian Kegiatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkanya Pembinaan Politik dan Sosial Kemasyarakatan		100 % 100 %	9 Laporan	100 %	57,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kegiatan Peran Partai Polilik dan Pendidikan Politik Capaian Kegiatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik	100 % 100 %	60,420,000
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								3,840,500,000					3,922,000,000
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								3,840,500,000					3,922,000,000
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Jumlah Ormas yang mendaftar/melapor dan aktif	Terwujudnya Administrasi Ormas sesuai ketentuan		10% 0	20 ormas	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	10% 0	212,000,000
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya Administrasi Ormas sesuai ketentuan		10% 0	0	100 %	3,540,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	10% 0	3,710,000,000
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya Administrasi Ormas sesuai ketentuan		10% 0	4 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	10% 0	0
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								820,000,000					953,600,000
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								820,000,000					953,600,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terciptanya situasi dan kondisi yang bebas narkoba di Kabupaten Tana Toraja		100 %	4 kegiatan	100 %	320,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya yang tepat sasaran	100 %	530,000,000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terciptanya situasi dan kondisi yang bebas narkoba di Kabupaten Tana Toraja		100 %	10 kegiatan	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya yang tepat sasaran	100 %	413,000,000
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terciptanya situasi dan kondisi yang bebas narkoba di Kabupaten Tana Toraja		100 %	2 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya yang tepat sasaran	100 %	10,600,000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								650,060,000					653,800,000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								650,060,000					653,800,000
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Jumlah Fasilitas Tim Kewaspadaan Dini	Terciptanya Keamanan Lingkungan yang Kondusif		100 %	4 kegiatan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	100 %	145,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Presentase Fasilitasi Penanganan Konflik	Terciptanya Keamanan Lingkungan yang Kondusif		100 %	100 persen	100 %	100,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	100 %	106,000,000
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terciptanya Keamanan Lingkungan yang Kondusif		100 %	4 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	100 %	84,800,000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Jumlah Kegiatan Forkopimda	Terciptanya Keamanan Lingkungan yang Kondusif		100 %	10 kegiatan	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	100 %	318,000,000
TOTAL									12,593,510,248					13,195,650,000



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

6.1 Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 – 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET RPJMD TAHUN 2023	TARGET RKPD TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,49	69,91	70,18	70,66
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,29	12,05	12,00	10,83
3	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,10	2,5	2,35	2,92



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET RPJMD TAHUN 2023	TARGET RKPd TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.19	3.50	4.50	5,59 – 6,41
5	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	28.35	32.70	33.15	33,15
6	Gini Rasio	Angka	0.378	0.335	0.325	0,319

Sumber Data : BAPPEDA Tana Toraja 2022

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Daerah untuk Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Adapun Penetapan Indikator Kinerja Daerah dapat dilihat pada tabel 6.2 :

Tabel 6.2
Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 – 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C (46,84)	CC (58)	B (62)
2	Indeks Kesehatan	Angka	82.15	82.16	82.22
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,7	1,5	2
4	Kunjungan Wisatawan	Orang	78.293	561.661	892.864
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,85	67,09	67,55
6	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	61.99	63,50	66.70
7	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Angka	138	132	123
8	Predikat SAKIP	Kategori	CC (54.03)	B (62)	B (67)



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
9	Opini BPK	Nilai	WDP	WDP	WTP
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	%	83.27	87.80	88.35
11	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	73.4	74.2	74.6
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68.77	69.55	72.40
13	Indeks Pendidikan	%	66.82	66.10	66.30
14	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)	%	23,42	24,11	24.60
15	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	7.85	7.85	7.98
16	Persentase Tingkat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	%	16.57	100	100
17	Persentase Kasus Kriminalitas yang Tertangani	%	82	84	86

Sumber Data : BAPPEDA Tana Toraja 2022

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau yang dikenal dengan *key performance indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Setelah organisasi menganalisis misinya, mengidentifikasi semua pemangku kepentingan, dan menentukan tujuan-tujuan, maka membutuhkan cara untuk mengukur capaian-capaian yang telah dilakukan, dan pengukuran itu adalah KPI.

KPI mencerminkan tujuan-tujuan organisasi, menjadi kunci kesuksesan organisasi, menjadi kunci kesuksesan organisasi, dan oleh karenanya KPI harus dapat diukur. Biasanya KPI dipertimbangkan untuk jangka panjang. Definisi apanya KPI dan bagaimana mengukurnya tidak terlalu sering berubah. Tetapi tujuan-tujuan jangka pendek dibuat dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang. Seberapa besar pencapaian KPI tergantung ukuran yang ditentukan. Maka dari itu dalam membuat KPI harus menyatakan kuantitas atau persentase yang hendak dicapai.



Banyak hal yang terukur namun tidak semuanya menjadi kunci kesuksesan organisasi. Dalam memilih KPI, sangat kritis untuk membatasinya hanya pada hal-hal esensial bagi organisasi meraih tujuan-tujuannya. Dan sangat penting untuk mempertahankan sedikit indikator agar semua pihak fokus perhatiannya dalam mencapai KPI yang sama. Bisa jadi KPI sebuah organisasi hanya terdiri dari tiga atau empat indikator sedangkan unit-unit kerja di dalamnya memiliki tiga atau empat atau lima indikator yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.

KPI dapat digunakan sebagai alat bantu manajemen dan dapat juga digunakan sebagai carrot atau umpan. KPI memberikan gambaran jelas kepada setiap orang mengenai hal-hal yang penting bagi organisasi, apa yang harus mereka lakukan untuk mewujudkannya. Hal ini untuk mengelola kinerja sehingga setiap orang fokus untuk memenuhi atau melampaui KPI. Sebagai umpan, KPI diposkan dimana-mana : di ruang kerja, di ruang makan, di ruang rapat, di intranet, bahkan di situs web perusahaan. Mempertontonkan target setiap KPI dan kemajuan yang dicapai dari setiap target. Semua itu dalam rangka memotivasi pekerja untuk mencapai KPI.

Tabel 6.3

Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2023

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	DINAS PENDIDIKAN				
1	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	91.61	100	100
2	Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	6.10	100	100
3	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	21.85	100	100
4	Presentase pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	50	60	100
5	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	97.89	88.19	88.74



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
6	Presentase pengendalian perizinan PAUD, pendidikan non formal dan pendidikan dasar yang terlayani	%	100	100	100
DINAS KESEHATAN					
1	Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100
2	Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100
3	Cakupan Pemberian PMT Balita	%	55	100	100
4	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	93.56	100	100
5	Persentase cakupan pelayanan Bayi dan Balita	%	94.67	100	100
6	Cakupan Puskesmas	%	110.53	110.53	110.53
7	Persentase Fasyankes yang Memiliki Tenaga Sesuai Permenkes 43 Tahun 2009	%	31	90	95
8	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas	%	40	100	100
9	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	%	78	100	100
10	Persentase Puskesmas melaksanakan upaya promkes, advokasi & pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
RSUD LAKIPADADA					
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	%	83.27	100	100
2	Prosentase Pencapaian SPM Rumah Sakit	%	94.64	97.16	97.79
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	77.41	62.40	63.29
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Air Minum curah Lintas Kabupaten/Kota	%	100	100	100
3	Persentase Sampah yang Tertangani	%	18.91	37.15	39.53
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota	%	100	100	100
5	Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	%	35.20	37.20	39.20



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
6	Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0.101	0.09	0.09
7	Persentase Bangunan Pemerintah yang tertata dengan Baik	%	90	91	92
8	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	1	2	3
9	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	67.72	71.52	73.07
10	Persentase ASN yang memperoleh Pelatihan Keterampilan Jasa Konstruksi	%	30	35	40
11	Jumlah penerbitan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah/lahan	Rekomendasi	105	60	60
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100
2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	90.13	90.56	91.79
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	90.13	87.62	88.76
4	Cakupan peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum pada kawasan kota penyangga	%	33.33	44.44	55.56
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten	%	100	100	100
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
1	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100
2	Persentase warga negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100
DINAS SOSIAL					
1	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	%	34.5	100	100
2	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	83.0	100	100



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
3	Presentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100
4	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
1	Dokumen perencanaan Tenaga Kerja	Dok.	0	0	0
2	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100	99.11	99.12
3	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	20.40	95.56	96.04
4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	100	100	100
5	Persentase lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	-	100	100
6	Prosentase penempatan transmigrasi	%	87.50	100	100
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	88.46	88.20	88.65
2	Prosentase Korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	61	60	70
3	Persentase kecamatan yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga	%	0	32	64
4	Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate	%	40	50	60
5	Persentase kecamatan yang memiliki forum anak	%	100	100	100
6	Prosentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	61	60	70
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					
1	Persentase Kecamatan yang memiliki kelompok Pengelola Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	%	31.57	31.00	36.80
2	Cakupan Desa/Kelurahan yang menerapkan Rumah Pangan Lestari	%	24.50	28.70	35.85
3	Persentase Lembang/Kelurahan yang rawan pangan	%	17.0	21.5	19.5
4	Cakupan wilayah kecamatan pelaksanaan pengawasan	%	31.57	36.80	52.60
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20	24	25



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
6	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	712	698	712
7	Jumlah produk perikanan yang dipasarkan	Ton	4,280	3,610	3,721
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100	100
2	Indeks kualitas air	nilai	62.73	52.70	52.80
3	Indeks kualitas udara	nilai	88.98	86.97	87.07
4	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)	%	16.57	30	40
5	Cakupan Limbah B3 Fasum/Fasos/Usaha yang diawasi	%	15.00	18.00	20.14
6	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	%	14.86	26	28.00
7	Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA	%	4.76	4.70	9.52
8	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	%	14.28	28.57	42.85
9	Jumlah penerima penghargaan dibidang lingkungan hidup	Orang/ Lembaga	1	1	1
10	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
11	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Melalui 3R	%	30	12.32	14.80
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Persentase Penduduk ber KTP-El per satuan penduduk	%	92	85	86
2	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	54	71	72
3	Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran	%	81	82	83
4	Persentase pasangan berakta perkawinan	%	95	45	50
5	Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan	%	100	100	100
6	Persentase lembaga yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public	%	100	100	100
7	Prosentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100	100
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG					
1	Cakupan batas desa dan sarana prasarana desa yang baik	%	83	85	86



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
2	Presentase kawasan perdesaan yang dibangun pada kecamatan	%	0	11	26
3	Presentase Desa yang Memiliki RPJMdes, RKPdes, dan APBDes dan BUMDES	%	100	100	100
4	Persentase kelembagaan lembaga kemasyarakatan lembang/kelurahan yang difasilitasi dan dibina	%	50	58	65
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	100	100	100
2	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	68.44	69.48	69.52
3	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan	%	100	100	100
DINAS PERHUBUNGAN					
1	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	72	77	78
2	Jumlah Orang Melalui Terminal per Tahun	orang	2.540.000	1.890.931	2.119.451
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	70	75	80
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	%	63	73	83
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah	%	29	33	63
4	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	19	19	38
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi Izin usaha	%	0.9	0.8	0.8
2	Persentase Koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan	%	12.07	10.34	8.62
3	Prosentase koperasi yang memiliki kategori SEHAT	%	10.92	12.64	14.36



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
4	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi	%	7.47	8.62	9.77
5	Persentase Koperasi yang terfasilitasi untuk diberdayakan	%	10.91	12.64	14.37
6	Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan	%	1.16	1.69	2.42
7	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	%	1.21	1.45	1.69
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
1	Persentase Potensi investasi yang dikelola	%	35.50	66.67	77.78
2	Persentase Realisasi Investasi PMDN/PMA	%	5	6.5	8.5
3	Persentase Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (Tepat Waktu)	%	99.44	94.66	94.77
4	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	%	100	100	100
5	Persentase jumlah data informasi pendukung penanaman modal yang tersedia	%	100	100	100
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	%	10	55	60
2	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	0	50	53
3	Persentase Peningkatan SDM Kepramukaan	%	25	57	60
DINAS KEBUDAYAAN					
1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	11	55.55	100
2	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	30.84	34.57	38.31
3	Persentase sejarah lokal yang disusun/dibukukan	%	13.33	26.66	40
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	13.22	17.36	22.31
5	Persentase pengelolaan museum	%	100	100	100
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
1	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	2.65	6.60	12.30
2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	90	92	94
3	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
DINAS PARIWISATA					
1	Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan	%	63.16	68.42	78.94



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
2	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan	%	80	100	100
3	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual	produk	0	1	1
4	Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata	%	100	100	100
DINAS PERTANIAN					
1	Produksi Padi (Ton)	ton	174.740	183.416	184.334
2	Produksi Jagung (Ton)	ton	620	13.184	13.316
3	Produksi Kopi (Ton)	ton	4.482	4.107	4.190
4	Produksi Kakao (Ton)	ton	1.334	1.340	1.367
5	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	Ton/Ha	6.70	5.1	5.3
6	Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	Ton/Ha	8.98	7.0	7.2
7	Produksi Daging Kerbau (Kg)	Kg	342.457	354.104	373.982
8	Produksi Daging Sapi (Kg)	Kg	58.096	46.127	46.565
9	Produksi Daging Babi (Kg)	Kg	1.123.205	806.824	838.712
10	Produksi Telur (Kg)	Kg	681.281	681.860	693.451
11	Persentase penggunaan benih padi bersertifikat	%	8.90	8.90	8.90
12	Jumlah Penggunaan Varietas Kopi Lokal Toraya bersertifikasi (Varietas)	Varietas	0	2	2
13	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (Unit)	%	50	16.67	25.00
14	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Unit)	Unit	23	20	20
15	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Unit)	Unit	3	10	10
16	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	%	19.93	12.50	14.29
17	Persentase penurunan serangan OPT	%	40	15-20	10-20
18	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	%	100	100	100
19	Persentase Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani/KEP	%	1.29	0.30	0.30
20	Persentase Ketersediaan Penyuluh terhadap Kelompok Tani/Ternak	%	4.54	6.25	6.25
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
1	Persentase perusahaan yang memiliki izin	%	27.67	29.43	30.96
2	Laju pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	Nilai	1.09	1.30	1.71
3	Cakupan penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok	%	68.42	68.42	73.68



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
4	Persentase UTP yang Di Tera	%	12.40	15	18.25
5	Persentase produk unggulan yang dipasarkan	%	44.44	44.44	44.44
6	Persentase kelompok industri yang terfasilitasi	%	23.53	23.53	29.41
SEKRETARIAT DAERAH					
1	Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	100	100	100
2	Persentase kebijakan Pemerintahan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan sesuai rencana	%	100	100	100
3	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan sesuai rencana	%	100	100	100
SEKRETARIAT DPRD					
1	Prosentase PROLEGDA yang terealisasi	%	36.36	100	100
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
1	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100
2	Prosentase konsistensi capaian program yang memenuhi target sesuai dokumen perencanaan	%	100	100	100
3	Cakupan kemanfaatan penelitian dan pengembangan	%	100	100	100
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
1	Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	%	50	100	100
2	Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	%	100	100	100
3	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Bersertifikat	%	42	50	55
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
1	Persentase Peningkatan PAD	%	0.63	2.69	3.67
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
1	Persentase ASN berkinerja baik	%	88.08	96	100
2	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural	%	80.02	85	87
3	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	%	35	40	50



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
1	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan BPK-RI	%	74	68	70
2	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Diakomodir menjadi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah	%	100	100	100
UNSUR KEWILAYAHAN					
KECAMATAN MAKALE					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	77	80	81
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	80	83	85
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	21	17	14
KECAMATAN MAKALE UTARA					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	81	83	84
2	Cakupan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100	100
KECAMATAN MAKALE SELATAN					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	85	85	85
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	55	60	65
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	10	7	5
KECAMATAN SANGALLA					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	85	87	88
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	80	83	85



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	4	4	3
KECAMATAN SANGALLA UTARA					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	81	82.5	84
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	2	2	2
KECAMATAN SANGALLA SELATAN					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	77	80	81
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	80	83	85
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	21	17	14
KECAMATAN MENGENDEK					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	81	82.5	84
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	73.33	73.33	80
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	37	32	27
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	78	81	82
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	84	88	92
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	27	23	18
KECAMATAN SALUPUTTI					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	81	83	85



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	65	67	70
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	37	32	27
KECAMATAN REMBON					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	82	85	86
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	6	3	3
KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	74	78	82
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	70	73	75
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	15	12	8
KECAMATAN RANTETAYO					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	81	82	83
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	8	7	5
KECAMATAN KURRA					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	82	83	85
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	83.33	85.71	87.5
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	11	9	6



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN BONGGAKARADENG					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	80	81	81
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	10	8	6
KECAMATAN RANO					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	90	92	94
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	80	82	85
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	12	10	5
KECAMATAN BITTUANG					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	78	79	81
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	81	83	85
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	43	33	28
KECAMATAN MASANDA					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	70	73	75
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	70	73	75
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	8	4	3
KECAMATAN SIMBUANG					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	82	83	84
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100	100



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	15	14	13
KECAMATAN MAPPAK					
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	Nilai	81	82	83
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	100
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	100	100
4	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	Temuan	8	7	5
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS					
1	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	75	80	85
2	Capaian kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik	%	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	30	50	60
4	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang tepat sasaran	%	100	100	100
5	Cakupan Kegiatan Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	%	100	100	100
ASPEK DAYA SAING					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah/kapita/tahun	11.949.360	11.059.740	11.491.565
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rupiah/kapita/tahun	5.659.092	4.801.275	5.033.713
3	Net Ekspor Barang dan Jasa (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	-7.10	-8.37	-7.99
4	Angka kriminilitas yang tertangani	Angka		132	123
5	Rasio ketergantungan	Rasio	44.96	65.43	65.03

6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan



melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.4
Capaian dan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2023

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2021	Asumsi Capaian SPM Tahun 2022	Target Tahun 2023
PENDIDIKAN				
Pendidikan Dasar				
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	91.61 %	100 %	100 %
Pendidikan Kesetaraan				
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	6.10 %	100 %	100 %



Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2021	Asumsi Capaian SPM Tahun 2022	Target Tahun 2023
Pendidikan Anak Usia Dini				
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	21.85 %	100 %	100 %
KESEHATAN				
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	93.56 %	100 %	100 %
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	89.4 %	100 %	100 %
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
Persentase Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	94.38 %	100 %	100 %
Pelayanan Kesehatan Balita				
Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	50.21 %	100 %	100 %
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	97 %	100 %	100 %
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	11 %	100 %	100 %
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	87 %	100 %	100 %
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	9 %	100 %	100 %
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				
Persentase Jumlah Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	91 %	100 %	100 %



Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2021	Asumsi Capaian SPM Tahun 2022	Target Tahun 2023
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %
PEKERJAAN UMUM				
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik				
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100 %	100 %	100 %
PERUMAHAN RAKYAT				
Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni				
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %	100 %	100 %
Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota				
Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100 %	100 %	100 %
TRANTIBUMLINMAS				
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum				
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	100 %	100 %	100%



Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2021	Asumsi Capaian SPM Tahun 2022	Target Tahun 2023
Pelayanan informasi rawan bencana				
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	55.56 %	100 %	100%
SOSIAL				
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti				
Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	100 %	100 %
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti				
Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	100 %	100 %
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti				
Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	100 %	100 %
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				



Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2021	Asumsi Capaian SPM Tahun 2022	Target Tahun 2023
Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	100 %	100 %	100 %
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota				
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %

6.5. Target Indikator Kinerja SDGs / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah telah menyeleraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Bagi Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa tujuan SDGs harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari target perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan kondisi topografis Kabupaten Tana Toraja hanya melaksanakan 17 tujuan. Selanjutnya target indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.5

Capaian dan Target Indikator

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2023

NO	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	%	12.7	19.89	15.21
1.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	%	100	100	100



NO	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1.3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	Rumah Tangga	13.292	12.923	13.805
1.4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	28.60	35,03	38,09
1.5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	15.18	16,15	16,57
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Dinas Pendidikan	%	97.21	98.74	99.05
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan	%	77.26	82.45	83.03
1.8	Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	%	73.0	70.2	73.4
2	TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN					
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%	7.41	9.825	9.394
2.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	%	16.26	21.99	18.92
2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	%	35.80	40.21	36.28
2.4	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	%	60.03	64.02	65.57
2.5	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	79.19	16.08	16.60
3	TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA					
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Angka	3	51	49
3.2	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Angka	0	1.35	1.18
3.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Angka	18	1.27	1.05
3.4	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Kasus	61	40.54	32.96
3.5	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	Rasio	0.0014	0.14	0.11
3.6	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	100	96	96
3.7	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	%	100	100	100



NO	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
4	TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA					
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan	%	98	96	96
4.2	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	70.12	79.40	84.55
4.3	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	54.32	64.88	69.84
4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Nilai	116.60	108.82	109.24
4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Nilai	110.26	107.32	108.45
4.6	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Tahun	7.96	8.10	8.25
4.7	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Pendidikan	%	96.96	91.94	93.45
4.8	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Dinas Pendidikan	%	100	94.38	95.29
4.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan	Nilai	75.50	77.15	77.84
4.10	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	%	70.26	63.96	67.05
5	TUJUAN 5 : MENCAPAI MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN					
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan	Kebijakan	90	1	1
5.2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Kasus	28	18	14
5.3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	%	100	100	100
5.4	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi & Informatika	Nilai	0.67	0.72	0.75
6	TUJUAN 6 : KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN					



NO	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	84.12	86.83	90.12
6.2	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Dinas Kesehatan	Orang		256.421	264.874
6.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	83.31	98.88	99.16
6.4	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Dinas Kesehatan	Desa	159	111	123
7	TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA					
7.1	Bauran energi terbarukan	-	-	-	-	-
8	TUJUAN 8 : PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA					
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	5.19	3.50	4.50
8.2	PDB per kapita	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Juta rupiah	28.36	33.79	35.15
8.3	Persentase tenaga kerja formal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	73.74	65.04	68.54
8.4	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi UKM	%	11.17	6.82	7.32
8.5	Upah rata-rata per jam pekerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp.	18.295	19.964	21.311
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	4.71	4.56	4.21
8.7	Persentase setengah pengangguran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	63.11	42.99	41.45
8.8	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	100	4.552	10.090
8.9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	Orang	78.193	313.766	549.090
9	TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI					



NO	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
9.1	Jumlah bandara	Kementerian Perhubungan , Dinas Bina Marga Prop. Sulsel, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	Jumlah Bandara	2	2	2
9.2	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%		2.50	6.35
9.3	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%		2.50	4.75
9.4	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi dan Informasi	%	0.77	0.79	0.81
9.5	Proporsi individu yang mengusasi/memiliki telpon genggam	Dinas Komunikasi dan Informasi	Rasio	0.67	0.72	0.75
9.6	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informasi	Rasio	0.70	0.71	0.74
10	TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTARNEGARA					
10.1	Koefisien Gini*	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	0.378	0.332	0.327
11	TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
11.1	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup	%	18.91	43.89	49,17
12	TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN					
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup	%	90.50	92.50	94.00
12.2	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup	%	7.5	25	40
13	TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA					
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dok.	0	0	1
14	TUJUAN 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
-	-	-	-	-	-	-



NO	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
15	TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI					
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	N/A	-	-
15.2	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Lingkungan Hidup	Nilait	N/A	-	-
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Dok.	0	1	1
16	TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN					
16.1	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Nilai	56	20	17
16.2	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	%	56	17	14
16.3	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	%	13.33	13.33	13.33
16.4	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	%	31.25	30.33	30.33
16.5	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	%	73	85	87
16.6	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Kantor Kesbang	Rasio	0.041	0.037	0.033
16.7	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Kantor Kesbang	Rasio	0.96	0.95	0.96
17	TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
17.1	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi & Informatika	Rasio	0.77	0.79	0.81
17.2	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi & Informatika	Rasio	0.70	0.71	0.74



NO	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	95.48	95	96
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	89	93



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) melalui Konsultasi Publik serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan tahun Kedua dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2026. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka proses penyusunannya RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 berlandaskan prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030.

Hubungan antara dokumen tersebut sangat erat kaitannya. Kedudukan dokumen yang lebih tinggi bersifat makro serta berpegang pada peraturan yang berlaku. Dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Tana Toraja berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif,



dimana nota kesepakatan KUA dan PPAS merupakan dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi lain RKPD adalah sebagai bahan evaluasi APBD dan dapat memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah. Kunci sukses pembangunan daerah adalah menjadikan perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan itu. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting. Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dengan tetap bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.
2. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
3. Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan berbasis pada *e-planning*.
4. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2023



dengan berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023.

5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah
7. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 bila diperlukan.
8. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2023.
9. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

7.2. Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui Pokok-pokok Pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan Tema Pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2023 yaitu : **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang inklusif Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing”** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program



kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

4. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya bersinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi berupa pendanaan dari APBN dan APBD I maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Makale,

2022

